

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah dalam perjalanannya telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Setiap daerah memiliki kewenangan yang besar untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan daerahnya, namun dalam konteks desentralisasi pembangunan tersebut tetap sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 2 ayat 2 UU SPPN mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun rencana pembangunan berjangka secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan. Rencana pembangunan berjangka tersebut antara lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kalimantan Timur yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program prioritas Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018 dan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2018. RPJMD Kalimantan Timur selanjutnya menjadi dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kalimantan Timur lima tahun kedepan yang dalam penyusunan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 didasarkan pada pertimbangan objektif sesuai dengan karakteristik wilayah yang menjadi isu-isu strategis yang difokuskan pada tujuan pembangunan berkelanjutan, dan merupakan tahapan 5 tahunan keempat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan”.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang kemudian akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahun.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang paling fundamental dalam penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. RPJMD ini juga menjadikan sejumlah regulasi sebagai landasan hukum operasionalnya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
5. Undang-Undang nomor 2 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 54 Tahun 2010;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Pemukiman.
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;serta
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;
25. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen RPJMD merupakan bagian dari satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang terintegrasi dengan dokumen lain sehingga diharapkan mampu mendukung terwujudnya harmonisasi

antar daerah, antar urusan pemerintahan, dan antar periode perencanaan baik dengan perencanaan di daerah lain maupun dengan perencanaan di tingkat nasional.

a. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJPN dan RPJMN

RPJMD memedomani RPJMN untuk sinergitas dan sinkronisasi kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPJMD memperhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah memperhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan. Dalam hal periode RPJMN yang segera berakhir saat penyusunan RPJMD maka arah kebijakan pada RPJPN periode berikutnya menjadi sumber acuan.

b. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJPD dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 tahap keempat. Secara substantif, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023 telah berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025. Berbagai evaluasi RPJMD periode sebelumnya dipergunakan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023.

RPJMD dilaksanakan dari tahun ke tahun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sasaran tahunan dan arah kebijakan RPJMD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Program pembangunan daerah yang sejatinya adalah program prioritas Gubernur dalam mencapai visi dan misi RPJMD harus terpetakan dengan baik kapan dilaksanakan secara spesifik dari satu RKPD ke RKPD tahap berikutnya.

c. Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur menjadi acuan bagi Organisasi

Pemerintah Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang bersifat lima tahunan dan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan. Sasaran RPJMD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra PD selama lima tahun. Implementasi dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dituangkan didalam Renstra dan Renja masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Gubernur bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sedangkan Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD, yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dan akhir masa jabatan. Di sini, keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja *impact* dan *outcome* dalam Renstra SKPD, secara langsung dan tidak langsung akan memengaruhi pencapaian visi dan misi serta janji politik Gubernur yang telah dijabarkan dalam RPJMD.

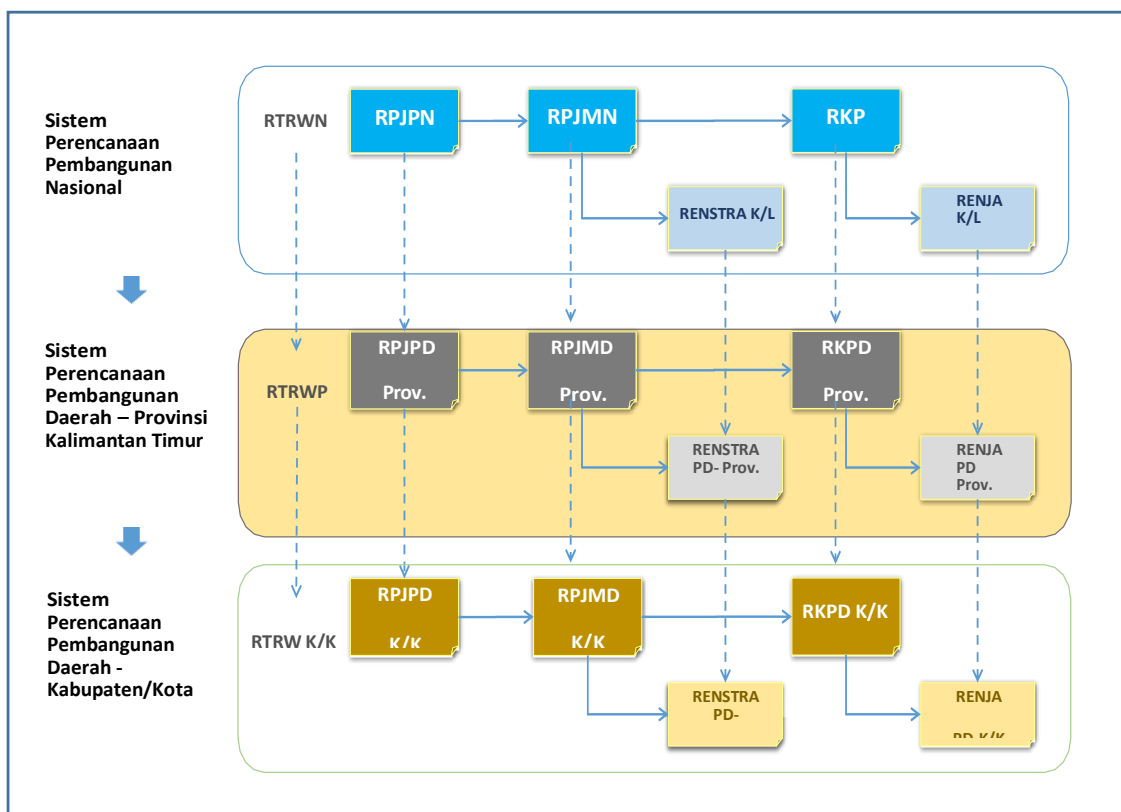
d. Hubungan Antara RPJMD Provinsi dengan RPJMD dan RKPD Kabupaten/Kota

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan dan atau perubahan dokumen RPJMD dan RKPD Kabupaten/Kota. Keberhasilan Kabupaten/Kota dalam mencapai target kinerja *impact* dan *outcome* dalam RPJMD dan RKPD, secara langsung dan tidak langsung akan memengaruhi pencapaian target kinerja yang telah direncanakan dalam RPJMD Provinsi.

Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, setiap tahun diselenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan untuk tujuan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan antar para pemangku kepentingan.

Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar 1.1
Hubungan Antara RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Selain itu, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 juga mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Strategi dan kebijakan pembangunan kewilayahan Kalimantan Timur dalam RPJMD merupakan bagian tak terpisahkan dari RTRWP dan KLHS. RPJMD, RTRWP dan KLHS menjadi dokumen yang sinergis dan terpadu, agar kebijakan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan.

Pendekatan pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan pendekatan pembangunan kewilayahan sebagaimana di atur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Suatu pembangunan yang berdimensi kewilayahan juga memerhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis secara terpadu yang mengedepankan kondisi daya dukung lingkungan atau ruang wilayah secara berkelanjutan.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Provinsi Kalimantan Timur ke depan dibangun dengan kerangka konsep pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan ekonomi hijau dalam implementasinya. Tujuan dan Sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun kedepan diarahkan untuk mencapai sejumlah target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, SDGs) yang terdiri dari empat pilar yaitu; mulai dari aspek kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan gender (Pilar Sosial); energi terbarukan, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan-pemerataan kesempatan akses, distribusi produksi-konsumsi komoditi (Pilar Ekonomi); isu terkait lingkungan hidup dan perubahan iklim (Pilar Lingkungan Hidup); dan langkah-langkah reformasi birokrasi dan ASN dalam meningkatkan tata-kelola pemerintahan (Pilar Hukum dan Tata Kelola).

Gambar 1.2
Integrasi RTRW dan KLHS Dalam Penyusunan RPJMD



1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan mengoperasionalkan visi dan misi kepala daerah selama 5 tahun, serta menjadi tolok ukur pertanggungjawaban kepala daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk menentukan strategi dan kebijakan umum serta program pembangunan yang akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun. Dalam menetapkan strategi dan arah kebijakan serta penentuan program prioritas pembangunan, dilakukan atas dasar hasil evaluasi pembangunan lima tahun sebelumnya serta dengan memperhatikan kondisi empiris, kemampuan, dan kewenangan daerah.

Sasaran penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 - 2013 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi, misi, Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
2. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan melalui sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBN dan sumber dana lainnya;
3. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Perangkat Daerah, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
4. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

5. Menciptakan iklim pemerintahan yang amanah dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
6. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 disusun dengan mengacu pada pedoman operasional dalam Permendagri No.86 Tahun 2017. sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Kinerja Masa Lalu
 - 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
 - 3.1.2. Neraca Daerah
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
 - 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
 - 3.2.2. Analisis Pembiayaan
- 3.3. Kerangka Pendanaan
 - 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja
 - 3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. Visi

5.2. Misi

5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PRGORAM
PERANGKAT DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek Geografi dan Demografi memberikan gambaran permasalahan/tantangan, kelemahan, kekuatan, potensi dan peluang dari kondisi geografis dan demografis saat ini dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

2.1.1 Aspek Geografi

a. Kondisi Geografi

1. Wilayah Administratif

Provinsi Kalimantan Timur terletak diantara 113°35'31"–119°12'48" Bujur Timur dan 2°34'23" Lintang Utara – 2°44'17" Lintang Selatan, memiliki luas wilayah 16.732.065 ha terdiri dari daratan seluas 12.638.931 Ha (75,68%) dan perairan laut seluas 3,3 juta Ha (2,59 %). Secara administratif terdiri dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang meliputi 7 (tujuh) Kabupaten, yaitu seperti tabel berikut :

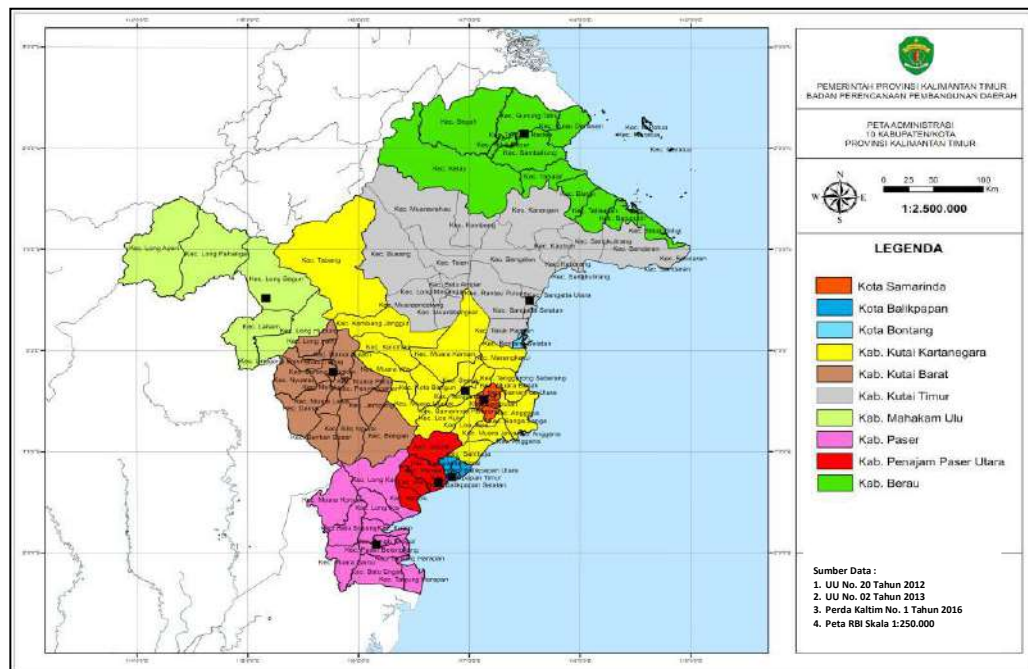
Tabel 2.1
Kode Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Kalimantan Timur

Kode Wilayah	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota
64	Kalimantan Timur
64.01	Kabupaten Paser
64.02	Kabupaten Kutai Kartanegara
64.03	Kabupaten Berau
64.07	Kabupaten Kutai Barat
64.08	Kabupaten Kutai Timur
64.09	Kabupaten Penajam Paser Utara
64.11	Kabupaten Mahakam Ulu
64.12	Kota Balikpapan
64.72	Kota Samarinda
64.74	Kota Bontang

Sumber : Ditjen Kependudukan dan catatan Sipil Kemendagri

Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara dan Mahakam Ulu; dan 3 (tiga) Kota, yaitu: Balikpapan, Samarinda dan Bontang.

Gambar 2. 1
Peta Administratif Provinsi Kalimantan Timur



Sumber : Bappeda Provinsi Kaltim, 2016)

Secara geostrategis, posisi Kalimantan Timur memiliki potensi dalam perdagangan internasional berada di tengah-tengah wilayah NKRI dan sangat strategis sebagai jalur transportasi laut internasional karena berbatasan langsung dengan wilayah perairan Selat Makasar dan Laut Sulawesi yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II).

Gambar 2. 2
Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)



Sumber : Bappeda Provinsi Kaltim

2. Kondisi Fisik Wilayah

Karakteristik topografi wilayah Kalimantan Timur didominasi oleh lahan-lahan dengan kelerengan di atas 15 persen. Kondisi demikian mempunyai pengaruh sangat besar dalam rangka pemanfaatan lahan kegiatan budidaya. Lahan datar (0-2%) di Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya hanya terdapat di daerah pantai dan daerah aliran sungai-sungai besar yang luasnya sekitar 10,70 persen dari total wilayah. Sedangkan lahan dengan tingkat kelerengan landai (2-15%) luasnya mencapai 16,16 persen. Sisanya, lahan berbukit dengan tingkat kelerengan > 15% dengan luasnya mencapai sekitar 73,14 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Pengembangan tanaman pangan hanya mungkin dilakukan di daerah yang datar hingga landai atau wilayah dengan kemiringan 0-15 persen. Sedangkan lahan dengan tingkat kelerengan yang lebih tinggi (>15 persen) hanya cocok untuk tanaman tahunan dan kawasan konservasi.

Berdasarkan ketinggian tempat di atas permukaan laut, 51,51 persen lahan di Provinsi Kalimantan Timur mempunyai ketinggian di bawah 100 mdpl. Sedangkan luas lahan yang terletak pada ketinggian antara 100 dan 500 mdpl mencapai 26,94 persen. Selebihnya terletak pada ketinggian di atas 500 mdpl sekitar 21,55 persen. Berdasarkan data ketinggian tempat tersebut, wilayah Provinsi Kalimantan Timur sekitar 21,55 persen termasuk daerah yang berhawa sejuk dengan ketinggian di atas 500 mdpl. Wilayah yang suhunya relatif lebih rendah ini cocok untuk tempat pengembangan tanaman hortikultura, terutama sayuran dan buah-buahan.

Jenis tanah di wilayah daratan Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh tanah podsolik merah kuning latosol dan litosol yang tersebar di bagian Tengah dan Utara Provinsi Kalimantan Timur. Jenis tanah lainnya adalah aluvial, organosol, latosol, podsol, dan podsolik merah kuning dengan tingkat kesuburan yang rendah. Jenis tanah ini sesuai untuk usaha pertanian, kebun campuran, pertanian sayur-sayuran, dan hutan.

Jumlah sungai yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 157 sungai besar dan kecil di antaranya adalah Sungai Mahakam yang memiliki panjang 920 km dengan luas Daerah Pengaliran Sungai (DPS) 77.913 km². Terdapat juga Sungai Kelay dengan panjang 254 km. Sedang jumlah danau yang ada sebanyak 18 (delapan belas) buah, dengan 3 (tiga) danau terbesar adalah Danau Melintang seluas 11.000 Ha, Danau Semayang seluas 13.000 Ha dan Danau Jempang seluas 15.000 Ha.

Selain dimanfaatkan sebagai prasarana transportasi dan sumber air baku, sungai-sungai tersebut juga dapat digunakan sebagai Pembangkitan Listrik Tenaga Air (PLTA) seperti Sungai Kelay, Sungai Telen, dan Sungai Medang. Sungai-sungai di Provinsi Kalimantan Timur dikelompokkan dalam 6 (enam) Satuan Wilayah Sungai (SWS), yaitu SWS Mahakam (Strategis Nasional) yang terdiri dari Sungai-sungai Besar antara lain Sungai Mahakam, Samboja, Senipah, dan Semoi; SWS Berau-Kelay (Lintas Kabupaten) yang terdiri dari sungai-sungai besar antara lain Sungai Kuning, Bakau, Berau, Pangkung, dan Sungai Pantai; SWS Karangan (Lintas Kabupaten) yang terdiri dari sungai-sungai besar antara lain Sungai Karangan, Sangatta, Bengalon, dan Santan.

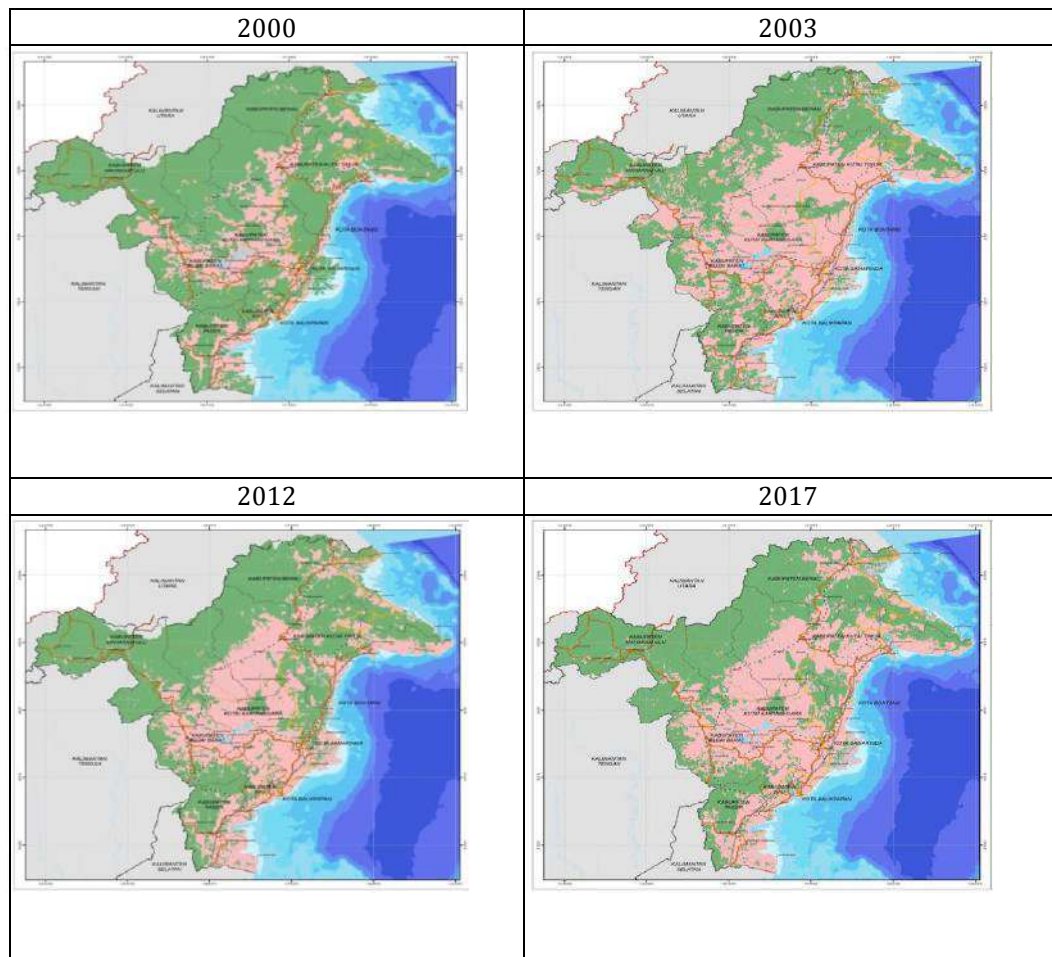
Provinsi Kalimantan Timur beriklim tropis dengan suhu udara berkisar dari 20,8°C sampai dengan 35,6°C, dan mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedang musim penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan April. Selain itu, karena letaknya di daerah khatulistiwa maka iklim di Provinsi Kalimantan Timur juga dipengaruhi oleh angin Muson, yaitu angin Muson Barat (November-April) dan angin Muson Timur (Mei-Oktober). Namun dalam beberapa tahun terakhir ini, keadaan musim di Provinsi Kalimantan Timur kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali, atau sebaliknya pada bulan-bulan yang seharusnya kemarau justru terjadi hujan dengan musim yang jauh lebih panjang. Provinsi Kalimantan Timur mempunyai kelembaban udara relatif tinggi dengan rata-rata berkisar antara 83-87 persen dan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 3-4 knot.

3. Kondisi Tutupan Lahan

Kondisi tutupan lahan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 (diolah berdasarkan data citra satelit) telah terjadi deforestasi yang sangat luas hingga mencapai lebih dari 176 ribu Ha per tahun. Deforestasi menjadi salah satu isu degradasi lingkungan di Kalimantan Timur. Kondisi tutupan hutan di Kalimantan Timur mengalami penurunan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2017, dimana luas tutupan hutan di tahun 2000 adalah seluas $\pm 9,28$ Juta Hektare, kemudian turun di tahun 2003 menjadi $\pm 7,21$ Juta Hektare. Selanjutnya di tahun 2012 tutupan hutan

di Kalimantan Timur kembali turun menjadi seluas $\pm 7,19$ Juta Hektare, dan terus menurun menjadi seluas $\pm 6,28$ Juta Hektare di tahun 2017. Wilayah yang paling luas deforestasinya sepanjang tahun 2000 sampai dengan 2017 adalah di Kabupaten Kutai Timur (± 911 ribu Ha) dan Kutai Kartanegara (± 797 ribu Ha).

Gambar 2. 3
Peta Perubahan Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Timur 2000-2017



Sumber : One Data One Map, Bappeda Prov.Kaltim

Saat ini kondisi tutupan lahan didominasi oleh Hutan Lahan Kering Primer seluas 2,17 Juta Ha, Hutan Lahan Kering Sekunder dengan luasan 3,89 Juta Ha dan Semak Belukar dengan luasan 2,71 Juta Ha, yang tersebar di Kabupaten Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kabupaten Mahulu, dan Kabupaten Paser. Kondisi lahan terbuka untuk kegiatan pertambangan seluas 130.789 Ha, tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Kutai Timur. Sementara untuk tutupan lahan yang telah ditanami komoditi perkebunan teridentifikasi seluas 1,33 Juta Ha yang tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota. Sedangkan untuk kelas

tutupan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang meliputi sawah, pertanian lahan kering, dan pertanian lahan campuran hanya seluas 494.293 Ha.

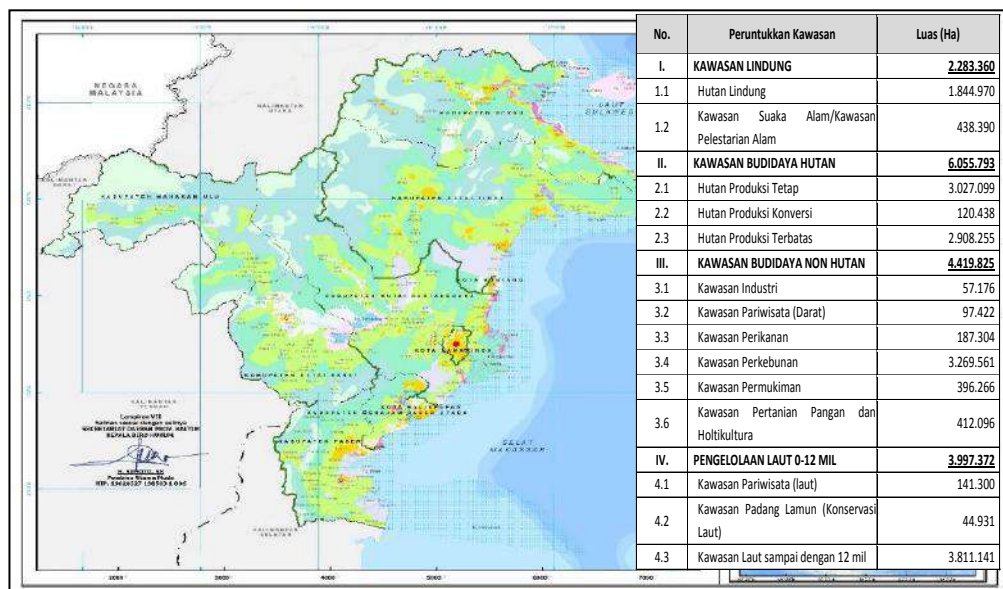
Ketersediaan sumber daya lahan yang produktif menjadi salah satu permasalahan dalam pengembangan komoditas pertanian di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur memiliki lahan dengan kategori Kritis seluas $\pm$ 820 ribu Ha (6,50 %), lahan kategori Agak Kritis seluas 6,95 Juta Ha (55,15 %), kategori lahan Potensial Kritis seluas $\pm$ 3,1 Juta Ha (25,18 %). Sementara itu lahan dengan kategori Sangat Kritis di Kalimantan Timur seluas $\pm$ 36.500 Ha (0,29 %), sedangkan lahan yang masuk kategori Tidak Kritis adalah seluas $\pm$ 1,62 Juta Ha (12,88 %). Lahan kategori Sangat Kritis tersebar hampir di seluruh wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur, dan areal yang paling luas berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur, Berau, dan Kabupaten Paser.

b. Potensi Pengembangan Wilayah

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Potensi sumber daya lahan di Kalimantan Timur telah dialokasikan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036, terdiri dari kawasan yang diperuntukan bagi kawasan lindung seluas 2.283.360 ha (18,03%), kawasan budidaya hutan seluas 6.055.792 Ha (47,82%) dan kawasan budidaya non hutan seluas 4.299.799 ha (34,15%). Kawasan non hutan terdiri dari kawasan permukiman sebesar 2,37% (396.266 Ha), kawasan industri sebesar 0,34% (57.176 Ha), kawasan pariwisata sebesar 0,58% (97.422 Ha) serta perkebunan dan pertanian pangan dan hortikultura yang mencapai 22,55% (3.773.204 Ha) terhadap luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2. 4
Peta Rencana Pola Ruang dalam RTRWP Kaltim 2016-2036



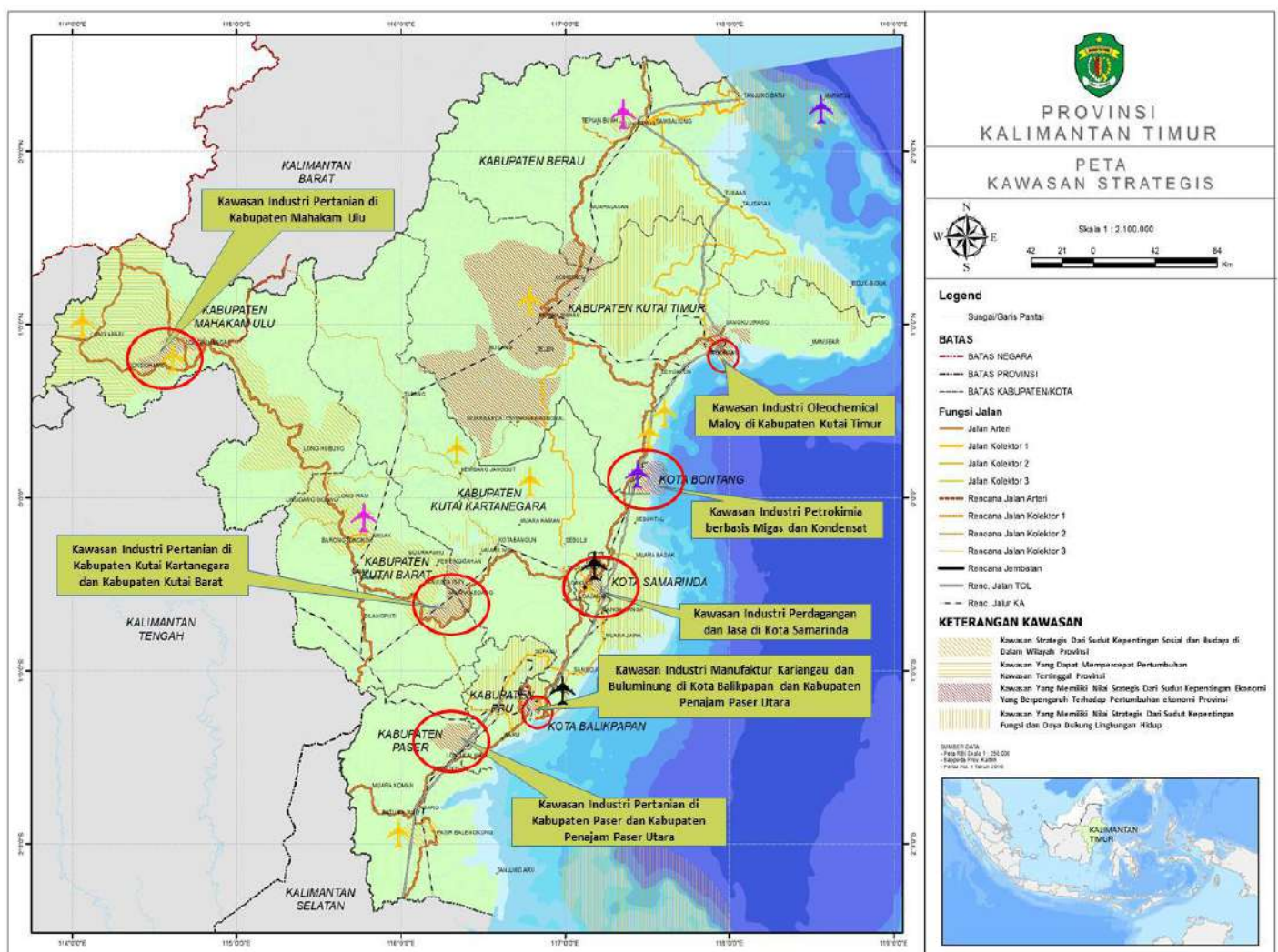
Sumber : Perda No. 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kaltim Tahun 2016-2036, Dinas PUPRPERA Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Disamping itu, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 telah dikembangkan struktur ruang yang dilengkapi dengan jaringan infrastruktur untuk mendukung pengembangan sektor unggulan daerah pada kawasan strategis dan kawasan pusat kegiatan ekonomi daerah. Dalam mendukung kebijakan nasional, tidak hanya melihat pertumbuhan ekonomi namun juga pengembangan wilayah dengan mendukung fungsi lingkungan secara berkelanjutan, telah ditetapkan kawasan strategis provinsi dengan melihat nilai strategis penting dalam lingkup wilayah provinsi serta potensi dan pengaruh terhadap daerah sekitarnya, yaitu:

- 1) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi meliputi:
 - Kawasan industri dan Pelabuhan Maloy di kabupaten Kutai Timur;
 - Kawasan agropolitan regional di kabupaten Kutai Timur; dan
 - Kawasan pusat pertambangan regional (klaster pertambangan) di kabupaten Kutai Timur.
- 2) Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal provinsi terdapat di Kabupaten Kutai Barat.
- 3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya di dalam wilayah provinsi meliputi:

- Koridor Sungai Mahakam hingga ke hulu;
 - Museum Mulawarman, Museum Kayu Tenggarong, dan Bukit Bangkirai di Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - Desa budaya Pampang di Kota Samarinda.
- 4) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di dalam wilayah provinsi meliputi:
- Kawasan Delta Mahakam;
 - Kawasan Danau Semayang, Danau Jempang, Danau Melintang, Danau Siran, dan sekitarnya;
 - Kawasan Teluk Balikpapan (Sepaku-Penajam-Balikpapan); dan
 - Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan.

Gambar 2.5
Peta Struktur Ruang dan Kawasan Strategis Provinsi Kaltim 2016-2036



Sumber : Perda No. 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kaltim Tahun 2016-2036, Dinas PUPRPERA Provinsi Kalimantan Timur, 2016

2. Potensi Pengembangan Kawasan

Berdasarkan deskripsi kondisi fisik wilayah, Provinsi Kalimantan Timur memiliki kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki daya tarik investasi yang cukup besar. Selaras dengan hal tersebut, sebagian besar penggunaan lahan di Kalimantan Timur didominasi oleh investasi dari sektor-sektor yang memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan ruang, baik izin dari sektor pertambangan dan penggalian, sektor kehutanan, maupun sektor perkebunan. Pemanfaatan ruang terbesar untuk perizinan adalah dari sektor kehutanan yakni seluas $\pm 5,6$ Juta Ha. Kemudian dari sektor pertambangan batubara seluas $\pm 4,8$ Juta Ha, dan selanjutnya dari sektor perkebunan seluas $\pm 2,4$ Juta Ha. Tingginya intensitas penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk kegiatan perizinan di Kalimantan Timur pada akhirnya juga menyebabkan tumpang tindih perizinan antar sektor, baik izin pertambangan batubara dengan izin kehutanan, izin perkebunan dengan izin pertambangan batubara, maupun tumpang tindih perizinan lainnya.

Total luas Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Hasil Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) di Kalimantan Timur adalah $\pm 3,79$ Juta Ha, dimana seluas $\pm 2,9$ Juta Ha kondisinya masih berupa hutan (hutan lahan kering primer dan sekunder, hutan rawa primer dan sekunder) dan masih memiliki potensi kayu alam, sedangkan seluas ± 892 ribu Ha kondisi tutupan lahannya sudah bukan lagi hutan dan tidak memiliki potensi kayu alam (berupa belukar rawa, semak belukar, perkebunan, permukiman, pertambangan, pertanian, dan lain-lain).

Sementara total luasan untuk IUPHHK Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Kalimantan Timur adalah seluas $\pm 1,57$ juta Ha, dimana seluas ± 638 ribu Ha kondisi tutupan lahannya masih berupa hutan, sedangkan seluas ± 940 ribu Ha kondisi tutupan lahannya sudah bukan lagi hutan. IUPHHK-HA paling luas berada di Kabupaten Berau seluas ± 848 ribu Ha, sedangkan IUPHHK-HT paling luas berada di Kabupaten Kutai Kartanegara seluas ± 508 ribu Ha.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan investasi di Kalimantan Timur adalah terkait dengan optimalisasi pemanfaatan lahan. Di sektor perkebunan, dari seluas $\pm 2,76$ Juta Ha total luas seluruh izin perkebunan di

Kalimantan Timur, baru sekitar $\pm 1,32$ Juta Ha atau 48% yang telah terdapat tanam tumbuh, berarti masih ada ± 52 % luas wilayah izin perkebunan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Sektor perkebunan telah dikembangkan menjadi salah satu sektor perekonomian unggulan di Kalimantan Timur. Sampai dengan tahun 2018 terdapat $\pm 2,76$ Juta Ha Izin Perkebunan di Kalimantan Timur yang terdiri dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Lokasi. Total luasan HGU kebun di Kalimantan Timur adalah seluas $\pm 1,02$ Juta Ha, dimana dari seluruh luasan HGU tersebut setelah diidentifikasi melalui citra satelit, baru ± 650 Ribu Ha yang kondisi eksistingnya sudah tanam tumbuh, sementara sisanya belum terlihat produktif. Sedangkan untuk izin perkebunan yang statusnya dibawah HGU, luasan yang teridentifikasi adalah $\pm 1,74$ Juta Ha, dimana penampakan eksisting yang sudah tanam tumbuh seluas ± 461 Ribu Ha. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pemanfaatan lahan izin perkebunan belum optimal dan perlu ditingkatkan untuk mendukung peningkatan kontribusi terhadap PDRB Kaltim.

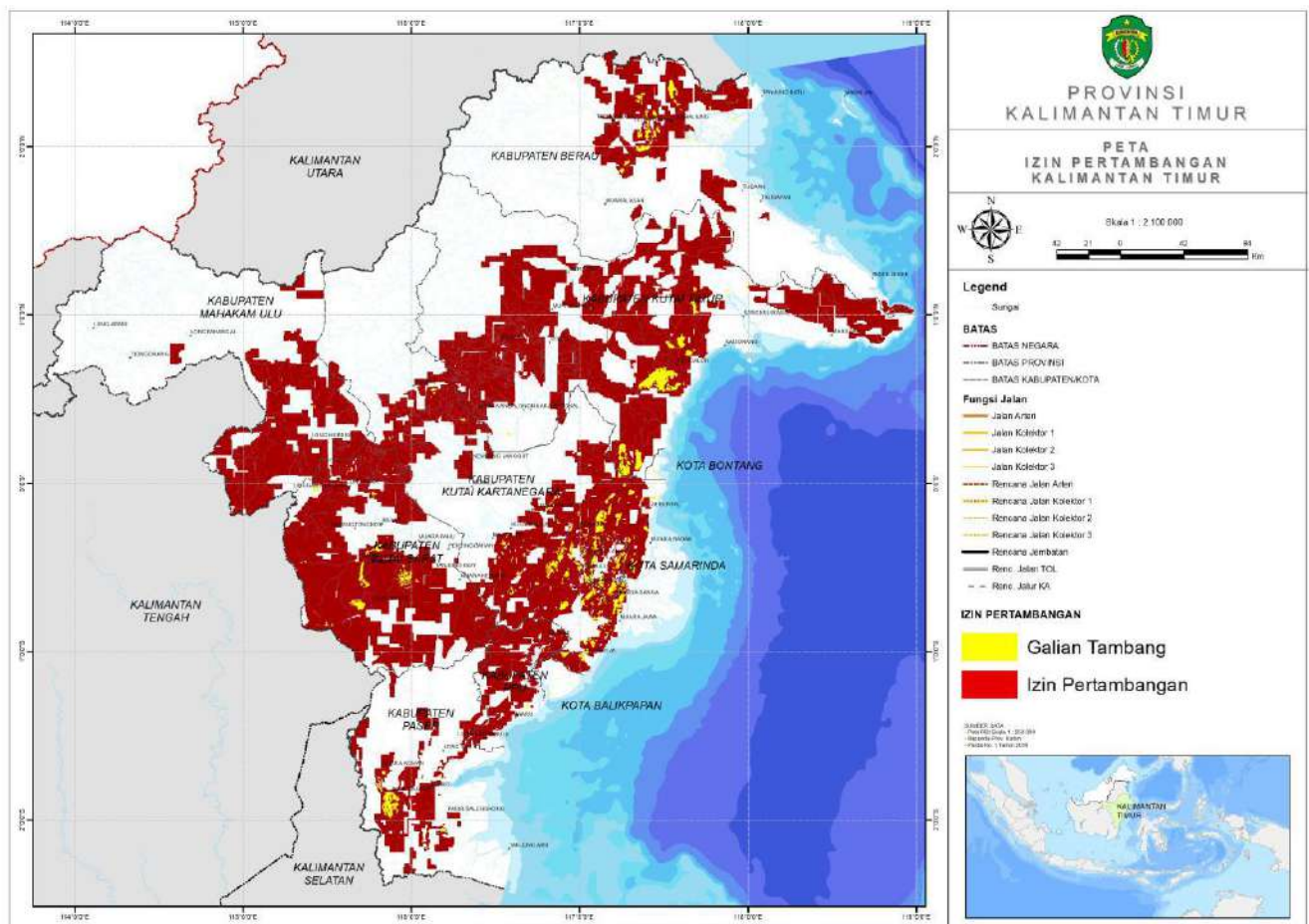
Upaya mewujudkan swasembada pangan di Kalimantan Timur memiliki keterkaitan erat dengan ketersediaan sumber daya lahan yang sesuai untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, peruntukan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura seluas 412.016 Ha, namun hanya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian ± 42.546 Ha atau 10,3 % yang kondisi eksistingnya berupa sawah, pertanian lahan kering, dan pertanian lahan campuran. Masih terdapat lahan seluas ± 369.470 Ha yang belum dimanfaatkan untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Areal ini selanjutnya menjadi lahan potensial untuk dikembangkan sesuai dengan arahan pola ruang dalam RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036. Oleh karena itu, dibutuhkan insentif program/kegiatan agar potensi ruang yang telah disediakan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dalam satu dekade terakhir, sektor pertambangan khususnya batubara, menjadi sektor ekonomi utama pembentuk struktur PDRB Provinsi Kalimantan Timur. Luas izin usaha pertambangan di Kalimantan Timur yang memiliki status CnC (clean and clear) mencapai $\pm 4,6$ Juta Ha. Luas izin usaha pertambangan (IUP) terbesar ada di Kabupaten Kutai Timur seluas $\pm 1,4$ Juta Ha, selanjutnya di Kabupaten

Kutai Barat seluas ± 957 ribu Ha dan Kutai Kartanegara seluas ± 937 ribu Ha. Luasan IUP ini letaknya tersebar baik di dalam kawasan hutan melalui mekanisme pinjam pakai kawasan hutan, maupun yang berada di areal peruntukan lain. Kawasan pertambangan ini masih menyisakan persoalan semakin meluasnya lubang bekas galian tambang. Dari hasil interpretasi citra satelit resolusi tinggi tahun 2017, diketahui bahwa bukaan lubang tambang yang ada di Kalimantan Timur telah mencapai ± 130 ribu Ha atau hanya 2,7 % dari total luas IUP yang diberikan.

Sektor perikanan menjadi salah satu sektor potensial yang akan dikembangkan untuk mempercepat upaya transformasi ekonomi daerah, terlebih dengan adanya keunggulan komparatif berupa luasnya wilayah kewenangan wilayah laut dan pesisir sejauh 0 sampai dengan 12 mil dengan luas ± 4 Juta Ha.

Gambar 2. 6
Peta Kawasan Pertambangan Migas dan Batu Bara



Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.Kaltim

Wilayah pesisir laut Kaltim sepanjang 1.583 km telah direncanakan alokasi ruang untuk perikanan tangkap pelagis seluas $\pm 1,5$ Juta Ha, ikan pelagis dan demersal seluas ± 605 ribu Ha, ikan demersal seluas ± 8 ribu Ha, dan untuk budidaya laut seluas ± 13 ribu Ha. Sedangkan untuk wisata alam bawah laut dan pantai pesisir tersedia alokasi ruang seluas ± 3 ribu Ha. Disamping itu, Kalimantan Timur memiliki Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) yakni Pulau Maratua dan sekitarnya, wilayah tersebut sebagian besar telah ditetapkan sebagai wilayah konservasi laut oleh pemerintah pusat. Hal ini selaras dengan kebijakan daerah yang menetapkan Kepulauan Derawan dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Disamping perikanan, sektor pariwisata juga menjadi salah satu sektor ekonomi yang akan dikembangkan dalam mendukung upaya transformasi ekonomi. Kalimantan Timur memiliki 406 titik obyek wisata alam dan budaya potensial yang tersebar di kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.

Titik obyek wisata terbanyak berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan 76 obyek wisata (18,72 %), Kota Samarinda dan Paser yang masing-masing memiliki 51 obyek wisata. Sedangkan Kabupaten Berau yang terkenal dengan wisata alam Kepulauan Derawan, memiliki 35 obyek wisata. Sementara Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki titik obyek wisata paling sedikit yaitu 18 obyek wisata (4,43 %). Sebagian besar obyek wisata tersebut belum dikelola secara optimal.

c. Wilayah Rawan Bencana

Kalimantan Timur merupakan wilayah yang relatif aman dari bencana gempa bumi tektonik dan vulkanik. Kejadian bencana yang paling berpotensi di Provinsi Kalimantan Timur adalah kebakaran hutan dan banjir, daerah yang berpotensi rawan bencana meliputi:

- **Gempa Bumi**

Daerah rawan gempa bumi terdapat di Kabupaten Paser, Tanjung Mangkalia di Kutai Timur dan Teluk Sulaiman di Berau.

- **Banjir**

Daerah rawan banjir terdapat hampir di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, dan kawasan yang sering dilanda banjir adalah kawasan perkotaan dan pemukiman di Bontang, Samarinda dan Balikpapan. Di wilayah

Kalimantan Timur terdapat $\pm$ 2,9 Juta Ha (23,18 %) yang merupakan wilayah rawan banjir dengan kriteria rawan tinggi seluas 350.460 Ha (2,78%) dan kategori rawan seluas 2.575.933 Ha (20,40 %). Wilayah lainnya merupakan wilayah dengan kategori kurang rawan seluas 8.611.705 Ha (68,21 %) dan tidak rawan seluas 1.087.525 Ha (8,61 %). Wilayah yang masuk ke dalam kategori rawan tinggi bencana banjir yang sangat luas terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Kabupaten Paser, dimana sebagian besar morfologi wilayah dimaksud merupakan daerah dataran rendah, rawa, daerah yang dekat dengan danau-danau alam dan muara-muara sungai.

- **Tanah Longsor**

Daerah yang rawan terhadap bencana tanah longsor terdapat di daerah perkotaan seperti Kota Samarinda dan Kota Balikpapan

- **Kebakaran Hutan dan Lahan**

Daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan terdapat di hampir seluruh kabupaten/kota kecuali Bontang dan Samarinda.

- **Tsunami**

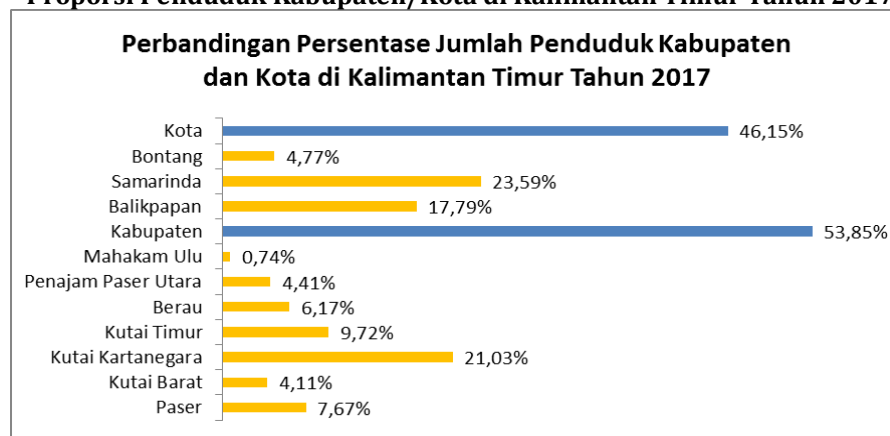
Meski tidak pernah mengalami tsunami, namun Provinsi Kalimantan Timur terdapat daerah yang rawan bencana tsunami. Daerah rawan tsunami adalah sepanjang pantai Provinsi Kalimantan Timur. Sementara daerah dengan tingkat kerawanan tsunami tinggi terdapat di Kota Balikpapan, Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Timur.

2.1.2 Aspek Demografi

Kalimantan Timur memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.505.161 jiwa yang tersebar 53,85 % di 7 kabupaten dan 46,15 di 3 kota, dengan rata-rata laju pertumbuhan 1,28 persen per tahun dan kepadatan rendah 27,26 jiwa per Km². Ketimpangan Distribusi penduduk yang tidak merata ini memiliki konsekuensi kebutuhan biaya infrastruktur yang sangat besar untuk meningkatkan akses pelayanan. Hal tersebut menjadi salah satu permasalahan dalam pemerataan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur secara menyeluruh di setiap lapisan masyarakat.

Penduduk Kaltim didominasi oleh kelompok usia 5-39 tahun dengan proporsi masing-masing sekitar 8-9 persen sedangkan penduduk di atas usia 70 tahun menempati jumlah yang paling sedikit dengan jumlah kurang dari 1 %. Struktur penduduk tersebut memperlihatkan bahwa Kaltim memiliki proporsi penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Penduduk Kalimantan Timur didominasi oleh laki-laki dimana sex ratio mencapai 108,99. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam setiap 100 penduduk berjenis kelamin perempuan terdapat 108-109 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki.

Gambar 2. 7
Proporsi Penduduk Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2017



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran permasalahan/tantangan, kelemahan, kekuatan, potensi dan peluang dari kondisi ekonomi, sosial, kemasyarakatan saat ini dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Gambaran kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat Kalimantan Timur dapat dilihat dari perkembangan capaian kinerja pembangunan daerah terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat kesenjangan, pengangguran, kemiskinan dan indikator kesejahteraan lainnya.

Perekonomian Kalimantan Timur masih memiliki ketergantungan sumber daya alam tak terbarui cukup tinggi, sehingga analisis pada PDRB baik secara total (dengan migas+batubara) maupun partial tanpa adanya migas maupun batubara (non migas dan non batubara) akan memberikan gambaran lebih proporsional jika dihubungkan dengan analisis mikro kesejahteraan masyarakat. Lapangan Usaha Pertambangan dan

Penggalian serta Lapangan Usaha Industri Pengolahan terutama pada sektor migas dan batubara masih memegang kendali pada struktur PDRB Kalimantan Timur.

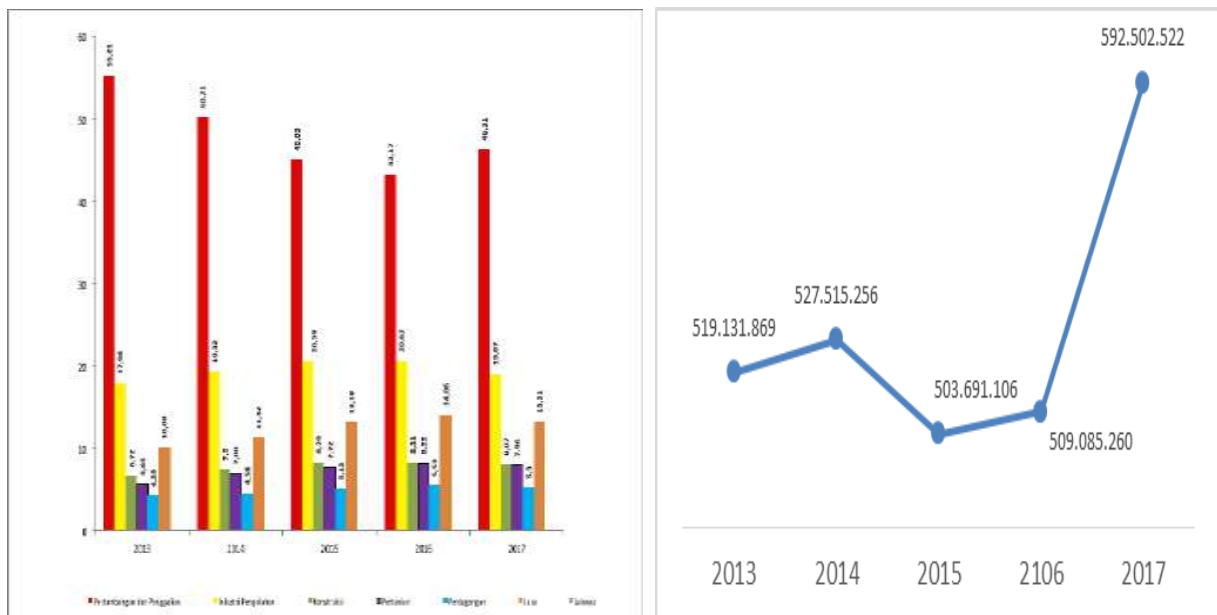
Tabel 2. 2
Capaian Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kalimantan Timur 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,25	1,71	-1,21	-0,38	3,13	II.8
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas dan Non Batubara (%)	%	5,99	5,87	3,60	1,57	5,24	II.8
3	Laju Inflasi	%	9,65	7,66	4,89	3,39	3,15	II.10
4	PDRB per kapita	Juta Rp	158,47	157,40	147,41	145,40	165,71	II.8
5	Indeks Gini		0,3341	0,3355	0,32	0,32	0,330	II.10
6	Pemerataan versi Worid Bank :							
	- 40% Rendah	%	19,77	18,92	21,49	20,03		II.10
	- 40% Sedang	%	37,67	36,85	37,91	38,91		II.10
	- 20% Tinggi	%	42,55	44,23	40,6	41,06		II.10
7	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)		0,57	0,53	0,48	0,49	0,51	II.10
8	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.			1,71	1,2	0,36	3,13	II.8
9	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	5,65	7,00	7,72	8,22	7,96	II.8
10	Produksi sektor pertanian	ton	76.653	84.516	76.100	89.083	105.669	II.8
11	Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB	%	2,59	3,75	3,98	4,43	4,49	II.8
12	Produksi sektor perkebunan	ton	6.988.344	9.717.275	10.902.358	11.499.164	13.249.959	II.8
13	Kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB	%	1,11	1,16	1,33	1,34	1,15	II.8
14	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	55,21	50,21	45,03	43,17	46,31	II.8
15	Kontribusi subsektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,66	0,73	0,86	0,95	0,93	II.8
16	Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB	%	1,18	1,30	1,50	1,54	1,46	II.8
17	Kontribusi subsektor perdagangan terhadap PDRB	%	4,29	4,58	5,12	5,53	5,30	II.8
18	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	17,98	19,32	20,59	20,62	19,07	II.8

Sumber : BPS Kaltim

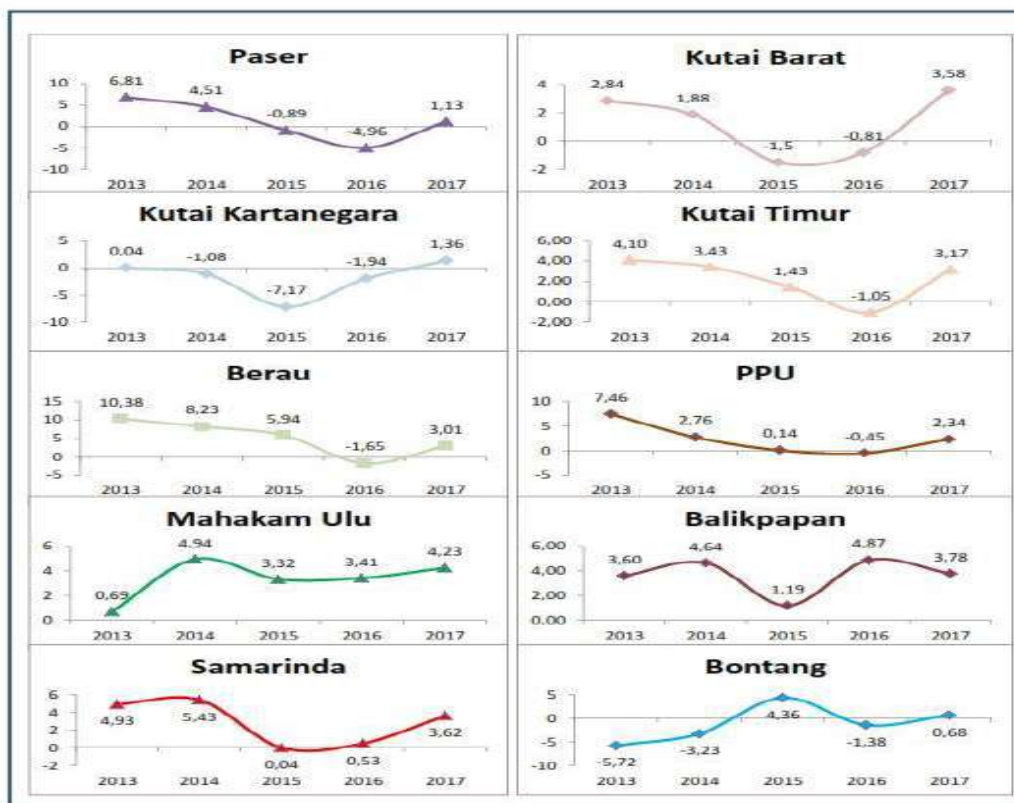
Besarnya kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Timur terhadap pembentukan PDB Nasional tidak menjadikan Kaltim memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil. Kinerja perekonomian Kalimantan Timur sangat rentan terhadap gejolak harga komoditas minerba dan CPO Sawit di pasar internasional. Pada saat harga komoditas energi tersebut mengalami penurunan pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur terpuruk pada level negatif 1,21 persen. Seiring membaiknya harga komoditas minerba dan CPO Sawit, perekonomian Kaltim mulai merangkak naik di tahun 2016 sebesar negatif 0,36 persen, dan mampu keluar dari tekanan kontraksi pada tahun 2017 menjadi sebesar 3,13 persen. Demikian pula yang terjadi di Kabupaten/Kota, hanya Mahakam Ulu, Balikpapan dan Samarinda yang mengalami pertumbuhan ekonomi relatif stabil.

Gambar 2. 8
Struktur Perekonomian (%) dan PDRB Kalimantan Timur (Juta Rp) Tahun 2013-2017



Sumber : BPS Prov. Kaltim

Gambar 2. 9
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota (persen) Tahun 2013-2017



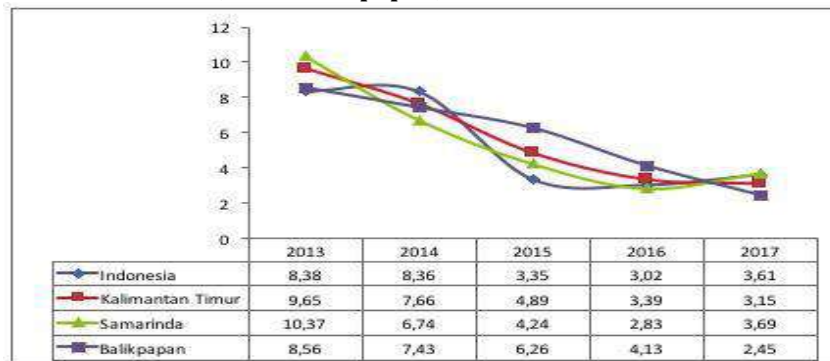
Sumber : BPS Provinsi Kaltim

Perkembangan kontribusi lapangan usaha terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa lapangan usaha konstruksi dan pertanian pada tahun 2013-2017 terlihat terus meningkat peranannya terhadap PDRB Kalimantan Timur, dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian cenderung menurun. Ini menjadi indikasi positif bahwa transformasi ekonomi Kaltim ke arah sumber daya alam terbarukan (*renewable resources*) sudah berjalan. Oleh karena itu, peningkatan kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan) menjadi harapan dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi Kaltim kedepan. Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan terhadap PDRB Kaltim juga menunjukkan pergerakan yang positif dan terus meningkat ditengah-tengah menurunnya aktivitas pertambangan dan penggalian, namun kontribusinya masih sangat kecil yaitu 5,30 persen.

Dalam pembangunan ekonomi, faktor stabilitas harga sangat penting mengingat fluktuasi harga sangat berpengaruh pada nilai barang dan jasa yang di

hasilkan, serta berdampak pada daya beli masyarakat. Inflasi merupakan salah satu alat ukur untuk melihat stabilitas harga barang dan jasa secara umum dari waktu ke waktu. Laju inflasi pada periode tahun 2013-2017 menunjukkan penurunan yang signifikan walaupun masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 3,02 %.

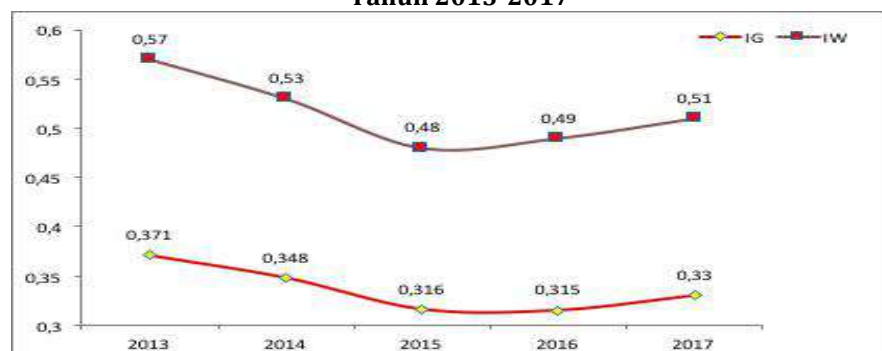
Gambar 2. 10
Laju Inflasi Kalimantan Timur,
Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Nasional Tahun 2013-2017 (%)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Indeks Gini Kaltim selama periode lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun, namun pada tahun 2017 mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,330. Sementara itu, Indeks Ketimpangan Williamson selama 2013-2017 juga menunjukkan kecenderungan menurun, namun pada tahun 2017 mengalami kenaikan ketimpangan menjadi sebesar 0,51. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan antar kabupaten/kota di Kaltim masih relatif tinggi. Perbedaan sumber daya antar wilayah, akses, dan tingkat kemudahan mobilitas barang dan jasa memberi andil dalam terciptanya ketimpangan tersebut.

Gambar 2. 11
Indeks Gini dan Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013-2017



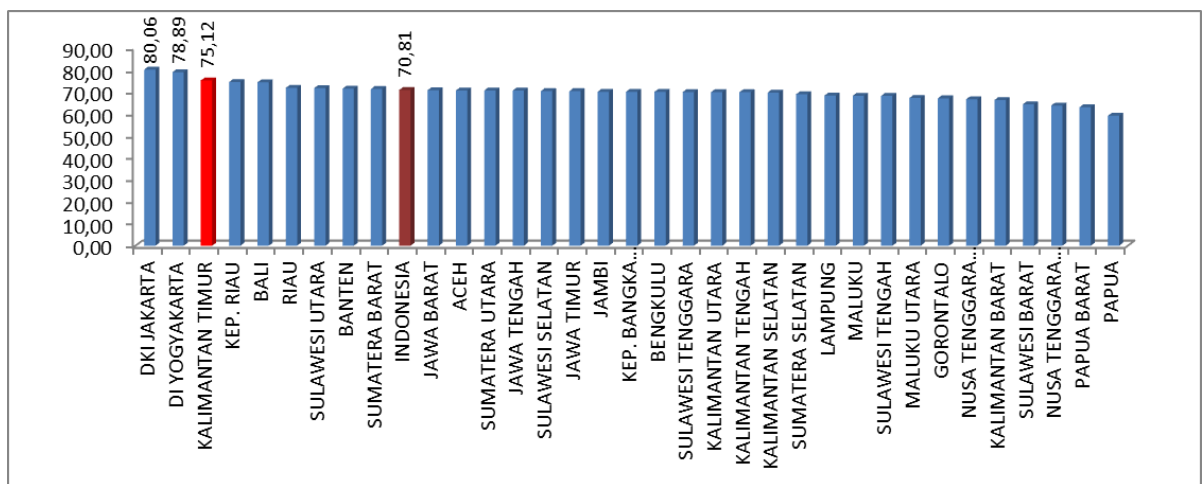
Sumber : BPS Provinsi Kaltim

Indeks ketimpangan regional masih bisa diturunkan jika terjadi peningkatan PDRB di Kabupaten Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara. Angka PDRB yang tinggi hanya didominasi oleh 2 (dua) kabupaten yaitu Kutai Timur (Rp. 117.816.986.000.000) dan Kutai Kartanegara (Rp. 148.336.960.000.000), sedangkan besar PDRB kabupaten/kota lainnya tidak sampai 50% dari nilai PDRB kedua kabupaten tersebut. Hanya Kota Balikpapan yang berada di urutan ketiga dengan nilai Rp. 86.732.396.000.000.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Walaupun mengalami pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil dan adanya ketimpangan perekonomian antar kabupaten/kota, tingkat kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Timur mengalami tren peningkatan selama periode 2013-2017, sudah lebih tinggi dibandingkan dengan IPM daerah provinsi lainnya di Pulau Kalimantan dan IPM Nasional.

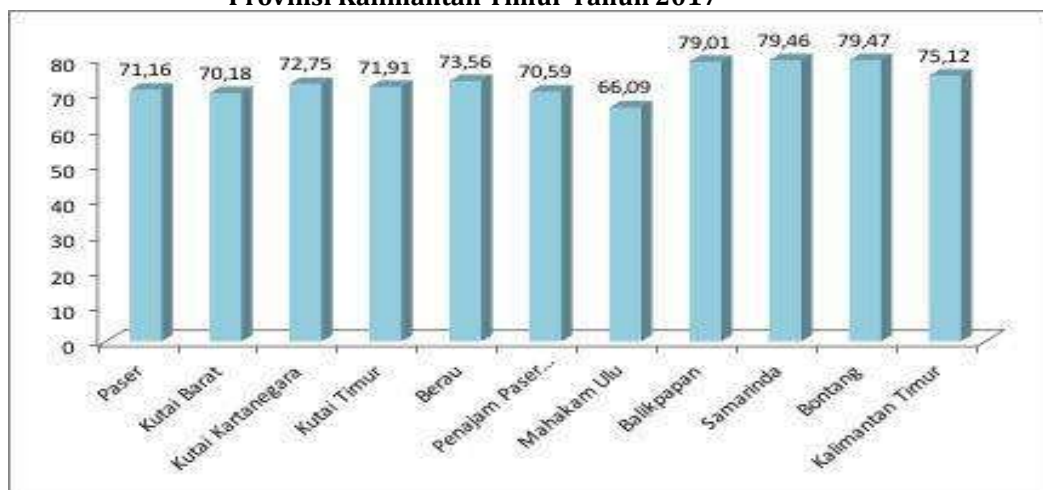
Gambar 2. 12
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi secara nasional Tahun 2017



Sumber : BPS Provinsi Kaltim

Jika dilihat IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, ketujuh kabupaten memiliki nilai IPM dibawah IPM Provinsi. Hanya wilayah kota yang memiliki nilai IPM di atas IPM Provinsi. Pemerataan pembangunan masyarakat terkait pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup di wilayah kabupaten perlu ditingkatkan terutama pada daerah perbatasan seperti di Kabupaten Mahakam Ulu.

Gambar 2. 13
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

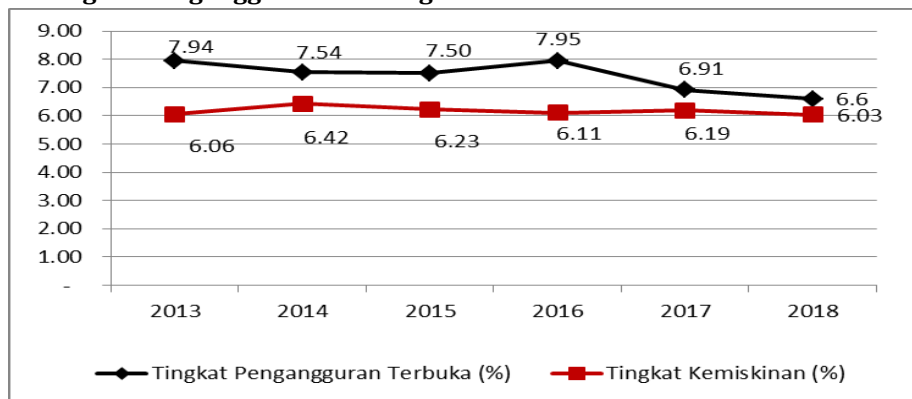
Tabel 2. 3
Capaian Kesejahteraan Sosial Kalimantan Timur 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Pemerataan Pendapatan Versi World Bank							
	- 40% Rendah	%	19.77	18.92	21.49	20.03		II.10
	- 40% Sedang	%	37.67	36.85	37.91	38.91		II.10
	- 20% Tinggi	%	42.55	44.23	40.6	41.06		II.10
2	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	93.94	93.58	93.77	93.89	93.09	I.1
3	Tingkat Kemiskinan	%	6.06	6.42	6.23	6.11	6.19	I.1
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		73.21	73.82	74.17	74.59	75.12	I.1
5	Indeks Desa Membangun (Permendes 2/2016)				0.525	0.525	0.525	II.10
6	Angka Melek Huruf	%	97.95	98.59	98.69	98.81	98.96	I.4
7	Rata-rata lama sekolah	tahun	8,87	9,04	9,15	11	9,24	I.4
8	Angka Harapan Hidup	tahun	73.52	73.62	73.65	73.68	73.7	I.3
9	Persentase Balita Gizi Buruk	%	3.9	3.7	3.7	0.1		I.3
10	Prevalensi balita gizi kurang		17.1	17.3	19.1	19.8		I.3
11	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	70	63.98	78	79		I.3
12	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	63.53	63.48	62.39	67.79	63.75	II.8
13	Tingkat pengangguran terbuka	%	7.94	7.54	7.5	7.95	6.91	II.8
14	Rasio penduduk yang bekerja		102.09	102.21	57.71	62.4	59.35	II.8
15	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	22.81	24.02	65.35	64.44	60.86	I.1
16	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)		92.53	97.75	97.74	97.26	98.16	I.2

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Pada aspek kesejahteraan masyarakat lainnya, Kaltim masih menghadapi permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Selama periode tahun 2013-2017 tingkat kemiskinan Kalimantan Timur berfluktuasi dan cenderung meningkat walaupun disisi lain tingkat pengangguran terbuka cenderung menurun. Kondisi tingkat kemiskinan sangat dipengaruhi oleh migrasi penduduk miskin dari luar daerah yang menambah jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur.

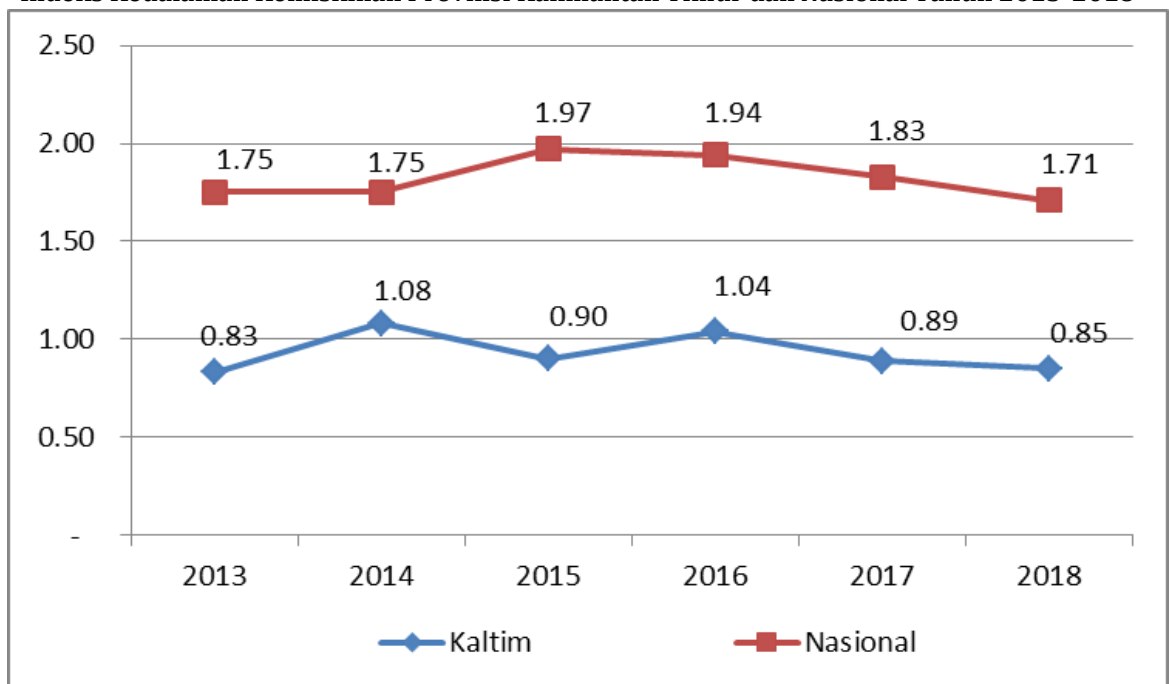
Gambar 2. 14
Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan Kalimantan Timur 2013-2017



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Angka kemiskinan terkait dengan pengeluaran, sementara pengeluaran masyarakat terkait dengan pendapatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Nilai indeks kedalaman kemiskinan Kaltim sangat fluktuatif dan selalu berada di bawah nasional, serta cenderung menurun menunjukkan bahwa semakin kecil rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Strategi penurunan kemiskinan di beberapa daerah dapat dimulai dari penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pengembangan ekonomi Kaltim kedepan harus mempertimbangkan penyerapan tenaga kerja untuk menekan tingkat pengangguran terbuka dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Gambar 2. 15
Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2013-2018

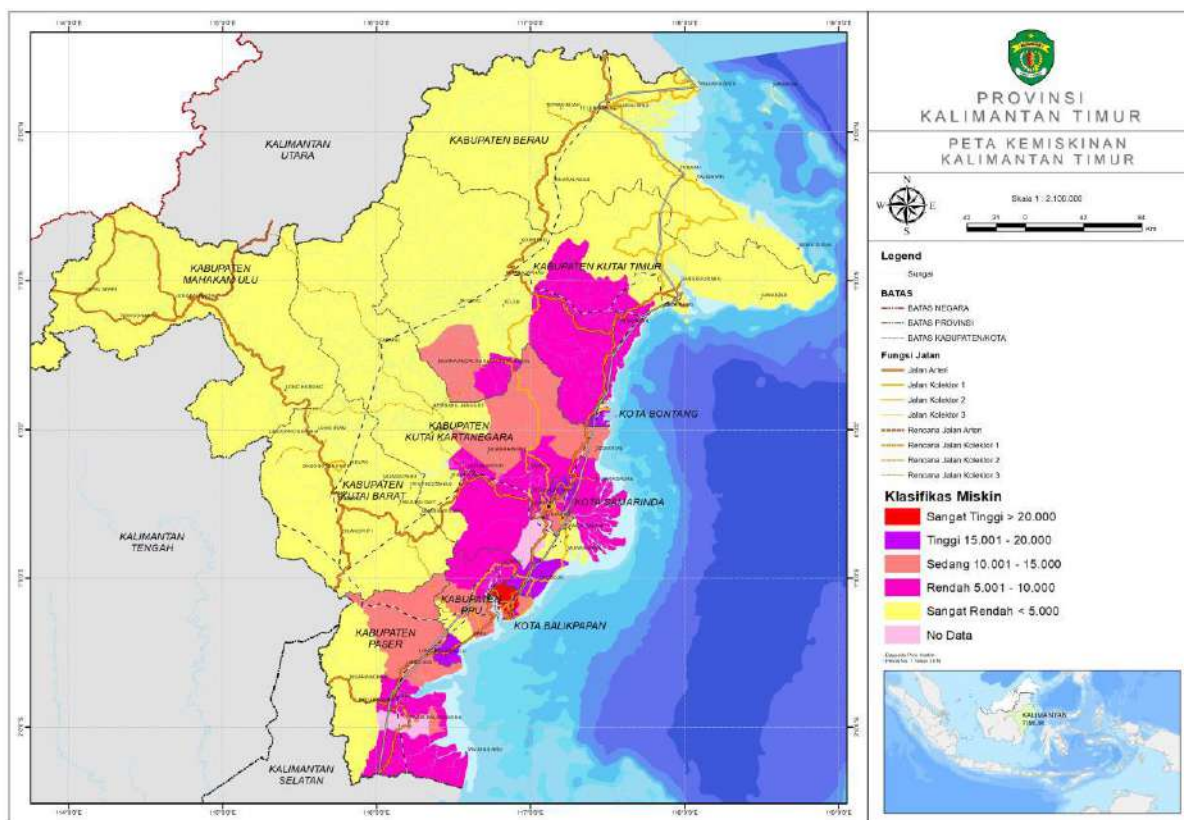


Sumber : BPS Provinsi Kaltim

Jumlah penduduk miskin terbanyak di Kalimantan Timur sebagian besar berada di kawasan perkotaan. Jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. Diperlukan kerjasama lintas sektor yang terintegrasi untuk pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat miskin pada daerah-daerah ini.

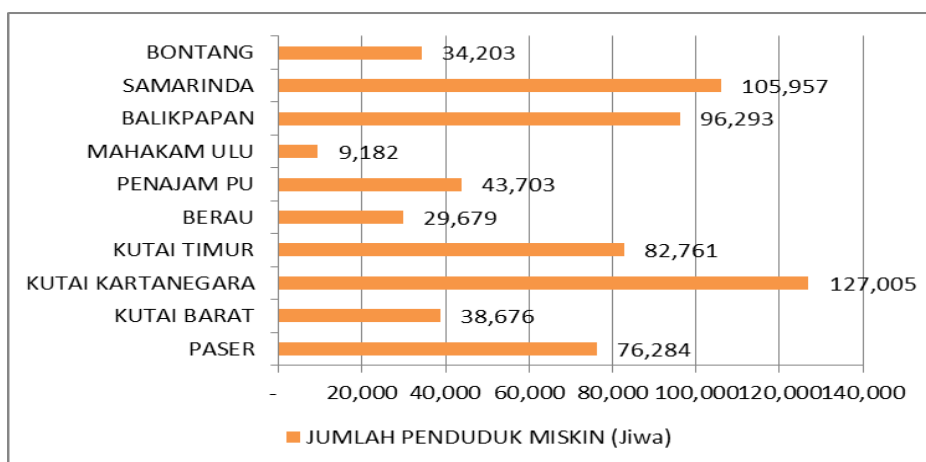
Kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Timur diharapkan memberi manfaat yang besar terhadap masyarakat yang berada di desa-desa sekitarnya. Namun sampai saat ini sebagian penduduk belum mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan tersebut, masih terdapat banyak penduduk miskin di sekitar kawasan lindung dan kawasan konsesi hutan produksi, pertambangan, dan perkebunan sejumlah 341.114 jiwa atau 53% dari total 643.743 jiwa penduduk miskin di Kalimantan Timur.

Gambar 2. 16
Peta Sebaran Penduduk Miskin Kalimantan Timur Tahun 2017



Sumber : One Data One Map, Bappeda Prov.Kaltim

Gambar 2. 17
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2017



Sumber : Basis Data Terpadu, TNP2K

Kabupaten Paser memiliki jumlah desa terbanyak (22 desa) yang berada pada kawasan Hutan Lindung, dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yaitu 16.865

jiwa. Di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki jumlah penduduk miskin 30.309 jiwa pada Kawasan Hutan Produksi dan pada kawasan Perkebunan sebanyak 62.815 jiwa.

Tabel 2. 4
Jumlah Desa dan Penduduk Miskin dalam Kawasan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kalimantan Timur Tahun 2017

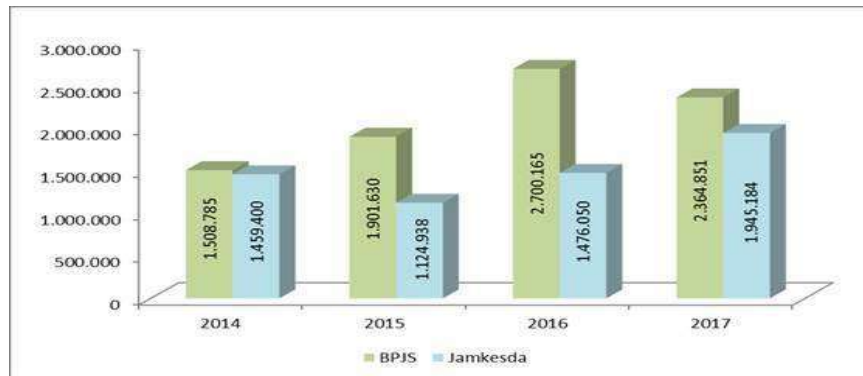
No	Kota/Kabupaten	Kawasan								Total	
		Hutan Lindung		Hutan Produksi		Perkebunan		Pertambangan			
		Jumlah Desa	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Desa	Penduduk Miskin
1	Balikpapan	2	10.706					0	14.883	2	25.589
2	Berau	9	839	46	12.051	30	9.210	49	19.365	134	41.465
3	Bontang	1	1.870			1	2.464	-	-	2	4.334
4	Kutai Barat	4	691	21	4.640	81	14.198	144	29.095	250	48.624
5	Kutai Kartanegara	11	9.549	57	30.309	120	62.815	139	101.075	327	203.748
6	Kutai Timur	11	13.816	41	22.460	76	37.520	108	76.215	236	150.011
7	Mahakam Ulu	14	2.362	20	3.614	16	3.206	30	7.151	80	16.333
8	Paser	22	16.865	23	7.896	69	34.198	69	36.059	183	95.018
9	Penajam Paser Utara	4	5.020	10	6.368	15	12.591	26	35.189	55	59.168
10	Samarinda	7	15.856					0	56.380	7	72.236
Jumlah		85	77.574	218	87.338	408	176.202	565	375.412	1.276	716.526

Terkait dengan kesejahteraan sosial masyarakat, Kaltim memiliki tingkat literasi masyarakat yang sangat baik dengan angka melek huruf di atas rata-rata nasional. Selama lima tahun terakhir, capaian Harapan Lama Sekolah Provinsi telah naik sebesar 0,64 poin dan telah melampaui capaian provinsi lainnya di wilayah Kalimantan. Selain Harapan Lama Sekolah (HLS) indikator penting untuk melihat keterjangkauan layanan pendidikan bagi penduduk usia sekolah adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Perkembangan RLS Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir tidak mengalami peningkatan yang signifikan karena hanya naik sebesar 0,49 tahun. Jenjang pendidikan yang ditamatkan penduduk usia sekolah di Kaltim rata-rata pada jenjang pendidikan SMP.

Disamping pendidikan, kesehatan merupakan indikator penting dalam menilai kesejahteraan masyarakat. Secara umum, perkembangan rata-rata Usia Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan secara perlahan. Dalam kurun waktu lima tahun UHH Provinsi Kalimantan Timur telah meningkat dari 73,32 tahun di tahun 2012 menjadi 73,70 tahun di tahun 2017. Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan kesehatan masyarakat dapat terlihat melalui jumlah kepesertaan

jaminan kesehatan baik melalui Jamkesda (untuk penduduk miskin) dan BPJS (berbayar) di Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2. 18
Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2014-2017



Sumber : SIDATA, Bappeda Provinsi Kaltim

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Bidang seni budaya dan keolahragaan juga menjadi aspek penting dalam aspek kesejahteraan masyarakat. Berkembangnya keolahragaan di Kalimantan Timur dapat dilihat dari capaian prestasi olahraga Kaltim dalam kejuaraan tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat pada tahun 2016 dimana Kaltim menempati posisi ke lima dari 34 provinsi. Peringkat Kaltim di PON 2016 tidak jauh berbeda dengan PON 2012 di Bengkulu yang juga menempati posisi kelima. Capaian tersebut menggambarkan bahwa keolahragaan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kaltim. Selain itu, capaian prestasi olahraga tersebut juga ditopang oleh adanya sarana dan prasarana keolahragaan yang memadai.

Secara umum, jenis olahraga yang paling populer adalah olahraga terukur seperti lari, renang, angkat besi, lompat tinggi, dan sebagainya. Olahraga ini paling banyak memiliki klub olahraga dan atlet dengan jumlah sarana dan prasarana sekitar 24 buah. Sedangkan olahraga lain yang juga populer di Kalimantan Timur adalah olahraga beladiri seperti taekwondo, silat, dan lain-lain dengan jumlah atlet profesional lebih dari 260 orang dan terdapat 11 klub. Di samping itu, olahraga lain seperti permainan dan olahraga beregu juga tetap menjadi minat yang populer.

Aktifitas seni dan budaya di Kalimantan Timur meliputi grup sanggar kesenian, sanggar seni ukir, sanggar seni lukis/gambar dan sanggar seni teater masih

belum berkembang optimal. Rendahnya aktifitas seni dan budaya disebabkan sanggar-sanggar kesenian di Kabupaten/Kota masih belum aktif. Disamping itu, event seni budaya Kalimantan Timur hanya diselenggarakan setahun sekali diantaranya Festival Budaya Erau, Festival Mahakam, Festival Budaya Dayak Kenyah.

Tabel 2. 5
Kondisi Olahraga dan Seni Budaya di Kalimantan Timur

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Klub Olahraga	1.045	1.045	1.050	1.050	1.050
Jumlah Gedung Olahraga	47	55	97	97	101
Jumlah Event Budaya	56	55	60	60	60
Jumlah Group Kesenian	676	735	861	861	861

Sumber : Sidata Kaltim

Kinerja pembangunan pemuda di suatu daerah dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Pemuda. Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu satu tahun 2015-2016 mampu meningkatkan capaian IPP nya dari sebesar 50,83 menjadi 56,33 dan berhasil menempati posisi ketiga secara nasional dibawah DI Jogjakarta dan Bali. Dimana peningkatan angka indeks ini dominan dipengaruhi oleh perbaikan kinerja pemuda dari sisi lapangan dan kesempatan kerja. Indikator pendukung pemuda wirausaha (*white collar*) dan tingkat pengangguran menunjukkan kinerja yang baik.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pada bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, baik pada urusan pelayanan wajib dan urusan pilihan.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Pembangunan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur telah berkembang dan menjadi perhatian Pemerintah, dimana sampai dengan tahun 2018 jumlah sekolah yang tersebar di 10 kabupaten/kota sebanyak 6.916 sekolah, terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 2.895 sekolah, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1.895 sekolah, Sekolah Menengah

Pertama (SMP) sebanyak 648 sekolah, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 221, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 222 sekolah. Sementara itu untuk pendidikan khusus telah dikembangkan sekolah luar biasa sebanyak 9 sekolah tersebar di 9 kabupaten/kota.

Selanjutnya untuk pengembangan pendidikan sekolah menengah yang diarahkan untuk sekolah vokasi telah dikembangkan sebanyak 147 jurusan/program keahlian. Dalam rangka mendukung kawasan industry yang akan dikembangkan, maka pemerintah akan melakukan revitalisasi sekolah vokasi yang disesuaikan dengan potensi daerah.

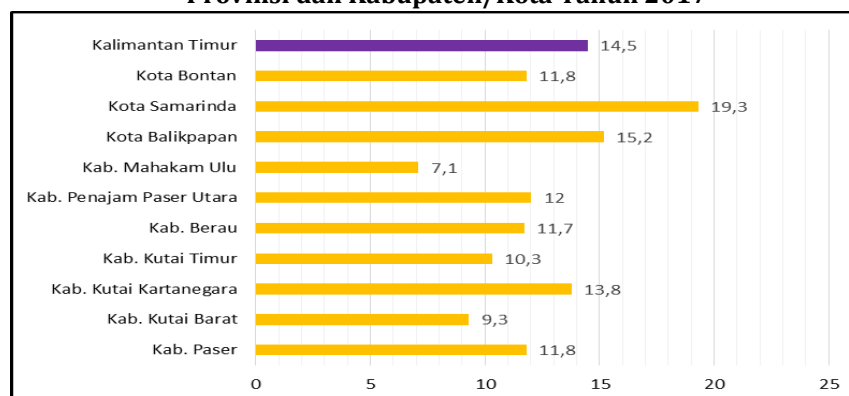
Sementara itu dalam rangka pengembangan pendidikan yang diarahkan bagi anak-anak penyandang disabilitas, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana di sekolah luar biasa.

Namun Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan pada partisipasi pendidikan di tingkat sekolah menengah atas terutama jika dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) rata-rata belum mencapai 90 persen dan angka putus sekolah yang tinggi yaitu rata-rata 21,09 % setiap tahun. Secara umum capaian APK Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan 9,56 persen dalam kurun waktu lima tahun, demikian pula capaian APM Kaltim meningkat sebesar 6,29 persen. Meskipun capaian APK dan APM Kaltim lebih unggul dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan, tetapi terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara APK dan APM yaitu sebesar 25,57 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya partisipasi penduduk usia sekolah dalam jenjang pendidikan SMA tidak diikuti dengan kesesuaian umur peserta didik dengan golongan umur yang seharusnya memasuki jenjang pendidikan SMA. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya peserta didik di SMA/SMK/MA yang tinggal kelas atau mengulang atau juga disebabkan oleh adanya umur peserta didik lebih muda daripada golongan umur yang seharusnya masuk jenjang SMA. Demikian pula capaian APK dan APM di Kabupaten/Kota mencerminkan disparitas kualitas pendidikan di Kaltim. Daerah yang harus menjadi prioritas perbaikan layanan pendidikan adalah Kabupaten Mahakam Ulu, Paser, Kutai

Kartanegara, Berau dan Kutai Barat karena nilai APK dan APM selalu menjadi yang paling rendah dalam lima tahun terakhir.

Disamping itu, disparitas pelayanan pendidikan dapat juga dilihat dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta ketercukupan tenaga pengajar. Kalimantan Timur memiliki tenaga pengajar yang terbatas di tingkat sekolah menengah atas, dimana rasio guru terhadap murid SMA/MA/SMK di Kalimantan Timur adalah 14,5 yang bermakna bahwa satu orang guru mengajar sebanyak kurang lebih 14-15 siswa. Terdapat beberapa daerah dengan rasio guru-murid yang kecil seperti di Mahakam Ulu, Kutai Barat dan Kutai Timur. Di sisi lain, juga terdapat daerah dengan rasio guru-murid sangat tinggi seperti di Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal tersebut mengindikasikan bahwa proporsi guru-murid lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota.

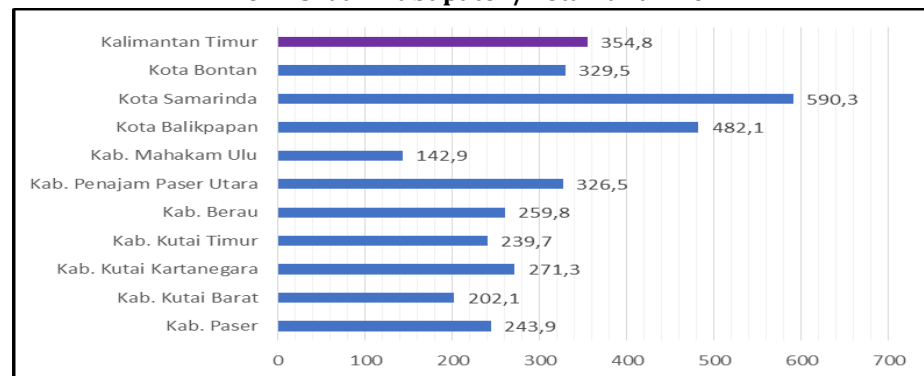
Gambar 2. 19
Rasio Guru-Murid pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA)
Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2017



Sumber: BPS Kaltim, Kaltim Dalam Angka 2017

Di samping rasio guru-murid, indikator lain yang juga menjadi indikasi penyebab disparitas pelayanan pendidikan adalah rasio sekolah-murid. Rasio murid-sekolah di Kaltim sebesar 354,8 yang artinya setiap satu sekolah rata-rata memiliki 354 siswa. Namun demikian, data tersebut belum menggambarkan daya tampung sekolah secara lebih rinci karena diperlukan data-data terkait jumlah ruang kelas per sekolah untuk mengukur rasio jumlah siswa dengan jumlah ruang belajar.

Gambar 2. 20
Rasio Sekolah-Murid pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA)
Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2017



Sumber: BPS Kaltim, Kaltim Dalam Angka 2017

Kota Balikpapan dan Kota Samarinda rasio memiliki sekolah-murid sangat tinggi yaitu satu sekolah rata-rata memiliki jumlah siswa 500 orang. Sebaliknya, di beberapa daerah terutama di Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Paser perbandingan sekolah-siswa terlihat lebih kecil.

b. Kesehatan

Kondisi kesehatan masyarakat menjadi penentu penting bagi produktivitas suatu masyarakat. Oleh karena itu pembangunan bidang kesehatan perlu menjadi prioritas pemerintah daerah. Pembangunan bidang kesehatan di Kalimantan Timur semakin membaik, hal ini ditunjukkan oleh usia harapan hidup yang semakin meningkat dari 73,52 tahun pada tahun 2013 mencapai 73,7 tahun pada tahun 2017.

Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan kesehatan terkait kematian ibu, morbiditas, keterbatasan tenaga kesehatan terutama dokter, belum terpenuhinya standar pelayanan minimal di pusat-pusat pelayanan kesehatan, prevalensi TB dan HIV-AIDS.

Tabel 2. 6
Capaian Pembangunan Kesehatan di Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Pilar-Tujuan SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Angka Harapan Hidup	tahun	73,52	73,62	73,65	73,68	73,7	I.3
2	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	jiwa	177,21	177,21	177,21	177,21	177,21	I.3
3	Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	jiwa	21	21	21	21	21	I.3
4	Angka Kematian Balita	jiwa	72	60	84	117	31	I.3

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Pilar-Tujuan SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
	(AKBa) per 1000 kelahiran hidup.							
5	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (jumlah)		7319	6012	6695	7933	10110	I.3
6	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk		0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	I.3
7	Rasio penduduk terhadap jumlah dokter	Orang	1.756	2.154	1.978	1.726	1.660	I.3
8	Rasio penduduk terhadap jumlah puskesmas+pustu	Orang	4.380	4.097	4.036	4.124	3.895	I.3
9	Rasio posyandu per satuan balita	(per. 1000)	24,87	29,33	31,02	33,4	34,33	I.3
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	(per. 1000)	4,09	3,57	3,4	3,39	4,03	I.3
11	Kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	%	90,86	88,76	91,26	90,12	92,29	I.3
12	Persentase penduduk dengan keluhan kesehatan	%	18,99	21,22	21,98	21,76	20,89	I.3
13	Morbiditas (Angka Kesakitan)	%	11,74	9,18	9,18	11,9	10,5	I.3
14	Cakupan Puskesmas	%	180,58	174,76	174,76	174,76	176,87	I.3
15	Cakupan Puskesmas Pembantu	%	564,71	624,27	676,70	693,20	693,20	I.3
16	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	87,21	92,9	95,46	88,75	I.3
17	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	%	90,9%	79,6%	79,6%	91,3%	90,1%	I.1
18	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	%	90,9%	79,6%	79,6%	91,3%	90,1%	I.3
19	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		7,3	7,54	7,81	8,62	7,8	I.3
20	Cakupan Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	I.3
21	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	85,34	87,73	92,4	89,4	94,46	I.3
22	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk		1,28	1,05	1,24	1,96	1,88	I.3
23	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	17	14,65	23,6	38,89	30,96	I.3
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	30,57	37,94	20,83	9,6		I.3
25	Tingkat prevalensi		229,40	74,28	56,00	4,19	100	I.3

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Pilar-Tujuan SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
	Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)							
26	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	22,50	28,00	19,80	47,10	35,99	I.3
28	Angka kejadian Malaria	per 1000 penduduk	1,50	0,75	0,20	0,04	0,40	I.3
29	Tingkat kematian akibat malaria		5,70	1,00	0	0	0	I.3
30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi		0,18	0,03	0,09	0,190	<1	I.3
31	Cakupan kunjungan bayi	%	60,44	78,52	65,41	84,16	82,40	I.3
32	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	84,99	78,95	65,23	88	45	I.3
33	Cakupan pelayanan nifas		84,80	85,30	82,30	79,40	81	I.3
34	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	48,60	63,20	57,90	68,10	69	I.3
35	Cakupan pelayanan anak balita	%	55,60	54,50	59,00	66,20	61,2	I.3
37	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	43,00	91,88	94,24	99,34	98,52	I.3
38	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	I.3
39	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)		60,06	93,18	100,00	97,92	94,12	I.3
40	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		100,00	85,23	98,80	100,00	100,00	I.3
41	Cakupan Jaminan Kesehatan		61,33	42,65	49,80	51,67	55,00	I.1
44	Angka Kematian Ibu (AKI).		113	104	100	95		I.3
45	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.		-	1,5	1,9	2,7	2,3	I.3
46	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).		-	1,5	1,9	2,7	2,3 jt	I.3

Sumber : Dinas Kesehatan Prov.Kaltim dan BPS Kaltim

Tuberkulosis (TB) dan HIV-AIDS merupakan salah satu penyakit yang menjadi perhatian pemerintah. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir,

temuan kasus TB BTA+ baru di Kalimantan Timur meningkat sebesar 34,92 % yaitu sebanyak 1.953 kasus pada tahun 2014 meningkat menjadi 2.635 kasus pada akhir tahun 2017. Kota Bontang, Kota Samarinda dan Kota Balikpapan merupakan penyumbang terbesar kasus TB BTA+ Baru selama kurun waktu empat tahun terakhir. Hal tersebut mengindikasikan tingginya resiko penyebaran TB BTA+ di wilayah tersebut. Terkait dengan distribusi tenaga medis dan paramedis, bahwa masih terjadi kekurangan tenaga medis dan paramedis terutama daerah 3T. Untuk memenuhi hal tersebut diperlukan penambahan tenaga medis dan para medis sehingga masyarakat yang berada di daerah 3T bisa terlayani dengan baik. Untuk sarana dan prasarana kesehatan, pemerintah telah memenuhi fasilitas kesehatan seperti puskesmas, Puskesmas 24 jam, dan Rumah Sakit Pratama, tetapi terkait dengan peralatan medis kesehatan, masih sangat terbatas khususnya di puskesmas-puskesmas di daerah 3T.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja pelayanan dasar dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat dengan memperhatikan beberapa indikator utama. Pemaparan kondisi pelayanan pada urusan tersebut diarahkan pada penilaian aspek ketersediaan dan kualitas. Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah kondisi pelayanan pada bidang infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya air, bangunan dan jasa konstruksi serta penataan ruang.

Tabel 2. 7
Capaian Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
di Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Pilar-Tujuan SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Panjang Jalan Provinsi	Km	1.762,07	1.628,07	1.628,07	1.628,07	1.628,07	II.9
2	Kondisi Mantap	%	48,64	54,08	58,94	66,24	51,66	II.9
3	Perumahan berdasarkan fasilitas sanitasi :							
	- Jamban sendiri	%	n/a	n/a	89,71	89,75	91,76	
	- Jamban dengan Tangki Septik/IPAL	%	n/a	n/a	70,08	77,66	76,56	
4	Luas Lingkungan Pemukiman (Kumuh)	Ha	n/a	1.405,14	1.363,39	1.309,72	1.026,69	II.9
5	Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan		2	2	2	2	2	II.9

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Pilar-Tujuan SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
	kawasan sentra produksi (Kawasan)							
6	Cakupan layanan Air Minum Perpipaan (%)	%	n/a	n/a	51,7	51,5	54,3	III.6
7	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)		67,83	82,06	69,14	75,02	73,18	III.11

Kinerja pelayanan jalan dan jembatan dapat dilihat dari dua aspek yaitu ketersediaan dan kualitas. Dalam konteks ini, kedua aspek tersebut belum dipenuhi secara baik di Provinsi Kalimantan Timur. Ketersediaan jaringan jalan Provinsi hingga tahun 2017 sesuai dengan SK Kemendagri No. 55 Tahun 2000 yaitu sepanjang 1.628,07 Km dengan kondisi mantap mencapai 51,66%. Ketersediaan jalan provinsi dalam kondisi mantap belum mampu sepenuhnya mendukung konektifitas 8 Kawasan Strategis Provinsi (Perda RTRW Kaltim No 1 tahun 2016) dan pusat produksi, kawasan industri, serta outlet pemasaran terkoneksi jaringan jalan.

Tabel 2.8
Panjang Jalan (Km) Provinsi Menurut Kondisi
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Tahun	Baik		Sedang		Rusak		Rusak Berat	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
2017	432,53	48,32	28,57	3,19	223,68	24,99	210,31	23,50
2016	149.97	9.55	720.54	45.89	500.52	31.88	269.04	17.14
2015	452.98	28.85	329.52	20.99	251.39	16.01	536.68	35.83
2014	456.86	29.10	339.57	21.63	359.21	22.88	414.43	26.40
2013	440.48	28.05	334.85	21.33	249.75	15.91	544.99	34.71

Sumber: Diolah dari Dinas PU Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Berdasarkan kondisi jalan tahun 2017 menunjukkan kondisi rusak dan rusak berat mencapai 433,99 Km atau 48,49% dari total panjang jalan. Sebagian besar jalan dalam kondisi rusak berada di Kabupaten Kutai Timur yaitu mencapai 161,86 Km atau 65,26% dari total panjang jalan provinsi diwilayah tersebut dan Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 116,62 Km atau 51,27% dari total panjang jalan provinsi diwilayah tersebut.

Tingginya kerusakan jalan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah ketidaksesuaian konstruksi jalan dengan standar spesifikasi

teknis, kondisi tanah yang labil sehingga rawan terjadi longsor, serta belum optimalnya upaya rehabilitasi, pemeliharaan dan rekonstruksi serta tingginya pelanggaran batas muatan kendaraan.

Dari aspek keselamatan berlalu lintas dijelaskan bahwa pada tahun 2017 angka kecelakaan lalu lintas mencapai 864 kasus dengan korban meninggal dunia 951 jiwa, hal ini sebagian besar disebabkan rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam berlalu lintas.

Persoalan lain yang berkaitan dengan konektivitas wilayah yaitu ketersediaan jaringan jalan yang menghubungkan antar kabupaten/Kota belum optimal. Saat ini masih terdapat satu kabupaten yang belum terkoneksi jaringan jalan yaitu Kabupaten Mahakam Ulu. Hal tersebut disebabkan oleh jauhnya rentang kendali menuju daerah tersebut sehingga biaya konstruksi dan mobilisasi alat berat menjadi lebih mahal.

Kota Balikpapan merupakan daerah yang memiliki kondisi jalan relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya. Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi baik pada daerah tersebut mencapai 77% dari total panjang jalan provinsi di wilayah tersebut. Ketimpangan capaian kualitas jalan terbangun antar wilayah mengindikasikan bahwa upaya rehabilitasi, pemeliharaan dan rekonstruksi belum merata di semua wilayah. Persoalan ini disebabkan oleh jauhnya rentang kendali serta sulitnya akses pada wilayah-wilayah tertentu.

Pada tahun 2018 dilakukan penetapan Status Jalan Provinsi Kalimantan Timur yang baru melalui Keputusan Gubernur No. 622/K.295/2018 tentang Penetapan Ruas-ruas menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi yaitu sepanjang 895.06 Km. dari perubahan Panjang jalan tersebut, maka kondisi mantap jalan provinsi mengalami perubahan mencapai 52,85 % dan tidak mantap mencapai 47,51 % di tahun 2018.

Salah satu sektor strategis pembangunan di Kalimantan Timur adalah Sumber Daya Air. Keberadaannya tidak hanya krusial untuk pemenuhan kebutuhan dasar tetapi juga menyangkut aktivitas perekonomian. Pada periode RPJMD sebelumnya, pembangunan sektor Sumber Daya Air difokuskan pada 3

aspek, yakni upaya pemenuhan Kebutuhan Air baku baik untuk kebutuhan domestik dan industri, Pembangunan jaringan irigasi untuk memberikan suplai air pada lahan pertanian, serta upaya pengendalian daya rusak air secara khusus pada pengendalian banjir.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi yang kesinambungannya sangat bergantung pada suplai air yang memadai. Pada tahun 2017, luas lahan pertanian yang terlayani jaringan irigasi baru mencapai 13.618,5 Ha, atau 14,4% dari luas seluruh lahan sawah eksisting di Kaltim. Luasan tersebut tersebar di seluruh Kabupaten/Kota serta mencakup seluruh kewenangan baik Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten. (Tabel Kondisi Sawah Eksisting di Kaltim)

Tabel 2.9
Kondisi Sawah Eksisting di Kaltim

NO	KAB/KOTA	Sawah Irigasi (Ha)	Sawah Non-Irigasi (Ha)	Luas Sawah (Ha)
1	Paser	0	12.702	12.702
2	Kutai Barat	608	8.111	8.719
3	Kutai Kartanegara	6.071	29.921	35.992
4	Kutai Timur	2.881	6.874	9.775
5	Berau	2.831	7.654	10.485
6	Penajam Paser Utara	933	11.272	12.205
7	Mahakam Ulu	0	480	480
8	Balikpapan	0	250	250
9	Samarinda	294,5	3.453,5	3.748
10	Bontang	0	74	74
	TOTAL	13.618	80.791,5	94.410

Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, & Holtikultura Prov. Kaltim, 2018

Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta diperkuat oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi, terdapat 8 Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah provinsi dengan total luasan 12.051 Ha. Dari luasan tersebut, yang terlayani jaringan irigasi baru mencapai 56,59% atau seluas 6.820 Ha. Rencana pembangunan jaringan irigasi pada 4 Daerah Irigasi mencapai 83 Km. Hingga tahun 2017

realisasi pembangunan jaringan irigasi tersebut baru mencapai $\pm$ 26 Km atau hanya 31%.

Tabel 2.10
Kondisi Daerah Irigasi di Kaltim

NO	DAERAH IRIGASI	LUAS DI (Ha)
1	Biatan	1.779
2	Labanan	1.100
3	Merancang	1.200
4	Semurut	1.089
5	Kaliorang	1.300
6	Selangkau	2.987
7	Marangkayu	1.507
8	Sungai Buluh	1.089
TOTAL		12.051

Sumber: Data Sektoral Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Dalam proses perencanaan pembangunan jaringan irigasi dan pencetakan sawah, integrasi memang belum dilakukan hingga posisi/lokasi spesifik. Penyebab utama dari hal ini adalah belum tersedianya data geospasial yang akurat mengenai kondisi lahan sawah eksisting serta rencana lokasi pencetakan sawah. Penyediaan data yang akurat dan mutakhir sangat diperlukan agar kedepannya persoalan ini tidak menjadi penghambat Kaltim untuk meningkatkan indeks pertanian dan presentase ketersediaan beras.

Pemenuhan kebutuhan air baku baik untuk kebutuhan domestik dan industri juga menjadi perhatian penting Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hingga saat ini dan 5 tahun kedepan, hampir seluruh Kabupaten/Kota mengalami defisit air baku.

Tabel 2.11
Defisit Kebutuhan Air Baku

No.	Kabupaten / Kota	Defisit Kebutuhan Air (m ³ /Thn)	
		2018	2023
1	Kabupaten Paser	(13.262.992,45)	(16.823.065,72)
2	Kabupaten Berau	(2.426.389,82)	(6.119.490,31)
3	Kabupaten Kutai Kartanegara	(2.453.614,96)	(13.252.406,91)
4	Kabupaten Kutai Barat	(4.109.424,37)	(4.572.610,85)
5	Kabupaten Kutai Timur	(16.181.957,16)	(25.275.031,62)
6	Kabupaten Penajam Paser Utara	(8.472.603,46)	(9.696.067,38)
7	Kota Bontang	(3.124.422,15)	(5.796.593,97)

No.	Kabupaten / Kota	Defisit Kebutuhan Air (m ³ /Thn)	
		2018	2023
8	Kota Balikpapan	(4.512.187,52)	(3.382.418,18)
9	Kota Samarinda	(22.710.346,28)	(18.568.251,44)
10	Kabupaten Mahakam Ulu	(4.109.424,37)	(4.572.610,85)

Sumber: Data Sektoral Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Defisit air baku lebih disebabkan masih kurangnya pembangunan infrastruktur pengambil air baku pada air permukaan dan semakin berkurangnya cadangan air tanah. Perencanaan dan pembangunan infrastruktur tersebut sudah dilakukan pada beberapa lokasi prioritas. Beberapa diantaranya telah terbangun dan sisanya belum direalisasikan. Terdapat pula beberapa prasarana yang telah terbangun namun belum dapat dioperasikan. Kekurangan prasarana dan sarana air baku berpengaruh pada distribusi dan ketersediaan air minum.

Permasalahan sumber daya air lainnya di Provinsi Kalimantan Timur adalah belum optimalnya akses air bersih terutama untuk air minum. Pembangunan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas layanan air minum dapat dilakukan melalui peningkatan cakupan pelayanan air minum.

Tabel 2.12
Penduduk Terlayani Air Bersih Perpipaian

NO	KABUPATEN/KOTA	Sambungan Rumah (SR)			Cakupan Layanan Air Minum Perpipaian (%)		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	PASER	15.882	18.743	19.050	41,93	24,21	38,29
2	PENAJAM PASER UTARA	4.798	5.339	5.470	15,79	14,19	15,87
3	SAMARINDA	127.633	137.135	146.225	89,60	90,96	95,46
4	BALIKPAPAN	87.999	95.781	97.243	76,84	76,50	76,98
5	KUTAI KERTANEGARA	65.026	69.942	68.035	59,86	63,25	63,39
6	KUTAI BARAT	9.560	9.987	10.012	34,58	34,25	34,35
7	KUTAI TIMUR	17.727	20.656	15.945	25,79	31,67	33,13
8	BERAU	13.159	16.120	16.517	40,71	44,34	44,70
9	BONTANG	19.212	22.970	23.999	80,23	84,37	87,05
10	MAHAKAM ULU	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
JUMLAH		360.996	396.673	402.496	51,7	51,5	54,3

Sumber: Data Sektoral Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Berdasarkan data di atas, peningkatan cakupan pelayanan air bersih perpipaan mengalami peningkatan meskipun belum maksimal, dimana pada tahun 2015 sebesar 51,7% dan pada tahun 2017 meningkat sebesar 54,3%. Masih minimnya cakupan air bersih perpipaan disebabkan oleh Masih kurangnya infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

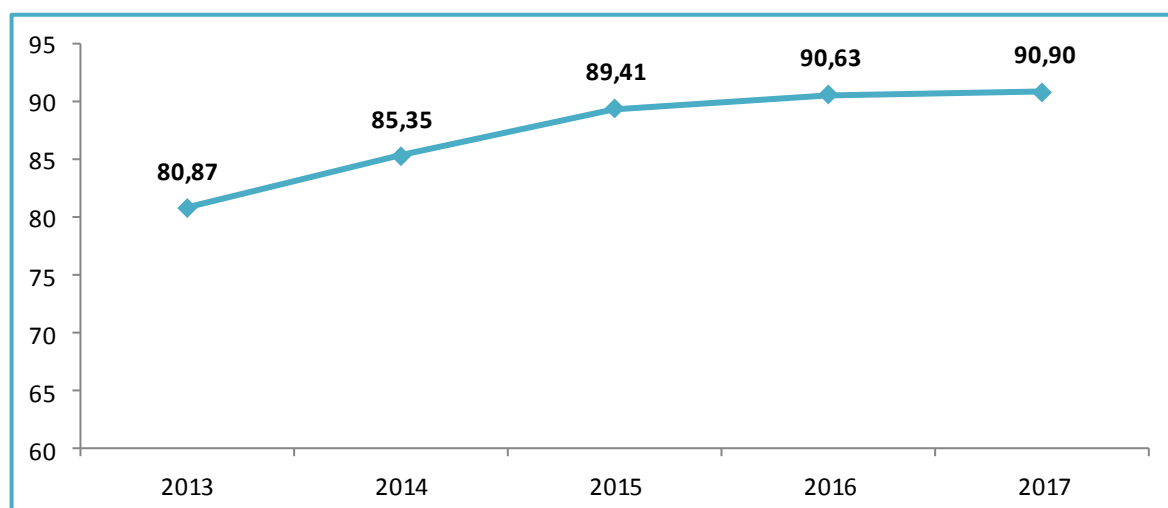
Tabel 2.13
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama
di Kalimantan Timur Tahun 2015-2017 (%)

No.	Sumber Air Minum	2015	2016	2017
1.	Ledeng meteran dan eceran	22,68	19,66	23,40
2.	Air kemasan dan air isi ulang	59,57	65,57	68,14
3.	Sumur bor dan sumur terlindungi	7,15	5,91	4,76
4.	Sumur tak terlindung, mata air terlindung/tak terlindungi, sungai air hujan dan lainnya	10,59	8,85	3,66

Sumber: Statistik Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Persoalan cakupan layanan air minum yang belum optimal, membuat masyarakat lebih memilih air kemasan dan air isi ulang sebagai sumber air minum. Hal ini terlihat pada tabel di atas, cakupan sumber air minum berupa air kemasan dan air isi ulang memiliki persentase tertinggi selama tiga tahun terakhir.

Grafik 2.21
Persentase Rumah tangga dengan Sumber Air Minum Bersih
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Perusahaan air minum di Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan segala daya dan upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih. Pada tahun 2015 sendiri sudah terdapat 9 perusahaan air minum tersebar di kabupaten/kota dengan kapasitas produksi efektif sebesar 7.181 liter/detik.

Selain mengukur kualitas bangunan perumahan, kinerja pelayanan dasar di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman juga dapat dilihat dari akses dan kualitas sanitasi. Sanitasi yang layak mengindikasikan kualitas sistem kesehatan lingkungan tempat tinggal. Kualitas sanitasi dapat dilihat dari penggunaan fasilitas sanitasi seperti jamban dan tangki septik.

Tabel 2.14
Perumahan Berdasarkan Fasilitas Sanitasi
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2017

Fasilitas Perumahan	2015	2016	2017
Jamban sendiri	89,71	89,75	91,76
Jamban dengan Tangki Septik/IPAL	70,08	77,66	76,56

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Pada tahun 2017, sebagian besar RT telah mempunyai jamban sendiri sebesar 91,76% dari total RT keseluruhan. Capaian tersebut mengindikasikan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan, proporsi RT yang mempunyai jamban dengan pembuangan akhir berupa tangki septik sebesar 76,56%, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Di samping fasilitas sanitasi, akses air bersih juga menjadi salah satu indikator rumah layak huni. Pada tahun 2016, rumah tangga yang mendapat akses air minum layak mencapai 92,25% dari total rumah tangga, meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun 7,75% sisanya belum dapat mengakses air minum layak.

Tabel 2.15
Penanganan Sampah dan Sampah Terangkut per Hari

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
% Penanganan sampah	-	75,24 %	77,5 %	78,5 %	72,29 %	67,62 %
% Sampah terangkut per hari	-	-	65,95 %	64,61 %	71,19 %	65,62 %

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Penanganan sampah menunjukkan tren penurunan dari tahun 2014 hingga 2018. Begitu juga dengan persentase sampah yang terangkut pada jangka waktu tahun yang sama. Berbasis data tersebut, maka persoalan yang dihadapi oleh Kalimantan Timur adalah belum optimalnya penanganan pesampahan. Menurut hasil FGD persoalan ini disebabkan oleh belum adanya TPA regional dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Meskipun belum memiliki TPA Regional, terdapat beberapa TPA di Kabupaten Kota yang bisa dioptimalkan. Namun ada satu kabupaten yang belum memiliki TPA, yaitu Mahakam Ulu. Berikut adalah sebaran lokasi TPA dan sistem operasionalnya di Provinsi Kalimantan Timur:

Tabel 2.16
Sebaran Lokasi TPA dan Sistem Operasionalnya di Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Nama TPA	Sistem Operasional TPA	Luas TPA (Ha)
Balikpapan	Manggar	<i>Control Landfill</i>	±28
Samarinda	Bukit Pinang	<i>Open Dumping</i>	±9,5
	Sambutan	<i>Control Landfill</i>	±30
Bontang	Bontang Lestari	<i>Control Landfill</i>	±15 (aktif 6 ha)
Paser	Janju	<i>Control Landfill</i>	10,499
	Batu Sopang	<i>Control Landfill</i>	±2 (rencana menjadi 5 ha)
Penajam Paser Utara	Buluminung	<i>Control Landfill</i>	±10
Kutai Timur	Batotak	<i>Control Landfill</i>	±12
Kutai Kartanegara	Bekotok	<i>Open Dumping</i>	±4
Kutai Barat	Belau	<i>Control Landfill</i>	±15
Berau	Bujangga	<i>Control Landfill</i>	±10
Mahakam Ulu	-	-	-

Sumber: Data Sektoral Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Jika ditinjau dari prasarana persampahan, semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur sudah memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kecuali Kabupaten Mahakam Ulu. Dari 11 TPA yang ada, dua diantaranya masih menggunakan sisten *open dumping* yaitu TPA Bukit Pinang di Samarinda dan TPA Bekotok di Kutai Kartanegara, sedangkan 9 TPA lainnya sudah menggunakan sistem *Control Landfill*. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, proses akhir sampah idealnya dilakukan

dengan metode *control landfill*, *sanitary landfill* dan teknologi ramah lingkungan. Oleh karena itu, proses akhir sampah dengan metode *open dumping* harus segera diganti minimal dengan metode *control landfill*. Meskipun demikian, metode *control landfill* ini merupakan metode antara sebelum mampu menerapkan sistem *sanitary landfill*. Oleh karena itu, perbaikan metode pemrosesan akhir sampah perlu untuk diperbaiki terutama pada TPA yang masih menggunakan metode *open dumping*. Upaya tersebut penting untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

Dari aspek pengendalian daya rusak air, dua fenomena utama yang menjadi fokus perhatian adalah pengendalian banjir dan abrasi. Tabel berikut memberikan gambaran mengenai prediksi luas genangan banjir di seluruh wilayah Kaltim.

Tabel 2. 17
Daerah Rawan Banjir Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/Kota	DAS	Perkiraan Luas Genangan
1	Kota Balikpapan	Sungai Ampal	130
		Klandasan	50
		Sepinggan	50
2	Kota Samarinda	Karangmumus	100
		Karangasam Besar	100
		Karangasam Kecil	30
		Loa Bakung	20
		Loa Lah	15
		Rapak Dalam	30
		Keledang	5
		Sempaja	20
		Bengkuring	15
		Palaran	30
3	Kota Bontang	Bontang	120
		Guntung	20
4	Kabupaten Paser	Longkali/Telakai	1000
		Kandilo	200
5	Kabupaten Berau	Segah	200
		Bayur	5
6	Kabupaten Kutai Karta Negara	Sungai Mahakam	100
		Medeka	200
7	Kabupaten Kutai Timur	Sungai Sanggata	500
		Sungai Bengalon	100
8	Kabupaten Kutai	Sungai Mahakam	500

No.	Kabupaten/Kota	DAS	Perkiraan Luas Genangan
	Barat		
9	Kabupaten Mahulu	Sungai Mahakam	500
10	Kabupaten PPU	Tunan	20

Sumber: Data Sektoral Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Selain disebabkan oleh faktor geografis masing-masing Kabupaten/Kota, intensifnya kegiatan pembangunan diikuti pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukannya menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya frekuensi banjir di wilayah Kaltim. Salah satu kondisi riil yang terlihat adalah banyaknya aktivitas penduduk di atas badan sungai yang menyebabkan alur sungai semakin sempit dan sedimentasi semakin intensif. Drainase perkotaan juga mengalami sedimentasi yang cukup tinggi sementara kegiatan Operasi dan Pemeliharaan belum cukup memadai.

Upaya pengendalian banjir secara struktural kerap terkendala permasalahan sosial terutama pada proses pengadaan lahan. Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan juga masih jauh dari harapan. Sejatinya jika volume sampah dan sedimentasi yang masuk ke sungai dan saluran drainase dapat dikurangi maka frekuensi kejadian banjir baik dari sisi durasi maupun tinggi genangan dapat sedikit direduksi. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hubungan antara menjaga lingkungan dengan penurunan risiko banjir merupakan upaya yang terus dilakukan dengan harapan mengurangi kebiasaan buruk masyarakat yang membawa dampak buruk bagi lingkungan.

Posisi geografi Provinsi Kalimantan Timur memberi konsekuensi wilayah ini memiliki potensi Abrasi. Hingga saat ini infrastruktur pengendali abrasi belum tersedia secara memadai. Berdasarkan hasil identifikasi terdapat 35.370 m garis pantai di Kaltim dalam kondisi kritis. Dari total panjang pantai kritis tersebut baru 9.086 m yang ditangani. Jika dikonversi menjadi luasan, wilayah pantai kritis yang belum tertangani mencapai 1.601 Ha.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1

Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036. Adapun 8 Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur yang telah menetapkan Perda RTRW Kabupaten/ Kota lebih dulu sebelum ditetapkannya Perda RTRWP, yaitu Kota Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara. Sementara untuk Kabupaten Berau, baru menetapkan Perda RTRW-nya pada November 2017 lalu. Adapun Kabupaten Mahakam Ulu yang saat ini masih berproses pengajuan Persetujuan Subtansi ke Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN.

Adanya perbedaan waktu dalam menetapkan Perda RTRW Kabupaten/Kota dengan Provinsi menyebabkan masih terdapat perbedaan dalam menetapkan peruntukan pola ruang. Terhadap perbedaan tersebut, perlu dilakukan Peninjauan Kembali (PK) dengan mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali RTRW. Adapun tabel dibawah ini .

Tabel 2.18
Data Progres Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/ Kabupaten / Kota

No	RTRW Kabupaten / Kota	Tahun PK	Progres Pelaksanaan PK RTRW											Permasalahan
			Persiapan	SK Penetapan PK	SK Tim PK	PK	Rekom PK	Revisi	Rekom Gub	Persub ATR	DPRD	Evaluasi Provinsi	PERDA	
1	Kota Balikpapan	2016	2016	√	√	2016	Revisi	2017	-	-	-	-	-	Target 2018 : Rekom Gub dan Persub ATR
2	Kota Bontang	2016	2016	√	√	2016	Revisi	2016	Tahun 2017	-	-	-	-	Proses pengajuan Persub ATR, namun terkendala belum ada keepakatan pola ruang dengan PT. PKT sebagai stakeholder di Bontang
3	Kabupaten Kutai Kartanegara	2017	2017	√	√	2017	Revisi	-	-	-	-	-	-	Sudah review RTRW tahun 2017 (kajian awal), SK Rekom Hasil PK: No 407/SK- BUP/HK/2017 tanggal 27 Desember 2017
4	Kabupaten Kutai Barat	2017	2018	√	√	2018	Revisi	2019	-	-	-	-	-	ada di presentasi Rakor BKPRD 2017 dan Surat Laporan 644/644/DPUPR- KB/IV/2018
5	Kota Samarinda	2018	2018	√	√	2018	-	-	-	-	-	-	-	PK mulai dari Februari 2018, SK Penetapan dan SK Tim sedang disusun
6	Kabupaten PPU	2018	2017	√	√	2019	-	-	-	-	-	-	-	sudah review RTRW tahun 2017 (kajian awal)
7	Kabupaten Kutai Timur	2020	Belum Masuk Waktu Peninjauan Kembali											
8	Kabupaten Paser	2019	Belum Masuk Waktu Peninjauan Kembali											TA 2018 melakukan Review RTRW (kajian awal PK)
9	Kabupaten Berau	2021	Belum Masuk Waktu Peninjauan Kembali											

Selain melakukan pengawalan terhadap Kabupaten/Kota yang melakukan penyusunan Perda RTRWK/K maupun PK RTRWK/K, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui TKPRD juga melakukan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sebagai turunan dari Perda RTRWP. Namun dalam pelaksanaannya, penyusunan dokumen RTR KSP mengalami beberapa kendala diantaranya belum tersedianya peta dasar skala rinci yang dibutuhkan, yaitu skala 1:25.000 – 1:5.000 dan perlunya melakukan penyesuaian materi teknis yang telah disusun terhadap beberapa KSP dengan mengacu pada Permen ATR/BPN Nomor 37 Tahun 2016.

Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Timur belum dapat berjalan secara optimal, dikarenakan belum menyusun dokumen terkait arahan peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, serta arahan pelanggaran sanksi sebagai kendali pada pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Untuk meningkatkan kualitas bangunan di Provinsi Kalimantan Timur, diperlukan peningkatan sistem pengawasan konstruksi bangunan. Sistem pengawasan ini terkait dengan kebutuhan sumber daya manusia tenaga ahli dan terampil yang belum terpenuhi.

Tabel 2.19
Data Tenaga Kerja dan Tenaga Ahli Jasa Konstruksi Prov. Kaltim
Tahun 2017

No	Indikator	Jumlah
1	Tenaga Kerja Konstruksi	83.247 orang
2	Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat	20.526 orang
3	Tenaga Kerja Konstruksi Belum Bersertifikat	62.721 orang
4	Jumlah Badan Usaha	5.793 orang
5	Tenaga Kerja Ahli K3	145 orang
5	Jumlah Minimal Tenaga Ahli K3	11.586 orang

Sumber: Bina Konstruksi, 2018

Data terkait sumber daya manusia tenaga ahli dan terampil yang sudah tersertifikasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.20
Sertifikasi Keterampilan dan Keahlian LPJ Kalimantan Timur
Tahun 2017

No	Kualifikasi	Jumlah
Sertifikat Keterampilan		
1	Kelas I	1.578
2	Kelas II	166
3	Kelas III	122
TOTAL		1.866
Sertifikat Keahlian		
1	Madya	1.094
2	Muda	688
TOTAL		1.782

Sumber: Bina Konstruksi, 2018

Jumlah tenaga terampil yang sudah memiliki sertifikat mencapai 1.866 orang dan tenaga ahli mencapai 1.782 orang. Selain untuk memenuhi jumlah ideal tenaga ahli, peningkatan keahlian tenaga kerja sangat diperlukan untuk mengatasi kemungkinan kegagalan pembangunan, kegagalan konstruksi, bahkan penyimpangan ke ranah hukum. Melalui UU Nomor 2 Tahun 2017, pemerintah mengharapkan jumlah tenaga ahli dan terampil meningkat melalui pembagian tugas pengembangan oleh pemerintah daerah dan kabupaten/kota.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman bertujuan untuk memastikan terpenuhinya perumahan dan kawasan pemukiman yang layak huni, terjangkau, aman dan berwawasan lingkungan bagi masyarakat. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pemenuhan perumahan dan kawasan pemukiman yang layak huni merupakan upaya pencapaian SDG's (*Sustainable Development Goal's*) yang ke-13 yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Adapun kondisi perumahan dan kawasan pemukiman di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 2.21
Luas Kawasan Pemukiman Eksisting dan Luas Kawasan Peruntukan
Pemukiman di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 (Ha)

Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Pemukiman Eksisting	Luas Kawasan Peruntukan Pemukiman
Samarinda	12.910,00	39.156
Kutai Kartanegara	9.558,62	63.928
Bontang	3.024,09	7.775
Kutai Timur	9.906,89	79.923
Berau	5.818,32	76.643
Balikpapan	8.905,67	25.318
Penajam Paser Utara	3.342,19	27.123
Paser	3.944,22	62.298
Kutai Barat	1.359,78	11.311
Mahakam Ulu	138,94	2.790
Total	58.908,76	396.265

Sumber : RTRW Prov. Kaltim 2016-2036

Luas kawasan peruntukan pemukiman mencapai 396.265 Ha. Pada tahun 2017, luas kawasan pemukiman eksisting sebesar 58.908,76 Ha atau 14,87 persen dari total luas kawasan peruntukan pemukiman. Sebagian besar kawasan pemukiman berada di Kota Samarinda (12.910 Ha) yang mencapai 21,9 persen dari total luas kawasan pemukiman.

Pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun khususnya di wilayah perkotaan memberikan dampak terhadap kebutuhan rumah yang semakin meningkat. Apabila pertumbuhan penduduk tidak diikuti oleh perkembangan perumahan maka akan terjadi *backlog* dimana seringkali angka pertumbuhan penduduk lebih besar daripada ketersediaan perumahan.

Tabel 2.22
Perkiraan Tambahan Kebutuhan Rumah di Provinsi Kalimantan Timur dari
Tahun Awal Rencana

No.	Kabupaten/kota	Tahun 2017			Tahun 2018	
		Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah	Backlog	Proyeksi Jumlah Rumah Tangga	Proyeksi Kebutuhan Rumah
1	Paser	37.056	28.363	8.693	80.863	43.807
2	Kutai Barat	21.548	17.711	3.837	32.040	10.492
3	Kutai	128.023	104.405	23.618	225.278	97.255

No.	Kabupaten/kota	Tahun 2017			Tahun 2018	
		Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah	Backlog	Proyeksi Jumlah Rumah Tangga	Proyeksi Kebutuhan Rumah
	Kartanegara					
4	Kutai Timur	17.249	12.740	4.509	139.762	122.513
5	Berau	83.549	66.413	8.800	87.973	4.424
6	Penajam Paser Utara	43.005	34.730	7.490	48.389	5.384
7	Mahakam Hulu	612	529	83	5.822	5.210
8	Balikpapan	161.892	112.086	49.806	169.106	7.214
9	Samarinda	204.605	144.370	51.069	233.001	28.396
10	Bontang	37.565	26.072	11.493	49.859	12.294
TOTAL		735.104	547.419	169.398	1.072.094	336.990

Sumber: Laporan Akhir RP3KP Prov Kaltim, 2018

Angka backlog diatas merepresentasikan kebutuhan rumah untuk keluarga yang belum memiliki rumah. Pemerintah memfasilitasi/mendorong agar setiap keluarga khususnya yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat menghuni rumah yang layak, baik dengan cara sewa/kontrak, beli/menghuni rumah milik sendiri, maupun tinggal di rumah milik kerabat/keluarga selama terjamin kepastian bermukimnya. Tantangan pemerintah dalam pengurangan backlog adalah harga rumah yang ditawarkan tidak sebanding dengan daya beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah sehingga mengakibatkan masyarakat lebih memilih bermukim di area kumuh dan tidak layak huni.

Tabel 2.23
Lokasi Kawasan Pemukiman Kumuh Provinsi
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh
1.	Balikpapan	224,86	153,5
2.	Samarinda	133,33	63,68
3.	Kutai Timur	75,93	-
4.	Bontang	73,56	47,43
5.	Kutai Kartanegara	172,67	11,68
6.	Berau	184,30	66,3
7.	Penajam Paser Utara	49,07	-
8.	Paser	10,68	10,68
9.	Kutai Barat	488,59	-
Total		1412,99	353,27

Sumber: SK Kumuh Kab Kota 2018

Total kawasan pemukiman kumuh yang berada di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan SK Bupati/Walikota sebesar 1.412,99 Ha. . Komponen-komponen pemukiman layak huni yang belum terpenuhi diantaranya adalah akses terhadap perumahan, sanitasi, jalan lingkungan dan PSU permukiman lainnya. Rendahnya akses masyarakat terhadap pemukiman layak huni juga disebabkan oleh kurang optimalnya upaya penataan pemukiman. Sampai tahun 2018, sudah tertangani 353.27 Ha dari luas kawasan kumuh yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, dan masih tersisa seluas 1.059,72 ha.

Permasalahan lain yang perlu diperhatikan dalam akses perumahan adalah kondisi rumah yang dihuni. Rumah tidak layak huni merupakan rumah yang belum memenuhi standar minimal dilihat dari kualitas jenis atap, lantai dan dinding rumah. Data mengenai rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Hingga tahun 2017 tercatat bahwa rumah tidak layak huni mencapai 51.722 unit (berdasarkan verifikasi pemda). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang tinggal dalam kondisi rumah yang tidak layak. Ketidaklayakan rumah tersebut baik dari segi kualitas fisik rumah maupun kualitas fasilitas rumah.

Tabel 2.24
Perkiraan Tambahan Kebutuhan Rumah di Provinsi Kalimantan Timur
dari Tahun Awal Rencana

No	Kabupaten/kota	Rumah Tangga Tahun 2017	Unit Rumah Tahun 2017	Backlog Tahun 2017	Rumah Tangga Tahun 2038	Demand Rumah Th 2038
1	Paser	37.056	28.363	8.693	80.863	43.807
2	Kutai Barat	21.548	17.711	3.837	32.040	10.492
3	Kutai Kartanegara	128.023	104.405	23.618	225.278	97.255
4	Kutai Timur	17.249	12.740	4.509	139.762	122.513
5	Berau	83.549	66.413	8.800	87.973	4.424
6	Penajam Paser Utara	43.005	34.730	7.490	48.389	5.384
7	Mahakam Hulu	612	529	83	5.822	5.210
8	Balikpapan	161.892	112.086	49.806	169.106	7.214
9	Samarinda	204.605	144.370	51.069	233.001	28.396
10	Bontang	37.565	26.072	11.493	49.859	12.294
TOTAL		735.104	547.419	169.398	1.072.094	336.990

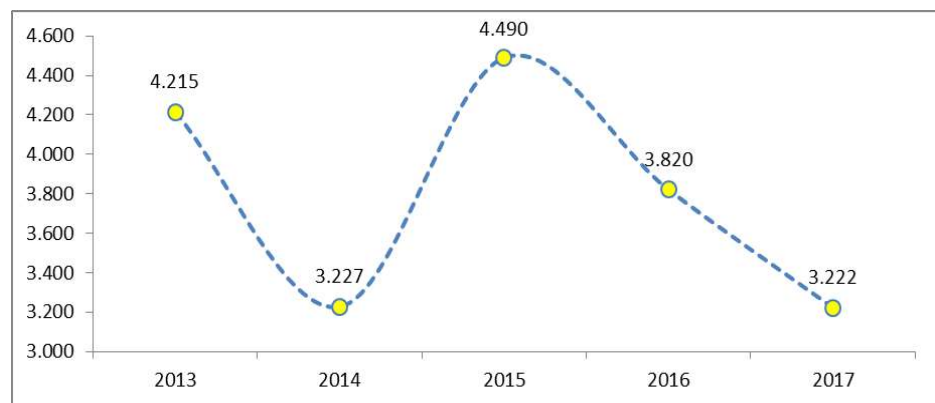
Sumber: Laporan Akhir RP3KP Prov Kaltim, 2018

Analisis backlog dilakukan untuk mengetahui jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah, dengan asumsi satu rumah tangga menempati satu rumah. Dengan demikian di Provinsi Kalimantan Timur masih dibutuhkan pembangunan rumah sebanyak 169.398 unit.

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang relatif aman dari konflik sosial. Walaupun demikian, Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan tingkat kriminalitas yang cukup tinggi dan rendahnya penanganan tingkat kebencanaan.

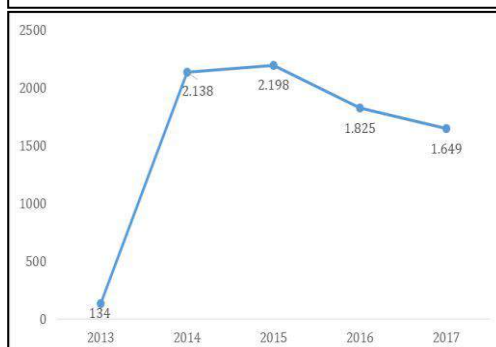
Gambar 2. 22
Jumlah Kejadian Kriminal di Kalimantan Timur



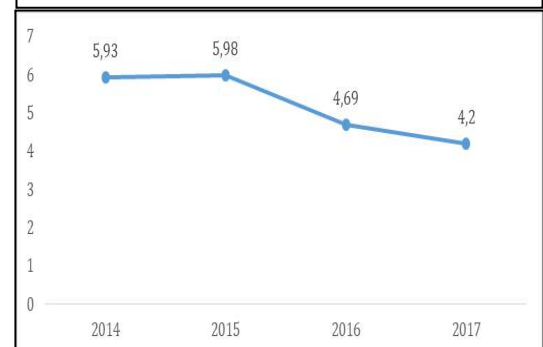
Sumber : Polda Kaltim

Permasalahan lain dalam memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat adalah kecenderungan penurunan ketersediaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Sat Linmas) di Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2. 23
Jumlah Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



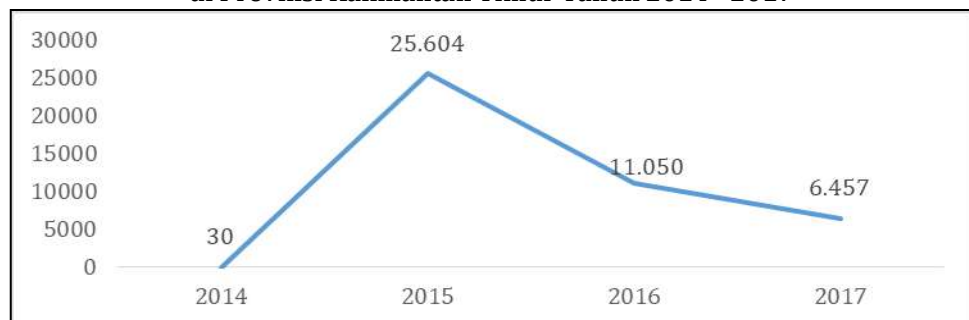
Gambar 2. 24
Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 - 2017



Sumber: Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Jumlah Satpol PP di Kalimantan Timur pada tahun 2009 hingga 2013 mengalami fluktuasi. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2014 yaitu dari 134 personil pada tahun 2013 menjadi 2.138 personil pada tahun 2014. Akan tetapi, jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017 yaitu masing-masing menjadi 1.825 dan 1.649 personil. Rasio Polisi Pamong Praja per satuan penduduk per 10.000 penduduk mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebanyak 0,84 persen, selanjutnya mengalami penurunan hingga tahun 2017.

Gambar 2. 25
Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 - 2017



Sumber: Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Begitu juga dengan jumlah petugas Linmas yang saat ini mengalami penurunan. Padahal Sat Linmas berfungsi untuk membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta membantu kegiatan sosial kemasyarakatan di desa/kelurahan.

f. Sosial

Pemerintah daerah memiliki kewajiban menyelenggarakan urusan sosial dalam pelayanan dasar. Kewajiban tersebut merupakan kepanjangan dari UU nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam prakteknya, urusan sosial lebih fokus pada penanganan dampak atau fenomena sosial yang membutuhkan intervensi sosial seperti penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Provinsi Kalimantan Timur mengalami permasalahan semakin meningkatnya jumlah penduduk penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Kondisi tersebut disebabkan oleh migrasi penduduk dari luar daerah. Kinerja pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial belum optimal karena peningkatan PMKS tidak sebanding dengan ketersediaan fasilitas pelayanan dan tenaga kesejahteraan sosial yang tersedia.

Salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah masih terdapat 54 ribu keluarga Pra Sejahtera atau keluarga sangat miskin/fakir miskin. Sebagian besar penduduk fakir miskin berada di kawasan perkotaan, yaitu di Kota Samarinda (29,0% dari total keseluruhan Kaltim), Kota Balikpapan (21,3%), dan Kabupaten Kutai Kartanegara (20,5%).

Tabel 2. 25
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Sosial
Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Jumlah PMKS	Orang	120,971	113,807	113,807	247,167	243,459	I.1
2	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	0.02	0,02%	0,02%	0.01	31.09	I.1
3	PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan	Orang	355,636	355,636	355,636	7,869	76	I.1
4	PMKS yang memperoleh bantuan Sosial	%	23,69	14,12	14,12	54,67	99,60	I.1
5	Jumlah PMKS yang ditangani	Orang	26	26	26	26	75,696	I.1
6	Banyaknya panti asuhan	Unit	134	111	118	124	125	I.1
7	Banyaknya anak yang diasuh di panti asuhan	Anak	7,368	7,296	7,296	7,256	5.469	I.1
8	Banyaknya panti wredha	Unit	4	4	4	3	4	I.1
9	Banyaknya penghuni panti wredha	Orang	200	267	277	210	210	I.1

Sumber: Dinas Sosial Prov.Kaltim

2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Koperasi dan UKM

Salah satu penunjang perekonomian masyarakat mikro adalah koperasi yang merupakan wadah kegiatan produktif masyarakat dalam perekonomian rakyat. Dalam lima tahun terakhir, perkembangan koperasi di Provinsi Kalimantan Timur cukup fluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2013, jumlah koperasi sebesar 5.916 unit dan menurun menjadi 5.184 unit di tahun 2017. Hal ini dikarenakan terjadinya pemekaran wilayah di Kalimantan Timur dan membentuk Provinsi baru yaitu Kalimantan Utara, imana ada beberapa Kabupaten/Kota yang sebelumnya berada di Provinsi Kalimantan Timur

masuk ke dalam Provinsi Kalimantan Utara. Hal itu menyebabkan Jumlah Koperasi dan juga mempengaruhi beberapa Indikator lainnya mengalami penurunan.

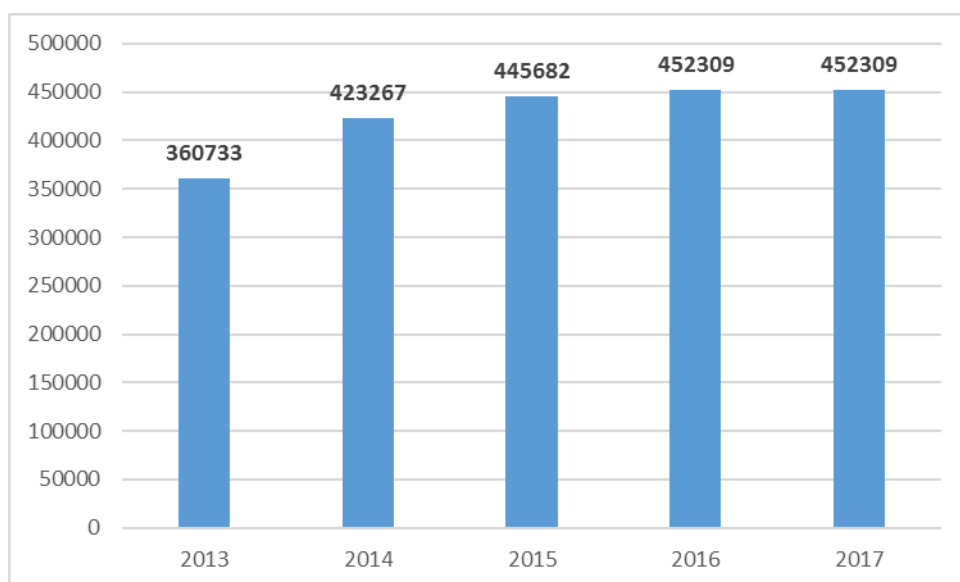
Tabel 2. 26
Perkembangan Koperasi Tahun 2013 s.d 2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Koperasi (Unit)	5,919	5,283	5,407	5,546	5,184
2	Persentase Koperasi Aktif (%)	66.73	72.7	67.99	64.08	71.05
3	Koperasi RAT (unit)	1,809	892	828	792	665
4	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT (%)	91.87	23.22	22.52	21.5	18.06
5	Jumlah Anggota (orang)	390,360	344,310	341,269	299,068	121,455
6	Modal Sendiri (Rp Milyar)	361,686	577,062	691,816	783,438	637,694
7	Modal Luar (Rp Milyar)	1,156,218	1,439,290	1,291,882	996,328	531,331
8	Volume Usaha (Rp Milyar)	1,628,842	2,298,383	2,511,087	2,186,346	1,042,484
9	Sisa Hasil Usaha (Rp Milyar)	129,230	133,415	230,980	153,682	78,493
10	Jumlah Manager (orang)	397	290	273	237	149
11	Jumlah Karyawan (orang)	7,622	5,943	5,374	6,641	2,590

Sumber : Disperindagkop Prov Kaltim tahun 2018

Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Kalimantan Timur pada tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Pada tahun 2013, jumlah UMKM sebesar 360.733 unit meningkat menjadi 452.309 unit pada tahun 2017.

Gambar 2. 26
Jumlah UMKM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2017



b. Tenaga Kerja

Produktivitas perekonomian daerah dipengaruhi oleh variabel tenaga kerja. Variabel yang dapat digunakan untuk melihat kondisi baik atau buruknya ketenagakerjaan di suatu daerah adalah angkatan kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Tingkat Kesempatan Kerja. Kinerja pembangunan bidang ketenagakerjaan di Kalimantan Timur sudah cukup baik, namun masih menghadapi permasalahan terkait daya saing tenaga kerja.

Tabel 2. 27
Capaian Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan
Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	%	15,55	40,61	22,12	20,03	22,61	11.8
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	63,53	63,48	62,39	67,79	63,75	11.8
3	Persentase penduduk bekerja terhadap usia kerja	%	58,48	58,7	57,71	62,4	59,35	11.8
4	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Orang	18,105	13,080	7,078	5,982	10,365	11.8
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Orang	292,582	322,064	385,796	358,826	449,465	11.8
6	Rasio lulusan S1/S2/S3							1.4

Sumber : BPS Prov.Kaltim dan Dinas Tenaga Kerja Prov.Kaltim

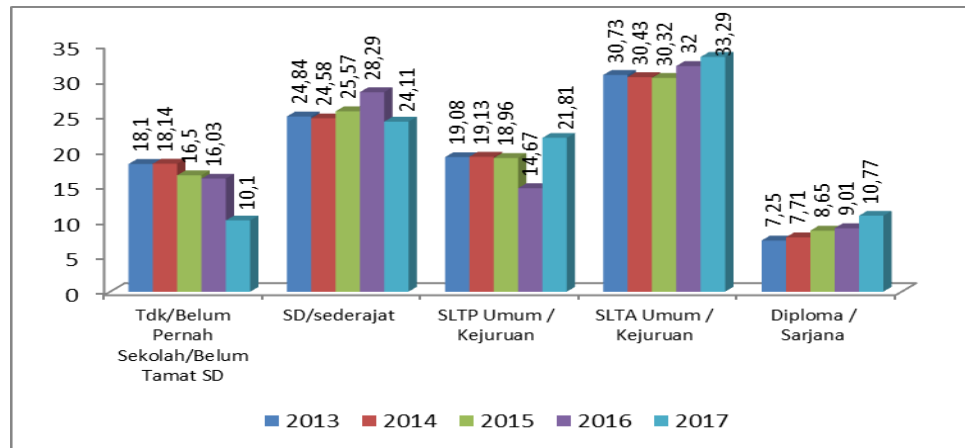
Angkatan kerja Provinsi Kalimantan Timur semakin meningkat selama 5 tahun terakhir, dengan daya saing yang rendah dilihat dari tingkat pendidikan sebagian besar hanya lulusan pendidikan menengah.

Tabel 2. 28
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama
di Kalimantan Timur, 2012 - 2017

Uraian Kegiatan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Angkatan Kerja	1.777.381	1.497.572	1.537.938	1.539.491	1.717.892	1.654.964
Bekerja	1.619.118	1.378.610	1.421.952	1.423.957	1.581.239	1.540.675
Pengangguran	158.263	118.692	115.986	115.534	136.653	114.289
Bukan Angkatan Kerja	889.718	859.778	884.603	928.020	816.221	941.028
Sekolah	246.473	263.369	271.956	272.331	203.316	247.456
Mengurus RT	557.100	526.867	521.681	560.800	535.158	612.093
Lainnya	66.145	69.542	90.966	94.889	77.747	81.479

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

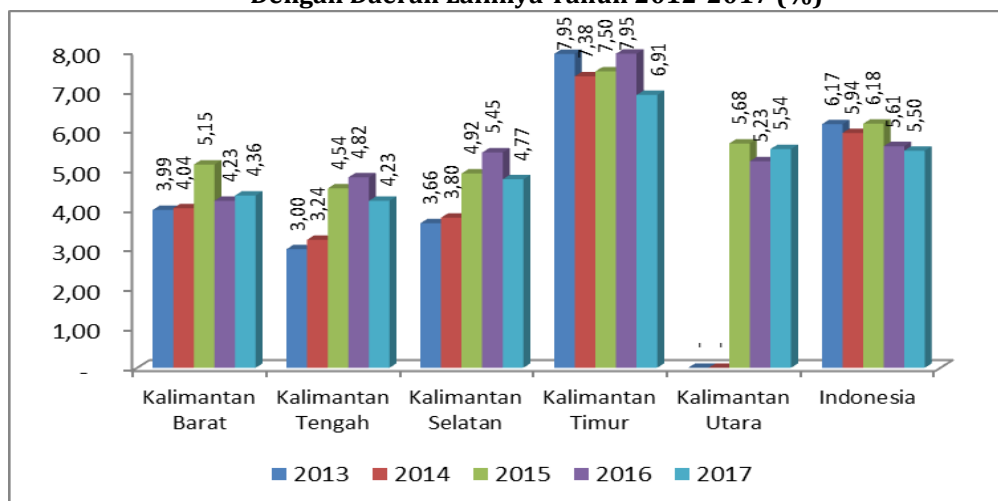
Gambar 2. 27
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (%)



Sumber : BPS Prov.Kaltim 2017

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi salah satu indikator paling penting untuk mengetahui daya saing tenaga kerja karena berkaitan dengan ketersediaan lapangan kerja dan keterampilan tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Timur lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Nasional dan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan. Pengembangan perekonomian Kaltim berimplikasi terhadap peningkatan jumlah pencari kerja yang masuk dari daerah lain, ditambah dengan kurangnya ketersediaan lapangan kerja di sektor ekonomi padat karya, hal ini semakin memperbesar tingkat pengangguran terbuka.

Gambar 2. 28
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur
Dengan Daerah Lainnya Tahun 2012-2017 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2018

c. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

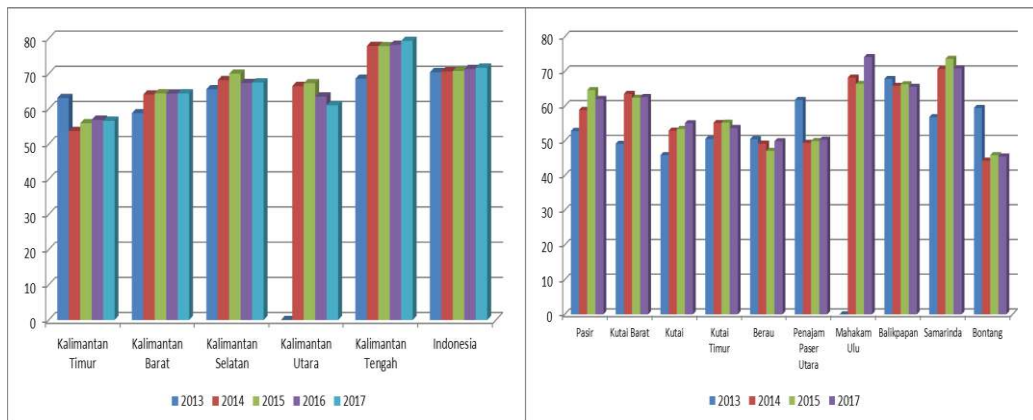
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga mempertimbangkan indikator kesejahteraan perempuan di samping IPG, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG menunjukkan tingkat partisipasi perempuan dibanding dengan laki-laki dalam berbagai aktivitas publik dan kontribusinya dalam pendapatan. Capaian IDG dihitung dari tiga aspek yaitu: keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, teknisi, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Capaian IDG Provinsi Kalimantan Timur masih lebih rendah dibandingkan dengan daerah pembanding lainnya dan Nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan pembangunan gender di Provinsi Kalimantan Timur masih belum optimal.

Tabel 2. 29
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		63.12	53.74	55.96	56.93	65.64	1.5
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		84.69	84.75	85.07	85.6	85.62	1.5
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (PNS Pemprov Kaltim)	%	39.53	39.63	40.52	39.37	44.86	1.5
4	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	%	39.95	42.26	48.93	47.69	42,33	1.5
5	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%			36.36	36.36		1.5
6	Rasio KDRT	%		12	1	7.12		1.5
7	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%						1.5
8	Banyaknya anak terlantar (0-21 tahun)	Anak	30,978	30,927	30,927	11,510		1.5
9	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	%	90.90	79.60	79.60	91.30	90.10	1.5

Sumber: BPS Kaltim dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan KB Prov.Kaltim

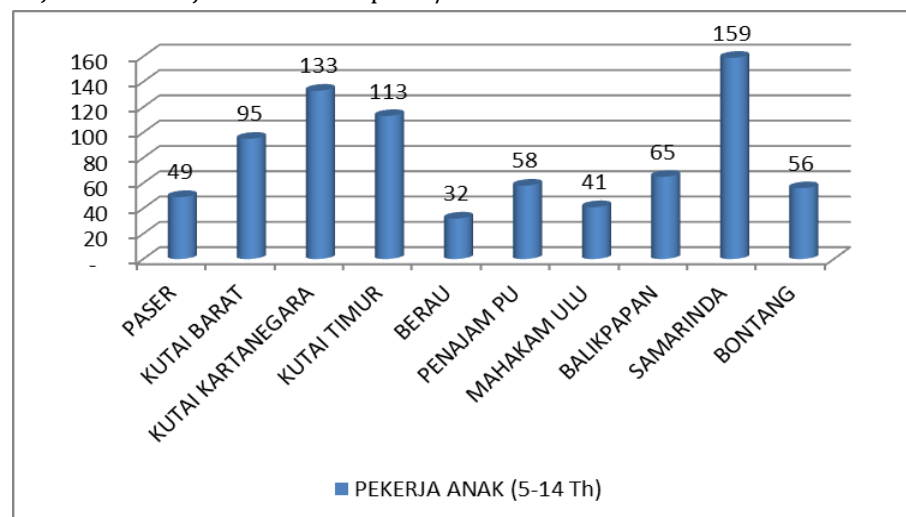
Gambar 2. 29
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota dan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (%)



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BPS Nasional

Provinsi Kalimantan Timur mengalami belum berkembangnya layanan publik ramah anak. Dari 10 kabupaten/kota, 9 daerah sudah menjadi pengembang kota/kabupaten layak anak. Sementara itu, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda memiliki jumlah pekerja anak yang cukup besar.

Gambar 2. 30
Jumlah Pekerja Anak di Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Tahun 2017



Sumber: Basis Data Terpadu, TNP2K 2017

d. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Belum optimalnya pengembangan desa mandiri, karena Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa. Faktor yang

berpengaruh adalah masih terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pendamping desa di daerah pedalaman, belum optimalnya fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna, belum optimalnya fasilitasi pelatihan dan akses pasar BUMDes, masih rendahnya koordinasi lintas sektor terhadap pembangunan desa.

Belum optimalnya fasilitasi penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, karena masih terbatasnya kemampuan memfasilitasi pelatihan bagi aparatur desa, belum optimalnya fasilitasi monitoring dan evaluasi pembangunan dan aparatur pemerintah desa.

e. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan khususnya beras dan daging di Provinsi Kalimantan belum memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Ketahanan pangan berhubungan dengan tiga aspek utama, yaitu ketersediaan pangan utama, akses atau distribusi pangan dan konsumsi pangan masyarakat. Berbagai indikator tersebut berhubungan erat dengan urusan kesehatan dan rumpun urusan ekonomi yang menjadi basis bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

Tabel 2. 30
Rasio Pemenuhan Beras/Kebutuhan Konsumsi Beras
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Produksi (GKG) (ton)	Beras Tersedia (ton)	Kebutuhan Konsumsi (ton)	Surplus/Minus (ton)	Ketersediaan (%)
1.	2013	3.275.844	439.439	275.704	373.446	-97.742	73,83
2.	2014	3.351.432	426.467	267.565	382.063	114.498	70,03
3.	2015	3.426.638	408.782	256.470	390.637	134.167	65,65
4.	2016	3.501.232	305.337	191.568	399.140	207.572	48,00
5.	2017	3.575.449	400.102	251.024	407.601	156.577	61,59

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov.Kaltim

Ketersediaan pangan terdiri dari pangan utama yang dikonsumsi masyarakat. Pada umumnya beras menjadi salah satu komponen dalam indikator tersebut. Ketersediaan pangan berkorelasi dengan stok cadangan pangan daerah. Ketersediaan pangan utama di Provinsi Kalimantan Timur

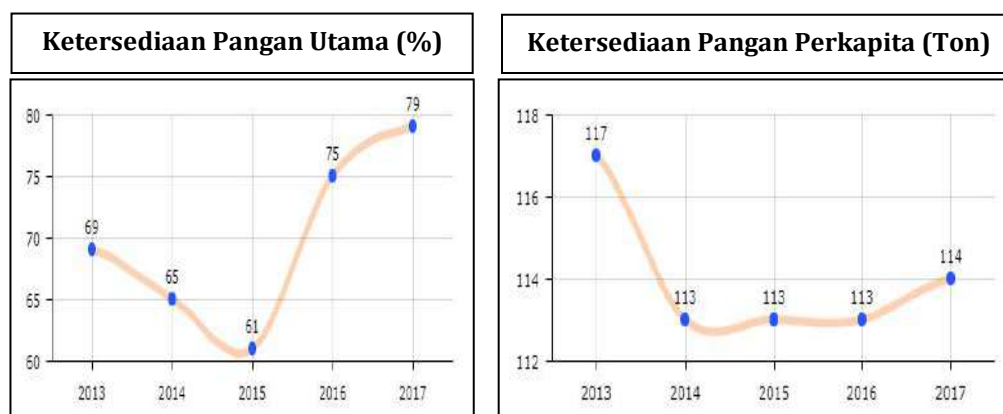
tetap harus ditingkatkan karena sebagian besar pangan utama berasal dari luar daerah.

Sampai tahun 2017, konsumsi beras per kapita di Kalimantan Timur sebesar 114 kg/kap/tahun, dan rasio pemenuhan beras lokal mencapai 61,54 % sampai tahun 2017. Pada tahun 2018 Tingkat konsumsi beras di Kalimantan Timur mengalami penurunan menjadi 89,79 kg/kap/tahun, sehingga tingkat pemenuhan beras di Kalimantan Timur pada tahun 2018 sebesar 73,53%. Tingkat konsumsi beras per kapita di Kalimantan Timur ini berada dibawah rata-rata nasional yaitu 92 kg/kap/tahun.

Stok beras di Kalimantan Timur sebagian besar berasal dari Surabaya, Sulawesi dan Kalimantan Selatan. Beras dari dalam daerah belum mampu memenuhi kebutuhan daerah dikarenakan tingkat produksi yang fluktuatif karena sebagian besar berasal dari sawah tadah hujan. Umur padi yang panjang juga menjadi penentu stok pangan beras dari dalam Provinsi Kalimantan Timur. Belum optimalnya stok cadangan pangan beras menjadi persoalan utama yang menjadi penyebab bagi ketersediaan pangan utama.

Ketersediaan pangan perkapita Provinsi Kalimantan Timur perlu menjadi perhatian utama untuk diintervensi oleh Pemerintah, karena erat dengan persoalan kemiskinan. Pemenuhan terhadap ketersediaan pangan per kapita secara merata dapat mempermudah akses masyarakat miskin terhadap pangan.

Gambar 2. 31
Ketersediaan Pangan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov.Kaltim

Penyebab lain masih rendahnya akses pangan di Provinsi Kalimantan Timur karena sulitnya distribusi pangan ke beberapa daerah. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kualitas infrastruktur ke sentra pertanian. Panjangnya rantai distribusi pangan dari luar daerah maupun ke dalam daerah juga menjadi penyebab. Lebih dari 40% pedagang mendatangkan dari luar daerah yaitu dari Jawa dan Sulawesi kemudian didistribusikan ke pedagang menengah dan pengecer atau langsung pengecer.

f. Pertanahan

Urusan pertanahan termasuk urusan yang penting dalam pembangunan daerah, terutama pada unsur aset, legalitas, hingga adanya persoalan konflik pertanahan. Adanya konflik pertanahan yang perlu menjadi perhatian di Kalimantan Timur adalah terkait batas wilayah dan konflik tumpang tindih perijinan.

g. Lingkungan Hidup

Dalam konteks rencana pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur, lingkungan hidup menjadi salah satu isu penting yang harus diselesaikan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai salah satu barometer pencapaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup. Provinsi Kalimantan Timur sangat serius dalam meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dalam lima tahun terakhir di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan.

Tabel 2. 31
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

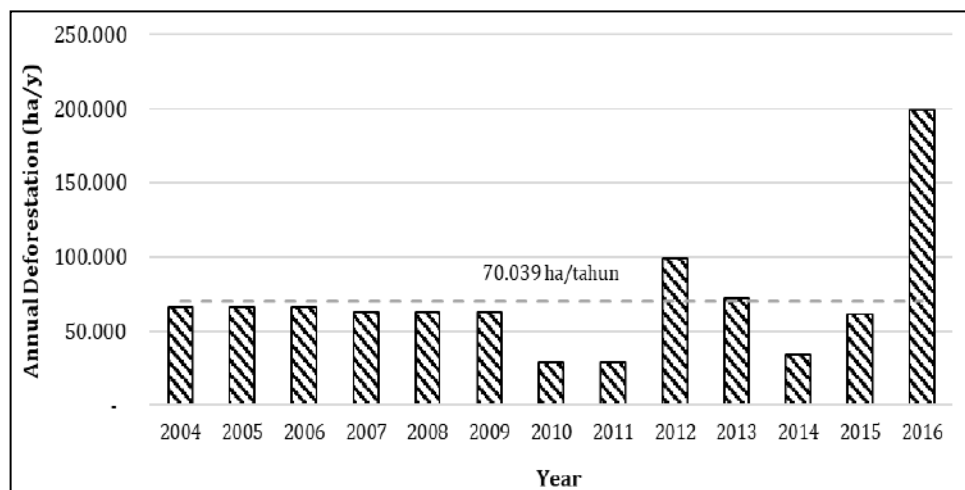
No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		72.41	75.24	81.97	83.03	82.64	
2	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	%	0.02	0.65	1.01	1.95	1.38	III.13
3	Indeks kualitas air sungai		7.59	3.04	2	3		III.14
4	Penegakan hukum lingkungan	%	86.21	86.36	100	100	100	IV.16
5	Persentase sampah terangkut per hari	%	64.61	90.33	66.43	87.51		III.11
6	Indeks Resiko Bencana							I.1
7	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	ha	45	11,160.25	181,125.00	12,740.00	104.00	III.6
8	Luas lahan terbuka tambang	ha	38,099.98	38,667.32	41,541.58	48,991.69	50,239.88	III.15
9	Luas lahan tambang yang direklamasi	ha	96,877.12	98,666.27	103,072.80	103,041.64	103,786.40	III.15
10	Emisi Gas Rumah Kaca tutupan hutan	ton CO2 Eq	10,276,303.00	23,831,368.00	31,085,172.00	19,725,868.92	19,433,145.44	III.15

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Prov.Kaltim

Kegiatan pembangunan, terutama yang bersifat fisik dan berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya alam jelas mengandung risiko terjadinya perubahan ekosistem yang selanjutnya mengakibatkan dampak yang bersifat negatif maupun positif. Oleh karena itu, aspek pelayanan umum dalam bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Timur selain mengedepankan kemajuan sosial dan ekonomi juga berwawasan lingkungan.

Indeks tutupan hutan mengalami penurunan, persoalan ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu: tingginya alih fungsi hutan dan lahan, tingginya pencemaran air akibat dari limbah domestik, tingginya pencemaran udara, dan masih tingginya angka emisi GRK. Penurunan indeks tutupan hutan sejalan dengan kenaikan semakin tingginya laju deforestasi. Laju deforestasi Kalimantan Timur menunjukkan tren kenaikan yang signifikan pada tahun 2016. Terdapat lebih dari 7 juta ha hutan yang mengalami deforestasi.

Gambar 2. 32
Deforestasi di Provinsi Kalimantan Timur



Sumber: ER-PD FCPF Carbon Fund Kalimantan Timur, 2017.

Tingginya alih fungsi hutan dan lahan yang ditandai dengan menurunnya indeks tutupan hutan dan meningkatnya laju deforestasi disebabkan oleh tiga hal, yaitu: rendahnya pengawasan kawasan lindung, tingginya bukaan lahan oleh masyarakat dan dunia usaha dan rendahnya kegiatan penghijauan dan reboisasi terutama masih rendahnya reklamasi lahan tambang dan revegetasi kawasan lindung di Kalimantan Timur.

Besarnya emisi gas rumah kaca menjadi persoalan utama yang dihadapi oleh Kalimantan Timur. Pada tahun 2013 hingga 2017 emisi GRK menunjukkan tren yang fluktuatif. Namun saat ini sudah disusun berbagai kebijakan penanganan yang melibatkan multi-pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Masih tingginya emisi GRK di Kalimantan Timur disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: masih rendahnya penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA, masih rendahnya penanaman pada area cadangan karbon rendah, masih kurangnya perlindungan area cadangan karbon tinggi, masih kurangnya Jumlah perusahaan yang memanfaatkan limbah POME dan masih kurangnya perusahaan yang menerapkan penggunaan biodiesel 20%.

Hingga saat ini Provinsi Kalimantan Timur memiliki area cadangan karbon tinggi seluas 53.000 ha, sedangkan area cadangan karbon rendah seluas 1.462.000 Ha. Pada konteks penerapan penggunaan biodiesel, hingga saat ini terdapat 2 perusahaan pertambangan yang menerapkan B20 (Biodiesel 20%) PKB2B yaitu Berau Coal dan KPC.

h. Perhubungan

Gambaran umum mengenai pelayanan perhubungan merefleksikan tingkat akses dan kualitas transportasi di suatu daerah. Bidang urusan ini memiliki fungsi utama untuk memperlancar konektivitas antar wilayah sehingga mempercepat arus mobilisasi orang/barang dan jasa di suatu wilayah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan layanan transportasi dibagi atas beberapa aspek yaitu transportasi darat, laut, sungai, danau, penyeberangan dan udara. Akan tetapi, dalam konteks pembagian kewenangan pemerintahan sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah di level provinsi berkaitan dengan urusan perhubungan lebih ditekankan pada pelayanan perhubungan darat, laut, sungai, danau dan angkutan penyeberangan. Pelayanan perhubungan di Provinsi Kalimantan Timur sudah cukup baik dilihat dari capaian kinerja pembangunan bidang perhubungan selama lima tahun terakhir.

Laju pertumbuhan penggunaan kendaraan angkutan umum cenderung menurun, jumlah pengguna angkutan umum mencapai 15,6% pada tahun 2017. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tingginya peralihan penggunaan moda transportasi dari angkutan umum ke kendaraan pribadi. Hal tersebut menyebabkan sejumlah terminal tidak mengalami peningkatan jumlah penumpang, rata pada periode 2013-2017.

Tabel 2. 32
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Perhubungan
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Jumlah Kendaraan Bermotor	unit	2,013,727	2,233,278	2,376,033	2,398,117	2,428,324	III.11
2	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Kejadian	1,094	1,228	867	667	977	I.3
3	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	m	7.81	7.09	7.12	6.89	6.51	II.9
4	Jumlah Pengguna Angkutan Umum	Orang	10,913,500	10,913,500	9,241,800	12,127,125	10.232.985	III.11
5	Jumlah penumpang angkutan laut yang turun	Orang	687,407	456,539	209,854	223,305	256,425	III.11
6	Jumlah penumpang angkutan laut yang naik	Orang	613,991	375,124	193,981	229,755	249,352	III.11
7	Jumlah penumpang angkutan udara yang datang	Orang	3,642,539	3,791,629	3,945,625	4,025,784	4,216,892	III.11
8	Jumlah penumpang angkutan udara yang berangkat	Orang	3,593,269	3,955,136	3,693,028	*		III.11
9	Jumlah penumpang yang terlayani	Orang	25,565,418	26,035,007	22,120,061	24129407	22,861,863	III.11
10	Jumlah barang	ton	1,723,350,543	834,348,907	2,637,670,927	2,440,221,930	2,329,974,117	III.11
11	Rasio ijin trayek	%	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	IV.16
12	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	145,670	145,701	145,701	152,564	152,788	IV.16
13	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	49	44	44	44	46	II.9
14	Persentase layanan angkutan darat	%	32,68	31,49	35,49	34,96	36,23	III.11
15	Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	unit	850	284	414	1,239	350	II.9
16	Persentase Pemasangan Rambu-rambu	%	6,74	2,30	3,47	11,60	3,11	II.9
17	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	%	7.81	7.09	7.12	6.89	6.51	II.9
18	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	jiwa	20,091,174	20,032,034	19,573,224	21,676,243	20,043,352	III.11

Sumber: Dinas Perhubungan Prov.Kaltim

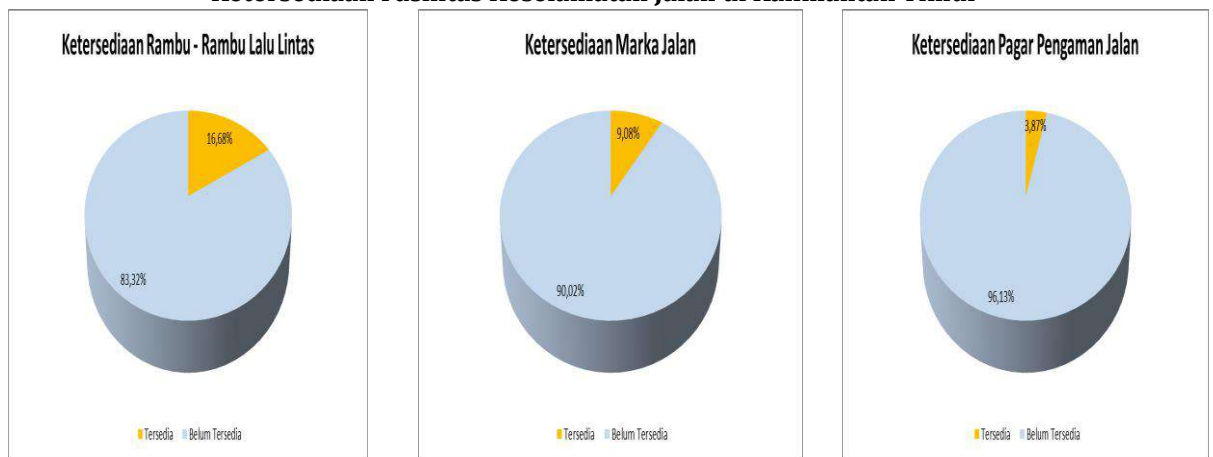
Tabel 2. 33
Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat

No.	Transportasi Darat	2013	2014	2015	2016	2017	Satuan
1.	Jumlah Terminal	23	23	23	23	23	Unit
	1. Kelas A	2	2	2	2	2	Unit
	2. Kelas B	7	7	7	7	7	Unit
	3. Kelas C	10	10	10	10	10	Unit
	4. Jumlah Orang Melalui Terminal	1.826.522	1.821.094	1.779.384	1.970.567	1.849.432	Orang
2.	Jumlah Jembatan Timbang	1	1	1	1	1	Unit
3.	Jumlah Rambu-rambu yang tersedia	851	1.135	1.549	2.472	2.822	Unit
	Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	850	284	414	923	350	Unit

Sumber: Dinas Perhubungan Prov.Kaltim

Keterbatasan jumlah jembatan timbang merupakan salah satu permasalahan yang menyebabkan daya rusak konstruksi jalan akibat lalu lintas sejumlah angkutan barang dan alat berat di atas 10 ton. Tingkat keselamatan transportasi juga sangat rendah karena bentuk trase jalan yang berkelok dan juga karena rendahnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan. Ketersediaan rambu-rambu jalan hanya 16,68% (2.669 unit) dari total kebutuhan sebanyak 16.000 unit. Sementara itu, marka jalan terbangun hanya 9,08% (201.235 km) dari total kebutuhan pada jalan sepanjang 2.215.500 km.

Gambar 2. 33
Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan di Kalimantan Timur



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Tingkat keselamatan transportasi sangat minim. Hal tersebut dapat terindikasi dari rendahnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan. Ketersediaan rambu-rambu jalan hanya 16,68% (2.669 unit) dari total kebutuhan sebanyak 16.000 unit. Sementara itu, marka jalan terbangun hanya 9,08% (201.235 km) dari total kebutuhan (2.215.500 km). Selain itu, ketersediaan pagar pengaman jalan hanya 3,87% (3.428 km) dibandingkan dengan total kebutuhan yang mencapai 88.620 km.

Akses pelayanan transportasi sungai dan penyeberangan mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2013-2017. Jumlah kendaraan roda empat yang terangkut kapal ferry meningkat 42,3%. Selain itu, jumlah orang melalui angkutan penyeberangan sungai juga mengalami peningkatan lebih dari 17% setiap tahunnya.

Ketersediaan prasarana perhubungan laut juga sudah cukup baik, upaya pengembangan pelabuhan terus berjalan sampai saat ini melalui pembangunan 4 pelabuhan laut baru yang direncanakan akan beroperasi pada tahun 2019/2020 yaitu Pelabuhan Buluminung, Pelabuhan Maloy, Pelabuhan Kenyamukan dan Pelabuhan Mantaritip. Selain itu, prasarana perhubungan laut juga dilengkapi dengan pelabuhan/terminal khusus yang jumlahnya saat ini sudah melebihi 300 unit.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki salah satu Bandar Udara Internasional terbesar di Indonesia yaitu Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian yang terletak di Kota Balikpapan, Bandara Kalimarau di Berau dan Bandara APT Pranoto di Samarinda. Bandara-bandara tersebut mampu melayani penerbangan udara menggunakan pesawat Boeing berkapasitas besar. Selain itu, aktivitas transportasi udara di Provinsi Kalimantan Timur juga ditopang oleh 6 bandara lokal. Saat ini terdapat 13 bandara yang beroperasi yang mampu melayani hampir seluruh kecamatan di dalam provinsi. Meskipun kuantitas bandara dan maskapai tidak mengalami perubahan pada periode 2013-2017, namun akses pelayanan perhubungan udara terus meningkat. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan kapasitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan jumlah penumpang pesawat udara tiba sebesar 15% selama periode 2013-2017, dan jumlah barang yang dibongkar muat meningkat lebih dari 10%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mobilitas orang/barang terus mengalami peningkatan.

Upaya pemerataan pembangunan melalui peningkatan konektivitas transportasi udara khususnya di perbatasan telah dilakukan secara serius dan komprehensif. Pembangunan bandara dengan panjang runway 1.600 m telah dilakukan di kawasan perbatasan yaitu kecamatan Data Dawai dan di Pulau kecil terluar yaitu Pulau Maratua. Selain itu, telah direncanakan pembangunan bandara perintis yang bisa melayani pesawat ringan/kecil di Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu.

i. Komunikasi dan Informatika

Seluruh masyarakat kawasan perkotaan di Kalimantan Timur telah terakses oleh layanan jaringan komunikasi dan informasi. Sementara di kawasan perdesaan masih terdapat beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan Timur yang belum memiliki akses telekomunikasi maupun informatika. Keterbatasan akses telekomunikasi disebabkan salah satunya adalah kondisi geografis yang sulit dijangkau terutama di kawasan pedalaman dan perbatasan.

Tabel 2. 34
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
10.1	Website milik pemerintah daerah	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	II.9
10.2	Persentase penduduk usia 5 thn keatas menggunakan HP	%	95.34	96.27	97.12	100	100	II.9
10.3	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	29.63	37.63	33.46	34.67	32.89	II.9

Sumber : SIDATA, Bappeda Prov.Kaltim

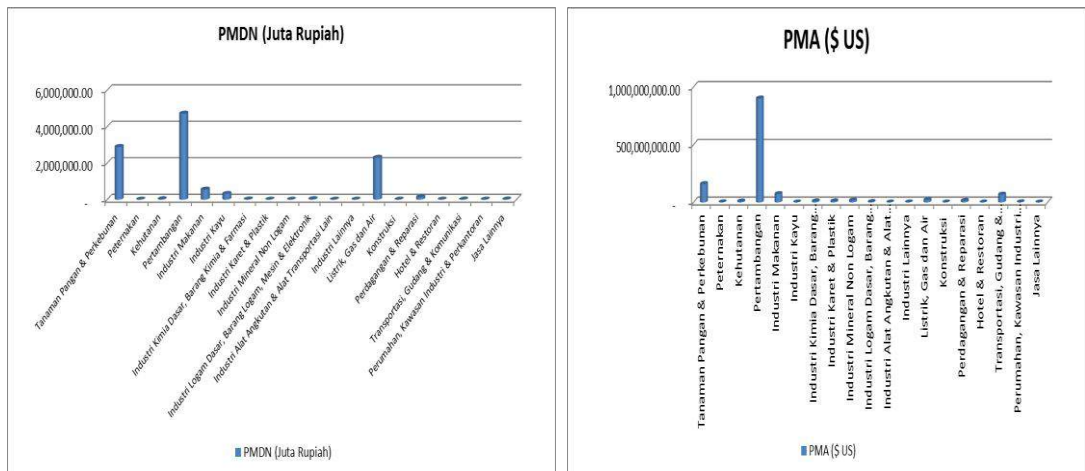
j. Penanaman Modal

Investasi di Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan realisasinya terus meningkat. Hal yang menjadi perhatian adalah sektor perkebunan dan pertambangan yang memiliki daya pikat para investor baik dalam negeri maupun luar negeri.

Tabel 2. 35
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Penanaman Modal
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Realisasi proyek PMDN	Juta Rp	18,441,377.30	12,983,049.70	9,611,313.10	6,885,124.60	10,980,216.40	II.8
2	Realisasi proyek PMA	US \$ 000	1.324.197,42	2.145.665,10	2.381.442,30	1.181.859,20	1285215.2	II.8
3	Nilai realisasi investasi	Milliar Rp	30,892	37,873	39,379	1,180,049	28,202.10	II.8
4	Rasio daya serap tenaga kerja		235.62	102.41	161.73	71.75	23.08	II.8
5	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	Milliar Rp	10,732	-5,458.32	-3,372	-2,726	4,095.09	II.8

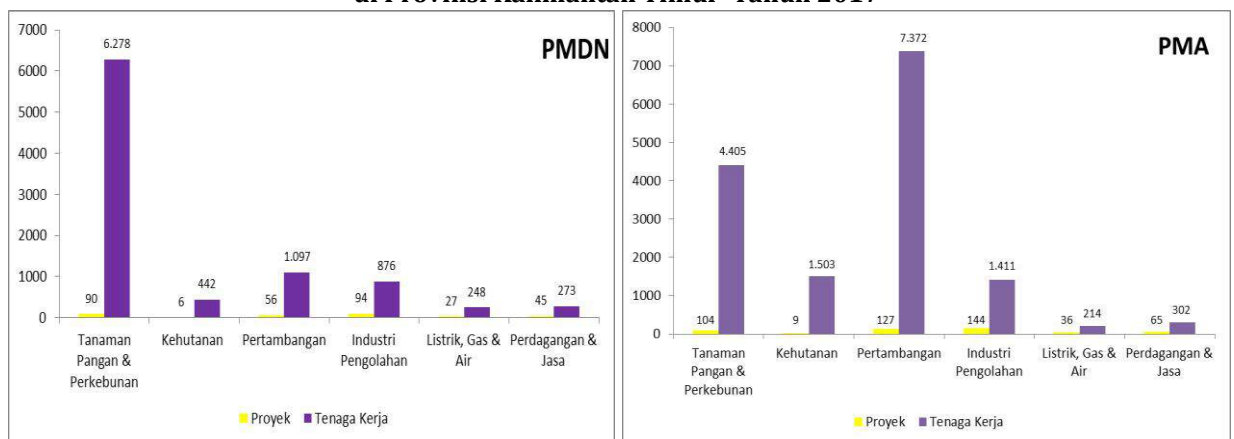
Gambar 2. 34
Realisasi PMDN dan PMA Per Sektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017



Sumber: DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Walaupun investasi di Kalimantan Timur berkembang dengan baik dan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap PDB Nasional, namun daya serap tenaga kerja dari investasi tersebut sangat rendah. Dari 3.247 proyek investasi yang dijalankan hanya menyerap 325.633 tenaga kerja dari 1,5 juta angkatan kerja yang bekerja atau 20,66 %. Investasi di bidang Perkebunan yang paling banyak menyerap tenaga kerja pada proyek PMDN, sementara Pertambangan paling banyak menyerap tenaga kerja pada proyek PMA.

Gambar 2. 35
Daya Serap Tenaga Kerja Proyek PMDN dan PMA di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017



Sumber: DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Selain permasalahan nilai investasi yang sudah berjalan, kawasan strategis Provinsi yaitu kawasan industri di Kariangau Balikpapan, Buluminung di Penajam Paser Utara (PPU), dan kawasan industri

oleochemical di Maloy Kutai Timur, yang telah disiapkan bagi pengembangan industri belum banyak investor yang memanfaatkan kawasan tesebut. Ketersediaan infrastruktur pendukung kawasan industri yang belum memadai menjadi salah satu permasalahan dalam menarik investasi di kawasan tersebut.

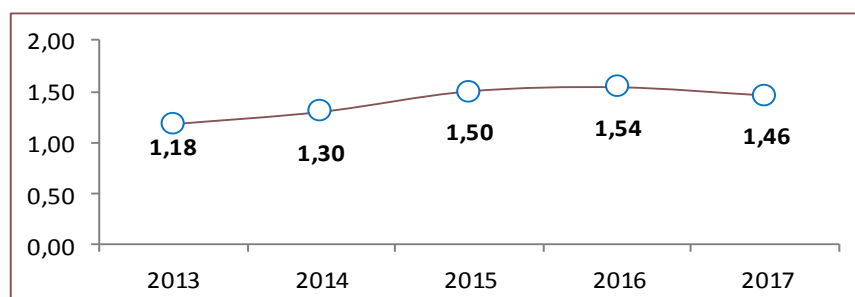
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan terdiri dari berbagai urusan seperti kelautan dan perikanan, pertanian, pariwisata dan berbagai sektor potensial lain yang berparuh terhadap berbagai indikator makro daerah. Urusan pilihan menjadi sektor pengungkit yang sangat potensial dan menjadi *leading* sektor dalam peningkatan perekonomian daerah.

a. Kelautan Dan Perikanan

Kalimantan Timur memiliki wilayah perairan yang sangat luas baik laut seluas 3,99 juta Ha maupun perairan darat dengan potensi perikanan yang juga sangat besar. Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB Kaltim selama lima tahun terakhir cenderung meningkat walaupun sedikit mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 1,46%.

Gambar 2. 36
Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka 2017

Kondisi perubahan iklim, kualitas sumber daya manusia, dan kurangnya sarana prasarana penangkapan maupun budidaya menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap produksi perikanan. Produksi perikanan selama lima tahun terakhir sangat fluktuatif dan bahkan cenderung menurun. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah sistem distribusi pemasaran hasil produksi perikanan yang tidak tercatat dan transaksi langsung di tengah laut

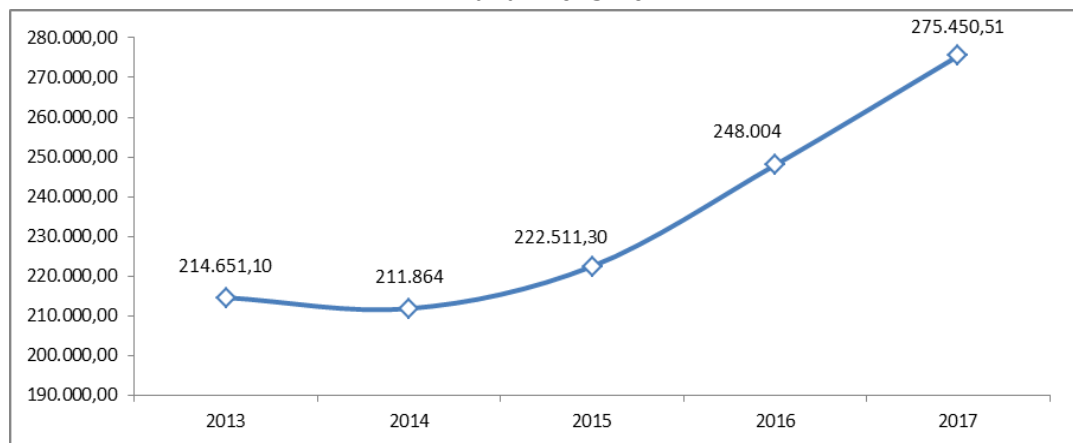
atau sungai. Permasalahan lainnya adalah pada budidaya perikanan terkait dengan perubahan kondisi fisik lahan dan kualitas sumber daya manusia pembudidaya.

Tabel 2. 36
Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Produksi Perikanan	Ton	214,651.10	211,863.50	222,511.30	248,004.20	275,450.51	II.8
2	Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB	%	1.18	1.30	1.50	1.54	1.46	II.8
3	Konsumsi ikan	Kg	1,537,874.00	837,876.00	276,047.00	278,298.00	399,055.00	I.2
4	Cakupan bina kelompok nelayan	%	5.77	6.81	8.81	3.14	3.14	II.8
5	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	42,202.50	42,273.10	40,557.90	40,558.00	37,583.00	II.8
6	Nilai tukar nelayan	%	88.98	101.46	98.38	99.89	101.37	I.1

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2. 37
Produksi Perikanan Laut dan Budidaya di Kalimantan Timur
Tahun 2013-2017



Sumber : Sidata Kaltim

b. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam menopang perekonomian daerah, karena pariwisata dapat mendorong pengembangan aktifitas ekonomi lainnya seperti perdagangan dan jasa dan layanan transportasi.

Pariwisata di Kalimantan Timur belum berkembang secara optimal. Destinasi Pariwisata cukup banyak dengan pola tersebar dan sebagian besar merupakan wisata alam. Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata di Kalimantan Timur membutuhkan biaya pembangunan yang tidak sedikit karena

wilayah yang sangat luas dan sebaran antar obyek wisata yang saling berjauhan. Namun demikian, jumlah kunjungan wisata cenderung meningkat baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.

Tabel 2. 37
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pariwisata
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

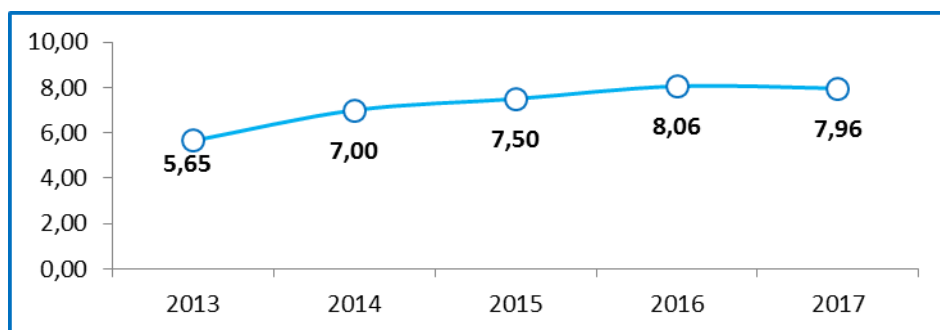
No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Jumlah wisatawan mancanegara.	Orang	32,973	53,257	49,285	45,211	58,869	11.8
2	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Orang	1,926,769	3,914,769	4,270,740	3,324,294	7,185,790	11.8
3	Kontribusi subsektor pariwisata terhadap PDRB	%	0.66	0.73	0.86	0.95	0.93	11.8

Sumber: BPS Kaltim dan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

c. Pertanian

Pertanian tidak hanya terkait peningkatan kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB, namun juga terkait kesejahteraan petani yang dinilai dengan Nilai Tukar Petani (NTP). Kinerja sektor pertanian mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Kontribusi sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terhadap PDRB Kaltim mengalami kenaikan mulai tahun 2013 hingga 2017. Walaupun relatif kecil, tetapi hal ini menunjukkan adanya pergerakan transformasi ekonomi Kalimantan Timur.

Gambar 2. 38
Kontribusi Pertanian (Dalam Arti Luas) Terhadap
PDRB Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Sumber : BPS Provinsi Kaltim

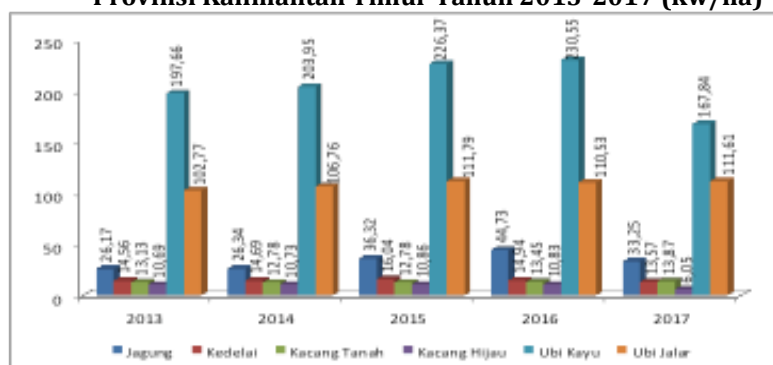
Tabel 2. 38
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pertanian
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Produksi padi	Ton	439,439	426,567	408,782	305,337	356,680	II.8
2	Produktivitas padi atau bahan utama lokal lainnya per Ha	Ton/Ha	4.27	4.25	4.12	3.80	3.78	II.8
3	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	5.65	7.00	7.72	8.22	7.96	II.8
4	Kontribusi subsektor tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB	%	0.30	0.32	0.36	0.31	0.30	II.8
5	Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB	%	2.59	3.75	3.98	4.43	4.49	II.8
6	Nilai tukar petani		95.30	99.93	98.61	98.14	97.16	I.1

Sumber: BPS Kaltim dan Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Timur

Salah satu komoditas tanaman pangan di Provinsi Kalimantan Timur adalah padi. Tingkat konsumsi beras di Kalimantan Timur cukup tinggi yaitu 84,1 kg/kap/tahun walaupun lebih rendah dari rata-rata nasional 150 kg/kap/tahun. Produksi beras lokal belum memenuhi kebutuhan pangan daerah dengan rasio pemenuhan beras lokal mencapai 61,54 % sampai tahun 2017. Permasalahan menurunnya luas tanam padi adalah kondisi fisik lahan potensial tersebar dalam kawasan konservasi hutan, alih fungsi lahan pertanian, dan terbatasnya petani. Tanaman pangan potensial di Provinsi Kalimantan Timur adalah komoditas pertanian lahan kering terutama ubi kayu, ubi jalar dan jagung.

Gambar 2. 39
Perkembangan Tingkat Produktivitas Palawija
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (kw/ha)



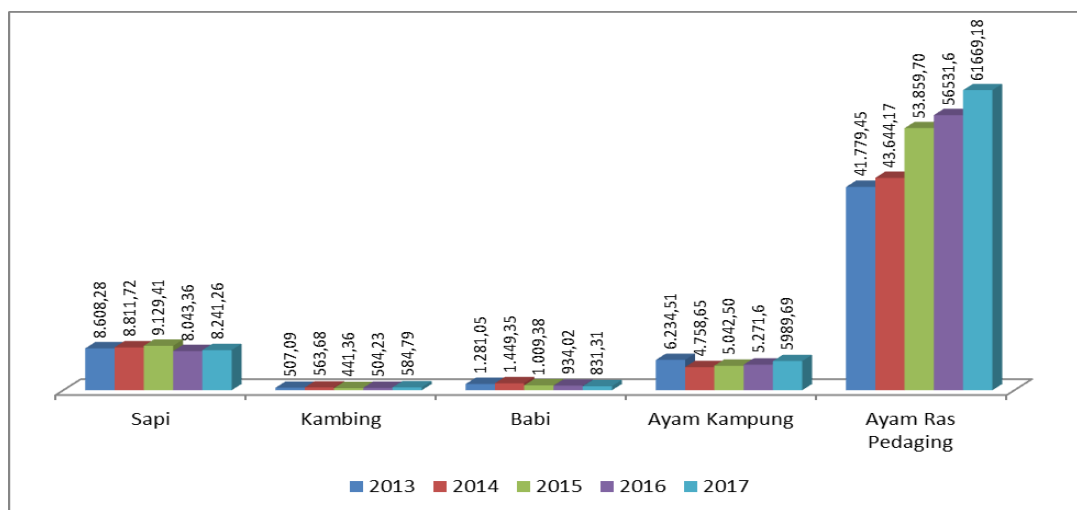
Sumber: BPS Kaltim

Sub sektor pertanian yang menjadi unggulan Kalimantan Timur adalah perkebunan. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah rendahnya

produktivitas perkebunan rakyat antara lain komoditi sawit, karet, kakao, kelapa dalam dan lada. Rendahnya produktivitas komoditi perkebunan rakyat disebabkan tanaman rusak dan keterbatasan benih unggul. Permasalahan lainnya adalah belum adanya pusat pengembangan teknologi bidang perkebunan.

Sub sektor pertanian unggulan lainnya adalah peternakan. Produksi peternakan terkait dengan cadangan pangan daerah untuk mencukupi konsumsi nutrisi masyarakat. Kalimantan Timur telah swasembada ayam dan telur.

Gambar 2. 40
Produksi Daging Komoditas Peternakan Kalimantan Timur
Tahun 2013-2017



Sumber : Sidata Kaltim

d. Kehutanan

Potensi produksi kehutanan di Kalimantan Timur mengalami penurunan seiring dengan laju deforestasi selama lebih dari satu dasawarsa. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB yang ditopang dari produksi hasil hutan kayu cenderung stagnan.

Tabel 2. 39
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Kehutanan
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB	%	1.11	1.16	1.33	1.34	1.15	II.8
2	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ha	46,896.39	84,035.54	56,224.46	42,464.21	40,901.85	III.15
3	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	Rasio	0.19	0.22	0.22	0.22	0.22	III.15

Sumber: Dinas Kehutanan Prov. Kaltim

Permasalahan yang dihadapi adalah hutan produksi belum dikelola secara arif dan efisien, semakin meluasnya areal hutan yang di berikan ijin pinjam pakai oleh Kementerian Kehutanan untuk kegiatan pertambangan. Pengelolaan kawasan hutan sampai saat ini yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat menjadi kendala dalam upaya pengendalian di daerah.

Hasil hutan produksi selama ini yang terus diharapkan adalah hasil hutan kayu, padahal pemanenan kayu kontradiktif dengan isu perubahan iklim dan *green economic*. Perlu perubahan orientasi terhadap hasil-hasil hutan non-kayu, seperti ekstraktif tumbuhan obat, energi terbarukan, jasa lingkungan dan ekowisata. Sampai saat ini belum ada regulasi tentang penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA. Hingga saat ini jumlah perusahaan IUPHHK-HA yang menerapkan metode riil-C 7 unit dari jumlah perusahaan IUPHHK-HA yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu 65 unit.

Pengolahan hasil hutan belum dilakukan dengan rangkaian yang lebih panjang dan nilai ekonomisnya yang masih rendah. Jika dikelola dengan baik, kayu log dapat diolah menjadi industri barang jadi seperti meubeler dan lain sebagainya. Rata-rata 1.6 juta m³ kayu log bahan mentah yang diekspor ke luar daerah tanpa pengolahan, sehingga nilai ekonomisnya masih rendah. Hal ini disebabkan belum adanya regulasi tentang pembatasan kayu bulat yang keluar dari Kalimantan Timur dan belum berkembangnya (diversifikasi) industri pengolahan hasil hutan kayu. Saat ini terdapat 131 unit industri pengolahan hasil hutan kayu di Provinsi Kalimantan Timur untuk kapasitas 2.000 m³ s/d 6.000

m³, 65 unit untuk kapasitas < 2.000 m³ dan 40 unit untuk kapasitas ≥ 6.000 m³. Peningkatan nilai tambah pengolahan hasil hutan kayu memerlukan regulasi yang mewajibkan stakeholder untuk mengolah hasil kayunya di Kalimantan Timur. Pada sisi lain, industri hasil hutan selama ini hanya fokus pada hasil kayu, belum mengarah pada limbah kayu, misalnya peluang mengembangkan Eucalyptol (minyak dari daun HTI Eucalyptus) yang selama ini justru hanya menjadi limbah di HTI di Kalimantan Timur. HTI Eucalyptus setiap tahunnya dipanen seluas sekitar 15.000 ha.

Akses masyarakat di sekitar kawasan hutan juga belum memadai dalam mendukung pengelolaan hutan lestari (perhutanan sosial). Kurangnya sosialisasi dan keterlibatan masyarakat disekitar kawasan hutan menjadi akar masalah dari persoalan tersebut. Di sisi lain areal penanganan masing-masing kawasan terlalu luas.

Menurunnya produksi kehutanan juga disebabkan oleh Penegakan hukum terhadap pelaku penebangan kayu liar belum dapat ditangani dengan lebih sistematis. Jumlah kasus *illegal logging* mengalami kenaikan dari tahun 2015 hingga 2017. Belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku penebangan kayu liar disebabkan oleh belum optimalnya pengendalian dan pengawasan hutan.

Persoalan ini diperparah oleh laju deforestasi dan degradasi hutan yang menyebabkan meningkatnya jumlah emisi di Kalimantan Timur. Deforestasi hutan di Kalimantan Timur rata-rata sebesar 70.039 Ha/tahun, dan degradasi hutan sebesar 16.236 Ha/tahun. Deforestasi di Provinsi Kalimantan Timur disebabkan oleh alih fungsi lahan untuk pertambangan dan perkebunan sawit. Terdapat ijin HGU pada kawasan hutan seluas lebih dari 600.000 ha, dan lebih dari 3 juta Ha ijin pinjam pakai pertambangan. Pemanfaatan hutan tanpa kendali menjadi kawasan perkebunan, pemukiman, infrastruktur, penambangan akan berdampak terhadap penurunan kapasitas penyerapan dan penyimpanan CO₂, di samping juga akan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan lainnya terutama menurunnya fungsi hidroorologis serta punahnya flora dan fauna.

Degradasi yang signifikan di Kalimantan Timur sebagian besar terkait dengan kegiatan penebangan di hutan alam (IUPHHK-HA) dari tahun 2006 sampai 2015, tingkat degradasi rata-rata yang disebabkan oleh penebangan di

Kalimantan Timur adalah 65.395 Ha per tahun dengan 3.381 Ha per tahun lebih lanjut terdegradasi dalam perkebunan kelapa sawit. Selain masalah emisi, deforestasi dan degradasi hutan menyebabkan berkurangnya fungsi hutan sebagai penangkap air, sehingga kegiatan tersebut dapat menyebabkan berkurangnya wilayah tangkapan air. Hal ini dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berkurangnya kuantitas dan kualitas air di berbagai daerah sebagai sumber mata air baku.

Penanganan kerusakan tanah pasca penebangan hutan belum tertangani melalui program reboisasi terus menerus. Permasalahan belum tertanganinya kerusakan tanah pasca penebangan hutan melalui program reboisasi disebabkan oleh kemampuan untuk merehabilitasi lebih rendah dari kemampuan penebangan, baik kemampuan pendanaan maupun sumber daya manusianya. Luas lahan kritis di Provinsi Kalimantan Timur saat ini telah mencapai 7,78 juta Ha. Program reboisasi dijalankan melalui dana DBH-DR melalui anggaran pemerintah pusat dan daerah. Disamping itu, terdapat berbagai skema rehabilitasi hutan dan lahan dan salah satunya dari program Rehab DAS yang dilakukan oleh pemilik ijin pinjam pakai dan beberapa program rehabilitasi dalam skema perubahan iklim.

Kawasan hutan lindung belum berfungsi optimal sebagai penyeimbang lingkungan hidup serta perlindungan keanekaragaman hayati. Masalah tersebut disebabkan oleh penataan batas kawasan hutan lindung yang belum tuntas oleh Kementerian Kehutanan, walaupun pengelolaan berada di pemerintah daerah. Luas hutan lindung mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2013 hingga 2017. Diperlukan penegakan regulasi yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan tersebut secara efektif.

e. Energi dan Sumberdaya Mineral

Pemerintah provinsi memiliki kewenangan yang cukup besar di bidang urusan Energi dan Sumber Daya Mineral. Kinerja bidang urusan Energi dan Sumberdaya Mineral meliputi ketenagalistrikan, pertambangan minyak, gas bumi, batu bara dan sumber daya mineral lainnya.

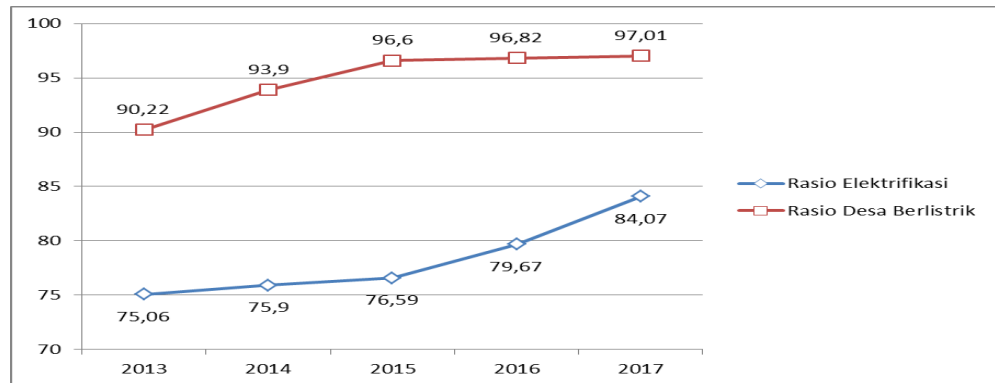
Tabel 2. 40
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

N	INDIKATOR DAERA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
4.1	Kontribusi pertambangan penggalan terhadap PDRB	%	55.21	50.21	45.03	43.17	46,31	II.8
4.2	Rasio ketersediaan daya listrik	Rasi	159.35	174.83	184.48	169.04	202.87	II.7
4.3	Rasio rasio KK	%	75,06	75,	76,59	79,67	84,07	II.7
10.	Daya listrik yang diproduksi	MWh	2,666,440.00	2,930,573.00	3,110,17	3,286,00	3,230,40	II.7
10.	Jumlah pelanggan	Oran	663,58	736,59	791,55	842,00	904,93	II.7

Pertambangan masih menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar di Provinsi Kalimantan Timur, namun demikian Kalimantan Timur mengedepankan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis sektor non-tambang. Geliat industri ekstraktif mengalami pelambatan dalam beberapa tahun terakhir, dengan terjadinya penurunan tingkat produksi beberapa komoditi pertambangan. Total produksi gas alam dan batubara yang menjadi sumber utama pertambangan mengalami penurunan pada periode 2013-2017 masing-masing sebesar 36,5% dan 3,9%. Sementara itu, produksi minyak bumi dan LNG juga mengalami penurunan sebesar 23,7%. Menurunnya harga pasar dunia beberapa produk pertambangan sangat berpengaruh pada produktifitas pertambangan di daerah.

Ketenagalistrikan adalah infrastruktur dasar yang menjadi fondasi bagi kegiatan ekonomi di berbagai sektor potensial, khususnya industri. Kondisi ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren yang semakin membaik. Namun tetap memerlukan upaya peningkatan agar akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan dapat berjalan dengan optimal. Sebagian besar masyarakat mengakses listrik non-PLN, mencapai 64% dari total keluarga. Hanya 12,16% keluarga yang telah mengakses listrik PLN dan 13,84% belum memiliki akses listrik. Pada tahun 2017, rasio elektrifikasi hanya mencapai 84,07% lebih rendah dari capaian nasional 92,75%.

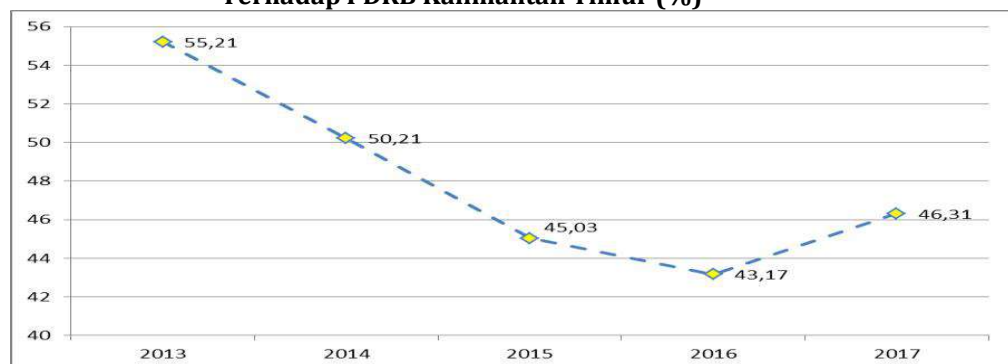
Gambar 2. 41
Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik di
Provinsi Kalimantan Timur



Sumber: *sidata.kaltimprov.go.id*, 2018

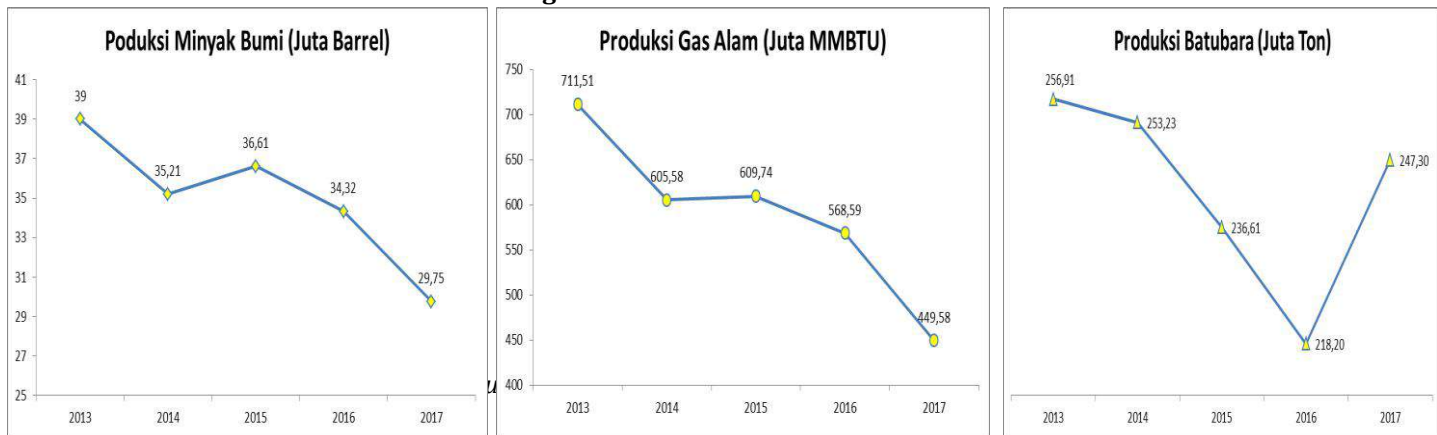
Kualitas instalasi listrik non-PLN yang terpasang sebagian besar belum sesuai dengan standar keamanan. Rata-rata listrik non-PLN hanya beroperasi selama 6 jam setiap harinya. Daya listrik non-PLN yang dialirkan berasal dari PLTS, PLTD, PLTU dan PLTG. Hal tersebut berarti cakupan layanan PLN di Provinsi Kalimantan Timur masih perlu ditingkatkan. Penyediaan listrik di wilayah Terpencil, Tertinggal dan Terluar (3T) melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) belum optimal karena lemahnya kemampuan masyarakat dalam pemeliharaan.

Gambar 2. 42
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian
Terhadap PDRB Kalimantan Timur (%)

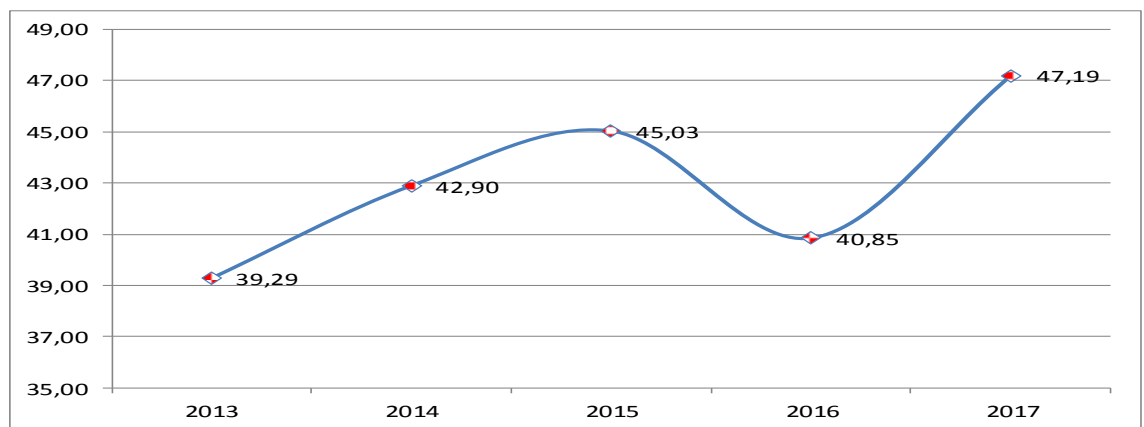


Sumber : *BPS Kaltim*

Gambar 2. 43
Kondisi Sektor Pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Gambar 2. 44
Persentase Area Direhabilitasi dari Lahan Terganggu



Sumber: sidata.kaltimprov.go.id, 2018

f. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kaltim lebih kecil dibandingkan dengan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Persoalan ini disebabkan oleh masih belum optimalnya daya saing produk dan masih terbatasnya pasar produk, karena kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk belum optimal dan belum luasnya jangkauan jaringan perdagangan.

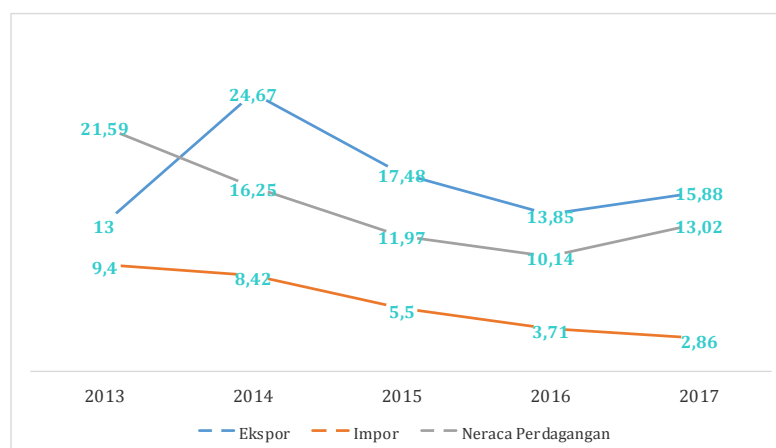
Kinerja perdagangan sangat dipengaruhi oleh nilai transaksi, kerjasama pemasaran, pelaku usaha, dan nilai ekspor. Selama periode 2013-2017, neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan neraca positif karena nilai ekspor lebih besar dari nilai impor. Sementara dilihat dari pertumbuhan mengalami surplus perdagangan.

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Perdagangan
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Kontribusi subsektor perdagangan terhadap PDRB	%	4.29	4.58	5.12	5.53	5.30	II.8
2	Nilai ekspor	Ribu USD	31,003,083	24,673,182	17,483,274	13,854,373	17,532,855	II.17
3	Nilai impor	Ribu USD	9,512,101	8,471,495	5,506,226	3,711,080	3,228,306	II.17
4	Ekspor bersih perdagangan	Ribu USD	21,490,982	16,201,687	11,977,048	10,143,293	14,304,549	II.17

Sumber : BPS Kaltim

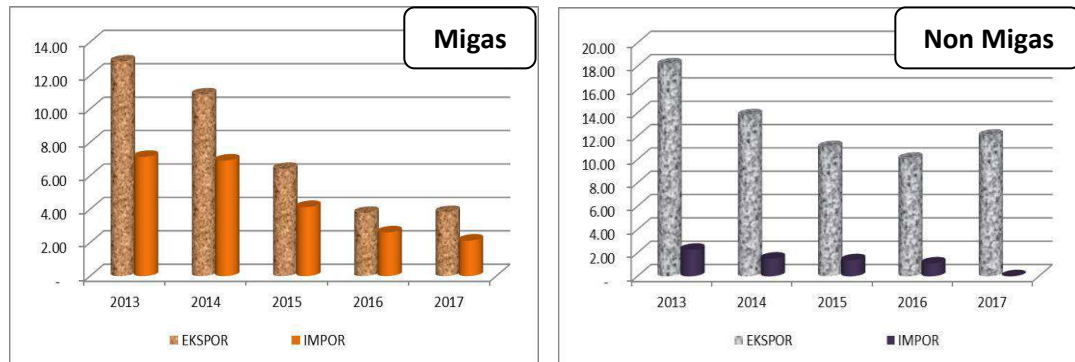
Gambar 2. 45
Nilai Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Sumber: BPS Kaltim

Selama periode tahun 2013-2017, tren pertumbuhan nilai ekspor menunjukkan peningkatan baik dari sektor migas ataupun non migas. Nilai ekspor migas meningkat sebesar 0,05 persen, sementara non migas meningkat sebesar 1,98 persen. Komoditi terbesar yang menyumbang nilai ekspor berasal dari produksi mineral. Sementara tren pertumbuhan nilai impor mengalami penurunan pada tahun 2017. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan di sector migas yaitu sebesar 0,49 dari 2,61 menjadi 2,12 pada tahun 2017. Sementara non migas data yang diperoleh tahun 2017 dari BPS belum valid karena berjumlah sebesar 742,65. Barang impor Provinsi Kalimantan Timur sebagian besar adalah golongan barang Minyak & Gas, dimana dari tahun ke tahun impor migas selalu lebih besar dari non migas.

Gambar 2. 46
Nilai Ekspor dan Impor Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013-2017 (Juta US)

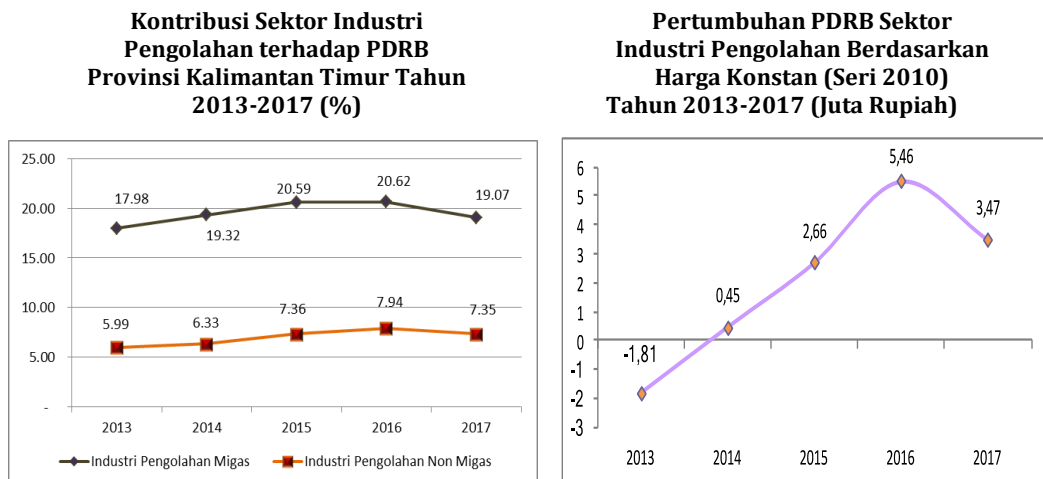


Sumber: BPS Kaltim

g. Perindustrian

Perindustrian merupakan sektor potensial kedua penyumbang terbesar dalam perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur. Pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan mengalami peningkatan rata-rata 2,85 persen selama lima tahun terakhir, namun kontribusinya terhadap PDRB Kaltim cenderung menurun. Rendahnya kontribusi Industri pengolahan non migas disebabkan tingkat produksi dan daya saing produk masih rendah.

Gambar 2. 47
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Perindustrian
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Sumber: BPS Kaltim

Sebagian besar produk pengelolaan sumber daya alam Kaltim diekspor dalam bentuk bahan mentah, integrasi proses hulu hilir dan antar sektor belum berjalan. Industri Kecil Menengah (IKM) di Kalimantan Timur masih belum berkembang dengan baik. Sentra industri kecil menengah tercatat 8.314 unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 22.033 orang. Jumlah IKM

yang berorientasi ekspor hanya 15 unit. Industri kecil menengah masih didominasi oleh industri pangan. Pengembangan IKM dihadapkan pada permasalahan belum adanya regulasi pembatasan ekspor bahan mentah, kualitas sumber daya manusia, dan daya saing produk.

Tabel 2. 42
Komoditas Produk Unggulan Industri Pengolahan di Kalimantan Timur

No.	Komoditas	Lokasi
1	Kayu Lapis (plywood), Mdf	Samarinda, Balikpapan, PPU, Kukar
2	Udang Beku	Balikpapan, Kukar
3.	Pengolahan kayu/sawmill	Samarinda, Balikpapan, Kukar, Berau, Paser, Kutim
4	Crude Palm Oil	Kukar, Paser, Kutim
5	Galangan Kapal	Kukar, Paser, Samarinda, Balikpapan
6	Pupuk urea & Amoniak	Bontang
7	Moulding	Samarinda, Balikpapan, Kukar
8	Gas, Methanol, Hexamethylene Tetramine, Melamine	Bontang
12	Pengolahan Lem	Samarinda, Bontang
13	Pengolahan Minyak Kelapa	Penajam Paser Utara
14	Pulp/Kertas	Berau
15	Pengolahan Rotan	Paser, Balikpapan
16	Kulit Buaya	Balikpapan
17	Kain Tenun Ulap Doyo	Kutai Kartanegara
18	Garmen	Balikpapan

Sumber: Dinas Indakop Provinsi Kalimantan Timur, 2018.

Komoditas unggulan yang mendominasi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur adalah komoditas kelapa sawit, akan tetapi industri pengolahan yang telah dikembangkan hanya sampai pada produk *Crude Palm Oil (CPO)*. Lima komoditas utama yang perlu dikembangkan secara prospektif dan potensial untuk industri pengolahan adalah Kayu, Batubara, Kelapa Sawit, Kakao dan Karet.

2.3.3 Fokus Urusan Penunjang

a. Perencanaan Pembangunan

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang telah ditetapkan baik sebagai Peraturan daerah maupun Peraturan Kepala Daerah merupakan acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan dan evaluasi terhadap pencapaian keberhasilan pembangunan di Kalimantan Timur. Kualitas perencanaan pembangunan daerah Kalimantan Timur sudah cukup baik dan mampu bersaing secara nasional. Kalimantan Timur telah

berhasil memperoleh penghargaan nasional sebagai salah satu provinsi berprestasi dalam perencanaan pembangunan, melalui Anugerah Pangripta Nusantara (APN) dengan peringkat kedua terbaik nasional. Walaupun demikian, Kalimantan Timur masih dihadapkan pada permasalahan inkonsistensi perencanaan dengan penganggaran di setiap perangkat daerah dan kabupaten/kota. Sebagian besar perangkat daerah masih belum konsisten dalam merencanakan dan mencapai target kinerja terutama pada program dan kegiatan.

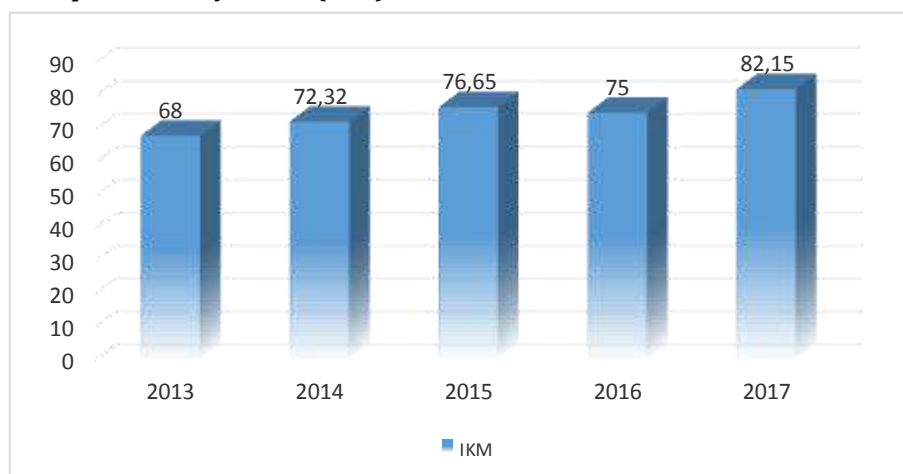
Tabel 2. 43
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	IV.16
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	IV.16
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	IV.16
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada	IV.16
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	%	-	-	-	97.00	99.28	IV.16
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	%	-	-	-	97.00	99.28	IV.16
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	-	-	-	95.15	96.32	IV.16

b. Kualitas Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan untuk merefleksikan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai IKM menunjukkan semakin tingginya kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi semakin meningkat. Artinya secara keseluruhan kualitas pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Timur semakin meningkat.

Gambar 2. 48
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (%)



Sumber: SIDATA, Bappeda Kaltim

Meskipun demikian, masih ada persoalan lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah terutama terkait dengan kontrol terhadap kegiatan survai IKM yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Saat ini, kontrol terhadap survai IKM belum berjalan optimal. Persoalan ini diindikasikan dengan masih adanya hasil survai yang tidak dikembalikan atau diserahkan kepada OPD pengampu yaitu Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Selain itu, persoalan lain juga berkaitan dengan belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur terdapat 9 (Sembilan) SPM, sementara di tingkat Kabupaten/Kota terdapat 15 (lima belas) SPM. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum yang mengatur secara jelas dan menyeluruh terkait dengan ruang lingkup dan pelaksanaan SPM, Pemerintah Daerah diharapkan dapat menerapkan SPM baik di kabupaten/kota maupun internal perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur.

c. Keuangan

Urusan keuangan merupakan salah satu urusan yang paling penting karena menjadi penopang penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu indikator untuk mengukur keuangan daerah adalah kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal merupakan gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah. Indeks Kapasitas Fiskal diperoleh dengan membandingkan kapasitas fiskal suatu daerah terhadap kapasitas fiskal seluruh daerah. Capaian indeks kapasitas fiskal Provinsi Kalimantan Timur termasuk kategori tinggi.

Tabel 2. 44
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Opini BPK		WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	IV.16
2	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		5,20	4,90	5,58	5,58	5,56	IV.16
3	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	%	-2.29	-2.96	-20.27	-11.26	1.95	IV.16
4	Persentase SILPA terhadap APBD	%	10.00	8	11.74	4.86	8.23	IV.16
5	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	Program (%)	7.39	9.43	0.82	12.43	0.46	IV.16
		Kegiatan (%)	12.43	13.22	0.72	8.60	0.60	
6	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	3.79	4.28	3.10	2.71	5.26	IV.16
7	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	5.80	5.41	6.90	10.98	9.54	IV.16
8	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak	BL (%)	49.87	45.99	43.71	47.47	36.95	IV.16
		BTL (%)	50.13	54.01	56.29	52.53	63.05	
9	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	18.23	21.09	25.03	18.51	23.81	IV.16
10	Penetapan APBD	Tepat Waktu / Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	IV.16
11	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	%	50,60	59,04	52,30	50,46	56,25	IV.16

Sumber : BPKAD Prov.Kaltim

Kalimantan Timur berupaya untuk mencapai kemandirian fiskal melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), karena dana perimbangan cenderung semakin menurun. Selama lima tahun terakhir PAD Kaltim semakin meningkat dan pada tahun 2017 telah mencapai 55,88 persen dari total pendapatan daerah. Namun peningkatan PAD tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Badan Usaha Milik Daerah yang ada belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, Kalimantan Timur perlu upaya keras untuk melakukan transformasi sumber-sumber PAD lainnya secara bertahap, melalui peningkatan kapasitas dan kinerja BUMD, serta pengembangan nilai tambah sektor ekonomi non migas dan batu bara yang berkelanjutan seperti industri pengolahan, pariwisata, perikanan dan pertanian.

d. Akuntabilitas

Salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah prinsip akuntabilitas. Sistem akuntabilitas yang baik menunjukkan berjalannya sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan, hingga evaluasi dan pelaporan dengan baik. Opini BPK merupakan

salah satu indikator penting untuk melihat capaian akuntabilitas perencanaan, penggunaan, dan pelaporan anggaran suatu daerah.

Laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur semakin membaik dan telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2014 sampai 2017. Meskipun demikian, Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan aset daerah terutama terkait dengan belum optimalnya identifikasi dan pengelolaan asset-asset daerah. Hal ini terjadi karena adanya pelimpahan wewenang berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Selain itu, persoalan lain juga berkaitan dengan belum seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki status opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian, masih terdapat 2 (dua) Kabupaten yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Mahakam Ulu.

Selain opini BPK, peringkat EKPPD juga menjadi salah satu gambaran akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peringkat EKPPD atau Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan penilaian terhadap dokumen LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) untuk melihat kualitas pelaksanaan otonomi daerah. Peringkat EKPPD Provinsi Kalimantan telah mencapai status skor sangat tinggi dengan peringkat ke tiga nasional. Tingkat akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga dapat dilihat melalui hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan Evaluasi AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 mendapat predikat BB dengan skor 77,49. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semakin meningkat. Untuk meningkatkan kinerja akuntabilitas pemerintah daerah, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai SAKIP, yaitu meningkatkan konsistensi penentuan indikator perencanaan program dan kegiatan di setiap perangkat daerah.

e. Keterbukaan informasi publik

Pemerintahan yang transparan adalah pemerintahan yang menerapkan salah satu prinsip-prinsip *governance*. Salah satu indikator untuk mengukur transparansi daerah adalah keterbukaan informasi publik.

Tabel 2. 45
Peringkat Keterbukaan Informasi Publik
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	Tahun	Peringkat	Nilai
1	2013	5	62,88
2	2014	3	91
3	2015	3	81,18
4	2016	3	88,17
5	2017	8	-

Sumber: Laporan Tahunan KIP 2012-2016

Walaupun akses terhadap informasi di Provinsi Kalimantan Timur sudah berjalan semakin baik yang diindikasikan dengan semakin mudahnya mendapatkan data atau informasi capaian pembangunan daerah di website pemerintah, Indeks keterbukaan informasi publik Kalimantan Timur mengalami penurunan dari peringkat ke 3 menjadi peringkat ke 8 nasional. Permasalahan tersebut terjadi karena belum optimalnya kelembagaan informasi, yaitu Komisi Informasi Publik (KIP).

f. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu urusan yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah. Urusan ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik maupun penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, diperlukan pembinaan PNS dan peningkatan kualitas SDM aparatur.

Persentase pembinaan PNS dan peningkatan kualitas SDM di Provinsi Kalimantan Timur masih belum optimal. Perkembangan ASN yang mengikuti Diklat baik diklat formal maupun diklat struktural cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut memerlukan adanya kebijakan peningkatan diklat pegawai melalui optimalisasi penerapan standar kompetensi, peningkatan sistem administrasi kepegawaian, optimalisasi kelembagaan perangkat daerah, dan optimalisasi pelaksanaan lembaga sertifikasi.

Tabel 2. 46
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
3.1	Jumlah PNS	Orang	7,235	7,163	7,234	6,525	11,566	IV.16
3.2	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Hari	68.00	57.00	61.00	63.00	49.00	
3.3	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	1.90	1.70	1.50	1.80	0.60	
	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	%	99.00	80.00	40.00	70.00	33.00	
3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	61	62	62	61	56	IV.16
3.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	310	310	299	300	280	IV.16
3.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	1,422	1,611	1,695	1,455	4,985	IV.16
3.7	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Skor	68.00	70.00	75.00	80.00	81.56	IV.16
3.8	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	%	5.68	11.99	11.08	11.20		IV.16

Sumber: BPSDM Kaltim

g. Penelitian dan pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan merupakan salah satu urusan yang krusial bagi penyelenggaraan pemerintah daerah. Urusan ini menyediakan instrumen perumusan kebijakan daerah melalui aktivitas ilmiah.

Tabel 2. 47
Uraian Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

No	Uraian	Capaian
1.	Implementasi Rencana Kelitbangan	100 %
2.	Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	87%
3.	Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	100 %
4.	Kebijakan Inovasi yang Diterapkan	100 %

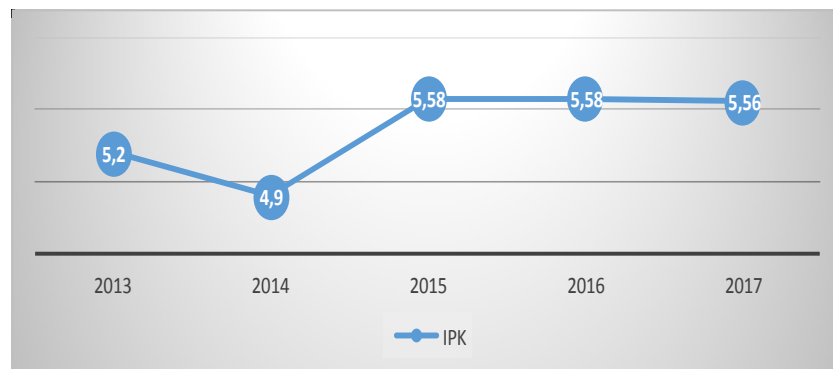
Sumber: Balitbang Prov.Kaltim 2018

Urusan penelitian dan pengembangan sudah berjalan optimal karena perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan kebijakan inovasi yang diterapkan sudah mencapai 100 persen. Sementara kegiatan pemanfaatan hasil kelitbangan baru 87 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlunya optimalisasi hasil penelitian dan pengembangan daerah.

h. Pengawasan

Urusan pengawasan merupakan urusan yang sangat penting bagi setiap pemerintah daerah. Urusan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi penyelenggaraan pemerintahan terutama terkait dengan bagaimana mencegah terjadinya pelanggaran internal instansi pemerintah. Untuk melihat kinerja pengawasan, dapat dilihat berdasarkan angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2. 49
Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Sumber: Inspektorat Prov.Kaltim

IPK provinsi Kalimantan Timur mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung menurun. Turunnya nilai IPK menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah belum berjalan optimal karena cukup banyak masyarakat menganggap masih ada praktek korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun demikian, IPK ini belum diterapkan di seluruh OPD, dimana baru diterapkan pada pelayanan perizinan berusaha. Artinya, pelayanan perizinan belum berjalan optimal sehingga perlu adanya peningkatan pengawasan.

Selain itu, persoalan lain juga berkaitan Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Kalimantan Timur masih pada posisi level 2. Hanya satu perangkat daerah yang sudah menerapkan zona integritas yaitu RSUD Kanujoso Balikpapan. Penetapan ini penting karena mencerminkan komitmen instansi tersebut dalam upaya pencegahan korupsi dan menciptakan pelayanan yang optimal.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) baik dari BPK maupun APIP juga belum optimal.

Tabel 2. 48
Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut		Persentase TLHP yang Belum Selesai
			Selesai	Belum	
2013	49	93	80	13	13,97
2014	19	47	38	9	19,14
2015	48	112	86	26	23,21
2016	41	118	60	58	49,15
2017	31	85	26	59	69,41
2018	11	29	8	21	72,41

Sumber: inspektorat 2013-2018

Tabel 2. 49
Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut		Persentase TLHP yang Belum Selesai
			Selesai	Belum	
2013	106	160	160	0	Selesai
2014	251	393	391	2	0,50
2015	203	309	308	1	0,32
2016	211	374	330	43	11,49
2017	282	421	209	212	50,35

Sumber: Inspektorat 2013-2017

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran tentang kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumberdaya manusia.

Tabel 2. 50
Indikator Daya Saing Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita	Rp/Bulan	1,096,709	1,136,173	1,193,642	1,296,926	1,443,928	I.1
2	Nilai tukar petani	%	95	100	99	98	97,16	I.1
3	Rata-rata pengeluaran konsumsi makanan per kapita	Rp/Bulan	508,706	508,801	549,351	587,920	663,535	I.1
4	Rata-rata pengeluaran konsumsi non makanan per kapita	Rp/Bulan	588,003	627,372	644,291	709,006	780,393	I.1
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	58.73	59.69	63.76	63.76	48.17	
6	Angka kriminalitas yang tertangani	%	5.84	5.42	6.33	6.44	5.29	
7	Jumlah kantor perbankan	Unit	580	627	770	775	688	II.8
8	Jumlah akomodasi (hotel/penginapan)	Unit	523	661	661	673	689	II.8
9	Jumlah rumah makan/restoran	Unit	943	987	1062	1167	1230	II.8
10	Persentase rumah tangga dengan sumber air bersih	%	80.87	85.35	89.41	90.63	90,90	I.3
11	Rasio ketergantungan		46.2	45.76	45.28	44.83	42.43	I.1

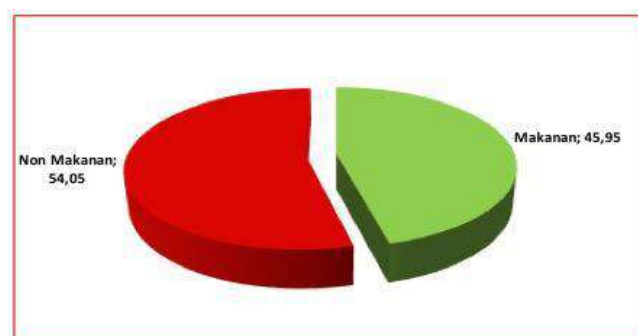
Sumber: BPS Kaltim

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus kemampuan ekonomi daerah diukur dengan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Selama kurun waktu beberapa tahun, pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita per bulan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 mencapai Rp. 1.443.928,- per bulan.

Secara umum kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur sudah lebih baik karena fokus konsumsi penduduk lebih tinggi ke konsumsi non makanan dibandingkan dengan konsumsi makanan. Kenaikan persentase konsumsi rumah tangga non makanan di tiap tahunnya menunjukkan konsumsi rumah tangga sudah mulai fokus ke pengeluaran barang sekunder maupun tersier yang merupakan kebutuhan penunjang kehidupan dan tidak hanya memikirkan pemenuhan kebutuhan makanan.

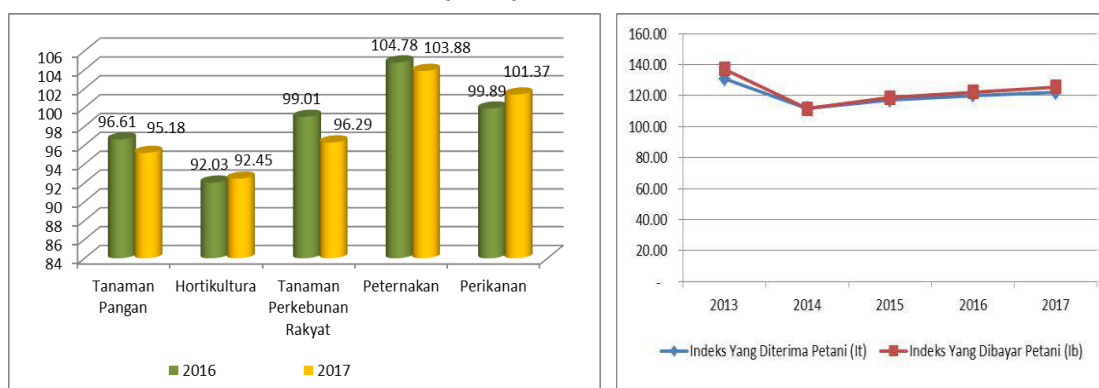
Gambar 2. 50
Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita sebulan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Disamping indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, kemampuan ekonomi daerah diukur juga dengan indikator Nilai Tukar Petani (NTP). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan/daya beli petani di wilayah pedesaan, dan juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi pertaniannya. Semakin tinggi NTP-nya maka semakin kuat kemampuan/daya beli petani. Pada periode tahun 2012-2017, NTP Provinsi Kalimantan Timur selalu berada di bawah nilai 100 yang berarti bahwa petani mengalami defisit/penurunan daya beli karena kenaikan penerimaan hasil produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga input biaya produksi dan kebutuhan konsumsi rumahtangganya.

Gambar 2. 51
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Jika dilihat Nilai Tukar Petani berdasarkan subsektor pertanian, NTP tertinggi adalah peternakan dan perikanan, sedangkan NTP terendah pada subsektor hortikultura.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur sangat berpengaruh terhadap daya saing daerah. Tingkat daya saing diukur dari ketersediaan infrastruktur pendukung kegiatan sosial ekonomi daerah. Pelayanan infrastruktur terkait sarana dan fasilitas wilayah lainnya yang diukur meliputi: konektivitas jalan, jembatan, perhubungan sungai, perhubungan udara, perhubungan laut ke kawasan-kawasan kesatuan sosial ekonomi masyarakat, ketersediaan air baku dan air bersih, jaringan irigasi, perumahan, listrik dan energy, jaringan telekomunikasi, serta fasilitas pelayanan jasa perdagangan.

Konektivitas infrastruktur perhubungan di Kalimantan Timur masih belum optimal mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat, terutama masih terbatasnya jaringan jalan dan prasarana perhubungan di kawasan pedalaman dan perbatasan. Konektivitas jalan nasional di wilayah Kalimantan Timur dikelompokkan menjadi tiga poros yaitu:

1. Poros Selatan, menghubungkan kawasan Kalimantan Selatan - Batu Aji/Kerang Dayu - Tanah Grogot - Kuaro - Penajam - Balikpapan - Samarinda - Bontang - Sangatta - Muara Wahau - Tanjung Redeb - Kalimantan Utara.
2. Poros Tengah, menghubungkan kawasan Samarinda - Tenggarong - Kota Bangun - Melak - Barong Tongkok - Kalimantan Tengah.
3. Poros Utara, menghubungkan Kalimantan Barat – Kalimantan Timur.

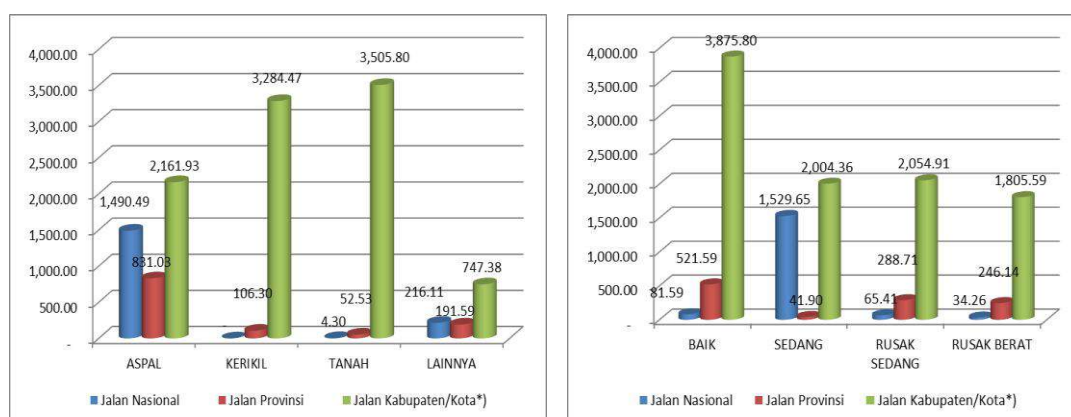
Pembangunan infrastruktur jalan Provinsi dihadapkan pada permasalahan masih rendahnya rasio panjang jalan terhadap luas wilayah, dimana angka rasionya menunjukkan 147,30 km per 1.000 km² di bawah rasio nasional, yaitu 265,47 km/1.000 km². Hal ini dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur jalan, antara lain:

1. Konsentrasi penduduk yang masih tidak merata dalam satuan kecil dan terpencil serta kondisi topografi yang berat;
2. Kendala pembebasan lahan dan penetapan harga yang disepakati;
3. Keterbatasan anggaran sehingga alokasi dana tidak proposional sesuai kebutuhan sehingga menyebabkan belum terpenuhinya target jalan mantap, baik nasional maupun provinsi, dan belum tuntasnya pembangunan jalan lintas kalimantan. Belum ada kesepakatan pembiayaan atas beberapa pembangunan infrastruktur

antara pemerintah pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan Dukungan swasta belum optimal.

4. Pembangunan jalan diperbatasan terkendala fungsi dan status kawasan hutan dan kawasan lindung.

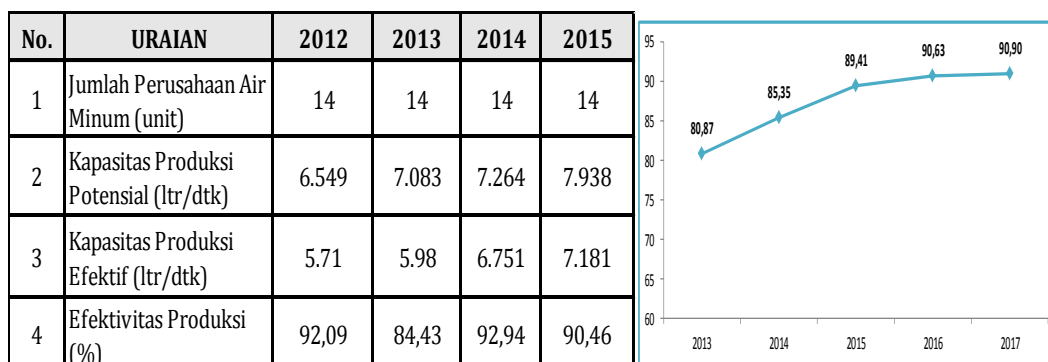
Gambar 2. 53
Panjang Jalan Menurut Status, Jenis Permukaan, dan Kondisi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017



Sumber: Dinas PUPR Prov.Kaltim

Ketersediaan air baku dan air bersih di Kalimantan Timur hingga tahun 2017 telah melayani 90,90 persen rumah tangga. Perusahaan air minum di Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan segala daya dan upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih. Terdapat 14 perusahaan air minum dengan kapasitas produksi efektif sebesar 7.181 liter/detik.

Gambar 2. 54
Kapasitas Pelayanan Air Bersih dan Persentase Rumah Tangga yang Terlayani
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017

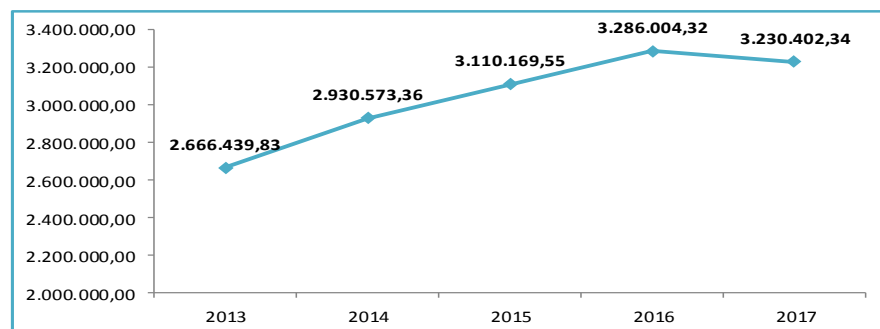


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Dari segi kelistrikan, infrastruktur listrik di Provinsi Kalimantan Timur memang perlu pembenahan, utamanya dalam pendistribusian listrik ke seluruh masyarakat. Oleh karena itu, PLN berusaha meningkatkan produksi tenaga listrik di

setiap tahunnya hingga mencapai 3.286.004,32 MWh pada tahun 2016. Pengguna listrik ini sebagian besar dirasakan oleh rumah tangga yang pada tahun 2016 berjumlah 774.995 rumah tangga dengan kapasitas listrik yang digunakan mencapai 1.801.719.937 MWh. Sementara pada tahun 2017 produksi tenaga listrik sedikit mengalami penurunan, namun jumlah pelanggan listrik rumah tangga tetap mengalami peningkatan.

Gambar 2. 55
Produksi Tenaga Listrik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (MWh)

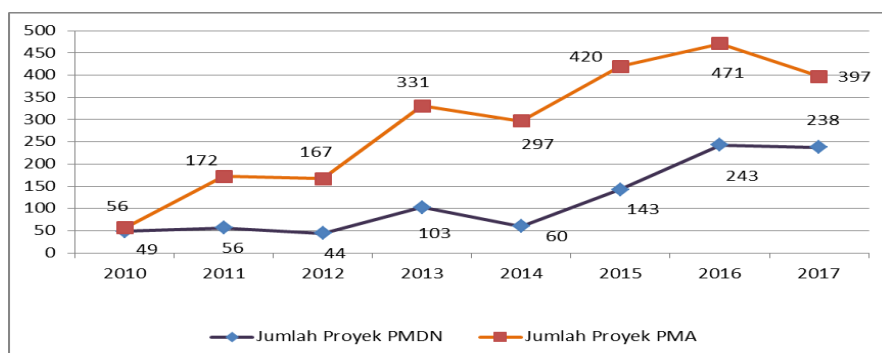


Sumber: PT. PLN Wilayah Kaltimra

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Daya saing daerah dengan fokus iklim berinvestasi sangat terkait dengan penataan ruang, pelayanan perijinan, regulasi daerah, kondisi keamanan berusaha, fasilitas pelayanan perbankan dan pelayanan umum lainnya. Ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Timur cukup tinggi. Sampai dengan tahun 2017, terdapat 936 proyek investasi terdiri dari 238 proyek investasi dari PMDN yang telah menyerap tenaga kerja sebanyak 128.998 orang, dan 397 proyek dari PMA yang telah menyerap tenaga kerja sebanyak 196.635 orang.

Gambar 2. 56
Perkembangan Jumlah Proyek Investasi PMDN dan PMA Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017



Sumber : DPMPSTSP Prov.Kaltim

Kondisi tata ruang wilayah sangat berpengaruh terhadap iklim berinvestasi terkait dengan kejelasan status lahan dan perijinan pemanfaatan ruang yang didukung oleh kebijakan daerah dalam penerapan insentif dan disinsentif. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur telah menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016. Hal tersebut telah memberikan kejelasan status lahan bagi pengembangan investasi di daerah. Namun demikian, Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan tumpang tindih lahan akibat perijinan yang diterbitkan sebelum RTRWP Kaltim di sahkan. Pengembangan luas lahan produktif yang tumpang tindih terkendala oleh waktu proses penyelesaian sengketa lahan yang cukup panjang. Hal tersebut menuntut pemerintah daerah untuk segera melakukan penataan perijinan dan peninjauan kembali peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam RTRWP Kaltim. Kabupaten/Kota juga dituntut segera menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Zonasi, karena Peraturan Zonasi menjadi dasar hukum dalam penerbitan ijin di tingkat kabupaten/kota.

Kondisi keamanan suatu wilayah juga sangat berpengaruh terhadap daya tarik investor dalam menanamkan modal usahanya di wilayah tersebut. Iklim investasi yang positif dibangun dari kondusifnya wilayah, baik itu segi keamanan, demokrasi, politik, hingga unsur sosial budaya. Adanya jaminan keamanan berinvestasi akan menentukan keberlangsungan dan kekonsistenan gerak perekonomian suatu wilayah sehingga para investor berani menanamkan modal dan pada akhirnya dapat mengembangkan perekonomian wilayah.

Angka kriminalitas di Kalimantan Timur cenderung mengalami penurunan, namun masih dalam posisi tinggi secara nasional. “Pekerjaan Rumah” inilah yang harus dituntaskan oleh aparat penegak hukum agar investor dapat nyaman dan aman dalam menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Timur.

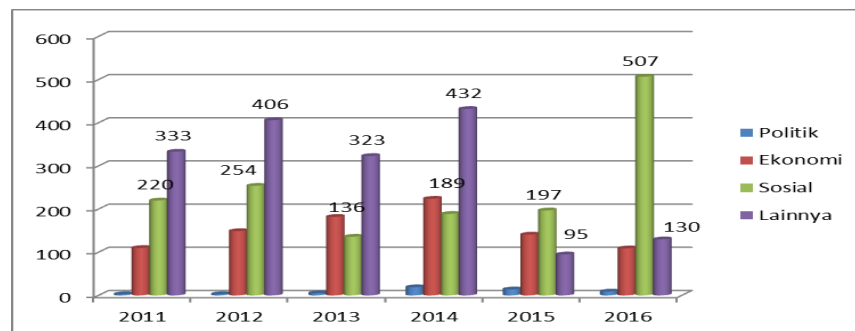
Gambar 2. 57
Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017



Sumber: Polda Kaltim 2017

Persoalan lain yang berpengaruh terhadap iklim investasi adalah demonstrasi. Demonstrasi menunjukkan kebebasan aspirasi masyarakat dalam berpendapat jika dilakukan dengan damai dan tujuan yang jelas. Namun jika demonstrasi dilakukan dengan diiringi kekerasan maka sudah menyalahi konsep dasar sebuah demokrasi. Jumlah demonstrasi di Kalimantan Timur meningkat dalam beberapa tahun terakhir, namun dilakukan dengan damai, ini mengindikasikan tingginya animo masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pendapatnya.

Gambar 2. 58
Jumlah Demonstrasi Menurut Jenisnya Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016



Sumber: Polda Provinsi Kaltim Tahun 2016

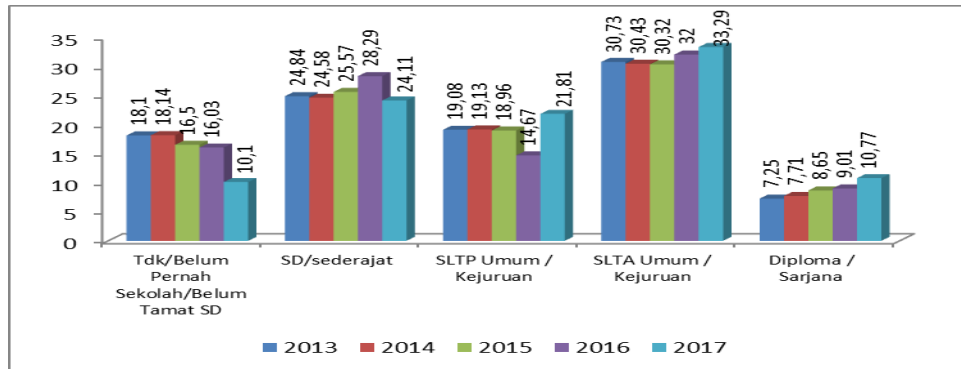
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada daya saing daerah. Untuk mencapai pembangunan yang diinginkan, tidak hanya kuantitas penduduk saja yang dibutuhkan, melainkan sumber daya manusia berkualitaslah yang menjadi harapan utama penyokong pembangunan suatu daerah. Indikator kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh masyarakat. Selain itu, rasio ketergantungan kelompok umur produktif dan non produktif juga dijadikan ukuran kualitas sumber daya manusia.

Penduduk Kalimantan Timur yang telah mengenyam pendidikan hingga bangku perguruan tinggi hanya mencapai 9,01 persen saja, sementara sebagian besar berpendidikan hingga jenjang SLTA (32,00%) dan SD (28,29%), serta masih tingginya masyarakat tidak/belum sekolah/belum tamat SD yang mencapai 16,03 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur masih rendah. Efek dari rendahnya tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keahlian sebagai modal daya saing tenaga kerja. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah maupun *stakeholder* terkait untuk mengoptimalkan kembali

program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

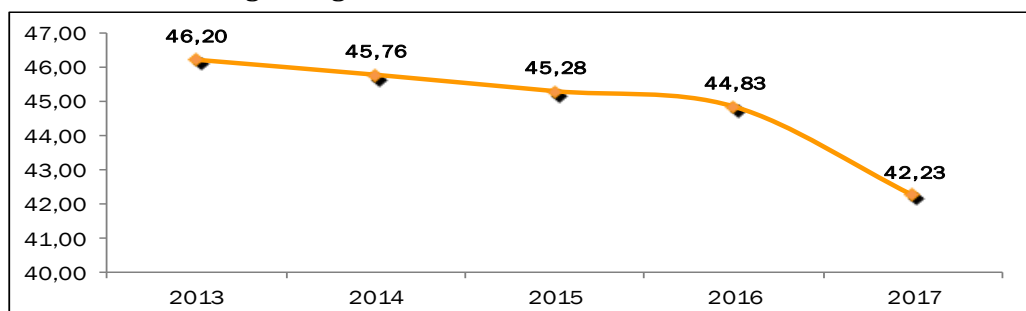
Gambar 2.58
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Produktivitas penduduk, selain dari kualitas pendidikan juga ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) dan usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di Provinsi Kalimantan Timur, rasio ketergantungan penduduk non produktif semakin menurun yang mengindikasikan bahwa beban tanggungan masyarakat produktif semakin ringan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 42-43 orang penduduk usia belum dan tidak produktif. Rasio ini secara konsisten mengalami penurunan, terutama jika dilihat dari tahun 2013 dimana rasio ketergantungan menunjukkan rasio sebesar 46,20.

Gambar 2. 59
Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur,

BAB 3

Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini akan menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk satu periode mendatang. Pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya menggambarkan kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan kondisi neraca daerah periode sebelumnya.

Gambaran tersebut selanjutnya berguna untuk menentukan kerangka pendanaan yang meliputi pengidentifikasian sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial, alokasi belanja serta pengeluaran daerah yang lebih optimal dan sesuai kebutuhan terutama untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran daerah lima tahun kedepan. Kerangka pendanaan juga mencakup potensi pembiayaan daerah jika terdapat defisit anggaran serta kondisi aset dan kewajiban daerah yang harus dipenuhi.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah digambarkan melalui analisis kinerja pelaksanaan realisasi anggaran daerah dan neraca daerah berdasarkan pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun terakhir.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

1. Perkembangan Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, komponen pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selama periode 2013-2017, realisasi pendapatan mengindikasikan tingkat efektivitas terhadap pencapaian rencana pendapatan masih cukup baik walaupun cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan kebijakan nasional terkait dana perimbangan.

Tabel 3.1.
Persentase Realisasi Terhadap Rencana Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Tahun	Rencana Pendapatan (Rupiah)	Realisasi Pendapatan (Rupiah)	% Realisasi Pendapatan Terhadap Rencana Pendapatan
2013	11.940.096.024.641	11.631.697.051.830	97,42%
2014	11.192.326.880.287	11.287.300.941.021	100,85%
2015	10.497.631.453.406	9.464.926.705.876	90,16%
2016	7.762.674.455.113	7.987.877.780.773	102,90%
2017	8.223.730.774.720	8.154.749.005.918	99,16%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi komponen utama penyusun pendapatan daerah. PAD terbesar berasal dari pendapatan pajak daerah dengan besaran proporsi rata-rata selama lima tahun terakhir sebesar 42,46 persen. Meskipun demikian, nilai absolut pendapatan pajak daerah setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan minus 12,85 persen per tahun.

Komponen terbesar penyumbang pajak daerah berasal dari pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Namun demikian terjadi penurunan pendapatan yang disebabkan turunnya penerimaan pajak kendaraan bermotor karena adanya penurunan daya beli dari masyarakat.

b. Dana Perimbangan

Pendapatan daerah dalam APBD yang berasal dari Dana Perimbangan dan transfer lainnya setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan. DAK mengalami peningkatan yang signifikan semenjak tahun 2014. Demikian pula dengan DAU mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun

2016. Sementara itu, meskipun sebagai sumber pendapatan terbesar, besaran DBH cenderung menurun.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Daerah juga didukung oleh komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan daerah pada komponen ini paling besar berasal dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Meskipun demikian, rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 2,53 persen.

Selama periode tahun 2013-2017, Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan yang sangat drastis. Dari tahun 2013 Rp 410,67 Milyar menjadi Rp 37,26 Milyar di tahun 2017. Hal ini disebabkan karena Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terus mengalami penurunan dari Rp 394,6 Milyar di tahun 2013 menjadi Rp 7,5 Milyar pada tahun 2017. Pada tahun 2018, tidak ada alokasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus untuk Kalimantan Timur.

2. Belanja Daerah

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif. Melalui analisis ini dapat terlihat sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Gambaran realisasi dari kebijakan belanja daerah pada periode tahun 2013-2017 digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana belanja daerah di masa yang akan datang.

Tabel 3.2. Persentase Realisasi Terhadap Rencana Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Tahun	Rencana Belanja (Rupiah)	Realisasi Belanja (Rupiah)	% Realisasi Belanja Terhadap Rencana Belanja
2013	15.139.000.000.000	13.780.244.907.476	91,02%
2014	12.217.683.000.000	11.274.631.837.034	92,28%
2015	11.484.260.000.000	10.205.342.292.212	88,86%
2016	7.976.359.000.000	7.601.242.338.859	95,30%

Tahun	Rencana Belanja (Rupiah)	Realisasi Belanja (Rupiah)	% Realisasi Belanja Terhadap Rencana Belanja
2017	8.223.730.774.720	8.101.145.367.965	98,51%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur cenderung menurun. Analisis pertumbuhan merupakan salah satu analisis lain dalam melihat kinerja belanja daerah selain menggunakan analisis efektifitas.

Analisis selanjutnya dalam melihat kinerja Belanja Daerah adalah analisis proporsi realisasi terhadap perencanaan. Rata-rata realisasi belanja langsung relatif lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja tak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengoptimalkan belanja bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, selama tahun 2013-2017 tergambar dalam tabel berikut.

**Tabel 3.3. Perkembangan Pembiayaan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

NO	TAHUN	URAIAN PEMBIAYAAN		PEMBIAYAAN NETTO
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	
1.	2013	3.198.903.975.359,34	-	3.198.903.975.359,34
2.	2014	1.050.356.119.713,24	25.000.000.000,00	1.025.356.119.713,24
3.	2015	1.036.628.546.594,01	50.000.000.000,00	986.628.546.594,01
4.	2016	226.684.544.888,84	-	226.684.544.888,84
5.	2017	611.118.124.746,55	-	611.118.124.746,55

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Pembiayaan Daerah terdiri dari dua komponen yaitu *pertama* penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya, *kedua* adalah pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah. Pada tahun 2013 – 2017, pembiayaan penerimaan daerah hanya bergantung pada SiLPA. SiLPA terendah terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar Rp 226,68 Milyar sedangkan SiLPA tertinggi yakni sebesar Rp 3,2 Trilyun dialami pada tahun 2013.

Tabel 3.4
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan %
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN	11.940.096.024.641	11.192.326.880.287	10.497.631.453.406	7.762.674.455.113	8.223.730.774.720	-3,19%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	5.543.616.578.000	5.771.201.825.750	5.095.145.980.601	3.921.364.868.077	4.167.589.517.079	-0,26%
1.1.1.	Pajak daerah	4.929.791.598.767	5.429.125.998.687	3.753.718.935.816	3.127.250.928.433	3.505.578.072.171	-2,13%
1.1.2.	Retribusi daerah	33.676.707.133	15.494.252.850	14.722.788.428	19.435.790.560	16.659.010.037	-4,29%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	291.684.072.010	310.199.925.478	230.116.057.795	167.385.377.651	208.807.497.552	-5,63%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	630.109.625.674	909.765.846.475	951.602.831.867	717.442.609.764	857.708.316.470	9,61%
1.2.	Dana Perimbangan	5.973.586.166.641	5.053.998.624.537	4.918.899.806.705	3.813.127.539.436	4.024.646.840.474	-5,01%
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	5.272.171.973.247	4.194.970.542.625	3.805.373.705.410	2.844.821.387.413	1.710.695.086.821	-9,28%
1.2.2.	Dana alokasi umum	55.539.336.500	57.312.515.000	0	80.402.179.000	714.906.576.000	139,95%
1.2.3.	Dana alokasi khusus	8.047.840.000	1.383.900.000	218.651.350.000	1.047.628.487.000	1.143.558.722.000.000	24990,59%
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	422.893.280.000	367.126.430.000	483.585.666.100	28.182.047.600	31.494.417.167	-9,12%
1.3.1	Hibah	16.045.173.000	16.781.978.000	11.404.893.000	9.736.113.000	10.437.936.000	-3,46%
1.3.2	Dana darurat						
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)						
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	394.630.725.500	352.611.956.905	483.585.666.100	5.000.000.000	7.500.000.000	-24,49%
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0	0	0	0	15.048.587.875	13,21%
2	BELANJA	15.139.000.000.000,00	12.217.683.000.000,00	10.967.068.904.744,60	7.989.359.000.000,00	8.834.897.375.000,00	-6,29%

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan %
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2.1	Belanja Tidak Langsung	7.589.788.098.568,00	6.598.286.393.088,30	5.947.158.306.899,96	4.197.167.944.503,67	5.570.709.846.709,00	-2,73%
2.1.1	Belanja Pegawai	933.282.282.068,00	1.027.784.762.088,30	514.399.254.869,71	991.505.508.003,67	1.698.837.530.019,00	24,95%
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	-	-	-	-	
2.1.4	Belanja Hibah	1.617.958.784.500,00	946.891.710.000,00	977.532.900.000,00	849.120.600.000,00	1.035.431.514.000,00	-5,07%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	3.870.100.000,00	5.010.000.000,00	3,15%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	2.759.134.532.000,00	2.576.755.696.000,00	2.874.912.719.218,25	1.478.522.500.000,00	2.104.010.195.500,00	2,66%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan & Politik	2.254.122.500.000,00	2.031.354.225.000,00	1.556.813.432.812,00	861.149.236.500,00	721.120.607.190,00	-19,58%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	19.790.000.000,00	10.000.000.000,00	18.000.000.000,00	13.000.000.000,00	6.300.000.000,00	-9,65%
2.2	Belanja Langsung	7.549.211.901.432,00	5.619.396.606.911,73	5.019.910.597.844,64	3.792.191.055.496,33	3.264.187.528.291,00	-9,03%
2.2.1	Belanja Pegawai	609.529.516.215,33	489.298.650.271,25	514.399.254.869,71	450.048.961.767,00	243.801.648.092,00	-14,15%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.747.919.262.071	2.430.984.550.539,79	2.158.118.306.082,14	1.695.886.958.784,33	2.001.134.625.074,00	-6,19%
2.2.3	Belanja Modal	4.191.763.123.145	2.699.113.406.100,69	2.347.393.036.892,79	1.646.255.134.945,00	1.019.251.255.125,00	-2,68%
3	PEMBIAYAAN	3.198.903.975.359,34	1.025.356.119.713,24	986.628.546.594,01	226.684.544.887,84	611.166.600.279,55	1,76%
3.1	Penerimaan Pembiayaan	3.198.903.975.359,34	1.050.356.119.713,24	1.036.628.546.594,01	226.684.544.887,84	611.166.600.279,55	2,31%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	25.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0	0	0,00%

3.1.2. Neraca Daerah

Salah satu instrumen analisis kondisi keuangan pemerintah daerah adalah neraca daerah. Neraca daerah terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Aset dilihat dari nilai uang yang terkandung di dalamnya, serta manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan dari adanya aset. Utang berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 didefinisikan sebagai jumlah uang yang wajib dibayar oleh pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan berdasarkan sebab lainnya yang sah. Utang dalam analisis neraca dilihat dari utang atau kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Selisih antara nilai aset dan utang didalam neraca daerah disebut sebagai ekuitas dana. Neraca merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu. Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset mencakup seluruh sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Kewajiban merupakan utang yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah di masa yang akan datang. Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban.

Aset, kewajiban, dan ekuitas yang disajikan di neraca pemerintah daerah berasal dari perolehan sejak Pemerintah Daerah tersebut berdiri. Oleh karena itu, untuk keperluan penyusunan neraca pertama kali, Pemerintah Daerah perlu menyiapkan suatu pendekatan tertentu dan melakukan inventarisasi terhadap aset dan kewajibannya. Keandalan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca awal sangat penting dalam membangun sistem akuntansi pemerintah daerah, karena jumlah-jumlah yang disajikan dalam neraca awal akan menjadi saldo awal, yang akan terus terbawa dalam sistem akuntansi berikutnya. Kondisi neraca daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013 hingga 2015 adalah sebagai berikut.

Rata-rata pertumbuhan paling tinggi selama 5 tahun adalah pada komponen aset lainnya, yakni sebesar 88,86 persen. Aset lainnya terdiri dari tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Komponen aset dengan pertumbuhan tertinggi kedua adalah aset tetap, sebesar 87,64 persen. Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; serta konstruksi dalam pengerjaan. Pertumbuhan yang tinggi dalam aset tetap ini dapat berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, terutama di bidang sarana dan prasarana wilayah. Pertumbuhan komponen aset daerah yang tidak signifikan adalah aset lancar sebesar 2,84 persen dan investasi jangka panjang sebesar 1,8 persen. Rata-rata pertumbuhan aset daerah secara keseluruhan adalah 1,91persen. Pertumbuhan aset tersebut jauh lebih rendah jika dibanding pertumbuhan utang atau kewajiban. Provinsi Kalimantan Timur hanya memiliki kewajiban jangka pendek, namun rata-rata pertumbuhan selama lima tahun adalah 24,66 persen. Ada rata-rata pertumbuhan ekuitas dana sebagai selisih antara aset dan kewajiban, yakni sebesar 1,41 persen.

Tabel 3.5.
Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

NO	URAIAN	2013 (RP)	2014 (RP)	2015 (RP)	2016 (RP)	2017 (RP)	PERTUMBUHAN (%)
1	Aset						
1.1.	Aset lancar	3,189,372,457,985.78	3,515,289,699,289.26	2,794,480,674,938.52	3,339,405,804,164.78	3,411,721,430,648.76	2.84
1.2.	Investasi jangka panjang	2,307,568,136,886	2,179,088,079,707	2,118,541,287,430	2,277,501,235,381	2,460,721,222,689.26	1.8
1.3.	Aset tetap	21,996,096,815,949.40	24,220,982,878,331.00	18,382,849,193,614.30	17,175,963,871,129.80	21,357,892,468,817.10	87.64
1.4.	Aset lainnya	151,881,580,658.91	174,339,515,972.00	132,704,136,253.30	320,313,481,494.34	1,035,220,371,759.79	88.86
	Jumlah aset daerah	27,644,918,991,480.20	30,089,700,173,299.00	23,428,575,292,236.40	23,113,184,392,170.20	28,265,555,493,914.90	1.91
2	Kewajiban						
	Kewajiban jangka pendek	632,278,528,956.51	913,791,245,661.67	468,763,491,805.24	716,158,960,129.10	1,074,749,726,990.98	24.66
3	Ekuitas dana						
	Jumlah kewajiban dan ekuitas dana	27,644,918,991,480.20	30,089,700,173,299.00	23,428,575,292,236.30	23,113,184,392,170.20	28,265,554,493,914.90	1.91

Sumber: Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Pertumbuhan berbagai komponen neraca daerah tersebut, kemudian dianalisis secara lebih mendalam melalui perhitungan tiga rasio. Analisis neraca daerah yang *pertama* adalah menggunakan rasio likuiditas. Hal ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar yang merupakan perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek, serta rasio quick yang merupakan perbandingan antara aset lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban jangka pendek. Adapun jumlah persediaan Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2013 hingga 2017 adalah:

Tabel 3.6 Jumlah Persediaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	PERTUMB. (%)
Persediaan	1,782,357,165,828	1,997,096,484,129	2,057,431,888,726	2,204,883,737,445	2,513,224,064,671	9.05

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

**Tabel 3.7
Rasio Likuiditas Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017**

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	RATA- RATA
1	Rasio Lancar (Current Ratio)	5.04	3.84	5.96	4.66	3.17	4.53
2	Rasio Quick (Quick Ratio)	2.22	1.66	1.57	1.58	0.83	1.57

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Berdasarkan perhitungan rasio likuiditas melalui perhitungan rasio lancar dan rasio quick, Provinsi Kalimantan Timur memiliki tingkat likuiditas yang cukup baik, meskipun dengan nilai yang tidak cukup besar. Rasio lancar memiliki rata-rata rasio sebesar 4,53, sedangkan rasio quick memiliki rata-rata 1,57. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya kewajiban jangka

pendek yang selalu ada setiap tahun dan memiliki rata-rata pertumbuhan cukup besar, yakni 24,66 persen. Adapun kondisi rasio quick yang lebih kecil dibanding dengan rasio lancar karena dipengaruhi oleh adanya pengurangan aset lancar oleh persediaan. Kondisi tidak signifikannya nilai rasio lancar maupun quick perlu menjadi perhatian, karena dapat mempengaruhi kapasitas keuangan daerah, serta adanya kebijakan pengambilan kewajiban jangka pendek perlu memiliki langkah cermat.

Analisis neraca daerah yang *kedua* dilakukan melalui perhitungan rasio solvabilitas. Solvabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio solvabilitas dilakukan melalui perhitungan rasio total hutang terhadap total aset, serta rasio hutang terhadap modal. Perhitungan rasio solvabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Tabel 3.8

Rasio Solvabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	RATA-RATA
1	Rasio total hutang terhadap total aset	0.022	0.0303	0.020	0.0309	0.038	0.028
2	Rasio hutang terhadap modal	0.023	0.0313	0.020	0.0319	0.039	0.029

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Berdasarkan perhitungan rasio solvabilitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki kondisi yang *solvable*. Perhitungan rasio solvabilitas berbeda dengan rasio likuiditas, dimana semakin kecil rasio solvabilitas maka kondisinya semakin baik atau *solvable*. Rasio total hutang terhadap aset dan rasio hutang terhadap modal memiliki kondisi yang fluktuatif selama 2013 hingga 2017, sedangkan rata-rata nilai rasio keduanya hampir sama, yakni 0,028 pada rasio total hutang terhadap total aset, dan 0,029 pada rasio hutang terhadap modal. Perhitungan kedua rasio tersebut hanya menggunakan kewajiban jangka pendek, karena Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur tidak memiliki kewajiban jangka panjang selama tahun 2013 hingga 2017.

Analisis neraca daerah yang *ketiga* menggunakan perhitungan rasio aktivitas, yaitu melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Rasio aktivitas terdiri dari rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama atau hari yang diperlukan untuk melunasi piutang. Hal ini merupakan upaya untuk mengubah piutang menjadi kas. Rata-rata umur piutang dihitung dari 365 hari dalam satu tahun dibagi dengan perputaran piutang. Guna memperoleh nilai perputaran piutang maka pendapatan daerah dibagi dengan rata-rata piutang pendapatan daerah, sedangkan rata-rata piutang diperoleh dari penjumlahan saldo awal piutang dengan saldo akhir piutang kemudian dibagi dua. Adapun nilai piutang Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 hingga 2017 adalah:

Tabel 3.9 Jumlah Piutang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	PERTUMB. (%)
Piutang	709,122,636,012	883,288,619,506	671,448,413,308	755,022,737,028	634,847,129,148	-20.57%

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Rasio aktivitas juga dihitung melalui rata-rata umur persediaan, yaitu berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan, karena dana persediaan dapat digunakan untuk pelayanan publik jika diperlukan. Rata-rata umur persediaan dihitung melalui 365 hari dalam satu tahun dibagi dengan perputaran persediaan. Untuk memperoleh nilai perputaran persediaan, maka nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun dibagi dengan rata-rata nilai persediaan, dimana rata-rata nilai persediaan diperoleh melalui penjumlahan antara saldo awal dan akhir persediaan kemudian dibagi dua.

Tabel 3.10 Rasio Aktivitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	RATA-RATA
1	Rata-rata Umur Piutang	21.29	25.75	29.97	32.59	31.09	28.14
2	Rata-rata Umur Persediaan	282.42	345.38	359.65	352.80	342.61	336.57

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Kemampuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengubah piutang menjadi kas cukup baik, yakni rata-rata selama 28,14 atau kurang dari satu bulan. Perhitungan yang berbeda terdapat pada rata-rata umur persediaan, yakni jika umur piutang lebih pendek atau sedikit maka lebih baik, sedangkan umur persediaan semakin lama, maka semakin baik. Pada konteks ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki rata-rata umur persediaan yang baik, yakni memiliki rata-rata 336,57 atau hampir selama satu tahun. Kondisi ini menjadikan keuangan pemerintah daerah yang relatif stabil, karena dana persediaan tidak dicairkan secara cepat atau relatif tidak ada kebutuhan mendesak untuk menggunakan dana persediaan.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Analisis kebijakan pengelolaan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 menggambarkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan. Proporsi penggunaan anggaran diuraikan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja. Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut. Dengan pola kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah secara bertahap akan mampu keluar dari berbagai persoalan yang selama ini dihadapi. Kebijakan keuangan daerah erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan untuk

mendukung tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri. Ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat, dan APBD yang sebagian besar hanya untuk membiayai pengeluaran rutin dan biaya operasional lainnya, maka kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penerimaan daerah, dan penajaman alokasi belanja serta upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD). DOFD dihitung melalui perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dalam APBD. Berdasarkan kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal, nilai DOFD Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam kategori sangat baik karena lebih dari 50 persen. Rata-rata DOFD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2017 adalah 53,73 persen. Kondisi ini menunjukkan kemandirian keuangan pemerintah daerah cukup tinggi untuk membiayai pembangunan daerah.

**Tabel 3.11 Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

Tahun	PAD (Rupiah)	Total Pendapatan	DOF (Persen)
2013	5.885.262.003.582,88	11.631.697.051.829,90	50,60%
2014	6.664.586.023.490,97	11.287.300.941.021,00	59,04%
2015	4.950.160.613.906,01	9.464.926.705.876,01	52,30%
2016	4.031.514.706.408,00	7.987.877.780.773,00	50,46%
2017	4.588.752.896.230,47	8.154.749.005.918,47	56,25%
Rata-rata	5.224.055.248.723,67	9.705.310.297.083,67	53,73%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun 2013 hingga 2017 menunjukkan tren yang fluktuatif. Berikut adalah analisis terhadap proporsi penggunaan anggaran Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2017:

Tabel 3.12.
Proporsi Belanja Pemenuh Kebutuhan Aparatur
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase (a) / (b) x 100%
		(a)	(b)	
1	2013	1,542,811,798,283.33	15,139,000,000,000.00	10.19%
2	2014	1,517,083,412,359.55	12,242,683,000,000.00	12.39%
3	2015	1,028,798,509,739.42	11,017,068,904,744.60	9.34%
4	2016	1.441.554.469.770.67	7,989,359,000,000.00	18.04%
5	2017	1.695.886.958.784.33	8,834,897,375,000.00	19.20%
6	2018	1.646.255.134.945.00	10,870,432,071,874.00	15.14%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Peningkatan tersebut lebih disebabkan oleh jumlah aparatur yang jumlahnya terus bertambah, juga berkenaan yang mengakibatkan lebih besar anggaran yang harus disediakan. Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah mengalami tren meningkat. Proporsi selama periode tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih besar proporsinya terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan terdiri atas analisis sumber defisit riil dan analisis SiLPA. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,

penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Secara umum berikut adalah analisis terhadap pembiayaan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2017:

1. Analisis Sumber Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Langkah awal dalam melakukan analisis ini dilakukan dengan mencari nilai defisit riil anggaran, yaitu mencari nilai realisasi pendapatan, setelah dikurangi realisasi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya, dilihat apakah ada penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran, sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Untuk melihat perkembangan defisit riil anggaran, dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.13. Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	11.631.697.051.829,90	11.287.300.941.021,00	9.464.926.705.876,01	7.987.877.780.773,00	8.154.749.005.918,47
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	13.780.244.907.476,00	11.274.631.837.034,30	10.205.342.292.212,00	7.601.242.338.859,40	8.239.379.709.093,14
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	25.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	-
A	Defisit riil	-2.148.547.855.646,10	-12.330.896.013,35	-790.415.586.335,99	386.635.441.913,60	-84.630.703.174,67
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	3.198.903.975.359,34	1.050.356.119.713,24	1.036.628.546.594,01	226.684.544.888,84	611.118.124.746,55
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	3.198.903.975.359,34	1.050.356.119.713,24	1.036.628.546.594,01	226.684.544.888,84	611.118.124.746,55
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	1.050.356.119.713,24	1.038.025.223.699,89	246.212.960.258,02	613.319.986.802,44	526.487.421.571,88

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	PROPORSI DARI TOTAL DEFISIT RIIL				
		2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	11.631.697.051.829	11.287.300.941.021	9.464.926.705.876	7,985,727,918,251	6,957,328,915,701
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	13.780.244.907.476,00	11.274.631.837.034,30	10,205,338,696,735	7,601,242,338,859	5,666,129,081,032
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	25.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	-
4	Defisit riil	-2.148.547.855.646,10	-12.330.896.013,35	-790,411,990,859	384,485,579,392	1,291,199,834,669

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2015	2016	2017
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	1,036,628,546,594	226,684,544,888	611,166,600,280
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0

Secara riil, kinerja pembiayaan daerah mempunyai peran penting pada tahun 2013, 2014, 2015 dan 2017 ketika APBD mengalami defisit. Penutup defisit itu, terutama bersumber dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya. Kondisi berbeda pada tahun 2016 yaitu ketika terjadi surplus riil, maka penerimaan pembiayaan justru semakin menambah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun tersebut.

2. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pembiayaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten. Apabila diperlukan maka dapat melakukan pinjaman daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program/kegiatan strategis lainnya. Analisis SiLPA digunakan untuk melihat sumber perolehan SiLPA dan proporsi kontribusi yang diberikan. Perolehan SiLPA selama tahun 2013-2017 sebagian besar diperoleh penghematan belanja yang tidak terserap. Hal tersebut mengidentifikasi dua hal yaitu efektifitas dalam penghematan anggaran atau belum optimalnya penganggaran belanja daerah.

**Tabel 3.14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

NO	URAIAN	2013		2014		2015		2016		2017	
		Rp	%dari SiLPA	Rp	%dari SiLPA	Rp	%dari SiLPA	Rp	%dari SiLPA	Rp	%dari SiLPA
	Jumlah SiLPA	1.050.356.119.713	100,00%	1.038.025.223.700	100,00%	246.212.960.258	100,00%	600.319.986.801	100,00%	- 1.123.738.108.106	100,00%
1	Pelampauan penerimaan PAD	341.645.425.583	32,53%	893.384.197.741	86,07%	-144.985.366.695	-58,89%	110.149.838.331	18,35%	-68.981.768.802	6,14%
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-637.827.016.894	-60,72%	-800.677.641.912	-77,13%	-894.874.751.295	- 363,46%	128.499.421.929	21,41%	-491.637.254.661	43,75%
3	Pelampauan lain-lain pendapatan yang sah	-12217381500	-1,16%	2.267.504.905	0,22%	7.155.370.460	2,91%	-13.445.934.600	-2,24%	1.492.106.708	-0,13%
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	1.358.755.092.524	129,36%	943.051.162.966	90,85%	1.278.917.707.788	519,44%	375.116.661.141	62,49%	-564.659.666.884	50,25%
5	Pelampauan pembiayaan netto	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	48.475.533	0,00%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan yang akan diuraikan dalam sub bab ini terdiri dari, *pertama* strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk lima tahun kedepan. Hal ini merupakan kerangka acuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, serta optimalisasi belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sedangkan *kedua*, pada komponen keuangan daerah tersebut, baik itu pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah, akan disertai proyeksi masing-masing jumlahnya untuk lima tahun mendatang. Dalam konteks makro, pengelolaan anggaran daerah juga harus memperhatikan berbagai asas dalam pengelolaan keuangan. Hal ini bertujuan agar pengelolaan anggaran sebagai salah satu komponen penting dari pembangunan daerah dapat mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, serta untuk menghindari adanya persoalan terkait pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran daerah. Berbagai asas tersebut adalah:

- Akuntabilitas, yaitu asas pengelolaan keuangan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun internal institusi pemerintahan
- Profesionalitas, yaitu membutuhkan prasyarat berupa kapasitas dan integritas yang tinggi, terutama dari aparatur pemerintah daerah
- Proporsionalitas, yaitu anggaran daerah dapat dikelola secara tepat dengan distribusi yang sesuai dengan perencanaan atau berdasarkan kebutuhan pembangunan daerah
- Transparansi, yaitu pengelolaan anggaran yang terbuka sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik
- Pengawasan yang dapat dilaksanakan oleh publik maupun badan pengawasan dan pemeriksa yang bebas dan mandiri

**Tabel 3.15 Proyeksi Kerangka Pendanaan
Tahun 2019-2023**

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	Pendapatan	10.549.624.013.250,00	11.534.474.227.000	12.147.101.010.000	13.246.220.487.000	14.201.152.017.500
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)					
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Total penerimaan	10.549.624.013.250,00	10.954.474.227.000,00	11.376.901.010.000,00	11.815.470.487.000,00	12.269.991.079.600,00
4	Belanja Tidak Langsung	6.526.656.978.075,00	5.411.102.979.307,11	5.412.061.767.073,62	5.616.897.372.290,36	5.775.758.664.747,42
5	Pengeluaran Pembiayaan	100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000
	Kapasitas riil kemampuan keuangan					

3.3.1. Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah. oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari strategi dan kebijakan peningkatan pendapatan daerah, optimalisasi belanja daerah dan pembiayaan daerah. Berikut adalah strategi dan kebijakan mengenai beberapa komponen tersebut:

1. Strategi dan Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ketiganya mempunyai strategi dan kebijakan sebagai berikut:

- a. Komponen PAD selaku representasi kinerja riil pemerintah daerah dalam menggali pendapatan daerah secara mandiri, strategi peningkatan pendapatan yang dijalankan adalah melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan publik sebagai penghasil PAD, serta koordinasi lintas instansi. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:
 - Optimalisasi pengelolaan aset kawasan ekonomi sebagai aset daerah.
 - Meningkatkan hasil pendapatan dari retribusi dan pajak daerah melalui optimalisasi sistem retribusi dan pajak daerah.
 - Peninjauan kembali terhadap Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang dianggap sudah tidak sesuai baik dari sisi tarif maupun mekanisme pemungutan.
 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pengelola retribusi/pajak daerah.
 - Melakukan pendataan atas potensi pajak dan retribusi daerah guna mengukur kapasitas pajak dan retribusi daerah sebagai dasar dalam menetapkan target pendapatan.
 - Melakukan koordinasi secara intensif antar instansi vertikal maupun horizontal, yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kepolisian, PD teknis penghasil, dan kecamatan.
 - Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan PD penghasil beserta Unit Pelayanan Teknis untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru dari sumberdaya kawasan ekonomi yang belum diatur dalam peraturan perundangan.
- b. Meningkatkan kinerja dan kesehatan BUMD dengan melakukan penataan manajemen yang mendorong BUMD dikelola secara profesional.

- c. Bagi Provinsi Kalimantan Timur, komponen pendapatan transfer menempati peran strategis dalam menyusun pendapatan daerah terkait DBHBP Sumber Daya Alam. Oleh karena itu, strategi yang dijalankan terutama melalui peningkatan koordinasi vertikal. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar provinsi dalam pengelolaan pendapatan transfer.
 - Upaya peningkatan jumlah DBHBP ketika terjadi penurunan melalui koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu.
 - Peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam.
 - Rasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Harmonisasi peraturan perundangan terkait investasi sektoral untuk Optimalisasi produktifitas kawasan ekonomi penyumbang terbesar PDRB Kaltim.
- d. Dalam komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, strategi yang dijalankan melalui koordinasi dengan provinsi dan kabupaten/kota. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut :
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lainnya, terutama dalam rangka bagi hasil pajak/ retribusi serta alokasi bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten/kota lainnya.
 - Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam hal transfer dana penyesuaian.

2. Strategi dan Kebijakan Optimalisasi Belanja Daerah

Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga yang keduanya menjadi penentu berlangsungnya pembangunan daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pengalokasian belanja daerah yang tepat sasaran dan tujuan, yaitu melalui:

- Strategi penganggaran berbasis kinerja, yaitu berdasarkan pada indikator kinerja yang jelas dan terukur. Indikator kinerja yang digunakan adalah

pencapaian kinerja dalam tahun anggaran/periode sebelumnya maupun indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan.

- Selanjutnya penganggaran disinergikan dengan berbagai dokumen perencanaan, baik itu perencanaan jangka menengah dalam bentuk RPJMD dan renstra OPD maupun perencanaan teknis setiap tahun dalam bentuk RKPD dan renja OPD
- Strategi penganggaran berbasis urgensi kebutuhan daerah dan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran daerah.

Strategi di atas dijalankan melalui berbagai kebijakan belanja daerah yang berdasarkan kapasitas riil keuangan daerah yang terdiri dari :

- a. Prioritas I : dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar
- b. Prioritas II : dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah
- c. Prioritas III : dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.
- d. Kebijakan belanja operasi juga diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan sehingga dapat dinikmati seluruh elemen masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, serta mampu menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan
- e. Alokasi belanja operasi, terutama berupa belanja bantuan sosial dan belanja keuangan diarahkan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan akselerasi pembangunan desa serta sebagai stimulus bagi berbagai kelompok masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah.

Tabel 3.15
Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Tahun 2019-2023

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	3.906.921.048.425	5.855.069.059.029	6.325.961.851.029	6.802.036.937.659	7.428.824.189.529
1	Prioritas I	3.309.189.730.304	5.018.612.696.589	5.409.359.250.099	5.905.380.955.803	6.500.411.128.328
2	Prioritas II	136.044.127.000	286.852.766.250	300.478.390.650	280.453.816.583	287.850.662.284
3	Prioritas III	461.687.191.121	549.603.596.190	616.124.210.280	616.202.165.273	640.562.398.917

3. Strategi dan Kebijakan Optimalisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah dilaksanakan ketika terjadi defisit anggaran, yaitu ketika pendapatan daerah belum mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah. Pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, mempunyai arah kebijakan yaitu penggunaan SiLPA tahun sebelumnya yang dimasukkan sebagai sumber penerimaan APBD, namun dengan besaran SiLPA yang diupayakan seminimal mungkin dari tahun ke tahun. Strategi lainnya adalah kerjasama pembiayaan pembangunan secara komplementer dan terpadu baik melalui Pinjaman (*Loan*), APBN, Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), APBD Kabupaten/Kota serta sumber pembiayaan lainnya terutama untuk pelaksanaan program prioritas daerah.

3.3.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara akuntabel.

Komponen pendapatan daerah diproyeksikan mengalami rata-rata pertumbuhan dalam tahun 2019-2023 sebesar 3,84 persen. Proyeksi didasarkan pada perhitungan analisis data tahun 2013-2018 dan potensi pendapatan. Peningkatan pendapatan daerah

tersebut diupayakan berasal dari optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), yaitu dengan pengoptimalan kinerja pemerintah daerah/OPD dalam menghasilkan PAD. Rasio PAD terhadap pendapatan menunjukkan tingkat kemandirian keuangan suatu daerah dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan.

Komponen belanja daerah diproyeksikan berdasarkan rata-rata pertumbuhan komponen wajib dan mengikat selama tahun 2013-2018 serta asumsi indikator makro yaitu inflasi. Komponen belanja daerah diproyeksikan berdasarkan pada prioritas dan kebutuhan riil daerah. Proyeksi ini didasarkan pada tren rata-rata pertumbuhan dan rata-rata proporsi komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada periode sebelumnya. Selain itu juga memperhatikan kemungkinan perkembangan perekonomian makro kedepan dan adanya perubahan kebijakan pemerintah, khususnya yang berimplikasi pada pendapatan daerah. Kondisi defisit memerlukan kewaspadaan karena besaran belanja yang melebihi kemampuan pendapatan daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi lain dalam hal penutupan defisit belanja dari sisi penerimaan pembiayaan. Lebih rinci untuk melihat proyeksi APBD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 3.16 Proyeksi APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	PENDAPATAN	10.549.624.013.250	11.534.474.227.000	12.147.101.010.000	13.246.220.487.000	14.201.152.017.500
1.1	Pendapatan Asli Daerah	5.452.964.353.550	6.362.974.720.000	6.860.538.503.000	7.808.866.980.000	8.381.004.510.500
1.1.1	Pajak Daerah	4.420.000.000.000	5.236.700.000.000	5.644.829.000.000	6.564.539.030.000	7.087.736.000.000
1.1.2	Retribusi Daerah	28.616.725.000	33.239.185.000	22.489.341.200	21.723.275.704	31.209.722.618
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	224.523.866.374	227.111.724.398	347.869.891.338	416.492.946.444	435.905.980.434
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	779.823.762.176	865.923.810.602	845.350.270.462	806.111.727.852	826.152.807.448
1.2	Dana perimbangan	5.059.832.628.500	5.159.079.507.000	5.273.955.507.000	5.424.555.507.000	5.807.155.507.000
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	3.038.477.121.500	3.137.724.000.000	3.252.600.000.000	3.403.200.000.000	3.785.800.000.000
1.2.2	Dana alokasi umum	815.693.641.000	815.693.641.000	815.693.641.000	815.693.641.000	815.693.641.000
1.2.3	Dana alokasi khusus	1.205.661.866.000	1.205.661.866.000	1.205.661.866.000	1.205.661.866.000	1.205.661.866.000
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	36.827.031.200	12.420.000.000	12.607.000.000	12.798.000.000	12.992.000.000
1.3.1	Hibah	12.272.000.000	12.420.000.000	12.607.000.000	12.798.000.000	12.992.000.000
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	14.671.639.200	-	-	-	-
1.3.5	Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya	-	-	-	-	-
1.3.6	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	-	-
2	Belanja	10.669.670.000.000	10.954.729.575.358	11.375.391.191.052	11.812.206.212.789	12.265.794.931.360
2.1	Belanja Tidak Langsung	6.526.656.978.075	5.531.148.966.057	5.532.107.753.823	5.736.943.359.040	5.895.804.651.497
2.1.1	Belanja Pegawai	1.774.799.167.283	1.774.799.167.283	1.774.799.167.283	1.774.799.167.283	1.774.799.167.283
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	782.352.802.338	472.394.163.938	472.394.163.938	472.394.163.938	472.394.163.938
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	9.774.550.000	9.774.550.000	9.774.550.000	9.774.550.000	9.774.550.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	2.579.253.034.454	2.629.135.098.086	2.730.093.885.852	2.834.929.491.069	2.943.790.783.526
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	1.355.477.424.000	620.045.986.750	520.045.986.750	620.045.986.750	670.045.986.750
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
2.2	Belanja Langsung	4.143.013.021.925	5.423.580.609.301	5.843.283.437.228	6.075.262.853.748	6.369.990.279.862
2.2.1	Belanja Pegawai	292.637.422.329	293.637.422.329	294.637.422.329	295.637.422.329	296.637.422.329
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.419.924.279.524	3.692.339.610.300	4.103.854.420.344	4.327.609.878.891	4.614.077.227.242
2.2.3	Belanja Modal	1.430.451.320.072	1.437.603.576.672	1.444.791.594.555	1.452.015.552.528	1.459.275.630.291
3	Pembiayaan	120.045.986.750	120.045.986.750	120.045.986.750	120.045.986.750	120.045.986.750
3.1	Penerimaan Pembiayaan	220.045.986.750	220.045.986.750	220.045.986.750	220.045.986.750	220.045.986.750
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000

BAB 5

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode 2018–2023 berpijak pada nilai yang berkembang di masyarakat, visi dan tahapan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur periode 2005-2025, capaian kondisi pembangunan daerah, serta proyeksi pembangunan lima tahun mendatang. Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 “Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan dengan didukung melalui misi:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum; dan
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, kedepan tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam tidak terbarukan tetapi lebih kepada sumber daya alam terbarukan yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perwujudan keseimbangan tersebut melalui model pembangunan ekonomi hijau dengan dimensi-dimensi penting antara lain pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ekosistem produktif yang terjaga sebagai penyedia jasa lingkungan, pertumbuhan yang adil dan merata (inklusif), ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Tahapan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 terdapat Penekanan yang menjadi acuan dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun tahapan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 5 tahunan adalah:

Tabel 5.1

Tahapan 5 Tahun RPJPD dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

Penekanan 5 Tahun Pertama (2005-2008)	Penekanan 5 Tahun Kedua (2009-2013)	Penekanan 5 Tahun Ketiga (2014-2018)	Penekanan 5 Tahun Keempat (2019-2023)
Peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga dalam jangka panjang memiliki daya saing yang tinggi; pengembangan ekonomi diarahkan pada pembentukan struktur ekonomi yang mapan dan lebih berpihak pada rakyat banyak; infrastruktur dasar lebih mendukung arah pengembangan kawasan prioritas; pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berjalan dengan lebih efisien dan efektif, dan hukum lebih diutamakan; serta penataan ruang menjadi dasar kebijakan pembangunan dengan mengedepankan kelestarian alam dan lingkungan. Kata kunci: Menyiapkan fondasi/meletakkan dasar	Penguatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri mulai berjalan, pengembangan perekonomian telah mengarah pada perbaikan struktur antara produk hulu-hilir. Lingkungan mulai terkendali. Prasarana dasar pembangunan semakin memiliki peran dalam pemerataan dan mendorong pertumbuhan wilayah, Pelaksanaan pembangunan makin menunjukkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dengan partisipasi yang makin meningkat serta penataan ruang dijadikan sebagai dasar pijakan pembangunan daerah. Kata kunci: Membangun/melanjutkan pembangunan di atas fondasi/dasar yang telah diletakkan.	Kualitas SDM semakin meningkat, kebergantungan ekonomi pada sumberdaya alam yang tidak terbarukan mulai berkurang, sedangkan pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan semakin berkembang, dan struktur ekonomi semakin mantap. Prasarana dan sarana dasar pembangunan telah mencapai wilayah pedalaman, pemerintahan berjalan makin efisien, efektif, dan transparan. Selanjutnya penataan ruang menjadi acuan pokok pembangunan wilayah, serta kualitas lingkungan secara global semakin terkendali dan terus meningkat kualitasnya. Kata kunci: Mendayagunakan dan menguatkan yang telah dibangun.	Peningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Kata Kunci: Menguatkan dan mengoptimalkan yang telah di dayagunakan untuk mewujudkan cita-cita.

Pada periode 2018-2023, Provinsi Kalimantan Timur berada dalam tahapan pembangunan yang ke-4 sesuai dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur. Tahapan ini menekankan pembangunan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatan efisiensi dan

efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi”. Oleh karena itu pemerintah daerah maupun masyarakat harus berperan aktif dalam mengoptimalkan potensi lokal untuk mencapai kemajuan daerah.

5.1 Visi Daerah

Berdasarkan pada hasil analisis permasalahan dan isu strategis serta visi RPJPD Tahun 2005-2025 Provinsi Kalimantan Timur telah selaras dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018-2023 yaitu:

“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pemerintahan Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

**Tabel 5.2.
Sinergi Visi RPJPD 2005-2025, RPJMN 2015-2019 dan
RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023**

Visi RPJPD 2005-2025	Visi RPJMN 2015-2019	Visi RPJMD 2018-2023
Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan	Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat , Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong	Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat

Adapun penjelasan visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023:

Tabel 5.3.

Penjelasan Visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023

Pernyataan Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat	Berani	Pemerintahan mempunyai keberanian, tekad dan komitmen yang kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundangan untuk mensejahterakan masyarakat
	Berdaulat	Kalimantan Timur memiliki kemantapan dalam pemerintahan, hukum dan pelayanan publik
		Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar
		Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
		Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas dan memiliki daya saing

5.2 Misi Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang yaitu:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;

5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Penjelasan masing-masing dari misi di atas diuraikan sebagai berikut:

Misi 1 : Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas

Kalimantan Timur memiliki kekayaan alam yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, namun dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas yang memadai. Tidak meratanya distribusi jumlah dan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur menjadi tantangan yang perlu dikedepankan, agar semakin meningkatkan daya saing provinsi, baik secara regional, nasional dan internasional.

Perkembangan global, baik politik maupun teknologi, dapat memberikan dampak yang nyata dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di Kalimantan Timur. Rendahnya produktivitas menjadi tantangan, yang dapat dijawab melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, dan penerapan pengetahuan dan teknologi yang lebih efektif dan efisien berdampak rendah terhadap lingkungan hidup.

Arah kebijakan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi melalui pengembangan pendidikan secara merata di Provinsi Kalimantan Timur baik pendidikan formal di sekolah, pendidikan vokasi, maupun pendidikan informal di luar sekolah. Peran serta perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas semakin ditingkatkan, untuk memberikan keadilan bagi seluruh warga Kalimantan Timur. Sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi saja tidak cukup akan tetapi diperlukan juga sumber daya manusia yang berakhlak mulia untuk membentuk identitas dan karakter manusia yang berkualitas. Pendidikan agama dan integrasi budaya lokal penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan pembangunan daerah.

Dengan demikian rencana pembangunan sumber daya manusia Kalimantan Timur bersifat komprehensif dengan mempertimbangkan baik aspek jasmani

(pangan, sandang, dan perumahan) maupun aspek rohani (pendidikan karakter, mental dan spiritual) sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki, lingkungan sosial maupun kultural daerah.

Misi 2 : Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan

Perkembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur sejak beberapa dasawarsa telah melalui beberapa fase perkembangan ekonomi yang kurang kokoh dan berkualitas. Dalam hal penciptaan Nilai Tambah Bruto (NTB), perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh sektor primer. Peranan sektor primer menunjukkan kecenderungan terus meningkat, sementara peranan sektor sekunder terus menurun pada kurun yang sama. Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih mengandalkan produk barang mentah (*raw material*) dan belum pada barang olahan (*processed product*). Sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan memiliki peran dominan dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.

Produktivitas kawasan yang rendah, serta belum optimalnya pemanfaatan lahan bercadangan karbon rendah, utamanya untuk kehutanan dan perkebunan, serta belum optimalnya produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan, menjadi tantangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Belum terbangunnya industri hilir (sekunder-tercier) hasil pertanian dalam arti luas, menjadikan nilai tambah komoditi Kalimantan Timur belum memberikan hasil yang optimum. Selain itu, belum adanya terminal-terminal distribusi hasil pertanian dalam arti luas, dan belum tersedianya sentra industri perikanan, menjadikan Kalimantan Timur kehilangan potensi pendapatan daerah.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah masih menjadi persoalan dalam kegiatan ekonomi Kalimantan Timur. Kesenjangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur relatif masih tinggi. Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat karena peningkatan pembangunan daerah tidak

selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk secara merata. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan, pendidikan, dan berbagai modal lainnya. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk adalah rasio Gini. Rasio Gini Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun 2013-2017 berfluktuasi dan memperlihatkan kecenderungan stabil pada angka 0,33. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur juga relatif masih melebar.

Dalam konteks mewujudkan daya saing ekonomi, tantangan yang dihadapi adalah membangun keterkaitan antara hulu dan hilir dari komoditas-komoditas unggulan sebagai basis perekonomian Provinsi Kalimantan Timur pada masa mendatang. Percepatan transformasi ekonomi menuju keseimbangan permintaan antara dan permintaan akhir merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian wilayah Provinsi Kalimantan Timur sehingga perlu adanya perubahan pola pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dalam pengembangan ekonomi wilayah. Selain itu, upaya mempersiapkan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang lebih seimbang antara ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan dengan sumber daya alam terbarukan secara sistematis dibutuhkan upaya keras yang terintegrasi mewujudkan ketahanan pangan, pengembangan komoditas agroindustri unggulan dan andalan yang strategis, serta mengoptimalkan produksi perikanan dan kelautan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan strategi besar pembangunan dengan fokus pada struktur ekonomi berbasis sekunder dan tersier. Di masa mendatang, Provinsi Kalimantan Timur mendorong lahirnya industri hilir agar hasil eksploitasi sumber daya alam yang diproduksi di Provinsi Kalimantan Timur tidak diekspor dalam bentuk mentah namun sudah dalam bentuk produk olahan baik berupa barang setengah jadi maupun barang jadi dengan memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal.

Hal yang ingin dicapai dalam konteks ekonomi yang berkerakyatan dalam misi kedua adalah terciptanya sistem ekonomi partisipatif yang meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat serta memberikan akses sebesar-

besarnya secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat baik dalam proses produksi, distribusi, maupun konsumsi. Upaya bantuan modal usaha, pendampingan teknis dan manajerial, serta bantuan pemasaran pada usaha kecil dan menengah akan semakin ditingkatkan. Ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya dan strategi untuk lebih mengedepankan masyarakat dalam membangun kesejahteraannya, serta memperkuat BUMDES sebagai penggerak perekonomian pedesaan. Pembangunan dan pengembangan ekonomi harus berakar pada ekonomi kerakyatan namun tetap mengacu pada pertumbuhan, pemerataan, stabilitas, dan peningkatan sumber daya manusia dengan cara mempercepat proses perubahan dari masyarakat yang masih berfikir dan berperilaku tradisional ke masyarakat modern; dari sistem ekonomi subsistem ke ekonomi pasar; dan dari masyarakat yang tergantung ke masyarakat yang mandiri. Penyelesaian konflik antara masyarakat dan perusahaan dilakukan melalui berbagai skema yang dimungkinkan di dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam menguatkan kemitraan antara perusahaan dengan kelompok ekonomi masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan rakyat tak lagi bertumpu pada dominasi pemerintah pusat, modal asing, dan perusahaan konglomerasi, melainkan pada kekuatan pemerintah daerah, persaingan yang berkeadilan, kepastian berusaha, dukungan permodalan dan teknologi, usaha pertanian rakyat, serta peran BUMDES dan koperasi sejati yang diharapkan mampu berperan sebagai fondasi penguatan ekonomi rakyat. Strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi dalam melaksanakan demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dan dibawah kepemimpinan dan kepemilikan anggota masyarakat.

Misi 3 : Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan

Indikator kemakmuran dan kemajuan kualitas hidup manusia tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi sejauh mana komitmen dan usaha pemerintah suatu daerah dalam menyediakan fasilitas infrastruktur secara merata. Kualitas infrastruktur yang belum memadai menjadi problem daya saing di Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan infrastruktur secara merata merupakan

faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci perkembangan suatu wilayah, dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Misi ini diarahkan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian masyarakat secara merata dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta antisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan jalan dengan kapasitas di atas 10 Ton pada jalan provinsi dan jalan produksi lainnya dalam rangka menghubungkan sentra-sentra produksi dan kawasan pertumbuhan ekonomi menuju pusat pemasaran outlet. Penyediaan transportasi udara dan laut yang handal serta representatif untuk meningkatkan arus barang dan jasa dari dan ke Provinsi Kalimantan Timur, sebagai upaya pembukaan keterisolasian wilayah dengan dikembangkannya sarana dan prasarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan dermaga, pembangunan bandar udara serta penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi. Disamping itu pemenuhan kecukupan layanan air minum, air baku untuk jaringan irigasi dan kawasan industri serta infrastruktur pertanian melalui peningkatan kualitas dan kapasitas pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan, penyediaan perumahan sederhana, layak huni dan sehat diarahkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam konteks energi terbarukan, misi ini tidak terlepas dari konsep pembangunan ekonomi hijau. Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan strategi besar mewujudkan ketahanan energy melalui pengembangan sumber energy baru terbarukan (EBT).

Misi 4 : Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

Tranformasi ekonomi berbasis *unrenewable resources* ke *renewable resources* harus dilakukan dengan mewujudkan keseimbangan antara pilar

ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam perencanaan pembangunan menuju ekonomi hijau. Diharapkan transformasi pembangunan menuju ekonomi hijau atau ekonomi yang rendah karbon akan mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial serta mengurangi resiko lingkungan dan kerusakan ekologi.

Sebagai upaya untuk mendukung ekonomi hijau, maka komitmen terhadap perbaikan lingkungan, rasionalisasi dan harmonisasi penataan ruang (RTRW) untuk memberikan jaminan terhadap keberlanjutan pembangunan ekonomi dan ekosistem menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kualitas lingkungan menjadi salah satu upaya *balancing* terhadap pembangunan ekonomi agar berdimensi “berkelanjutan”. Fenomena iklim saat ini tidak bisa terprediksi sehingga adaptasi terhadap perubahan iklim mutlak dilakukan, khususnya yang terkait dengan strategi pembangunan sektor kesehatan, pertanian, permukiman, dan tata ruang. Dalam rangka mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus mulai menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Masyarakat juga harus terlibat langsung dalam upaya menjaga dan merawat lingkungan di masa perubahan iklim yang tidak menentu ini.

Upaya lain yang dilakukan adalah meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam mengantisipasi risiko bencana, agar dapat memiliki kesiapsiagaan, sarana-prasarana pencegahan, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana, serta memastikan pemulihan pasca bencana yang lebih baik, yang keseluruhnya diintegrasikan dalam perencanaan keruangan (RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota dan Rencana Rinci Tata Ruang kawasan hingga tingkat Desa), rencana pembangunan (RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten/Kota, dan RPJM Desa), serta sektor-sektor lainnya, seperti infrastruktur, pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

Misi 5 : Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik sebagai pengejawantahan dari prinsip-prinsip

dasar *good governance*. Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan masyarakat, peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Setidaknya ada Sembilan parameter keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu; 1) Tidak ada korupsi; 2) Tidak ada pelanggaran hukum; 3) APBD baik; 4) Semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik; 5) Perijinan cepat dan mudah serta tidak ada overlap; 6) Komunikasi dengan publik berjalan baik; 7) Penggunaan waktu efektif dan produktif; 8) Adanya *reward* dan *punishment* terhadap kinerja aparat pemerintah; dan 9) Hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah provinsi melakukan harmonisasi dengan pemerintahan kabupaten/kota, pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah. Upaya untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui keterbukaan layanan informasi publik dan menguatkan akuntabilitas serta kecepatan layanan perijinan, sehingga tingkat kepuasan masyarakat dapat semakin meningkat.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi dioperasionalisasikan menjadi rumusan tujuan dan sasaran. Rumusan tujuan memperlihatkan operasionalisasi upaya pencapaian misi, sedangkan sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dari pelaksanaan tujuan. Rumusan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Tabel 5.4
Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD
Visi ; Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Tahun					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA TERUTAMA PEREMPUAN DAN PENYANDANG DISABILITAS	Tujuan 1: Mewujudkan Masyarakat yang berakhlak mulia dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,12	75,30	75,43	75,56	75,76	76,87	76,87
		Sasaran 1: Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia	72,86	73,50	74,50	75,50	76,50	77,50	77,50
		Sasaran 2: Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,36	9,40	9,50	9,60	9,70	9,80	9,80
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,49	13,89	14,13	14,34	14,73	14,96	14,96
		Sasaran 3: Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,7	73,72	73,74	73,76	73,78	73,8	73,8
		Tujuan 2: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	6,19	6,00	5,94	5,87	5,78	5,70	5,70
		Sasaran 4: Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	56,64	56,70	56,71	56,72	56,73	56,75	56,75
		Sasaran 5: Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	56,33	56,74	57,23	57,82	58,27	58,86	58,86
		Sasaran 6: Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	50	51	52	53	54	55	55
2	BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN	Tujuan 3: Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,13	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1
		Sasaran 7: Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	4,40	4,50	4,60	4,70	4,80	4,90	4,90

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Tahun					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
		Sasaran 8: Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal (desa)	518	503	478	448	413	368	368
		Sasaran 9: Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	0,93	0,95	0,97	0,99	1,01	1,03	1,03
		Tujuan 4: Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas dan Non Batubara (%)	5,24	6±1	6±1	6±1	6±1	6±1	6±1
		Sasaran 10: Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	18,33	20	20	20	21	21	21
		Sasaran 11: Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi (Rp Triliun)	25,53	31,5	33,08	34,73	36,47	38,29	38,29
		Sasaran 12: Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,57
			Rasio Pemenuhan Beras (%)	62,82	62,46	67,41	72,69	78,40	84,53	84,53
		Sasaran 13: Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,3	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37
		Sasaran 14: Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4,49	5,1	5,4	5,7	6	6,3	6,3
		Sasaran 15: Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,46	1,52	1,58	1,64	1,71	1,78	1,78
		Sasaran 16: Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,15	1	1,05	1,1	1,15	1,2	1,2

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Tahun					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
		Sasaran 17: Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah (%)	-8,16	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84
3	BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Tujuan 5: Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	0,330	0,330	0,329	0,328	0,327	0,326	0,326
		Sasaran 18: Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Jumlah penumpang yang terlayani (orang)	10.392.536	10.705.000	11.026.000	11.536.200	11.700.000	12.050.000	12.050.000
			Jumlah barang (ton)	325.051.663	334.805.000	344.850.000	355.200.000	365.900.000	376.900.000	376.900.000
		Sasaran 19: Meningkatnya konektivitas antar kawasan	Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi (kawasan)	2	2	3	3	3	6	6
		Sasaran 20: Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	Cakupan layanan air minum (%)	71,83	73,33	75,00	77,00	81,00	85,00	85,00
			Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	13.618,5	14.008,5	14.808,5	15.558,5	16.258,5	16.925,5	16.925,5
			Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	730	664	575	505	435	365	365
		Sasaran 21: Menurunnya kawasan kumuh	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	673,42	620,06	533,56	459,56	409,56	359,56	359,56
		Sasaran 22: Terpenuhinya kebutuhan energi daerah	Rasio elektrifikasi (%)	84,21	85,50	87,50	89,50	92,00	95,00	95,00
		Tujuan 6: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,65	75,75	75,85	75,95	76,05	76,15	76,15
4	BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN	Sasaran 23: Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	7,2	26,3	26,89	27,75	28,5	29,33	29,33
		Sasaran 24: Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana	0	145	140	135	130	125	125
		Sasaran 25: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	73,18	66,68	69,01	75,09	80,09	83,09	83,09
		Tujuan 7: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	B (68,93)	B (69,50)	B (70,50)	B (71,50)	B (72,50)	B (74,50)	B (74,50)
5	BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI									

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Tahun					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
	PELAYANAN PUBLIK	Sasaran 26: Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	77,49	77,50	78,00	78,50	79,00	80,00	80,00
		Sasaran 27: Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Skor Kepuasan Masyarakat (SKM)	80,56	81	81,50	82	82,50	83	83
		Sasaran 28: Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4

BAB 7

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Pada bagian ini menjabarkan kerangka pendanaan yang bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian sebagai berikut :

Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kode			KAPASITAS RIIL /BELANJA	Proyeksi					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1			2	3	4	5	6	7	8
I			KAPASITAS RIIL KEUANGAN	8,566,250,000,0 00.00	5.518.720.811. 513	5.513.723.979. 007	6.084.616.771. 007	6.660.691.857. 637	7.337.479.109. 507
II			BELANJA	8,566,250,000,0 00.00	10.669.670.00 0.000	11.534.474.22 7.000	12.147.101.01 0.000	13.246.220.48 7.000	14.201.152.01 7.500
II	1		Belanja Tidak Langsung	5,193,673,675,8 86.00	6.486.979.778. 075	6.526.656.978. 075	6.526.656.978. 075	6.526.656.978. 075	6.526.656.978. 075
II	1	1	Belanja Pegawai	1,672,792,329,2 86.00	1.774.799.167. 283	2.287.901.347. 513	2.287.901.347. 514	2.287.901.347. 515	2.287.901.347. 516
II	1	2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
II	1	3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
II	1	4	Belanja Hibah	1,055,451,599,6 00.00	740.543.638.40 0	730.944.338.40 0	730.944.338.40 0	661.811.399.19 0	383.667.120.5 59
II	1	5	Belanja Bantuan Sosial	5,500,000,000,0 0	9.774.550.000	9.774.550.000	9.774.550.000	9.774.550.000	9.774.550.000
II	1	6	Belanja Bagi Hasil	1,890,570,835,0 00.00	2.579.253.034. 454	2.977.391.300. 000	3.019.125.291. 000	3.542.169.681. 370	3.820.313.960. 000
II	1	7	Belanja Bantuan Keuangan	551,858,912,000 .00	1.357.609.387. 938	495.645.442.16 2	453.911.451.16 1		
II	1	8	Belanja Tidak Terduga	17,500,000,000. 00	25,000,000,000 .00	25,000,000,000 .00	25,000,000,000 .00	25,000,000,000 .00	25,000,000,000 0.00
II	2		Belanja Langsung	3,372,576,324,1 14.00	4.143.013.021. 925	5.007.817.248. 925	5.620.444.031. 925	6.719.563.508. 925	7.674.495.039. 425
II	2	1	Belanja Pegawai	215,026,293,328 .00	292.637.422.32 9	353.721.970.81 3	396.994.227.42 4	474.629.390.25 8	542.079.987.2 39
II	2	2	Belanja Modal	1,527,763,510,9 34.00	1.430.451.320. 072	1.729.040.859. 031	1.940.561.504. 951	2.320.052.686. 483	2.649.760.331. 897
II	2	3	Belanja Barang dan Jasa	1,629,786,519,8 52.00	2.419.924.279. 524	2.925.054.419. 081	3.282.888.299. 550	3.924.881.432. 184	4.482.654.720. 299

7.2. Program Perangkat Daerah

Pada bagian ini menyajikan rumusan program pembangunan 5(lima) tahun kedepan baik program yang bersifat strategis maupun program yang bersifat operasional. Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program untuk perencanaan strategis dan program untuk perencanaan operasional. Dalam hal program didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah. Perumusan program bagi penyelenggaraan urusan dilakukan berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah di tiap urusan (wajib dan pilihan) sebagaimana Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 6. sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
 1. tenaga kerja;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pangan;
 4. pertanahan;
 5. lingkungan hidup;
 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

9. perhubungan;
 10. komunikasi dan informatika;
 11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 12. penanaman modal;
 13. kepemudaan dan olah raga;
 14. statistik;
 15. persandian;
 16. kebudayaan;
 17. perpustakaan; dan
 18. kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:
1. kelautan dan perikanan;
 2. pariwisata;
 3. pertanian;
 4. kehutanan;
 5. energi dan sumber daya mineral;
 6. perdagangan;
 7. perindustrian; dan
 8. transmigrasi.

Berbagai program yang disajikan dalam Bab 7 ini berbasiskan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh masing-masing perangkat daerah yang bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya sebagai berikut :

Tabel 7.2 Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
I	Urusan Wajib Pelayanan Dasar			2,967,409,713,675.00	3,570,831,251,175.00		4,178,773,050,595.00		5,280,865,855,225.00		6,217,315,243,675.00			
1.01	Pendidikan			880,900,940,675.00	747,346,612,000.00		894,917,796,020.00		1,104,286,504,000.00		1,212,982,648,500.00			
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	76.80%	80.26%	185,000,000,000.00	82.67%	185,000,000,000.00	86.30%	192,000,000,000.00	88.26%	210,525,082,000.00	88.26%	215,442,596,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	6 unit	6 unit	5,613,548,200.00	6 unit	5,613,548,200.00	6 unit	14,108,890,000.00	6 unit	18,618,444,000.00	6 unit	18,618,444,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	90%	91%	6,955,460,000.00	92%	6,955,460,000.00	93%	6,955,460,000.00	97%	9,828,450,000.00	97%	14,850,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan n Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	78%	4,228,862,075.00	81%	4,132,041,000.00	82%	4,132,041,000.00	83%	6,180,000,000.00	84%	9,906,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.01.19	Program Pendidikan Luar Biasa	Persentase pelayanan pendidikan luar biasa	60%	65%	28,793,195,800.00	70%	23,793,195,800.00	75%	24,356,000,000.00	80%	40,689,400,000.00	85%	45,090,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi	95%	96%	42,980,914,600.00	97%	14,770,000,000.00	98%	28,340,000,000.00	99%	30,349,000,000.00	100%	37,728,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah yang memenuhi standar pelayanan minimal bidang pendidikan menengah dan khusus	75%	77%	7,827,000,000.00	79%	7,827,000,000.00	81%	9,370,000,000.00	83%	11,443,369,000.00	85%	20,277,245,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.23	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	Penerima Beasiswa KALITIM TUNTAS yang berprestasi	791 Orang	6500 Orang	93,570,000,000.00	13000 Orang	93,570,000,000.00	19500 Orang	100,000,000,000.00	26000 Orang	110,000,000,000.00	31700 Orang	121,000,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.38	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan	Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa yang tidak putus sekolah	635 Siswa	2500 Siswa	14,821,000,000.00	2500 Siswa	77,943,407,000.00	2500 Siswa	53,718,361,600.00	2500 Siswa	57,855,561,600.00	2500 Siswa	30,180,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni SMA/MA	68,23%	70%	207,606,000,000.00	73%	131,940,000,000.00	77%	149,660,020,000.00	82%	158,543,900,000.00	85%	164,254,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Murni SMK, MAK	68,23%	70%	230,796,000,000.00	73%	103,093,000,000.00	77%	219,257,023,420.00	82%	357,235,297,400.00	85%	442,616,363,500.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.41	Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	Jumlah Sekolah yang Mengembangkan Ekstrakurikulu m Berbasis Agama	72 Persen	85 Persen	10,000,000,000.00	100 Persen	10,000,000,000.00	150 Persen	10,000,000,000.00	200 Persen	10,000,000,000.00	233 Persen	10,000,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.42	Program Pengembangan Sekolah Kejuruan	Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri	30 SMK	40 SMK	-	55 SMK	20,000,000,000.00	70 SMK	20,000,000,000.00	86 SMK	20,000,000,000.00	86 SMK	20,000,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.43	Program Pendidikan Jarak Jauh (Distance Learning System)	Persentase sekolah yang telah menggunakan sistem pendidikan jarak jauh	0 persen	0 persen	-	90 persen	20,000,000,000.00	95 persen	20,000,000,000.00	97 persen	20,000,000,000.00	100 persen	20,000,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	76.80%	80.26%	1,076,360,000.00	82.67%	1,076,360,000.00	86.30%	1,300,000,000.00	88.26%	1,300,000,000.00	88.63%	1,300,000,000.00	UPTD Taman Budaya
1.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	6 unit	6 unit	472,600,000.00	6 unit	472,600,000.00	6 unit	500,000,000.00	6 unit	500,000,000.00	6 unit	500,000,000.00	UPTD Taman Budaya
1.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	90%	91%	90,000,000.00	92%	90,000,000.00	93%	150,000,000.00	95%	150,000,000.00	97%	150,000,000.00	UPTD Taman Budaya
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	76.80%	80.26%	870,000,000.00	82.67%	870,000,000.00	86.30%	870,000,000.00	88.26%	870,000,000.00	88.63%	870,000,000.00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	6 unit	6 unit	32,000,000,000.00	6 unit	31,725,500,000.00	6 unit	31,725,500,000.00	6 unit	31,725,500,000.00	6 unit	31,725,500,000.00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	90%	91%	-	92%	274,500,000.00	93%	274,500,000.00	95%	274,500,000.00	97%	274,500,000.00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi	90%	91%	8,200,000,000.00	92%	8,200,000,000.00	93%	8,200,000,000.00	95%	8,200,000,000.00	97%	8,200,000,000.00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1.02	Kesehatan				874,153,454,750.00		912,780,714,500.00		886,074,160,650.00		913,541,159,000.00		949,992,239,000.00	
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	82.34%	85%	2,858,978,240.00	86%	2,875,828,240.00	87%	2,858,978,240.00	88%	2,858,978,240.00	90%	2,858,978,240.00	Dinas Kesehatan
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit	5 unit	2,599,158,000.00	5 unit	1,047,900,000.00	5 unit	1,047,900,000.00	5 unit	1,309,100,000.00	5 unit	1,809,100,000.00	Dinas Kesehatan
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	25.64%	30%	1,517,150,000.00	40%	1,987,150,000.00	60%	1,487,150,000.00	70%	1,487,150,000.00	70%	1,487,150,000.00	Dinas Kesehatan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	65%	67%	1.245.583.000.00	68%	1.072.750.000.00	69%	1.072.750.000.00	70%	1.072.750.000.00	71%	1.072.750.000.00	Dinas Kesehatan
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan Vaksin esensial di puskesmas	98%	98.50%	3.030.933.260.00	99%	1.938.576.760.00	99.80%	1.573.531.760.00	100%	1.500.000.000.00	100%	1.500.000.000.00	Dinas Kesehatan
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan antenatal 4 kali (K4)	10%	30%	7.599.827.760.00	50%	3.753.000.000.00	70%	3.353.000.000.00	90%	3.353.000.000.00	100%	5.039.076.760.00	Dinas Kesehatan
1.02.17	Program Peningkatan Kemiskinan Bidang Kesehatan	Persentase penduduk miskin dan tidak mampu yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan	87.50%	87.50%	41.478.068.000.00	90%	41.500.000.000.00	92%	41.500.000.000.00	95%	41.000.000.000.00	100%	41.500.000.000.00	Dinas Kesehatan
1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	persentase Kab/Kota yang melaksanakan min. 5 tema kampanye GERMAS	50%	60%	1.834.215.000.00	70%	903.340.000.00	80%	903.340.000.00	90%	903.340.000.00	100%	903.340.000.00	Dinas Kesehatan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.02.22	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Jumlah Kab/Kota yang berhasil menurunkan kejadian penyakit menular	5 Kab/Kota	1,095,015,000.00	6 Kab/Kota	1,150,000,000.00	7 Kab/Kota	1,150,000,000.00	8 Kab/Kota	1,150,000,000.00	10 Kab/Kota	1,150,000,000.00	Dinas Kesehatan	
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas terakreditasi utama	6%	2,385,297,500.00	43%	2,500,000,000.00	64%	3,000,000,000.00	96%	4,412,331,760.00	100%	3,370,710,000.00	Dinas Kesehatan	
1.02.56	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Persentase fasyankes yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga kesehatannya	50 Fasyankes	1,441,700,240.00	70 Fasyankes	1,453,350,000.00	80 Fasyankes	1,453,350,000.00	90 Fasyankes	1,822,938,500.00	100 Fasyankes	2,017,995,000.00	Dinas Kesehatan	
1.02.59	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah Kab/Kota yang berhasil menurunkan kejadian penyakit tidak menular	5 Kab/Kota	389,925,000.00	6 Kab/Kota	500,000,000.00	7 Kab/Kota	1,100,000,000.00	8 Kab/Kota	1,000,000,000.00	10 Kab/Kota	1,091,300,000.00	Dinas Kesehatan	
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase terpenuhinya layanan BLUD sesuai standar	100%	4,600,000,000.00	100%	5,000,000,000.00	100%	5,500,000,000.00	100%	6,000,000,000.00	100%	6,600,000,000.00	UPTD Laboratorium Kesehatan (BLUD)	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	60%	65%	1,338,450,000.00	70%	1,338,450,000.00	75%	2,500,000,000.00	80%	2,500,000,000.00	85%	2,500,000,000.00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit	3 unit	1,740,500,000.00	3 unit	1,740,500,000.00	3 unit	2,235,578,000.00	3 unit	2,200,000,000.00	3 unit	2,500,000,000.00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	100%	100%	358,975,000.00	100%	358,975,000.00	100%	600,000,000.00	100%	800,000,000.00	100%	1,100,000,000.00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas terakreditasi utama	%	15%	8,835,578,000.00	0%	-	%	-	%	-	%	-	UPTD Balai Latihan Kesehatan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.02.56	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Persentase fasyankes yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga kesehatannya	50 Fasyankes	60 Fasyankes	1,062,075,000.00	70 Fasyankes	9,897,653,000.00	80 Fasyankes	8,000,000,000.00	90 Fasyankes	7,835,578,000.00	100 Fasyankes	8,900,000,000.00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	70%	1,944,150,412.00	80%	2,000,000,000.00	90%	2,400,000,000.00	95%	2,400,000,000.00	95%	2,400,000,000.00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	1,594,158,849.00	3 unit	1,300,000,000.00	3 unit	1,000,000,000.00	3 unit	1,000,000,000.00	3 unit	1,000,000,000.00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	60%	65%	391,000,000.00	70%	410,000,000.00	75%	450,000,000.00	80%	580,000,000.00	85%	580,000,000.00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	98%	98.50%	-	99%	1,190,000,000.00	99.50%	1,150,000,000.00	99.70%	1,227,247,500.00	100%	1,000,000,000.00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.02.26	Program pengadain, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Unit pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM)	5554 SPM	70 SPM	2,770,690,739.00	80 SPM	800,000,000.00	90 SPM	500,000,000.00	95 SPM	500,000,000.00	100 SPM	4,425,800,000.00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang layak pakai sesuai standar	0%	50%	-	60%	1,000,000,000.00	70%	1,000,000,000.00	80%	1,000,000,000.00	90%	1,000,000,000.00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1.02.104	Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	0%	100%	-	100%	1,000,000,000.00	100%	500,475,000.00	100%	500,000,000.00	100%	500,000,000.00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penanganu kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	60%	65%	852,200,000.00	70%	1,000,000,000.00	75%	1,500,000,000.00	80%	2,000,000,000.00	85%	2,000,000,000.00	UPTD Laboratoriu m Kesehatan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit	2,617,727,800.00	3 unit	2,800,000,000.00	3 unit	2,782,623,500.00	3 unit	3,500,000,000.00	3 unit	4,500,000,000.00	UPTD Laboratorium Kesehatan	
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	60%	30,072,200.00	70%	115,000,000.00	75%	125,000,000.00	80%	275,000,000.00	85%	375,000,000.00	UPTD Laboratorium Kesehatan	
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	80%	-	85%	2,085,000,000.00	87%	1,775,000,000.00	90%	1,700,851,000.00	95%	2,158,145,000.00	UPTD Laboratorium Kesehatan	
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Presentase capaian pelaksanaan standar pelayanan minimal	0%	406,044,000.00	0%	-	0%	-	100%	-	0%	-	UPTD Laboratorium Kesehatan	
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	74%	8,000,000,000.00	100%	8,000,000,000.00	100%	8,000,000,000.00	100%	8,000,000,000.00	100%	8,000,000,000.00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim (BLUD)	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	60%	65%	5,172,400,000.00	70%	5,200,000,000.00	75%	5,172,400,000.00	80%	5,172,400,000.00	85%	5,172,400,000.00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit	3 unit	586,050,000.00	3 unit	800,000,000.00	3 unit	565,369,000.00	3 unit	565,369,000.00	3 unit	565,369,000.00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	70%	75%	223,650,000.00	80%	800,000,000.00	85%	700,000,000.00	90%	700,000,000.00	95%	700,000,000.00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase standar RS terhadap pelayanan obat dan perbekalan kesehatan	80%	82%	4,967,478,000.00	84%	3,000,000,000.00	85%	2,500,000,000.00	87%	2,500,000,000.00	90%	2,500,000,000.00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase standar RS terhadap pelayanan kesehatan	100%	100%	-	100%	1,000,000,000.00	100%	500,000,000.00	100%	500,000,000.00	100%	500,000,000.00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/	Persentase standar RS terhadap pelayanan kesehatan	0%	80%	1,150,048,000.00	90%	2,700,000,000.00	95%	2,046,857,000.00	100%	2,000,000,000.00	100%	2,000,000,000.00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
	rumah sakit mata														
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Alat kesehatan rumah sakit berfungsi dengan baik	1%	100%	25.000.000.00	100%	624.626.000.00	100%	640.000.000.00	100%	686.857.000.00	100%	686.857.000.00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	78%	80%	652.000.000.00	82%	1.000.000.000.00	84%	1.000.000.000.00	86%	1.000.000.000.00	88%	2.000.000.000.00	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda	
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	67%	69%	50.000.000.00	70%	50.000.000.00	71%	50.000.000.00	73%	50.000.000.00	75%	50.000.000.00	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda	
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Stock out dan stagnansi obat dan bhp medis	7%	6%	15.000.000.000.00	5%	1.000.000.000.00	4%	1.000.000.000.00	3%	1.000.000.000.00	3%	1.500.000.000.00	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Ketepatan pengadaan sesuai perencanaan	75%	85%	10,177,840,000.00	90%	17,300,000,000.00	100%	9,998,178,600.00	100%	18,200,000,000.00	100%	13,000,000,000.00	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik	75%	85%	6,801,000,000.00	90%	8,150,000,000.00	100%	10,800,000,000.00	100%	7,453,144,000.00	100%	13,000,000,000.00	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda
1.02.56	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Tingkat kepuasan kerja terhadap pengembangan SDM dan pemberdayaan SDM	70%	80%	-	85%	300,000,000.00	87%	700,000,000.00	89%	700,000,000.00	91%	453,144,000.00	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda
1.02.60	Program Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan	Ketepatan waktu pemberian insentif sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda
1.02.10 2	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Tingkat Kepuasan Pasien	75%	85%	-	90%	100,000,000.00	91%	100,000,000.00	92%	100,000,000.00	93%	100,000,000.00	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.02.10 4	Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Persentase capaian indikator standar pelayanan minimal Rumah Sakit	76%	-	80%	500,000,000.00	82%	600,000,000.00	84%	1,000,000,000.00	86%	1,500,000,000.00	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda	
1.02.10 5	Program Rumah Sakit Pendidikan	Peningkatan mutu luaran peserta didik (peningkatan IPK/Tahun)	3.1	-	3.2	300,000,000.00	3.25	300,000,000.00	3.3	300,000,000.00	3.35	300,000,000.00	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda	
1.02.10 6	Program Peningkatan Tata Kelola RS, dan Tata Kelola Klinis	Pencapaian indikator kinerja utama RS	80%	-	84%	1,000,000,000.00	86%	1,000,000,000.00	88%	500,000,000.00	90%	1,400,000,000.00	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda	
1.02.10 7	Program Tata Kelola Keuangan	Cost recovery	65%	-	78%	300,000,000.00	81%	400,000,000.00	84%	400,000,000.00	87%	400,000,000.00	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda	
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jenis pelayanan sesuai standar rumah sakit kelas A	100%	454,000,000,000.00	100%	461,000,000,000.00	100%	465,000,000,000.00	100%	470,000,000,000.00	100%	482,000,000,000.00	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda (BLUD)	
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	78.42%	-	79%	549,000,000.00	79.30%	4,000,000,000.00	79.50%	5,000,000,000.00	80%	5,000,000,000.00	RSUD dr. Kanjoso Dhatibow o di Balikpapan	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	80 unit	-	85 unit	-	90 unit	2,000,000,000.00	95 unit	2,000,000,000.00	100 unit	2,500,000,000.00	RSUD dr. Kanjoso Djatiribow o di Balikpapan	
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelayangan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	100%	-	100%	1,635,000,000.00	100%	1,500,000,000.00	100%	1,750,000,000.00	100%	2,250,000,000.00	RSUD dr. Kanjoso Djatiribow o di Balikpapan	
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	72%	50,000,000.00	72.50%	79,000,000.00	73%	100,000,000.00	73.50%	100,000,000.00	74%	100,000,000.00	RSUD dr. Kanjoso Djatiribow o di Balikpapan	
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pelayanan sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS)	100%	100%	100%	525,000,000.00	100%	500,000,000.00	100%	750,000,000.00	100%	500,000,000.00	RSUD dr. Kanjoso Djatiribow o di Balikpapan	
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit parti-paru/ rumah sakit mata	Persentase Kelengkapan sarana prasarana dan akses sesuai standar kelas rumah sakit	78%	80%	27,348,000,000.00	83%	49,625,500,000.00	85%	11,098,764,550.00	90%	15,786,769,000.00	18,036,769,000.00	RSUD dr. Kanjoso Djatiribow o di Balikpapan	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi sesuai standar	90%	91%	-	92%	1,500,500,000.00	93%	2,500,000,000.00	95%	2,500,000,000.00	95%	2,500,000,000.00	RSUD dr. Kanujoso Djatiribowo di Balikpapan
1.02.62	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Jejaring dengan Fasilitas Kesehatan	0 Jaringan	0	-	10 Jaringan	400,000,000.00	10 Jaringan	400,600,000.00	10 Jaringan	400,600,000.00	10 Jaringan	400,600,000.00	RSUD dr. Kanujoso Djatiribowo di Balikpapan
1.02.102	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan pelanggan	500%	500%	-	500%	200,000,000.00	500%	100,000,000.00	500%	100,000,000.00	500%	100,000,000.00	RSUD dr. Kanujoso Djatiribowo di Balikpapan
1.02.103	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Penilaian proper hijau	80 Sertifikat	80 Sertifikat	-	85 Sertifikat	262,500,000.00	85 Sertifikat	450,000,000.00	85 Sertifikat	450,000,000.00	90 Sertifikat	450,000,000.00	RSUD dr. Kanujoso Djatiribowo di Balikpapan
1.02.104	Program Upaya Kesehatan di Rumah Sakit	Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	76%	80%	-	85%	220,500,000.00	90%	250,000,000.00	95%	250,000,000.00	100%	250,000,000.00	RSUD dr. Kanujoso Djatiribowo di Balikpapan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Kelas B BLUD	Jenis Pelayanan Sesuai Standar Rumah Sakit Kelas B	0 Instalasi / unit	18 Instalasi / unit	208,100,000,000.00	18 Instalasi / unit	212,300,000,000.00	19 Instalasi / unit	216,000,000,000.00	20 Instalasi / unit	220,000,000,000.00	21 Instalasi / unit	225,000,000,000.00	RSUD dr. Kamjoso Djatibowo di Balikpapan (BLUD)
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna pelayanan terhadap pelayanan PD (SKM)	70 Nilai	74 Nilai	8,244,355,000.00	77 Nilai	9,523,675,000.00	80 Nilai	9,600,000,000.00	83 Nilai	9,650,000,000.00	86 Nilai	9,700,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kantor sesuai standar tiap unit pelayanan	5 unit	6 unit	-	7 unit	312,000,000.00	8 unit	1,000,000,000.00	9 unit	1,000,000,000.00	10 unit	1,000,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	75%	77%	82,000,000.00	81%	602,000,000.00	85%	650,000,000.00	90%	700,000,000.00	95%	800,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	65%	68%	116,000,000.00	71%	116,000,000.00	75%	150,000,000.00	78%	150,000,000.00	81%	150,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelaksanaan standar Pelayanan Keperawatan	65%	70%	12.000.000.00	75%	15.000.000.00	80%	18.000.000.00	85%	21.000.000.00	90%	24.000.000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Capaian Standar Indikator Keselamatan Pasien	40%	50%	392.400.000.00	60%	250.000.000.00	70%	320.000.000.00	80%	420.000.000.00	90%	420.000.000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Sarana dan Prasarana RS Sesuai Standar	65%	70%	10.863.060.750.00	75%	1.390.300.000.00	80%	5.068.000.000.00	85%	6.073.000.000.00	95%	7.078.000.000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Tersedianya alat-alat kesehatan Rumah Sakit yang layak dipakai dan berfungsi dengan baik	Jenis	3 Jenis	122.700.000.00	Jenis	629.100.000.00	Jenis	930.000.000.00	Jenis	940.000.000.00	Jenis	955.000.000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.61	Program Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Rumah Sakit	Persentase teknologi/aplika si yang dapat dimanfaatkan dengan optimal	58%	66.67%	-	75%	1.200.000.000.00	83.33%	1.300.000.000.00	91.67%	1.400.000.000.00	100%	1.500.000.000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.02.62	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Piutang rumah sakit yang telah terbayarkan	2000000000 Rupiah	-	1000000000 Rupiah	180.000.000.000	1000000000 Rupiah	200.000.000.000	1000000000 Rupiah	200.000.000.000	1000000000 Rupiah	200.000.000.000	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
1.02.63	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur sesuai dengan aturan yang berlaku	83%	-	90%	338.600.000.000	93%	558.000.000.000	95%	568.000.000.000	98%	573.000.000.000	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
1.02.10 4	Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Persentase capaian indikator standar pelayanan minimal rumah sakit	76%	-	85%	8.281.940.500.000	90%	6.139.315.000.000	95%	8.115.755.000.000	100%	9.837.755.000.000	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat	0%	16.000.000.000.000	95%	16.800.000.000.000	95%	17.650.000.000.000	95%	18.500.000.000.000	95%	19.500.000.000.000	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (BLUD)	
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			1.125.072.315.750.000		1.638.753.730.891.000		2.088.683.840.082.000		2.908.855.072.196.000		3.655.279.801.024.000		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	82,34%	85%	12.968.700.000.00	86%	20.000.000.000.00	87%	23.750.000.000.00	88%	27.970.000.000.00	90%	32.200.000.000.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	7 unit	7 unit	3.069.932.117.00	7 unit	4.740.612.935.00	7 unit	5.550.000.000.00	7 unit	6.610.000.000.00	7 unit	7.598.490.367.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	55%	1.689.400.000.00	60%	2.617.000.000.00	65%	3.100.310.876.00	70%	3.646.539.313.00	75%	4.200.000.000.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	66%	75%	941.317.500.00	79%	1.510.000.000.00	80%	1.820.000.000.00	82%	2.040.000.000.00	84%	2.370.000.000.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Tingkat kemitatan jalan provinsi	52,85%	54,30%	552.481.103.020.00	58,88%	994.570.504.517.00	63,46%	1.329.828.399.770.00	68,04%	2.029.191.334.197.00	72,62%	2.661.831.219.624.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.03.16	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kapasitas Air Baku	7922 L/detik	148,924,820,000.00	8322 L/detik	216,507,097,018.00	8622 L/detik	256,652,331,562.00	8622 L/detik	301,998,744,857.00	8982 L/detik	347,763,677,742.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1.03.17	Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan	Cakupan layanan Air Minum Perpipaan	60.23%	258,960,950,000.00	65.23%	223,724,000,251.00	67.23%	265,207,409,281.00	71.23%	312,065,369,686.00	75.23%	359,355,800,334.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1.03.18	Program Penyelenggaraan Pembiayaan Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikat	20456 Orang	3,000,000,000.00	24066 Orang	14,433,806,468.00	27846 Orang	17,110,155,437.00	32186 Orang	20,133,249,657.00	37086 Orang	23,184,245,183.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1.03.70	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Prosentase Kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota	63.19%	6,297,172,500.00	75.34%	21,650,709,702.00	77.19%	25,665,233,156.00	90%	30,199,834,486.00	96.82%	34,776,367,774.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan PD (SKM)	82.34%	1,271,950,000.00	86%	1,500,000,000.00	87%	1,600,000,000.00	88%	1,800,000,000.00	90%	2,000,000,000.00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit	5.908.693,633.00	3 unit	2.500.000.000.00	3 unit	6.700.000.000.00	3 unit	3.500.000.000.00	3 unit	4.700.000.000.00	UPTD Peneliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	849,375.000.00	60%	920.000.000.00	65%	1,030.000.000.00	70%	1,150.000.000.00	75%	1,180.000.000.00	UPTD Peneliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1.03.19	Program Rehabilitasi/Peeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik di wilayah I	52%	41,736,700.000.00	58%	45,080.000.000.00	63%	55,670.000.000.00	68%	63,550.000.000.00	72%	64,120.000.000.00	UPTD Peneliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	82,34%	1,018,914.000.00	86%	1,200.000.000.00	87%	867,000.000.00	88%	867.000.000.00	90%	867.000.000.00	UPTD Peneliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit	5,551,901,400.00	3 unit	6,350,200,000.00	3 unit	3,781,000,000.00	3 unit	3,781,000,000.00	3 unit	3,781,000,000.00	UPTD Peneliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	905,000,000.00	60%	1,000,000,000.00	65%	1,265,000,000.00	70%	1,265,000,000.00	75%	1,265,000,000.00	UPTD Peneliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	
1.03.20	Program Rehabilitasi/Peeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik di wilayah II	52%	43,448,426,580.00	58%	43,449,800,000.00	63%	49,087,000,000.00	68%	54,087,000,000.00	72%	57,087,000,000.00	UPTD Peneliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	82,34%	1,535,560,000.00	86%	1,725,452,000.00	87%	1,721,227,500.00	88%	1,998,102,000.00	90%	1,798,102,000.00	UPTD Peneliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit	1,173,650,000.00	3 unit	2,745,450,000.00	3 unit	6,952,800,000.00	3 unit	4,214,300,000.00	3 unit	3,432,300,000.00	UPTD Peneliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	55%	838,750,000.00	60%	938,750,000.00	65%	953,750,000.00	70%	2,000,000,000.00	75%	1,200,000,000.00	UPTD Peneliharaa n Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
1.03.21	Program Rehabilitasi/Pe meliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik di wilayah III	52%	52%	32,500,000,000.00	58%	31,590,348,000.00	63%	30,372,222,500.00	68%	36,787,598,000.00	72%	40,569,598,000.00	UPTD Peneliharaa n Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				47,055,350,000.00		209,290,193,784.00		248,097,253,843.00		291,932,120,029.00		336,171,555,151.00	
1.04.15	Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah rumah tidak layak huni	51722 unit	46722 unit	47,055,350,000.00	41722 unit	209,290,193,784.00	36722 unit	248,097,253,843.00	31722 unit	291,932,120,029.00	26722 unit	336,171,555,151.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.05	Ketentraman dan Keteriban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				21,077,652,500.00		28,660,000,000.00		30,000,000,000.00		30,251,000,000.00		30,889,000,000.00	
1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	3,772,852,200.00	85%	3,769,712,200.00	90%	3,769,712,200.00	95%	3,769,712,200.00	100%	3,781,712,200.00	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	1 unit	2 unit	1,781,566,000.00	3 unit	1,320,966,000.00	4 unit	1,108,966,000.00	5 unit	687,416,000.00	5 unit	1,083,455,150.00	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelayangan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	25,64%	30%	1,148,692,500.00	40%	1,755,770,000.00	50%	1,400,510,800.00	60%	2,077,078,300.00	70%	1,572,809,150.00	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akutabilitas Kinerja PD	77,69%	78%	192,747,500.00	78,50%	219,082,500.00	79%	266,860,000.00	80%	241,102,500.00	81%	428,642,500.00	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
1.05.60	Program Pengakkan Produk Hukum Daerah	Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	85%	1,219,514,000.00	%	1,227,480,000.00	%	1,449,830,000.00	%	1,429,780,000.00	%	1,475,930,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.05.63	Program Penyelenggaraan Ketertarikan Umum dan Ketertarikan masyarakat	Persentase pengamanan Penyelenggaraan Ketertarikan Umum dan Ketertarikan masyarakat serta Penyelenggaraan Penjagaan Pengawalan dan Patroli	0%	80%	1,057,411,800.00	83%	1,052,251,000.00	86%	1,252,251,000.00	90%	1,252,251,000.00	92%	1,252,251,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
1.05.64	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	kapasitas satlinmas daerah	persen	80 persen	940,440,500.00	83 persen	1,487,850,000.00	86 persen	1,668,030,000.00	90 persen	1,707,000,000.00	92 persen	1,710,350,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
1.05.65	Program Peningkatan Kesigapan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase masyarakat tanggap darurat bencana kebakaran	%	60%	812,628,000.00	70%	741,888,300.00	80%	1,083,840,000.00	90%	960,660,000.00	95%	1,045,150,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	58%	59%	865,806,000.00	60%	400,000,000.00	61%	520,000,000.00	62%	550,000,000.00	63%	570,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 Unit	194,500,000.00	5 Unit	160,000,000.00	5 Unit	160,000,000.00	5 Unit	180,000,000.00	5 Unit	190,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	60%	985,458,000.00	60%	700,000,000.00	60%	770,000,000.00	60%	790,000,000.00	60%	840,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	54,03%	243,836,000.00	58%	500,000,000.00	60%	500,000,000.00	62%	500,000,000.00	64%	500,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.05.15	Program Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Lingkungan	Penurunan jumlah konflik sosial di Kalimantan Timur	507 Konflik	102 Konflik	721,900,000.00	102 Konflik	1,845,000,000.00	102 Konflik	1,920,000,000.00	100 Konflik	1,960,000,000.00	2,010,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.05.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat Kalimantan Timur khususnya pelajar SLTA yang Memahami Wawasan dan Karakter Bangsa (%)	25%	535,800,000.00	5%	2,350,000,000.00	5%	2,350,000,000.00	5%	2,310,000,000.00	5%	2,269,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.05.21	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat	72,86%	73,50%	2,492,300,000.00	74,50%	1,000,000,000.00	75,50%	1,075,000,000.00	76,50%	1,140,000,000.00	77,50%	1,260,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.62	Program Pembinaan dan Pengembangan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Penguatan Peran Ormas	Ormas yang berperan aktif dalam kegiatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	587 Ormas	100 Ormas	596,800,000.00	120 Ormas	1,680,000,000.00	120 Ormas	1,705,000,000.00	120 Ormas	1,620,000,000.00	127 Ormas	1,650,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	1,749,810,000.00	85%	2,594,080,000.00	90%	3,139,330,000.00	95%	3,391,330,000.00	100%	3,391,330,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja PD yang Memiliki Kinerja Pelayanan Tepat Waktu	4 Unit	4 Unit	240,820,000.00	4 Unit	600,000,000.00	4 Unit	425,000,000.00	4 Unit	250,000,000.00	4 Unit	425,000,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	17,39%	369,950,000.00	17,39%	750,000,000.00	17,39%	790,950,000.00	17,39%	744,950,000.00	17,39%	744,950,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	64 Nilai	66 Nilai	399,800,000.00	68 Nilai	450,000,000.00	70 Nilai	418,800,000.00	72 Nilai	418,800,000.00	75 Nilai	418,800,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.49	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	85 Persen	85 Persen	355,020,000.00	85 Persen	1,785,920,000.00	85 Persen	1,785,920,000.00	85 Persen	1,785,920,000.00	100 Persen	1,785,920,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.51	Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang terbentuk dan memperoleh peringatan dini bencana	12 Desa / Kelurahan	0 Desa / Kelurahan	225,000,000.00	8 Desa / Kelurahan	1,225,000,000.00	7 Desa / Kelurahan	1,325,000,000.00	8 Desa / Kelurahan	1,275,000,000.00	7 Desa / Kelurahan	1,274,000,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.55	Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	0 Persen	20 Persen	175,000,000.00	40 Persen	1,045,000,000.00	60 Persen	1,115,000,000.00	80 Persen	1,210,000,000.00	100 Persen	1,210,000,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06	Sosial				19,150,000,000.00		34,000,000,000.00		31,000,000,000.00		32,000,000,000.00		32,000,000,000.00	
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	12%	12%	2,651,383,800.00	12%	2,900,000,000.00	12%	2,900,000,000.00	12%	2,900,000,000.00	12%	2,900,000,000.00	Dinas Sosial

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	12 unit	1,100,450,000.00	12 unit	1,680,000,000.00	12 unit	1,680,000,000.00	12 unit	1,680,000,000.00	12 unit	1,680,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	12%	1,509,627,200.00	12%	2,500,000,000.00	12%	2,500,000,000.00	12%	3,500,000,000.00	12%	3,500,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	11%	233,800,000.00	11%	420,000,000.00	11%	420,000,000.00	11%	420,000,000.00	11%	420,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi, dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	0 Orang	45 Orang	340,950,000.00	80 Orang	400,000,000.00	80 Orang	400,000,000.00	80 Orang	400,000,000.00	80 Orang	400,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.17	Program pembinaan anak terlantar	Jumlah PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi, dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	0 Orang	255 Orang	123,000,000.00	1275 Orang	300,000,000.00	1320 Orang	300,000,000.00	1350 Orang	300,000,000.00	1365 Orang	300,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Trauma yang mendapatkan Pembinaan	0 Orang	32 Orang	212,200,000.00	435 Orang	950,000,000.00	454 Orang	950,000,000.00	466 Orang	950,000,000.00	480 Orang	950,000,000.00	Dinas Sosial

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.06.20	Program pembinaan eks penyangkai penyakit sosial (eks narapidana, ODHA, Korban NAPZA, Tuna Susia, Waria dan Gepeng) yang mampu mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Jumlah eks penyangkai penyakit sosial (Eks. Narapidana, ODHA, Korban NAPZA, Tuna Susia, Waria dan Gepeng) yang mampu mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	0 Orang	45 Orang	401,000,000.00	120 Orang	450,000,000.00	135 Orang	450,000,000.00	165 Orang	450,000,000.00	175 Orang	450,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah lembaga sosial yang diberdayakan	0 Lembaga	5 Lembaga	344,960,000.00	5 Lembaga	1,000,000,000.00	5 Lembaga	1,000,000,000.00	5 Lembaga	1,000,000,000.00	5 Lembaga	1,000,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.23	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS Lainnya Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	0 Orang	520 Orang	1,380,185,000.00	2250 Orang	2,700,000,000.00	2325 Orang	2,700,000,000.00	2395 Orang	2,700,000,000.00	2505 Orang	2,700,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.24	Program Penanganan dan Penanggulangan Korban Bencana	Jumlah Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS Lainnya Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	0 Orang	1518 Orang	274,165,000.00	1618 Orang	1,000,000,000.00	1700 Orang	1,000,000,000.00	1800 Orang	1,000,000,000.00	2000 Orang	1,000,000,000.00	Dinas Sosial

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														PD
Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1.06.25	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar bagi keluarga miskin	0 unit	1 unit	163.500.000.00	1 unit	700.000.000.00	1 unit	700.000.000.00	1 unit	700.000.000.00	1 unit	700.000.000.00	Dinas Sosial
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	85%	100%	811.050.000.00	100%	950.000.000.00	100%	950.000.000.00	100%	950.000.000.00	100%	950.000.000.00	UPTD Pantii Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	80 unit	85 unit	386.092.000.00	87 unit	903.300.000.00	90 unit	903.300.000.00	92 unit	903.300.000.00	95 unit	903.300.000.00	UPTD Pantii Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	100%	66.000.000.00	100%	166.000.000.00	100%	166.000.000.00	100%	166.000.000.00	100%	166.000.000.00	UPTD Pantii Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.06.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Terperuhnya sarana dan prasarana serta pelayanan/pem binaan bagi panti asuhan/jompo	0 Panti	1 Panti 1,980,700,000.00	1 Panti 3,980,700,000.00	1 Panti 2,980,700,000.00	1 Panti 2,980,700,000.00	1 Panti 2,980,700,000.00	1 Panti 2,980,700,000.00	1 Panti 2,980,700,000.00	1 Panti 2,980,700,000.00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri		
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	85%	100% 843,797,400.00	100% 843,797,400.00	100% 843,797,400.00	100% 843,797,400.00	100% 843,797,400.00	100% 843,797,400.00	100% 843,797,400.00	100% 843,797,400.00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma		
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	unit	80 unit 454,800,000.00	80 unit 454,800,000.00	80 unit 454,800,000.00	80 unit 454,800,000.00	80 unit 454,800,000.00	80 unit 454,800,000.00	80 unit 454,800,000.00	80 unit 454,800,000.00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma		
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	100% 66,000,000.00	100% 66,000,000.00	100% 66,000,000.00	100% 66,000,000.00	100% 66,000,000.00	100% 66,000,000.00	100% 66,000,000.00	100% 66,000,000.00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma		
1.06.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Terperuhnya sarana dan prasarana serta pelayanan/pem binaan bagi panti asuhan/jompo	0 Panti	1 Panti 1,280,264,600.00	1 Panti 3,135,402,600.00	1 Panti 2,635,402,600.00	1 Panti 2,635,402,600.00	1 Panti 2,635,402,600.00	1 Panti 2,635,402,600.00	1 Panti 2,635,402,600.00	1 Panti 2,635,402,600.00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	85%	833,201,000.00	100%	833,201,000.00	100%	833,201,000.00	100%	833,201,000.00	100%	833,201,000.00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	80 unit	471,294,000.00	80 unit	471,294,000.00	80 unit	471,294,000.00	80 unit	471,294,000.00	80 unit	471,294,000.00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	100%	90,000,000.00	100%	90,000,000.00	100%	90,000,000.00	100%	90,000,000.00	100%	90,000,000.00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
1.06.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Terpenuhinya sarana dan prasarana serta pelayanan/perm binaan bagi panti asuhan/jompo	0 Panti	1 Panti	1,532,705,000.00	1 Panti	3,105,505,000.00	1 Panti	2,605,505,000.00	1 Panti	2,605,505,000.00	1 Panti	2,605,505,000.00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	100%	721,075,000.00	100%	850,000,000.00	100%	850,000,000.00	100%	850,000,000.00	100%	850,000,000.00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	80 unit	67.000.000.00	80 unit	300.000.000.00	80 unit	300.000.000.00	80 unit	300.000.000.00	80 unit	300.000.000.00	UPTD Pantti Sosial Bina Remaja
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	100%	69.150.000.00	100%	100.000.000.00	100%	100.000.000.00	100%	100.000.000.00	100%	100.000.000.00	UPTD Pantti Sosial Bina Remaja
1.06.17	Program pembinaan anak terlantar	Persentase Anak Terlantar dan Berhadapan dengan Hukum yang tertangani	0%	100%	721.650.000.00	100%	2.750.000.000.00	100%	1.750.000.000.00	100%	1.750.000.000.00	100%	1.750.000.000.00	UPTD Pantti Sosial Bina Remaja
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				212.257.896.100.00		316.207.055.260.00		342.189.947.580.00		335.899.051.000.00		349.579.977.000.00	
2.01	Tenaga Kerja				19.337.500.000.00		27.387.500.000.00		26.461.500.000.00		27.989.375.000.00		27.989.375.000.00	
2.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	86.70%	88%	3.954.400.000.00	88%	4.404.400.000.00	88.10%	4.404.400.000.00	88.50%	4.598.940.000.00	88.70%	4.598.940.000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit	1,584,750,000.00	5 unit	1,734,750,000.00	5 unit	1,734,750,000.00	5 unit	1,908,225,000.00	5 unit	1,908,225,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelayakan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	75%	1,585,800,000.00	85%	1,985,800,000.00	87%	1,985,800,000.00	90%	2,184,380,000.00	95%	2,184,380,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	50,28%	573,640,000.00	70%	747,640,000.00	72,15%	889,040,000.00	74,25%	977,944,000.00	80%	977,944,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase lulusan pelatihan yang terserap dipasar kerja	80%	6,957,500,000.00	80%	8,007,500,000.00	80%	7,007,500,000.00	80%	7,357,875,000.00	80%	7,357,875,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31%	2,063,500,000.00	31%	2,063,500,000.00	31%	2,063,500,000.00	31%	2,166,675,000.00	31%	2,166,675,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	UMP Sama Dengan KHL	100%	1,805,960,000.00	100%	3,055,960,000.00	100%	2,205,960,000.00	100%	2,316,258,000.00	100%	2,316,258,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ⁱ	
2.01.24	Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif	Persentase Wirausahaan Baru dan Pencari Kerja	0%	-	30%	950,000,000.00	35%	950,000,000.00	40%	997,500,000.00	45%	997,500,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ⁱ	
2.01.27	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang Dibina dan Diawasi	120 Perusahaan	190 Perusahaan	811,950,000.00	325 Perusahaan	2,361,950,000.00	475 Perusahaan	2,361,950,000.00	675 Perusahaan	2,480,048,000.00	875 Perusahaan	2,480,048,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ⁱ
2.01.29	Program Peningkatan Produktivitas	Persentase Perusahaan yang Meningkatkan Produktivitasnya	80%	80%	-	80%	326,000,000.00	80%	358,600,000.00	80%	376,530,000.00	80%	376,530,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ⁱ
2.01.30	Program Pelatihan Pencari Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan yang Ditempatkan	70%	0%	-	80%	1,750,000,000.00	85%	2,500,000,000.00	90%	2,625,000,000.00	95%	2,625,000,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ⁱ

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				8,349,372,000.00		10,050,000,000.00		9,500,000,000.00		9,735,000,000.00		10,200,000,000.00	
2.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna pelayanan terhadap pelayanan PD (SKM)	100%	100%	1,675,214,000.00	100%	1,700,000,000.00	100%	1,800,000,000.00	100%	1,900,000,000.00	100%	2,000,000,000.00	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan an Perempuan dan Perlindungan n Anak
2.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	100 unit	100 unit	1,559,826,000.00	100 unit	3,990,000,000.00	100 unit	2,980,000,000.00	100 unit	2,495,000,000.00	100 unit	2,840,000,000.00	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan an an Perempuan dan Perlindungan n Anak
2.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	100%	100%	594,000,000.00	100%	710,000,000.00	100%	720,000,000.00	100%	740,000,000.00	100%	750,000,000.00	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan an an Perempuan dan Perlindungan n Anak
2.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan n Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	100%	100%	248,360,000.00	100%	450,000,000.00	100%	450,000,000.00	100%	700,000,000.00	100%	500,000,000.00	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan an an Perempuan dan Perlindungan n Anak

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		PD
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
2.02.15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	100%	395,480,000.00	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan an Perempuan dan dan Perlindungan Anak	
2.02.16	Program Penguatan Kelenyangan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan	%	82,650,000.00	%	-	%	-	%	-	%	-	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan an Perempuan dan dan Perlindungan Anak	
2.02.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan	%	111,000,000.00	%	-	%	-	%	-	%	-	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan an Perempuan dan dan Perlindungan Anak	
2.02.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	meningkatnya pelaksanaan PUG bidang ekonomi perempuan	%	658,425,000.00	%	-	%	-	%	-	%	-	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan an Perempuan dan dan Perlindungan Anak	
2.02.20	Program Penguatan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan	Persentase pelaku ekonomi perempuan	34%	158,900,000.00	62%	150,000,000.00	76%	150,000,000.00	87%	350,000,000.00	100%	160,000,000.00	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan an Perempuan dan dan Perlindungan Anak	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
2.02.21	Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	Persentase meningkatnya peringkat kriteria Kab/Kota layak anak	70%	76%	223,985,000.00	82%	300,000,000.00	88%	300,000,000.00	94%	300,000,000.00	100%	300,000,000.00	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan an Perempuan dan Perlindungan n Anak
2.02.22	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya peran perempuan dalam membangun ekonomi keluarga	%	100%	47,500,000.00	%	-	%	-	%	-	%	-	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan an Perempuan dan Perlindungan n Anak
2.02.23	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Pemenuhan hak anak dan penanaman nilai-nilai luhur	kebijakan	1 kebijakan	87,390,000.00	kebijakan	-	kebijakan	-	kebijakan	-	kebijakan	-	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan an Perempuan dan Perlindungan n Anak
2.02.26	Program Pengembangan Basis Data Gender dan Anak	tersedianya dokumen data gender dan anak	%	100%	319,500,000.00	%	-	%	-	%	-	%	-	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan an Perempuan dan Perlindungan n Anak
2.02.27	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen administrasi kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	2,187,142,000.00		-		-		-		-	Dinas Kependudukan, Pemberdaaan n Perempuan dan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
														Perlindungan Anak
2.02.35	Program Pengutan Kelengkapan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Rasio KDRT	0.06 Rasio	-	0.054 Rasio	200,000,000.00	0.048 Rasio	250,000,000.00	0.042 Rasio	400,000,000.00	0.038 Rasio	350,000,000.00	Dinas Kependuduka an Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan n Anak	
2.02.36	Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya pemenuhan hak perempuan dan anak	50 persen	60 persen	70 persen	900,000,000.00	80 persen	1,050,000,000.00	90 persen	1,050,000,000.00	100 persen	1,200,000,000.00	Dinas Kependuduka an Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan n Anak	
2.02.38	Program Kesetaraan Gender	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	50 persen	60 persen	70 persen	900,000,000.00	80 persen	1,050,000,000.00	90 persen	1,050,000,000.00	100 persen	1,200,000,000.00	Dinas Kependuduka an Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan n Anak	
2.02.39	Program Sistem Data Gender dan Anak	Persentase pemanfaatan data gender dan anak	50 persen	60 persen	70 persen	750,000,000.00	80 persen	750,000,000.00	90 persen	750,000,000.00	100 persen	900,000,000.00	Dinas Kependuduka an Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan n Anak	
2.03	Pangan			22,743,573,600.00		30,243,514,260.00		23,990,250,000.00		25,226,883,000.00		23,687,500,000.00		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	2.068.756.600,00	85%	2.200.000.000,00	90%	2.100.000.000,00	95%	2.500.000.000,00	100%	2.500.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1.449.148.000,00	5 unit	2.250.000.000,00	5 unit	1.950.000.000,00	5 unit	2.250.000.000,00	5 unit	2.250.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	80%	2.005.800.000,00	85%	2.200.000.000,00	90%	2.000.000.000,00	95%	2.200.000.000,00	100%	2.200.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
2.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	64 nilai AKIP	65 nilai AKIP	1.194.282.344,00	66 nilai AKIP	1.809.000.000,00	67 nilai AKIP	1.750.000.000,00	68 nilai AKIP	1.800.000.000,00	69 nilai AKIP	1.800.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.03.25	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah Desa Rawan Pangan yang ditangani	420 Desa	418 Desa	2,189,991,656.00	416 Desa	2,900,000,000.00	414 Desa	2,900,000,000.00	412 Desa	3,050,000,000.00	410 Desa	2,950,000,000.00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.03.27	Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	84.6 Skor	84.7 Skor	1,250,000,000.00	86.9 Skor	2,050,000,000.00	89.1 Skor	2,050,000,000.00	91.2 Skor	2,100,000,000.00	93.4 Skor	2,050,000,000.00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	80%	605,000,000.00	85%	800,000,000.00	90%	800,000,000.00	95%	800,000,000.00	100%	800,000,000.00	UPTD Pengawasan dan Serifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	2,585,600,000.00	3 unit	2,850,000,000.00	3 unit	1,550,000,000.00	3 unit	600,000,000.00	3 unit	600,000,000.00	UPTD Pengawasan dan Serifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenyagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	80%	80%	73,750,000.00	85%	100,000,000.00	90%	150,000,000.00	95%	200,000,000.00	100%	200,000,000.00	UPTD Pengawasan dan Serifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	951,350,000.00	85%	1,100,000,000.00	90%	1,200,000,000.00	95%	1,300,000,000.00	100%	1,200,000,000.00	UPTD Proeksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	134,000,000.00	3 unit	1,025,159,620.00	3 unit	170,000,000.00	3 unit	190,000,000.00	3 unit	200,000,000.00	UPTD Proeksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenyahan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	80%	105,250,000.00	85%	244,840,380.00	90%	135,000,000.00	95%	150,000,000.00	100%	150,000,000.00	UPTD Proeksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	1,278,700,000.00	85%	1,400,000,000.00	90%	1,500,000,000.00	95%	1,500,000,000.00	100%	1,300,000,000.00	UPTD Balai Benih Induk Hortikultura	
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	287,500,000.00	3 unit	2,099,325,260.00	3 unit	377,500,000.00	3 unit	377,500,000.00	3 unit	287,500,000.00	UPTD Balai Benih Induk Hortikultura	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	80%	187,000,000.00	85%	200,000,000.00	90%	220,000,000.00	95%	242,000,000.00	100%	200,000,000.00	UPTD Balai Benih Hiduk Hortikultura	
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	1,038,635,000.00	85%	1,500,000,000.00	90%	1,497,750,000.00	95%	1,500,000,000.00	100%	1,500,000,000.00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan gan SDM	
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	196,260,000.00	3 unit	340,000,000.00	3 unit	290,000,000.00	3 unit	290,000,000.00	3 unit	305,000,000.00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan gan SDM
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	80%	80%	156,750,000.00	85%	200,000,000.00	90%	200,000,000.00	95%	250,000,000.00	100%	250,000,000.00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan gan SDM
2.03.15	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	Jumlah Desa yang dibina	693 Desa	696 Desa	4,985,800,000.00	711 Desa	4,975,189,000.00	726 Desa	3,150,000,000.00	741 Desa	3,927,383,000.00	756 Desa	2,945,000,000.00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan gan SDM
2.05	Lingkungan Hidup				18,052,648,000.00		22,042,100,000.00		21,020,500,000.00		22,052,500,000.00		22,157,500,000.00	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	3,794,827,500.00	85%	3,950,100,000.00	90%	3,500,000,000.00	95%	3,680,300,000.00	100%	3,200,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	5 unit	989,700,000.00	5 unit	1,490,000,000.00	5 unit	1,400,000,000.00	5 unit	1,200,000,000.00	5 unit	1,100,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	80%	1,314,600,000.00	85%	1,820,000,000.00	90%	1,350,000,000.00	95%	1,450,000,000.00	100%	1,450,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraa n Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0 Nilai AKIP	59 Nilai AKIP	1,406,350,000.00	60 Nilai AKIP	1,500,000,000.00	61 Nilai AKIP	1,600,000,000.00	62 Nilai AKIP	1,700,000,000.00	65 Nilai AKIP	1,800,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase Sampah yang dikelola	Persentase	65 Persentas e	1,451,850,000.00	Persenta se	-	Persentas e	-	Persentas e	-	Persenta se	-	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.05.26	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75 Indeks	2,113,818,000.00	Indeks	-	Indeks	-	Indeks	-	Indeks	-	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.27	Program Penyusunan dan inventarisasi kajian lingkungan dan inventarisasi	Jumlah Kajian LH yang disusun	Dokumen	7 Dokumen	1,601,180,000.00	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.28	Program Tata Laksana Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup	Pelayanan penilaian dan pemeriksaan dokumen LH	Persentase	100 Persentase	708,272,500.00	Persentase	-	Persentase	-	Persentase	-	Persentase	-	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.29	Program Penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Perusahaan yang dinilai	225	225 225	1,036,500,000.00	225	-	225	-	225	-	225	-	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.30	Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Pencemaran	0 Indeks (Tercemar Sedang)	0 Indeks (Tercemar Sedang)	-	8 Indeks (Tercemar Sedang)	4,237,000,000.00	8 Indeks (Tercemar Sedang)	3,600,000,000.00	8 Indeks (Tercemar Sedang)	3,800,000,000.00	8 Indeks (Tercemar Sedang)	3,950,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.05.31	Program Pelayanan Pengaduan dan Penyelidikan Sengketa LH	Pelayanan penyelesaian kasus-kasus lingkungan	%	100%	446.250.000.00	%	-	%	-	%	-	%	-	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.32	Program Penyusunan Kebijakan dan Pengakuan Hak-hak Lingkungan	Meningkatnya ketataan pelaku usaha/kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan LH	0 Perusahaan	15 Perusahaan	421.000.000.00	0 Perusahaan	-	0 Perusahaan	-	0 Perusahaan	-	0 Perusahaan	-	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.53	Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH	Jumlah penghargaan pengelolaan LH yang diterima	Penghargaan	4 Penghargaan	1.204.800.000.00	Penghargaan	-	Penghargaan	-	Penghargaan	-	Penghargaan	-	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.56	Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim	Penurunan emisi gas rumah kaca	Juta Ton CO2eq	10 Juta Ton CO2eq	998.000.000.00	Juta Ton CO2eq	-	Juta Ton CO2eq	-	Juta Ton CO2eq	-	Juta Ton CO2eq	-	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.57	Program Perlindungan Sumber Daya Alam	Luas Kawasan lindung yg dilindungi di dalam kawasan perijinan	Ribu Hektare	200 Ribu Hektare	565.500.000.00	Ribu Hektare	-	Ribu Hektare	-	Ribu Hektare	-	Ribu Hektare	-	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.05.58	Program Penataan, Pengamanan Pengabdian dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup	Persentase ketataan dalam pengelolaan lingkungan hidup	100%	0%	-	100%	2.720.000.000.00	100%	2.954.500.000.00	100%	3.247.200.000.00	100%	3.582.500.000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.59	Program Tata Lingkungan	Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang diinventarisasi dan di PEP kan	417 Kegiatan	0 Kegiatan	-	550 Kegiatan	4.400.000.000.00	600 Kegiatan	4.491.000.000.00	640 Kegiatan	4.650.000.000.00	670 Kegiatan	4.550.000.000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.60	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Persentase sampah dan limbah B3 yang dimanfaatkan	10%	0%	-	12%	1.925.000.000.00	13%	2.125.000.000.00	14%	2.325.000.000.00	15%	2.525.000.000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa				7.050.000.000.00		12.675.250.000.00		11.520.500.000.00		11.875.250.000.00		12.000.000.000.00	
2.07.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	70%	1.866.120.000.00	75%	1.866.120.000.00	75%	1.866.120.000.00	80%	1.866.120.000.00	80%	1.866.120.000.00	Dinas Pemberdayaan an Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.07.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit	525,900,000.00	5 unit	891,566,000.00	5 unit	844,816,000.00	5 unit	728,566,000.00	5 unit	679,316,000.00	Dinas Pemberdayaan an Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2.07.09	Program Peningkatan Kapasitas Kellmbagaan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	993,250,000.00	40%	993,250,000.00	45%	993,250,000.00	50%	993,250,000.00	55%	993,250,000.00	Dinas Pemberdayaan an Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2.07.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraa n Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	65%	233,964,000.00	67%	233,964,000.00	68%	233,964,000.00	69%	233,964,000.00	70%	233,964,000.00	Dinas Pemberdayaan an Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Lembaga Kemasyrakata n Desa Yang Berperan Aktif Dalam pembangunan Desa dan Kelurahan	35 Lembaga Kemasyrakata n Desa	390,000,000.00	35 Lembaga Kemasyrakata n Desa	1,100,000,000.00	35 Lembaga Kemasyrakata n Desa	860,000,000.00	35 Lembaga Kemasyrakata n Desa	885,000,000.00	35 Lembaga Kemasyrakata n Desa	895,000,000.00	Dinas Pemberdayaan an Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2.07.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah Bumdes Yang Aktif	320 Bumdes	148,045,000.00	360 Bumdes	770,000,000.00	390 Bumdes	700,000,000.00	425 Bumdes	720,000,000.00	470 Bumdes	714,000,000.00	Dinas Pemberdayaan an Masyarakat dan Pemerintahan Desa	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	80%	80,000,000.00	80%	80,000,000.00	80%	80,000,000.00	80%	80,000,000.00	80%	80,000,000.00	Dinas Pemberdayaan an Masyarakat dan Pemerintahan n Desa	
2.07.21	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan masyarakat	Rekomendasi Sinkronisasi Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan masyarakat	1 Dokumen	260,350,000.00	1 Dokumen	260,350,000.00	1 Dokumen	260,350,000.00	1 Dokumen	260,350,000.00	1 Dokumen	260,350,000.00	Dinas Pemberdayaan an Masyarakat dan Pemerintahan n Desa	
2.07.22	Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok Desa Pengelola Sarana dan Prasarana dan pemanfaatan TTTG Yang Mempunyai Daya Saing Pasar	18 Unit	252,811,000.00	18 Unit	605,440,000.00	18 Unit	455,440,000.00	18 Unit	485,440,000.00	18 Unit	479,440,000.00	Dinas Pemberdayaan an Masyarakat dan Pemerintahan n Desa	
2.07.26	Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	PKK yang berperan aktif dalam pemberdayaan/Adat dan pembinaan masyarakat dan keluarga desa/kelurahan	150 PKK	1,500,000,000.00	165 PKK	1,500,000,000.00	180 PKK	1,620,000,000.00	200 PKK	1,668,000,000.00	220 PKK	1,686,000,000.00	Dinas Pemberdayaan an Masyarakat dan Pemerintahan n Desa	
2.07.27	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rekomendasi Sinkronisasi Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan masyarakat	1 Dokumen	24,560,000.00	1 Dokumen	24,560,000.00	1 Dokumen	34,560,000.00	1 Dokumen	44,560,000.00	1 Dokumen	42,560,000.00	Dinas Pemberdayaan an Masyarakat dan Pemerintahan n Desa	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
														Dinas Pemberdayaan an Masyarakat dan Pemerintahan n Desa
2.07.28	Program Pembinaan Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa Yang Memiliki Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	323 Desa	338 Desa	475,000,000.00	363 Desa	2,150,000,000.00	393 Desa	1,242,000,000.00	428 Desa	1,280,000,000.00	473 Desa	1,295,000,000.00	
2.07.29	Program Pembangunan Desa dan Kawasan	Jumlah Desa berkembang	289 Desa	304 Desa	300,000,000.00	329 Desa	1,200,000,000.00	359 Desa	1,080,000,000.00	394 Desa	1,130,000,000.00	439 Desa	1,125,000,000.00	Dinas Pemberdayaan an Masyarakat dan Pemerintahan n Desa
2.07.30	Program Kampung Iklim +	Jumlah Kampung/Desa Iklim	0 Desa	15 Desa	-	40 Desa	1,000,000,000.00	70 Desa	1,250,000,000.00	105 Desa	1,500,000,000.00	150 Desa	1,650,000,000.00	Dinas Pemberdayaan an Masyarakat dan Pemerintahan n Desa
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				321,700,000.00		1,500,000,000.00		1,500,000,000.00		1,500,000,000.00		1,800,000,000.00	
2.08.15	Program Keluarga Berencana	peran perempuan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga	%	100%	225,800,000.00	%	-	%	-	%	-	%	-	Dinas Kependudu kan, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindunga n Anak
2.08.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	jumlah remaja yang mendapatkan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi)	orang	100 orang	95,900,000.00	orang	-	orang	-	orang	-	orang	-	Dinas Kependudu kan, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindunga n Anak

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.08.23	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya lembaga masyarakat yang aktif dalam bidang kesejahteraan, kemandirian dan ketahanan keluarga	50 lembaga masyarakat (LM)	60 lembaga masyarakat (LM)	-	70 lembaga masyarakat (LM)	750,000,000.00	80 lembaga masyarakat (LM)	750,000,000.00	90 lembaga masyarakat (LM)	750,000,000.00	100 lembaga masyarakat (LM)	900,000,000.00	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.24	Program Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	50 persen	60 persen	-	70 persen	750,000,000.00	80 persen	750,000,000.00	90 persen	750,000,000.00	100 persen	900,000,000.00	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09	Perhubungan				41,780,446,500.00		78,000,000,000.00		121,000,000,000.00		98,000,000,000.00		98,000,000,000.00	
2.09.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	100%	100%	2,894,520,000.00	100%	3,000,000,000.00	100%	3,000,000,000.00	100%	3,000,000,000.00	100%	3,000,000,000.00	Dinas Perhubungan
2.09.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apuratur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	4 unit	4 unit	2,331,190,000.00	4 unit	2,700,000,000.00	4 unit	3,700,000,000.00	4 unit	3,700,000,000.00	4 unit	3,700,000,000.00	Dinas Perhubungan
2.09.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	55%	60%	2,476,400,000.00	65%	3,000,000,000.00	70%	4,000,000,000.00	75%	4,000,000,000.00	80%	4,000,000,000.00	Dinas Perhubungan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.09.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	69%	70.50%	710,832,000.00	71%	1,300,000,000.00	71.50%	1,400,000,000.00	72.50%	1,300,000,000.00	73.50%	1,300,000,000.00	Dinas Perhubungan
2.09.15	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	854 Kasus	683 Kasus	4,375,614,000.00	598 Kasus	21,800,000,000.00	512 Kasus	39,790,670,000.00	427 Kasus	29,590,670,000.00	342 Kasus	29,590,670,000.00	Dinas Perhubungan
2.09.16	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP	Jumlah dan kapasitas prasarana perhubungan laut dan SDP	83 Unit/%	83 Unit/%	3,037,846,500.00	85 Unit/%	30,200,000,000.00	88 Unit/%	40,609,330,000.00	90 Unit/%	27,909,330,000.00	90.42 Unit/%	27,909,330,000.00	Dinas Perhubungan
2.09.17	Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah simpul transportasi yang terintegrasi dan terpadu	0 Simpul	1 Simpul	21,109,330,000.00	2 Simpul	11,000,000,000.00	3 Simpul	22,500,000,000.00	1 Simpul	22,500,000,000.00	0 Simpul	22,500,000,000.00	Dinas Perhubungan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.09.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	100%	1,075,964,000.00	100%	1,100,000,000.00	100%	1,100,000,000.00	100%	1,100,000,000.00	100%	1,100,000,000.00	UPTD Terminal	
2.09.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit	413,200,000.00	3 unit	450,000,000.00	3 unit	450,000,000.00	3 unit	450,000,000.00	3 unit	450,000,000.00	UPTD Terminal	
2.09.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenyagaan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	55%	138,200,000.00	60%	200,000,000.00	65%	200,000,000.00	70%	200,000,000.00	75%	200,000,000.00	UPTD Terminal
2.09.18	Program Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B	Jumlah penumpang terminal yang terlayani	500000 Penumpang	650000 Penumpang	3,217,350,000.00	700000 Penumpang	3,250,000,000.00	750000 Penumpang	4,250,000,000.00	800000 Penumpang	4,250,000,000.00	1000000 Penumpang	4,250,000,000.00	UPTD Terminal
2.1	Komunikasi dan Informatika				12,550,000,000.00		20,325,000,000.00		20,500,000,000.00		21,500,000,000.00		22,450,000,000.00	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.10.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	70%	4,252,950,000.00	75%	4,500,000,000.00	80%	4,500,000,000.00	85%	4,600,000,000.00	90%	4,650,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	2 unit	1,196,720,000.00	3 unit	1,250,000,000.00	4 unit	1,250,000,000.00	5 unit	1,270,000,000.00	5 unit	1,300,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	75%	1,773,850,000.00	80%	1,850,000,000.00	85%	1,850,000,000.00	90%	1,900,000,000.00	95%	1,950,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	75%	131,000,000.00	77%	500,000,000.00	80%	500,000,000.00	83%	500,000,000.00	85%	500,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.10.11	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase Siswa sekolah dan mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi dibidang TIK	0 Persen	25 Persen	381,200,000.00	30 Persen	600,000,000.00	50 Persen	614,000,000.00	60 Persen	700,000,000.00	70 Persen	884,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.12	Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah	Jumlah lembaga yang mengembangkan media center informasi publik	0 Lembaga	2 Lembaga	535,800,000.00	2 Lembaga a	980,000,000.00	2 Lembaga	1,040,000,000.00	2 Lembaga	1,150,000,000.00	2 Lembaga a	1,255,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.13	Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika	Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Informasi Publik	0%	80%	462,000,000.00	84%	820,000,000.00	86%	835,000,000.00	88%	865,000,000.00	90%	880,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.14	Program Pengembangan Informasi, dan Komunikasi Publik	Cakupan Masyarakat yang memiliki akses terhadap pelayanan informasi	0 Persen	80 Persen	353,800,000.00	84 Persen	369,000,000.00	86 Persen	350,000,000.00	88 Persen	360,000,000.00	90 Persen	370,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2.4 Indeks	2,143,730,000.00	2.6 Indeks	5,101,000,000.00	2.8 Indeks	5,071,000,000.00	3 Indeks	5,231,000,000.00	3.2 Indeks	5,491,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.16	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem pengamanan data elektronik	0 Persen	70 Persen	1,106,950,000.00	75 Persen	4,205,000,000.00	80 Persen	4,340,000,000.00	85 Persen	4,774,000,000.00	90 Persen	5,020,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.18	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Persentase Program/kegiatan an dari hasil rekomendasi penelitian TIK yang dilaksanakan	0 Persen	100 Persen	212,000,000.00	100 Persen	150,000,000.00	100 Persen	150,000,000.00	100 Persen	150,000,000.00	100 Persen	150,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				21,704,081,000.00		44,239,952,000.00		21,598,786,000.00		21,466,444,000.00		21,120,203,000.00	
2.11.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	5,917,661,500.00	87%	3,756,945,500.00	88%	3,850,000,000.00	89%	3,928,806,000.00	90%	3,827,390,000.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	5 unit	2,011,298,500.00	5 unit	25,725,366,500.00	5 unit	2,455,018,000.00	5 unit	1,850,000,000.00	5 unit	1,333,000,000.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenyangan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	50%	1,576,015,000.00	55%	2,444,600,000.00	60%	2,475,000,000.00	65%	2,235,000,000.00	70%	1,845,000,000.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.11.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	72.01 Nilai AKIP	75 Nilai AKIP	1,066,200,000.00	76 Nilai AKIP	1,279,000,000.00	77 Nilai AKIP	1,427,460,000.00	78 Nilai AKIP	1,420,000,000.00	80 Nilai AKIP	1,108,585,000.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.11.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah UKM Naik Kelas	0 UKM	100 UKM	1,194,160,000.00	0 UKM	-	0 UKM	-	0 UKM	-	0 UKM	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		PD
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
2.111.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah WUB Mandiri	0 Wirausaha Baru	100 Wirausaha Baru	571,570,000.00	0 Wirausaha Baru	-	0 Wirausaha Baru	-	0 Wirausaha Baru	-	0 Wirausaha Baru	-	Dinas Perindustria n, Perdagangan n, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.111.18	Program Peningkatan Kualitas Kelayangan Koperasi	Jumlah Koperasi Sehat	0 Koperasi	100 Koperasi	4,441,790,000.00	0 Koperasi	-	0 Koperasi	-	0 Koperasi	-	0 Koperasi	-	Dinas Perindustria n, Perdagangan n, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.111.20	Program Penguatan Kelayangan dan Pengembangan Koperasi dan UKM	Jumlah UKM Naik Kelas dan koperasi berkualitas	0 UKM	0 UKM	-	200 UKM 100 Koperasi	3,424,608,000.00	200 UKM 100 Koperasi	3,733,608,000.00	200 UKM 100 Koperasi	4,033,608,000.00	200 UKM 100 Koperasi	4,333,608,000.00	Dinas Perindustria n, Perdagangan n, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.111.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepingnan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	1,132,000,000.00	87%	1,444,780,000.00	88%	1,501,575,000.00	89%	1,633,750,000.00	90%	1,772,530,000.00	UPD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	320,400,000.00	3 unit	510,184,000.00	3 unit	519,575,000.00	3 unit	553,560,000.00	3 unit	584,230,000.00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40%	308,100,000.00	45%	654,468,000.00	50%	636,550,000.00	55%	664,220,000.00	60%	681,360,000.00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
2.11.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	1,209,200,000.00	87%	1,584,930,000.00	88%	1,715,512,000.00	89%	1,886,767,000.00	90%	2,129,052,000.00	UPTD Pusat Pelatihan, Pengembangan Koperasi dan UKM
2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	622,650,000.00	3 unit	929,832,500.00	3 unit	1,056,153,000.00	3 unit	1,042,432,500.00	3 unit	1,117,333,000.00	UPTD Pusat Pelatihan, Pengembangan Koperasi dan UKM

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40%	409.900.000.00	45%	860.085.000.00	50%	774.782.000.00	55%	718.866.500.00	60%	745.231.500.00	UPTD Pusat Pelatihan, Pengembangan Koperasi dan UKM
2.11.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah	Jumlah KUKM terlatih	300 Orang	300 Orang	923.136.000.00	300 Orang	1.625.152.500.00	300 Orang	1.453.553.000.00	300 Orang	1.499.434.000.00	300 Orang	1.642.883.500.00	UPTD Pusat Pelatihan, Pengembangan Koperasi dan UKM
2.12	Penanaman Modal				9.924.535.000.00		15.000.000.000.00		16.000.000.000.00		17.000.000.000.00		18.000.000.000.00	
2.12.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	70%	2.991.264.800.00	72%	3.000.000.000.00	73%	3.200.000.000.00	74%	3.500.000.000.00	75%	3.700.000.000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apuratur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	6 unit	1.807.060.200.00	6 unit	1.700.000.000.00	6 unit	1.800.000.000.00	6 unit	1.700.000.000.00	6 unit	1.900.000.000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
2.12.09	Program Peningkatan Kapasitas K lembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	90%	2,954,000,000.00	92%	3,000,000,000.00	93%	3,000,000,000.00		94%	3,000,000,000.00	95%	3,000,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	31.06 Nilai AKIP	51 Nilai AKIP	311,500,000.00	61 Nilai AKIP	820,000,000.00	65 Nilai AKIP	890,000,000.00		71 Nilai AKIP	890,000,000.00	75 Nilai AKIP	1,100,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.18	Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan	0 Hari	0 Hari	221,000,000.00	13 Hari	1,500,000,000.00	12 Hari	1,520,000,000.00		11 Hari	1,600,000,000.00	10 Hari	1,600,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.27	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	0 perusahaan industri baru	25 perusahaan industri baru	509,400,000.00	7 perusahaan industri baru	1,590,000,000.00	7 perusahaan industri baru	2,000,000,000.00		7 perusahaan industri baru	2,250,000,000.00	7 perusahaan industri baru	2,570,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.28	Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah kajian kebijakan penanaman modal	1 Kebijakan	1 Kebijakan	532,600,000.00	2 Kebijakan	1,700,000,000.00	2 Kebijakan	1,700,000,000.00		2 Kebijakan	1,880,000,000.00	2 Kebijakan	1,900,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.12.29	Program Pelayanan Advokasi dan Informasi Perizinan	Tingkat kepuasan layanan advokasi dan informasi perizinan	%	100%	131,910,000.00	100%	480,000,000.00	100%	480,000,000.00	100%	480,000,000.00	100%	480,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.30	Program Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha	Jumlah perjanjian kerjasama penanaman modal	2 MoU	2 MoU	465,800,000.00	3 MoU	1,210,000,000.00	3 MoU	1,410,000,000.00	4 MoU	1,700,000,000.00	4 MoU	1,750,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				34,381,000,000.00		36,180,742,000.00		45,005,104,580.00		48,945,542,000.00		57,945,542,000.00	
2.13.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	76,80%	80,26%	3,908,323,800.00	89,55%	4,308,901,000.00	89,35%	4,300,000,000.00	89,35%	4,300,000,000.00	89,35%	4,300,000,000.00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.13.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5	5	1,458,750,000.00	5	1,431,191,000.00	5	4,000,000,000.00	5	3,440,542,000.00	5	5,000,000,000.00	Dinas Pemuda dan Olah Raga

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.13.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	90%	91%	2.810.338.450,00	92%	3.195.350.000,00	93%	4.000.000.000,00	94%	4.000.000.000,00	95%	4.880.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.13.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	58,38%	58,40%	494.292.000,00	58,60%	545.300.000,00	58,80%	565.000.000,00	59,20%	565.000.000,00	60%	565.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.13.30	Program Pemberdayaan Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan	Orang	50 Orang	961.645.000,00	Orang	2.000.000.000,00	Orang	3.850.000.000,00	Orang	2.900.000.000,00	Orang	5.000.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.13.31	Program Pengembangan Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan	Orang	450 Orang	1.394.900.750,00	Orang	2.021.800.000,00	Orang	1.900.000.000,00	Orang	2.000.000.000,00	Orang	2.100.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.13.32	Program Pembudayaan Keolahragaan	Persentase masyarakat yang berolahraga	3%	3%	5.987.100.000,00	3%	1.700.000.000,00	3%	6.899.404.580,00	3%	3.800.000.000,00	3%	5.150.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.13.33	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase masyarakat yang berolahraga	5%	3,911,650,000.00	5%	6,000,000,000.00	5%	3,585,700,000.00	5%	7,225,000,000.00	5%	7,830,542,000.00	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
2.13.35	Program Peningkatan Upaya Pemulihan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Tercapainya pemuda Kaltim dalam berwirausaha	0.03 Persen	0.09 Persen	-	0.15 Persen	1,478,200,000.00	1 Persen	2,405,000,000.00	1.5 Persen	7,215,000,000.00	2 Persen	9,620,000,000.00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.13.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran	100%	100%	8,784,490,000.00	100%	9,550,000,000.00	100%	10,000,000,000.00	100%	10,000,000,000.00	100%	10,000,000,000.00	UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya
2.13.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlayannya Administrasi Perkantoran	0%	100%	1,719,760,000.00	100%	2,925,000,000.00	100%	1,500,000,000.00	100%	1,500,000,000.00	100%	1,500,000,000.00	UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya
2.13.34	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terlayannya Administrasi Perkantoran	0%	100%	2,949,750,000.00	100%	1,025,000,000.00	100%	2,000,000,000.00	100%	2,000,000,000.00	100%	2,000,000,000.00	UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya
2.14	Statistik				-		500,000,000.00		500,000,000.00		500,000,000.00		550,000,000.00	
2.14.16	Program pengujian dan evaluasi data dan statistik	jumlah Kajian yang diselesaikan	0 Buku	0 Buku	-	1 Buku	500,000,000.00	1 Buku	500,000,000.00	1 Buku	500,000,000.00	1 Buku	550,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16	Kebudayaan				10,788,040,000.00		10,788,040,000.00		14,813,300,000.00		20,078,200,000.00		20,050,000,000.00	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah sekolah mengembangkan budaya loka	17 Sekolah	90 Sekolah	9,200,000,000.00	150 Sekolah	9,200,000,000.00	233 Sekolah	11,763,300,000.00	233 Sekolah	17,028,200,000.00	233 Sekolah	17,000,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pembinaan dan Pelestarian Seni dan Budaya Prov. Kaltim	100 Orang	100 Orang	1,588,040,000.00	130 Orang	1,588,040,000.00	150 Orang	3,050,000,000.00	280 Orang	3,050,000,000.00	220 Orang	3,050,000,000.00	UPD Taman Budaya
2.17	Perpustakaan				4,837,042,000.00		6,416,999,000.00		7,380,007,000.00		8,725,000,000.00		11,611,857,000.00	
2.17.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	76.80%	80.26%	2,071,470,000.00	82.67%	2,356,350,000.00	86.30%	2,400,000,000.00	88.26%	2,750,000,000.00	88.63%	3,500,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.17.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	6 unit	6 unit	513,064,100.00	6 unit	584,174,000.00	6 unit	925,000,000.00	6 unit	1,025,000,000.00	6 unit	1,150,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.17.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelayangan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	90%	91%	806,000,000.00	92%	1,080,493,000.00	93%	975,000,000.00	95%	1,050,000,000.00	97%	1,575,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.17.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	94%	95%	85.765.900.00	95.50%	248.000.000.00	96%	172.732.000.00	97%	250.000.000.00	98%	500.000.000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.17.23	Program Peningkatan Layanan, Otonomi dan Kerjasama Perpustakaan	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan	0 Pemustaka	205000 Pemustaka	796.500.000.00	205700 Pemustaka	1.350.000.000.00	206600 Pemustaka	1.575.000.000.00	207200 Pemustaka	2.025.000.000.00	209100 Pemustaka	2.436.857.000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.17.24	Program Depository, Pelestarian, Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	Jumlah pengembangan koleksi bahan perpustakaan	0 Judul	3000 Judul	320.300.000.00	3550 Judul	354.040.000.00	4100 Judul	832.275.000.00	4650 Judul	975.000.000.00	5200 Judul	1.500.000.000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.17.26	Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	Jumlah Perpustakaan yang memenuhi standar	20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	243.942.000.00	20 Perpustakaan	443.942.000.00	20 Perpustakaan	500.000.000.00	20 Perpustakaan	650.000.000.00	20 Perpustakaan	950.000.000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.18	Kearsipan				437.958.000.00		857.958.000.00		1.400.000.000.00		1.304.857.000.00		2.018.000.000.00	
2.18.19	Program pengelolaan Arsip	Jumlah Arsip statis dan arsip hasil akuisisi yang dikelola dengan baik	1100 berkas	1100 berkas	148.658.000.00	1100 berkas	358.658.000.00	1100 berkas	675.000.000.00	1100 berkas	628.857.000.00	1100 berkas	1.018.000.000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.18.25	Program Pembinaan Kearsipan	Jumlah lembaga instansi yang dibangun	50 Lembaga/Instansi	289,300,000.00	50 Lembaga/Instansi	499,300,000.00	50 Lembaga/Instansi	725,000,000.00	50 Lembaga/Instansi	676,000,000.00	50 Lembaga/Instansi	1,000,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
3	Urusan Pilihan			471,263,756,150.00		618,543,241,490.00		594,790,631,750.00		595,277,165,700.00		598,164,989,750.00		
3.01	Kelautan dan Perikanan			44,630,495,000.00		56,877,500,000.00		57,437,250,000.00		58,350,975,000.00		55,960,862,620.00		
3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna pelayanan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	5,625,150,000.00	81%	6,325,000,000.00	82%	6,957,500,000.00	83%	7,653,250,000.00	84%	7,653,250,000.00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	5 unit	2,850,630,950.00	5 unit	3,955,000,000.00	5 unit	4,290,500,000.00	5 unit	4,659,550,000.00	5 unit	4,659,550,000.00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	20%	2,276,150,000.00	20%	3,135,000,000.00	20%	3,448,500,000.00	20%	3,793,350,000.00	20%	3,793,350,000.00	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	55 Nilai	60 Nilai	1,679,125,000.00	63 Nilai	1,980,000,000.00	65 Nilai	2,178,000,000.00	68 Nilai	2,395,800,000.00	70 Nilai	2,395,800,000.00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.21	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	149039 Ton	152027 Ton	15,396,907,000.00	155516 Ton	18,157,500,000.00	158938 Ton	16,121,500,000.00	162593 Ton	13,093,650,000.00	166170 Ton	11,279,213,620.00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.25	Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	151918 Ton	154956 Ton	4,125,830,000.00	158055 Ton	5,555,000,000.00	161216 Ton	6,110,500,000.00	164441 Ton	6,721,550,000.00	167730 Ton	6,721,550,000.00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.26	Program Pengelolaan Ruang Laut	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	0 Kawasan yang di restorasi	1 Kawasan yang di restorasi	3,122,885,000.00	1 Kawasan yang di restorasi	3,795,000,000.00	1 Kawasan yang di restorasi	4,174,500,000.00	1 Kawasan yang di restorasi	4,591,950,000.00	1 Kawasan yang di restorasi	4,591,950,000.00	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.01.27	Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Cakupan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diawasi dan IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	33.6 Persen	35.28 Persen	1,932,570,050.00	37.07 Persen	3,265,000,000.00	40.74 Persen	3,719,000,000.00	44.82 Persen	4,090,900,000.00	47.6 Persen	4,090,900,000.00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD	0%	80%	486,598,000.00	81%	554,200,000.00	82%	585,250,000.00	83%	586,475,000.00	84%	623,014,000.00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja UPTD yang Memiliki Kinerja Pelayanan Tepat Waktu	0 Unit	3 Unit	123,500,000.00	3 Unit	855,650,000.00	3 Unit	385,000,000.00	3 Unit	375,000,000.00	3 Unit	410,000,000.00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	20%	139,990,000.00	20%	373,100,000.00	20%	312,000,000.00	20%	312,000,000.00	20%	345,500,000.00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3.01.28	Program Pengembangan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan	253 Sampel	200 Sampel	368,744,000.00	210 Sampel	217,050,000.00	220 Sampel	200,000,000.00	230 Sampel	357,000,000.00	240 Sampel	415,000,000.00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangan­ku kepentingan terhadap pelayanan UPTD	0%	80%	569,400,000.00	81%	632,500,000.00	82%	695,750,000.00	83%	765,225,000.00	84%	632,500,000.00	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja UPTD yang Memiliki Kinerja Pelayanan Tepat Waktu	0 Unit	3 Unit	284,000,000.00	3 Unit	315,200,000.00	3 Unit	363,000,000.00	3 Unit	399,300,000.00	3 Unit	315,200,000.00	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelen­bagaan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	20%	167,005,000.00	20%	463,200,000.00	20%	485,500,000.00	20%	516,550,000.00	20%	463,200,000.00	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3.01.29	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan	Jumlah Produksi Benih Udang Windu/Ikan Air Laut	2500000000 Ekor	2600000000 Ekor	3,796,810,000.00	2700000000 Ekor	4,799,100,000.00	2800000000 Ekor	5,111,750,000.00	2900000000 Ekor	5,510,425,000.00	3000000000 Ekor	4,789,100,000.00	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD	0%	80%	584.600.000.00	81%	723.200.000.00	82%	730.800.000.00	83%	780.000.000.00	84%	795.000.000.00	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Muara Badak - Sebulu
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja UPTD yang Memiliki Kinerja Pelayanan Tepat Waktu	0 Unit	3 Unit	99.775.000.00	3 Unit	684.805.775.00	3 Unit	490.600.000.00	3 Unit	611.900.000.00	3 Unit	764.785.000.00	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Muara Badak - Sebulu
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenyangan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	20%	147.650.000.00	20%	277.839.225.00	20%	269.100.000.00	20%	287.000.000.00	20%	294.000.000.00	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Muara Badak - Sebulu
3.01.30	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Tawar Ekonomis Penting	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Tawar	6000 Ekor	6500 Ekor	853.175.000.00	0 Ekor	-	0 Ekor	-	0 Ekor	-	0 Ekor	-	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Muara Badak - Sebulu
3.01.31	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Payau/ Air Laut	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang Galah/Ikan Air Laut	0 Ekor	0 Ekor	-	7000 Ekor	814.155.000.00	7500 Ekor	808.500.000.00	8000 Ekor	850.000.000.00	8500 Ekor	928.000.000.00	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Muara Badak - Sebulu

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.02	Parwisata			12,817,000,000.00		16,000,000,000.00		15,000,000,000.00		15,000,000,000.00		15,000,000,000.00		
3.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	90%	2,231,698,000.00	90%	4,750,000,000.00	95%	2,300,000,000.00	95%	2,300,000,000.00	95%	2,300,000,000.00	Dinas Pariwisata
3.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	5 unit	2,842,550,000.00	5 unit	2,320,000,000.00	5 unit	2,400,000,000.00	5 unit	2,400,000,000.00	5 unit	2,400,000,000.00	Dinas Pariwisata
3.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelmbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	50%	1,587,152,000.00	55%	1,600,000,000.00	60%	1,600,000,000.00	65%	1,600,000,000.00	70%	1,600,000,000.00	Dinas Pariwisata
3.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraa n Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	65.18 nilai AKIP	70 nilai AKIP	900,000,000.00	75 nilai AKIP	930,000,000.00	80 nilai AKIP	950,000,000.00	80 nilai AKIP	950,000,000.00	80 nilai AKIP	950,000,000.00	Dinas Pariwisata

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.02.15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah Destinasi KPP Strategis yang di Promosikan	2 Destinasi	0 Destinasi	970,000,000.00	-	0 Destinasi	-	0 Destinasi	-	0 Destinasi	-	Dinas Pariwisata	
3.02.16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya	2 Kawasan	2 Kawasan	1,885,600,000.00	2,800,000,000.00	2 Kawasan	3,050,000,000.00	2 Kawasan	3,050,000,000.00	2 Kawasan	3,050,000,000.00	Dinas Pariwisata	
3.02.17	Program Pengembangan Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata	Jumlah Destinasi Unggulan Provinsi yang dipromosikan	0 Destinasi	8 Destinasi	-	1,200,000,000.00	10 Destinasi	1,550,000,000.00	10 Destinasi	1,550,000,000.00	10 Destinasi	1,550,000,000.00	Dinas Pariwisata	
3.02.18	Program Pengembangan Industri dan Kelengkapan Pariwisata	Jumlah pelaku usaha jasa pariwisata yang dikembangkan	0 Orang	520 Orang	-	1,200,000,000.00	660 Orang	1,600,000,000.00	660 Orang	1,600,000,000.00	660 Orang	1,600,000,000.00	Dinas Pariwisata	
3.02.19	Program Pengembangan Karya Seni Budaya dan Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	0 orang	270 orang	-	1,200,000,000.00	350 orang	1,550,000,000.00	350 orang	1,550,000,000.00	350 orang	1,550,000,000.00	Dinas Pariwisata	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.02.30	Program Pengendalian Usaha Jasa Pariwisata	Jumlah Jenis Usaha Jasa Pariwisata yang dikembangkan pengembangannya	10 Jenis Usaha	1,000,000,000.00	0 Jenis Usaha	-	0 Jenis Usaha	-	0 Jenis Usaha	-	0 Jenis Usaha	-	Dinas Pariwisata	
3.02.31	Program Pengembangan Karya Seni Budaya	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	0 orang	1,400,000,000.00	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	Dinas Pariwisata	
3.03	Pertanian			88,017,803,400.00	133,105,485,740.00		106,647,500,000.00		104,372,141,950.00		109,152,087,380.00			
3.03.41	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	226017 Ton	233020 Ton	3,020,600,000.00	240245 Ton	3,700,000,000.00	247698 Ton	3,700,000,000.00	255387 Ton	3,950,000,000.00	263320 Ton	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3.03.51	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Jumlah produksi padi	383958 Ton	403000 Ton	11,471,580,000.00	423000 Ton	13,550,000,000.00	444000 Ton	13,550,000,000.00	466000 Ton	15,150,000,000.00	495000 Ton	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3.03.49	Program Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas Lahan yang Menggunakan Benih Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura yang bersertifikat	150 Ha	150 Ha	655,550,000.00	165 Ha	2,298,990,000.00	180 Ha	2,000,000,000.00	195 Ha	1,400,000,000.00	210 Ha	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.03.48	Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas Scrangan OPT	6192 Ha	6165 Ha	2.907.112.500,00	6139 Ha	2.705.590.000,00	6112 Ha	2.495.000.000,00	6086 Ha	3.360.000.000,00	6060 Ha	1.450.000.000,00	UPTD Proeksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.03.46	Program Peningkatan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Rata-rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Bersertifikat	75%	80%	4.897.210.900,00	81%	3.523.500.740,00	82%	3.402.500.000,00	83%	3.880.500.000,00	84%	2.212.500.000,00	UPTD Balai Benih Induk Hortikultura
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	2.680.263.900,00	83%	2.680.263.900,00	86%	3.503.900.000,00	89%	3.371.229.600,00	92%	3.500.000.000,00	Dinas Perkebunan
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	5 unit	2.156.565.000,00	5 unit	2.434.000.000,00	5 unit	2.581.200.000,00	5 unit	2.550.000.000,00	5 unit	3.000.000.000,00	Dinas Perkebunan
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	20%	1.992.775.000,00	20%	2.291.605.000,00	20%	2.291.605.000,00	20%	2.000.000.000,00	20%	2.600.000.000,00	Dinas Perkebunan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
3.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0 Nilai	62 Nilai	744,675,000.00	68 Nilai	762,823,000.00	70 Nilai	991,671,000.00	72 Nilai	1,289,172,000.00	74 Nilai	1,675,924,000.00	Dinas Perkebunan
3.03.58	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Komoditi Perkebunan (karet)	0 Ton	70533 Ton		74060 Ton		77763 Ton		81651 Ton		90000 Ton		Dinas Perkebunan
		Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit)	0 ton	15197504 ton	14,977,395,000.00	16717254 ton	21,805,111,250.00	17036402 ton	16,717,791,000.00	18020894 ton	16,717,791,000.00	18197504 ton	18,472,673,000.00	
		Produksi Komoditi Perkebunan (kakao)	0 ton	3006 ton		3307 ton		3771 ton		4368 ton		5000 ton		

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														PD
Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Produksi Komoditi Perkebunan (Lada)	0 ton	5317 ton		5849 ton		6434 ton		7077 ton		8517 ton		
		Produksi Komoditi Perkebunan (Kelapa)	0 Ton	12105 Ton		12468 Ton		12479 Ton		12500 Ton		12853 Ton		
		Produksi komoditas perkebunan	Ton	1528846 5 Ton		1681293 8 Ton		1713684 9 Ton		18126490 Ton		1831387 4 Ton		
3.03.60	Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	Persentase konflik yang ditangani	%	20%	148.450.000.00	%	-	%		%	-	%		Dinas Perkebunan
3.03.61	Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	Persentase produk yang bersertifikat	%	30%	903.760.000.00	%	-	%		%	-	%		Dinas Perkebunan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.03.62	Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	Jumlah komoditi produk olahan hasil perkebunan	5 Komoditi	223,710,500.00	0 Komoditi	-	0 Komoditi	-	0 Komoditi	-	0 Komoditi	-	Dinas Perkebunan	
3.03.65	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Jumlah komoditi perkebunan yang dipasarkan melalui kegiatan pameran dagang	5 Komoditi	395,800,000.00	0 Komoditi	-	0 Komoditi	-	0 Komoditi	-	0 Komoditi	-	Dinas Perkebunan	
3.03.68	Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	Jumlah kelompok tani yang dapat melaksanakan pengendalian hama terpadu	Kelompok Tani	228,075,000.00	Kelompok Tani	-	Kelompok Tani	-	Kelompok Tani	-	Kelompok Tani	-	Dinas Perkebunan	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.03.76	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	1.87 Juta ton CO2eq	4.79 Juta ton CO2eq	275,800,000.00	4.08 Juta ton CO2eq	977,500,000.00	4.07 Juta ton CO2eq	977,500,000.00	4.06 Juta ton CO2eq	1,020,000,000.00	4.04 Juta ton CO2eq	1,490,000,000.00	Dinas Perkebunan
3.03.77	Program konservasi lahan dan air	Persentase sumber air dan HCV yang terlindungi	%	50%	247,750,000.00	%	-	%	-	%	-	%	-	Dinas Perkebunan
3.03.78	Program Pemberdayaan Tenaga Pendamping Perkebunan Rakyat	Jumlah SDM petani, petugas lapangan dan teknis perkebunan	Orang	25 Orang	355,775,000.00	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Dinas Perkebunan
3.03.79	Program Peningkatan Kemandirian dan Kelembagaan Kelompok Tani	Jumlah gabungan kelompok tani	Gapoktan	5 Gapoktan	339,425,000.00	Gapoktan	-	Gapoktan	-	Gapoktan	-	Gapoktan	-	Dinas Perkebunan
3.03.80	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	98 Perusahaan	32 Perusahaan	542,400,000.00	35 Perusahaan	1,010,821,250.00	35 Perusahaan	1,010,821,000.00	35 Perusahaan	1,150,000,000.00	35 Perusahaan	1,537,331,000.00	Dinas Perkebunan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.03.81	Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan	Jumlah lembaga pekebun yang bermitra	20 Kelompok k	276,675,000.00	Kelompok	-	Kelompok	-	Kelompok	-	Kelompok	-	Dinas Perkebunan	
3.03.82	Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan	Jumlah olahan produk hasil perkebunan	5 Komoditi	347,250,000.00	Komoditi 1	-	Komoditi	-	Komoditi	-	Komoditi 1	-	Dinas Perkebunan	
3.03.83	Program Pengendalian Kebakaran Kebun	Persentase kebakaran kebun yang dikendalikan	%	40%	271,500,000.00	%	-	%	-	%	-	%	Dinas Perkebunan	
3.03.88	Program penyediaan bahan tanaman	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	0%	75%	1,495,388,000.00	85%	-	90%	-	95%	-	100%	Dinas Perkebunan	
3.03.93	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Jumlah produk perkebunan yang bersertifikat SNI	0 Produk	-	2 Produk	2,251,383,750.00	2 Produk	2,251,383,000.00	3 Produk	2,400,000,000.00	3 Produk	3,424,072,000.00	Dinas Perkebunan	
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	327,160,000.00	83%	526,234,000.00	86%	370,662,387.00	89%	497,570,650.00	92%	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	505,925,000.00	3 unit	1,150,000,000.00	3 unit	300,108,313.00	3 unit	345,124,400.00	3 unit	405,000,000.00	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	20%	379,280,000.00	20%	600,000,000.00	20%	501,597,800.00	20%	576,837,400.00	20%	710,000,000.00	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3.03.84	Program Pengawasan Peredaran benih perkebunan	Jumlah penanganan kasus peredaran benih ilegal	0 Kasus	6 Kasus	626,260,000.00	0 Kasus	-	0 Kasus	-	0 Kasus	-	0 Kasus	-	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3.03.85	Program pengujian dan sertifikasi benih	Jumlah benih yang disertifikasi	5000000 Benih	5000000 Benih	401,105,000.00	0 Benih	-	0 Benih	-	0 Benih	-	0 Benih	-	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3.03.94	Program Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih	Jumlah benih yang beredar	2825176 Benih	0 Benih	-	2905176 Benih	1,729,171,000.00	2945176 Benih	1,327,631,500.00	2985176 Benih	1,526,776,500.00	3025176 Benih	1,700,000,000.00	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	506,853,600.00	83%	582,881,640.00	86%	626,545,850.00	89%	770,861,200.00	92%	901,333,000.00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	394,280,000.00	3 unit	1,713,958,830.00	3 unit	521,435,300.00	3 unit	599,650,500.00	3 unit	800,000,000.00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelayangan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	267,210,000.00	20%	400,000,000.00	20%	353,385,300.00	20%	406,392,900.00	20%	470,000,000.00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	
3.03.86	Program Pengendalian OPT	Jumlah kelompok tani dan brigade proteksi yang mengendalikan OPT	25 Kelompok	461,284,000.00	0 Kelompok	-	0 Kelompok	-	0 Kelompok	-	0 Kelompok	-	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	
3.03.87	Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)	Jumlah produksi Agens Pengendali Hayati (APH)	500 Liter	425,060,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	
3.03.95	Program Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT	208538000 Rupiah	-	1087534440 Rupiah	1,303,159,530.00	1047138860 Rupiah	1,498,633,550.00	916648000 Rupiah	1,723,428,400.00	774940000 Rupiah	1,850,000,000.00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	-	83%	371,049,300.00	86%	376,234,000.00	89%	300,000,000.00	92%	580,000,000.00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	-	3 unit	260,963,750.00	3 unit	300,308,200.00	3 unit	270,720,600.00	3 unit	385,000,000.00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbugaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	-	20%	436,172,000.00	20%	379,280,000.00	20%	312,780,000.00	20%	670,000,000.00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	
3.03.88	Program penyediaan bahan tanaman	Persentase penemulan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	80%	-	85%	1,618,306,800.00	90%	1,618,306,800.00	95%	1,618,306,800.00	100%	1,665,000,000.00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	2,692,700,000.00	81%	2,700,000,000.00	82%	3,000,000,000.00	83%	3,100,000,000.00	84%	3,300,000,000.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	5 unit	1,491,778,814.00	5 unit	4,550,000,000.00	5 unit	3,470,000,000.00	5 unit	3,500,000,000.00	5 unit	3,530,000,000.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	10%	11%	1,480,196,000.00	12%	1,830,000,000.00	13%	1,710,000,000.00	14%	1,790,000,000.00	15%	1,870,000,000.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	77.86 Nilai	78.36 Nilai	1,075,000,000.00	78.86 Nilai	1,700,000,000.00	79.36 Nilai	1,300,000,000.00	79.86 Nilai	1,400,000,000.00	80.36 Nilai	1,500,000,000.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.03.23	Program Hilirisasi Produk Peternakan	Peningkatan usaha yang bersertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	10%	10%	1,112,468,000.00	11%	2,200,000,000.00	12%	1,300,000,000.00	13%	1,450,000,000.00	14%	1,600,000,000.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.03.34	Program Pengembangan Usaha Peternakan	Jumlah Miniranch yang terregistrer	Unit	5 Unit	5,800,000,000.00	35 Unit	10,250,000,000.00	40 Unit	11,670,000,000.00	35 Unit	7,400,000,000.00	35 Unit	7,600,000,000.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.03.89	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Jumlah kompartemen yang berstatus bebas penyakit jembrana	0 Unit	5 Unit	1,115,150,000.00	35 Unit	2,600,000,000.00	40 Unit	2,450,000,000.00	35 Unit	2,600,000,000.00	35 Unit	2,750,000,000.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.03.90	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	Calving Interval	19 Bulan	18 Bulan	7,000,000,000.00	18 Bulan	24,100,000,000.00	17 Bulan	7,100,000,000.00	17 Bulan	7,700,000,000.00	16 Bulan	8,300,000,000.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	80%	989,233,186.00	81%	1,200,000,000.00	82%	1,200,000,000.00	83%	1,300,000,000.00	84%	1,500,000,000.00	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	1,193,400,000.00	3 unit	2,160,000,000.00	3 unit	1,960,000,000.00	3 unit	1,580,000,000.00	3 unit	1,590,000,000.00	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	10%	11%	267,620,000.00	12%	540,000,000.00	13%	540,000,000.00	14%	220,000,000.00	15%	230,000,000.00	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.03.92	Program Peningkatan Mutu Genetik Ternak	Persentase produksi bibit ternak berkualitas	10%	5.878.254.000.00	11%	3.100.000.000.00	12%	2.300.000.000.00	13%	1.700.000.000.00	14%	1.900.000.000.00	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak	
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	764.738.554.00	81%	870.000.000.00	82%	900.000.000.00	83%	1.100.000.000.00	84%	1.200.000.000.00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	192.471.446.00	3 unit	1.622.000.000.00	3 unit	460.000.000.00	3 unit	470.000.000.00	3 unit	475.000.000.00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	10%	218.000.000.00	12%	385.000.000.00	13%	340.000.000.00	14%	375.000.000.00	15%	385.000.000.00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
3.03.91	Program Penyidikan dan Pengujian Kewan dan Ksmavet	Peningkatan pemeriksaan sampel penyakit hewan dan produk asal hewan	11%	896.890.000.00	12%	2.615.000.000.00	13%	3.300.000.000.00	14%	1.500.000.000.00	15%	1.700.000.000.00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
3.04	Kebutanan			297.205.957.750.00		328.215.057.750.00		328.215.057.750.00		328.215.057.750.00		328.215.057.750.00		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepinginan terhadap pelayanan PD (SKM)	50%	80%	3,179,936,000.00	85%	3,376,435,000.00	90%	3,376,435,000.00	95%	3,376,435,000.00	100%	3,376,435,000.00	Dinas Kehutanan
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit	5 unit	2,463,895,000.00	5 unit	2,037,950,000.00	5 unit	2,037,950,000.00	5 unit	2,037,950,000.00	5 unit	2,037,950,000.00	Dinas Kehutanan
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelmbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	80%	2,588,400,000.00	85%	2,606,000,000.00	90%	2,606,000,000.00	95%	2,606,000,000.00	100%	2,606,000,000.00	Dinas Kehutanan
3.04.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	70.73 Nilai AKIP	70 Nilai AKIP	1,774,590,000.00	70 Nilai AKIP	1,306,500,000.00	70 Nilai AKIP	1,306,500,000.00	70 Nilai AKIP	1,306,500,000.00	70 Nilai AKIP	1,306,500,000.00	Dinas Kehutanan
3.04.16	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Realisasi Penerimaan PNPB Sektor Kehutanan	167 Milyar Rupiah	160 Milyar Rupiah	3,471,960,000.00	165 Milyar Rupiah	3,471,960,000.00	170 Milyar Rupiah	3,471,960,000.00	175 Milyar Rupiah	3,471,960,000.00	180 Milyar Rupiah	3,471,960,000.00	Dinas Kehutanan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.39	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Persentase tutupan lahan Meningkat	13,98%	13.98%	1,194,850,000.00	13.98%	1,194,850,000.00	13.98%	1,194,850,000.00	13.98%	1,194,850,000.00	13.98%	1,194,850,000.00	Dinas Kehutanan
3.04.41	Program Perlindungan dan KSDAE Kawasan Hutan	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	2%	2%	782,100,000.00	1.75%	782,100,000.00	1.50%	782,100,000.00	1.25%	782,100,000.00	1%	782,100,000.00	Dinas Kehutanan
3.04.42	Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Masyarakat	118000 Ha	32000 Ha	2,330,970,000.00	32000 Ha	2,330,970,000.00	32000 Ha	2,330,970,000.00	32000 Ha	2,330,970,000.00	32000 Ha	2,330,970,000.00	Dinas Kehutanan
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	11 Unit Usaha	5 Unit Usaha	1,729,390,425.00	5 Unit Usaha	2,572,000,000.00	5 Unit Usaha	2,572,000,000.00	5 Unit Usaha	2,572,000,000.00	5 Unit Usaha	2,572,000,000.00	Dinas Kehutanan
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	35 Jumlah Usulan	1,540,886,800.00	35 Jumlah Usulan	3,428,000,000.00	35 Jumlah Usulan	3,428,000,000.00	35 Jumlah Usulan	3,428,000,000.00	35 Jumlah Usulan	3,428,000,000.00	Dinas Kehutanan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA/DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0.25%	14,359,425,100.00	0.25%	5,500,000,000.00	0.25%	5,500,000,000.00	0.25%	5,500,000,000.00	0.25%	5,500,000,000.00	Dinas Kehutanan	
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	9 kasus Tindak Pidana	1,542,039,700.00	39 kasus Tindak Pidana	1,700,000,000.00	39 kasus Tindak Pidana	1,700,000,000.00	39 kasus Tindak Pidana	1,700,000,000.00	39 kasus Tindak Pidana	1,700,000,000.00	Dinas Kehutanan	
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	350 Hektar	5,764,634,750.00	350 Hektar	10,000,000,000.00	350 Hektar	10,000,000,000.00	350 Hektar	10,000,000,000.00	350 Hektar	Dinas Kehutanan	
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih	4 SK/Sertifikat	27 SK/Sertif ikat	1,542,040,000.00	37 SK/Serti fikat	2,800,000,000.00	37 SK/Sertif ikat	2,800,000,000.00	37 SK/Sertifi kat	2,800,000,000.00	37 SK/Serti fikat	Dinas Kehutanan	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.52	Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DR)	Persentase Realisasi Keuangan DBH SDA DR meningkat	0%	-	25%	978,416,775.00	27.50%	978,416,775.00	30%	978,416,775.00	32.50%	978,416,775.00	Dinas Kehutanan	
3.04.53	Program Pengelolaan KPH Lindung	Luas Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung	0 Ha	-	50 Ha	179,936,000.00	50 Ha	179,936,000.00	50 Ha	179,936,000.00	50 Ha	179,936,000.00	Dinas Kehutanan	
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	80%	846,594,000.00	85%	846,594,000.00	90%	846,594,000.00	95%	846,594,000.00	100%	846,594,000.00	UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	3 Unit	731,906,000.00	3 Unit	731,906,000.00	3 Unit	731,906,000.00	3 Unit	731,906,000.00	3 Unit	731,906,000.00	UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	80%	229,100,000.00	85%	229,100,000.00	90%	229,100,000.00	95%	229,100,000.00	100%	229,100,000.00	UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	Unit Usaha	4 Unit Usaha	432,800,000.00	4 Unit Usaha	800,000,000.00	4 Unit Usaha	850,000,000.00	4 Unit Usaha	900,000,000.00	4 Unit Usaha	900,000,000.00	UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	5 Jumlah Usulan	1.264.100.000.00	5 Jumlah Usulan	1.550.000.000.00	5 Jumlah Usulan	1.550.000.000.00	5 Jumlah Usulan	1.550.000.000.00	5 Jumlah Usulan	1.550.000.000.00	UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahar (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0%	0.25%	19.668.291.775.00	0.25%	14.461.266.775.00	0.25%	12.475.166.775.00	0.25%	12.400.166.775.00	0.25%	12.375.166.775.00	UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	0 kasus Tindak Pidana	2 kasus Tindak Pidana	1.728.125.000.00	2 kasus Tindak Pidana	2.050.000.000.00	2 kasus Tindak Pidana	2.050.000.000.00	2 kasus Tindak Pidana	2.050.000.000.00	2 kasus Tindak Pidana	2.050.000.000.00	UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahar (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahar Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	86 Hektar	1.998.800.000.00	86 Hektar	6.413.300.000.00	86 Hektar	8.349.400.000.00	86 Hektar	8.374.400.000.00	86 Hektar	8.399.400.000.00	UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto
3.04.48	Program Pengembangan Perkebunan (DBH DR)	Jumlah Bibit	0 Bibit	100000 Bibit	182.450.000.00	0 Bibit	-	0 Bibit	-	0 Bibit	-	0 Bibit	-	UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.50	Program Pengelolaan Tahura	Luas Kawasan Hutan Tahura yang dikelola	0 Hektar	320,400,000.00	150 Hektar	320,400,000.00	150 Hektar	320,400,000.00	150 Hektar	320,400,000.00	150 Hektar	320,400,000.00	UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto	
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	616,850,000.00	85%	616,850,000.00	90%	616,850,000.00	95%	616,850,000.00	100%	616,850,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	640,930,000.00	3 Unit	640,930,000.00	3 Unit	640,930,000.00	3 Unit	640,930,000.00	0 Unit	640,930,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	269,200,000.00	85%	269,200,000.00	90%	269,200,000.00	95%	269,200,000.00	100%	269,200,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0 Unit Usaha	-	5 Unit Usaha	200,000,000.00	5 Unit Usaha	200,000,000.00	5 Unit Usaha	200,000,000.00	5 Unit Usaha	200,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	3,975,620,000.00	4 Jumlah Usulan	4,176,120,000.00	4 Jumlah Usulan	4,232,520,000.00	4 Jumlah Usulan	3,937,910,000.00	4 Jumlah Usulan	2,804,410,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan n Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0%	0.25%	15,082,740,000.00	0.25%	4,601,306,775.00	0.25%	4,133,606,775.00	0.25%	3,381,936,775.00	0.25%	2,723,136,775.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	0 kasus Tindak Pidana	5 kasus Tindak Pidana	2,761,970,000.00	5 kasus Tindak Pidana	3,162,470,000.00	5 kasus Tindak Pidana	3,218,870,000.00	5 kasus Tindak Pidana	2,724,260,000.00	5 kasus Tindak Pidana	2,010,460,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	200 Hektar	2,208,066,775.00	200 Hektar	11,188,000,000.00	200 Hektar	11,386,500,000.00	200 Hektar	14,022,000,000.00	200 Hektar	16,657,500,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bbit, Sertifikasi Sumber Benih	0 SK/ Sertifikat	8 SK/ Sertifikat	1,246,170,000.00	8 SK/ Serti fikat	1,946,670,000.00	8 SK/ Sertif ikat	2,103,070,000.00	8 SK/ Sertifi kat	1,008,460,000.00	8 SK/ Serti fikat	879,060,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	0 Unit Usaha	8 Unit Usaha	1,065,700,000.00	8 Unit Usaha	6,665,700,000.00	8 Unit Usaha	6,665,700,000.00	8 Unit Usaha	6,665,700,000.00	8 Unit Usaha	6,665,700,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	80%	1,076,890,000.00	85%	1,076,890,000.00	90%	1,076,890,000.00	95%	1,076,890,000.00	100%	1,076,890,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongkan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	696,010,000.00	3 Unit	696,010,000.00	3 Unit	696,010,000.00	3 Unit	696,010,000.00	0 Unit	696,010,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	80%	248,500,000.00	85%	248,500,000.00	90%	248,500,000.00	95%	248,500,000.00	100%	248,500,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0 Unit Usaha	2 Unit Usaha	309,450,000.00	2 Unit Usaha	1,120,000,000.00	2 Unit Usaha	1,250,000,000.00	2 Unit Usaha	1,275,000,000.00	2 Unit Usaha	1,300,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	3 Jumlah Usulan	1,206,900,000.00	3 Jumlah Usulan	1,090,000,000.00	3 Jumlah Usulan	950,000,000.00	3 Jumlah Usulan	800,000,000.00	3 Jumlah Usulan	850,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0.25%	0.25%	20,838,650,000.00	0.25%	8,390,000,000.00	0.25%	8,250,000,000.00	0.25%	7,600,000,000.00	0.25%	7,475,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kebutanan yang ditangani	1 kasus Tindak Pidana	6 kasus Tindak Pidana	264,500,000.00	6 kasus Tindak Pidana	800,000,000.00	6 kasus Tindak Pidana	700,000,000.00	6 kasus Tindak Pidana	1,075,000,000.00	6 kasus Tindak Pidana	1,125,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 hektar	100 hektar	2,655,066,775.00	100 hektar	13,674,566,775.00	100 hektar	13,824,566,775.00	100 hektar	13,824,566,775.00	100 hektar	13,824,566,775.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih	0 SK/ Sertifikat	0 SK/Sertifikat	-	1 SK/Serti fikat	200,000,000.00	1 SK/Sertif ikat	300,000,000.00	1 SK/Sertif ikat	700,000,000.00	1 SK/Serti fikat	700,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	0 Unit Usaha	2 Unit Usaha	1,056,600,000.00	2 Unit Usaha	6,665,700,000.00	2 Unit Usaha	6,665,700,000.00	2 Unit Usaha	6,665,700,000.00	2 Unit Usaha	6,665,700,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	80%	746,450,000.00	85%	746,450,000.00	90%	746,450,000.00	95%	746,450,000.00	100%	746,450,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	3 Unit	642,000,000.00	3 Unit	642,000,000.00	3 Unit	642,000,000.00	3 Unit	642,000,000.00	3 Unit	642,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	80%	590,800,000.00	85%	590,800,000.00	90%	590,800,000.00	95%	590,800,000.00	100%	590,800,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0 Unit Usaha	5 Unit Usaha	908,364,000.00	5 Unit Usaha	1,206,054,575.00	5 Unit Usaha	1,206,054,575.00	5 Unit Usaha	1,206,054,575.00	5 Unit Usaha	1,206,054,575.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	2 Jumlah Usulan	2,467,524,000.00	2 Jumlah Usulan	1,773,925,000.00	2 Jumlah Usulan	1,959,925,000.00	2 Jumlah Usulan	2,155,925,000.00	2 Jumlah Usulan	2,155,925,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0%	0.25%	16,859,792,800.00	0.25%	7,937,450,000.00	0.25%	7,514,250,000.00	0.25%	7,318,250,000.00	0.25%	7,454,525,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Keuhutan yang ditangani	0 kasus Tindak Pidana	6 kasus Tindak Pidana	1,631,969,600.00	6 kasus Tindak Pidana	3,405,600,000.00	6 kasus Tindak Pidana	3,810,600,000.00	6 kasus Tindak Pidana	3,810,600,000.00	6 kasus Tindak Pidana	3,674,325,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	100 Hektar	2,404,166,375.00	100 Hektar	10,744,895,200.00	100 Hektar	10,550,595,200.00	100 Hektar	10,550,595,200.00	100 Hektar	10,550,595,200.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih	0 SK/Sertifikat	1 SK/Sertif ikat	1,002,750,000.00	1 SK/Serti fikat	206,642,000.00	1 SK/Sertif ikat	233,142,000.00	1 SK/Sertif ikat	233,142,000.00	1 SK/Serti fikat	233,142,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	0 Unit Usaha	2 Unit Usaha	948,750,000.00	2 Unit Usaha	2,548,750,000.00	2 Unit Usaha	2,548,750,000.00	2 Unit Usaha	2,548,750,000.00	2 Unit Usaha	2,548,750,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	80%	721,297,000.00	85%	721,297,000.00	90%	721,297,000.00	95%	721,297,000.00	100%	721,297,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	3 Unit	1,358,300,000.00	3 Unit	1,358,300,000.00	3 Unit	1,358,300,000.00	3 Unit	1,358,300,000.00	3 Unit	1,358,300,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	80%	336,620,000.00	85%	336,620,000.00	90%	336,620,000.00	95%	336,620,000.00	100%	336,620,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0 Unit Usaha	4 Unit Usaha	343,700,000.00	4 Unit Usaha	499,600,000.00	4 Unit Usaha	490,000,000.00	4 Unit Usaha	510,300,000.00	4 Unit Usaha	563,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	7,530,100,000.00	10 Jumlah Usulan	4,260,300,000.00	10 Jumlah Usulan	3,523,776,000.00	10 Jumlah Usulan	4,039,000,000.00	10 Jumlah Usulan	3,947,600,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendito	
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan n Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0%	14,043,725,000.00	0.25%	6,731,750,000.00	0.25%	7,506,530,000.00	0.25%	7,478,140,000.00	0.25%	7,322,250,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendito	
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	0 kasus Tindak Pidana	2,046,716,775.00	1 kasus Tindak Pidana	1,910,565,000.00	1 kasus Tindak Pidana	2,047,598,800.00	1 kasus Tindak Pidana	1,932,760,000.00	1 kasus Tindak Pidana	1,954,100,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendito	
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	1,124,800,000.00	100 Hektar	10,508,451,775.00	100 Hektar	10,869,000,000.00	100 Hektar	10,408,841,775.00	100 Hektar	10,566,091,775.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendito	
3.04.48	Program Pengembangan Perbibitan (DBH DR)	Jumlah Bibit	0 Bibit	185,525,000.00	25000 Bibit	1,363,900,000.00	25000 Bibit	837,751,975.00	25000 Bibit	905,525,000.00	25000 Bibit	921,525,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendito	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	0 Unit Usaha	6 Unit Usaha	376,783,000.00	6 Unit Usaha	1,976,783,000.00	6 Unit Usaha	1,976,783,000.00	6 Unit Usaha	1,976,783,000.00	6 Unit Usaha	1,976,783,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	80%	657,950,000.00	85%	657,950,000.00	90%	657,950,000.00	95%	657,950,000.00	100%	657,950,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	3 Unit	224,860,000.00	3 Unit	224,860,000.00	3 Unit	224,860,000.00	3 Unit	224,860,000.00	3 Unit	224,860,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenyangan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	80%	483,500,000.00	85%	483,500,000.00	90%	483,500,000.00	95%	483,500,000.00	100%	483,500,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0 Unit Usaha	3 Unit Usaha	729,856,775.00	3 Unit Usaha	1,000,000,000.00	3 Unit Usaha	1,175,000,000.00	3 Unit Usaha	1,125,000,000.00	3 Unit Usaha	1,550,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	10 Jumlah Usulan	681,600,000.00	10 Jumlah Usulan	3,200,000,000.00	10 Jumlah Usulan	3,050,000,000.00	10 Jumlah Usulan	2,525,000,000.00	10 Jumlah Usulan	2,200,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan n Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0%	0.25%	16,785,737,500.00	0.25%	7,223,066,775.00	0.25%	7,566,066,775.00	0.25%	5,642,066,775.00	0.25%	4,659,409,275.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehtutanan yang ditangani	0 kasus Tindak Pidana	2 kasus Tindak Pidana	868,800,000.00	2 kasus Tindak Pidana	1,220,000,000.00	2 kasus Tindak Pidana	1,250,000,000.00	2 kasus Tindak Pidana	1,290,000,000.00	2 kasus Tindak Pidana	1,315,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	350 Hektar	6,115,172,500.00	350 Hektar	11,401,500,000.00	350 Hektar	11,358,500,000.00	350 Hektar	13,912,500,000.00	350 Hektar	14,840,157,500.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Bibit	0 Bibit	200000 Bibit	93,400,000.00	200000 Bibit	1,230,000,000.00	200000 Bibit	875,000,000.00	200000 Bibit	780,000,000.00	200000 Bibit	710,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Persentase Pengelolaan Kawasan Hutan	0%	2%	2,073,649,000.00	1.95%	3,673,649,000.00	1.90%	3,673,649,000.00	1.85%	3,673,649,000.00	1.80%	3,673,649,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santian
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	80%	1,287,420,000.00	85%	1,287,420,000.00	90%	1,287,420,000.00	95%	1,287,420,000.00	100%	1,287,420,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	3 Unit	495,492,000.00	3 Unit	495,492,000.00	3 Unit	495,492,000.00	3 Unit	495,492,000.00	3 Unit	495,492,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenyagaan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	80%	291,100,000.00	85%	291,100,000.00	90%	291,100,000.00	95%	291,100,000.00	100%	291,100,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	1,146,185,000.00	2 Unit Usaha	1,573,100,000.00	2 Unit Usaha	1,730,410,000.00	2 Unit Usaha	1,903,451,000.00	2 Unit Usaha	2,093,796,100.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	4 Jumlah Usulan	5 Jumlah Usulan	2,740,840,000.00	2,428,750,000.00	2,481,625,000.00	2,549,787,500.00	5 Jumlah Usulan	5 Jumlah Usulan	2,634,766,250.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan		
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0.25%	0.25%	14,729,810,000.00	8,679,135,000.00	8,679,135,000.00	8,679,135,000.00	0.25%	0.25%	8,679,135,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan		
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	4 kasus Tindak Pidana	5 kasus Tindak Pidana	537,429,000.00	1,186,174,000.00	1,274,791,400.00	1,372,270,540.00	5 kasus Tindak Pidana	5 kasus Tindak Pidana	1,479,497,594.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan		
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	340 Hektar	5,426,302,775.00	10,807,407,775.00	10,508,605,375.00	10,169,922,735.00	340 Hektar	340 Hektar	9,787,371,831.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan		
3.04.48	Program Pengembangan Perburuan (DBH DR)	Jumlah Bibit	Bibit	100000 Bibit	694,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	100000 Bibit	100000 Bibit	600,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif ketahanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	0 Unit Usaha	4 Unit Usaha	936,088,000.00	4 Unit Usaha	4,136,088,000.00	4 Unit Usaha	4,136,088,000.00	4 Unit Usaha	4,136,088,000.00	4 Unit Usaha	4,136,088,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	80%	800,125,000.00	85%	800,125,000.00	90%	800,125,000.00	95%	800,125,000.00	100%	800,125,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apuratur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	3 Unit	683,400,000.00	3 Unit	683,400,000.00	3 Unit	683,400,000.00	3 Unit	683,400,000.00	3 Unit	683,400,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	80%	465,075,000.00	85%	465,075,000.00	90%	465,075,000.00	95%	465,075,000.00	100%	465,075,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	-	5 Unit Usaha	582,000,000.00	5 Unit Usaha	582,000,000.00	5 Unit Usaha	582,000,000.00	5 Unit Usaha	582,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	2 Jumlah Usulan	724,480,000.00	2 Jumlah Usulan	1,199,480,000.00	2 Jumlah Usulan	1,199,480,000.00	2 Jumlah Usulan	1,199,480,000.00	2 Jumlah Usulan	1,199,480,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0.25%	0.25%	10,244,758,000.00	0.25%	7,724,758,000.00	0.25%	7,724,758,000.00	0.25%	7,724,758,000.00	0.25%	7,724,758,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kebutanan yang ditangani	0 kasus Tindak Pidana	4 kasus Tindak Pidana	1,250,226,000.00	4 kasus Tindak Pidana	923,826,000.00	4 kasus Tindak Pidana	923,826,000.00	4 kasus Tindak Pidana	923,826,000.00	4 kasus Tindak Pidana	923,826,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	600 Hektar	12,450,354,775.00	600 Hektar	14,229,754,775.00	600 Hektar	14,229,754,775.00	600 Hektar	14,229,754,775.00	600 Hektar	14,229,754,775.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Bibit	Bibit	50000 Bibit	604,748,000.00	50000 Bibit	614,748,000.00	50000 Bibit	614,748,000.00	50000 Bibit	614,748,000.00	50000 Bibit	614,748,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	0 Unit Usaha	2 Unit Usaha	779,400,000.00	2 Unit Usaha	2,379,400,000.00	2 Unit Usaha	2,379,400,000.00	2 Unit Usaha	2,379,400,000.00	2 Unit Usaha	2,379,400,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengkulu
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	80%	716,850,000.00	85%	716,850,000.00	90%	716,850,000.00	95%	716,850,000.00	100%	716,850,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Aya
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	3 Unit	763,700,000.00	3 Unit	763,700,000.00	3 Unit	763,700,000.00	3 Unit	763,700,000.00	3 Unit	763,700,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Aya
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	80%	613,400,000.00	85%	613,400,000.00	90%	613,400,000.00	95%	613,400,000.00	100%	613,400,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Aya

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0 Unit Usaha	-	5 Unit Usaha	1,600,000,000.00	5 Unit Usaha	1,600,000,000.00	5 Unit Usaha	1,700,000,000.00	5 Unit Usaha	1,700,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	3,804,000,000.00	5 Jumlah Usulan	1,928,000,000.00	5 Jumlah Usulan	1,928,000,000.00	5 Jumlah Usulan	1,728,000,000.00	5 Jumlah Usulan	1,328,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0.25%	16,105,485,575.00	0.25%	7,246,566,775.00	0.25%	7,046,566,775.00	0.25%	6,446,566,775.00	0.25%	5,946,566,775.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehtanan yang ditangani	0 kasus Tindak Pidana	10 kasus Tindak Pidana	3,273,081,200.00	10 kasus Tindak Pidana	3,500,000,000.00	10 kasus Tindak Pidana	3,200,000,000.00	10 kasus Tindak Pidana	3,100,000,000.00	10 kasus Tindak Pidana	3,000,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	250 Hektar	2,092,000,000.00	250 Hektar	11,000,000,000.00	250 Hektar	11,500,000,000.00	250 Hektar	12,300,000,000.00	250 Hektar	13,300,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	0 Unit Usaha	9 Unit Usaha	678,050,000.00	9 Unit Usaha	10,878,050,000.00	9 Unit Usaha	10,878,050,000.00	9 Unit Usaha	10,878,050,000.00	9 Unit Usaha	10,878,050,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3.05	Energi dan Sumber Daya Mineral				17,861,800,000.00		71,776,650,000.00		71,876,660,000.00		72,226,660,000.00		72,476,660,000.00	
3.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	2,998,790,000.00	85%	3,149,990,000.00	90%	3,100,000,000.00	95%	3,300,000,000.00	100%	3,500,000,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	5 unit	2,319,453,000.00	5 unit	850,000,000.00	5 unit	850,000,000.00	5 unit	850,000,000.00	5 unit	850,000,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	80%	1,365,125,000.00	85%	1,550,000,000.00	90%	1,650,000,000.00	95%	1,750,000,000.00	100%	1,800,000,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	65.68 Nilai AKIP	67 Nilai AKIP	1,470,550,000.00	68.35 Nilai AKIP	1,750,000,000.00	67.67 Nilai AKIP	1,800,000,000.00	68.18 Nilai AKIP	1,850,000,000.00	68.68 Nilai AKIP	1,850,000,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.27	Program Diversifikasi Energi	% Pemanfaatan EBT	3.81%	4.48%	2,200,700,000.00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.37	Program Pengembangan Ketenagalistrikan	Jumlah KK berlistrik	945607 KK	965607 KK	1,723,350,000.00	989607 KK	11,000,000,000.00	1018607 KK	11,000,000,000.00	1041607 KK	11,000,000,000.00	1078607 KK	11,000,000,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.39	Program Pengembangan Air Tanah	Persentase pemanfaatan potensi air tanah	%	3%	1,272,592,000.00	%	-	%	-	%	-	%	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.41	Program Rehabilitasi/ Reklamasi lahan Pasca Tambang	Persentase wilayah pertambangan yang direhabilitasi	%	30%	160,000,000.00	%	-	%	-	%	-	%	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.05.42	Program Pembinaan dan Evaluasi Bidang pertambangan	Jumlah Perusahaan yang berkualitas	Perusahaan	80 Perusahaan	3,129,970,000.00	Perusahaan	-	Perusahaan	-	Perusahaan	-	Perusahaan	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.43	Program Pengembangan Sumber Daya Geologi	Peningkatan nilai tambah data sumberdaya mineral dan batubara	%	95%	1,221,270,000.00	%	-	%	-	%	-	%	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.45	Program Pengembangan Sumberdaya Geologi dan Tata Lingkungan	Persentase perusahaan yang mengikuti kaidah perhitungan sumberdaya dan cadangan	60%	0%	-	67%	2,493,862,000.00	74%	2,493,862,000.00	80%	2,493,862,000.00	88%	2,493,862,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.46	Program Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik	Jumlah perusahaan yang memenuhi standar dalam pelaksanaan dokumen RKAB	38 Perusahaan	0 Perusahaan	-	45 Perusahaan	3,289,970,000.00	50 Perusahaan	3,289,970,000.00	55 Perusahaan	3,289,970,000.00	60 Perusahaan	3,289,970,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.47	Program Diversifikasi dan Konservasi Energi	% Pemanfaatan EBT	3.81%	0%	-	4.82%	47,692,828,000.00	6.08%	47,692,828,000.00	7.34%	47,692,828,000.00	8.40%	47,692,828,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.06	Perdagangan				6,862,400,000.00		7,626,048,000.00		9,959,664,000.00		10,705,896,000.00		10,144,527,000.00	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.06.15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Barang Beredar SNI wajib Yang Diawasi.	0%	29%	2.150,000,000.00	5%	2.158,000,000.00	5%	4,000,000,000.00	5%	4,318,000,000.00	5%	3,300,000,000.00	Dinas Perindustria n, Perdagangan n, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.06.17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Nilai ekspor produk non migas dan non batubara	0 milyar USDollar	1.43 milyar USDollar	737,000,000.00	0 milyar USDollar	-	0 milyar USDollar	-	0 milyar USDollar	-	0 milyar USDollar	-	Dinas Perindustria n, Perdagangan n, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.06.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rentang waktu kecukupan stok barang pokok dan barang strategis	bulan	3 bulan	971,600,000.00	bulan	-	bulan	-	bulan	-	bulan	-	Dinas Perindustria n, Perdagangan n, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.06.32	Program peningkatan kerjasama perdagangan	Jumlah Pelaku usaha dan nilai transaksi dalam kerjasama pemasaran	0 Pelaku usaha/nilai transaksi	3 Pelaku usaha/nilai transaksi	1,079,400,000.00	0 Pelaku usaha/nilai transaksi	-	0 Pelaku usaha/nilai transaksi	-	0 Pelaku usaha/nilai transaksi	-	0 Pelaku usaha/nilai transaksi	-	Dinas Perindustria n, Perdagangan n, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.06.34	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	Nilai ekspor produk non migas dan non batubara	0 milyar USDollar	0 milyar USDollar	-	1.43 milyar USDollar	3,077,480,000.00	1.57 milyar USDollar	3,366,914,000.00	1.72 milyar USDollar	3,688,776,000.00	1.89 milyar USDollar	4,047,247,000.00	Dinas Perindustria n, Perdagangan n, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.06.33	Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang	Presentasi peningkatan jumlah customer yang dilayani	0%	5%	1,924,400,000.00	10%	2,390,568,000.00	10%	2,592,750,000.00	10%	2,699,120,000.00	10%	2,797,280,000.00	UP ID Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
3.07	Perindustrian				3,155,800,000.00		4,080,000,000.00		4,692,000,000.00		5,395,810,000.00		6,205,170,000.00	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.07.32	Program Penataan Struktur Industri	Volume usaha kawasan ekonomi khusus (KEK) MBTK	miliar rupiah	100 miliar rupiah	626,000,000.00	miliar rupiah	-	miliar rupiah	-	miliar rupiah	-	miliar rupiah	-	Dinas Perindustria n, Perdagangan n, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.07.33	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	Pertumbuhan Industri olahan	0.23%	1%	2,529,800,000.00	1%	4,080,000,000.00	1%	4,692,000,000.00	1%	5,395,810,000.00	1.50%	6,205,170,000.00	Dinas Perindustria n, Perdagangan n, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.08	Transmigrasi				712,500,000.00		862,500,000.00		962,500,000.00		1,010,625,000.00		1,010,625,000.00	
3.08.15	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Kawasan Transmigrasi	0 Kimtrans	4 Kimtrans	712,500,000.00	4 Kimtrans	862,500,000.00	4 Kimtrans	962,500,000.00	4 Kimtrans	1,010,625,000.00	4 Kimtrans	1,010,625,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras i
4	Usuran Pemerintahan Fungsi Penunjang				492,081,656,000.00		502,235,701,000.00		504,690,402,000.00		507,521,437,000.00		509,434,829,000.00	
4.01	Kesekretariatan Daerah				279,907,504,000.00		281,232,504,000.00		282,342,504,000.00		283,457,504,000.00		283,857,504,000.00	
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepatingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	70%	23,600,770,000.00	75%	24,674,497,550.00	80%	23,600,770,000.00	85%	23,600,770,000.00	90%	23,600,770,000.00	Biro Umum

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	56,505,530,000.00	2 unit	55,014,414,000.00	3 unit	55,687,535,177.00	4 unit	55,266,880,037.00	4 unit	54,825,201,588.00	Biro Umum
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Ketenagaaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	%	60%	21,617,718,500.00	65%	21,554,506,000.00	70%	21,554,506,000.00	75%	21,554,506,000.00	80%	21,554,506,000.00	Biro Umum
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	70%	770,575,000.00	73%	770,575,000.00	74%	770,575,000.00	77%	770,575,000.00	80%	770,575,000.00	Biro Umum
4.01.30	Program Pelayanan Tata Usaha Umum	jumlah bulan pelaksanaan administrasi tata usaha umum	bulan	12 bulan	1,881,005,000.00	bulan	1,975,055,250.00	bulan	2,073,799,013.00	bulan	2,177,498,413.00	bulan	2,286,373,334.00	Biro Umum

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.40	Program Pelayanan Sarana Prasarana Rumah Tangga Selda	jumlah sarana dan prasarana untuk pelayanan rumah tangga	0 buah	190 buah 5,650,701,500.00	200 buah 6,037,252,200.00	220 buah 6,339,114,810.00	240 buah 6,656,070,550.00	250 buah 6,988,874,078.00						Biro Umum
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	85% 1,407,700,000.00	90% 1,548,470,000.00	95% 1,703,317,000.00	100% 1,873,648,700.00	100% 2,061,013,570.00						Biro Hubungan Masyarakat
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	1 unit	2 unit 478,800,000.00	3 unit 526,680,000.00	3 unit 579,348,000.00	3 unit 637,282,800.00	3 unit 701,011,080.00						Biro Hubungan Masyarakat
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	75%	80% 1,207,050,000.00	85% 1,327,755,000.00	90% 1,460,530,500.00	95% 1,606,583,550.00	95% 1,767,241,905.00						Biro Hubungan Masyarakat

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	70%	73%	60.000.000.00	74%	66.000.000.00	75%	72.600.000.00	77%	79.860.000.00	80%	87.846.000.00	Biro Hubungan Masyarakat
4.01.37	Program Peningkatan dan Pembinaan Kerjasama	Jumlah kerjasama Pemerintah Provinsi dengan pihak Pemerintah lainnya dan non Pemerintah yang difasilitasi	0 laporan	20 laporan	1.244.100.000.00	25 laporan	1.368.510.000.00	27 laporan	1.505.361.000.00	30 laporan	1.655.897.100.00	35 laporan	1.821.486.810.00	Biro Hubungan Masyarakat
4.01.88	Program Peningkatan Komunikasi Kehumasan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kehumasan (SKM)	0 skor	70 skor	9.821.620.000.00	75 skor	9.229.280.800.00	80 skor	8.577.707.680.00	85 skor	7.860.977.248.00	90 skor	7.072.573.773.00	Biro Hubungan Masyarakat
4.01.90	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Persentase pelayanan Keprotokolan sesuai dengan SOP Keprotokolan	0%	90%	1.525.742.000.00	90%	1.678.316.200.00	95%	1.846.147.820.00	97%	2.030.762.602.00	100%	2.233.838.862.00	Biro Hubungan Masyarakat

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna pelayanan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	75%	475.400.000.00	80%	475.400.000.00	83%	475.400.000.00	85%	475.400.000.00	90%	475.400.000.00	Biro Hukum
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	255.400.000.00	3 unit	255.400.000.00	3 unit	305.400.000.00	3 unit	355.400.000.00	3 unit	355.400.000.00	Biro Hukum
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	50%	571.500.000.00	60%	571.500.000.00	70%	671.500.000.00	80%	671.500.000.00	90%	671.500.000.00	Biro Hukum
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	70%	55.400.000.00	73%	55.400.000.00	75%	55.400.000.00	78%	55.400.000.00	80%	55.400.000.00	Biro Hukum

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.26	Program Peningkatan Pemberian Peraturan Daerah	Peraturan Daerah yang mendorong peningkatan perekonomian daerah (Perda)	0 perda	10 perda	691,000,000.00	10 perda	691,000,000.00	10 perda	691,000,000.00	10 perda	691,000,000.00	10 perda	741,000,000.00	Biro Hukum
4.01.28	Program Peningkatan Produk Hukum Daerah Provinsi	Peraturan Gubernur yang Diterapkan (Pergub)	0 pergub	5 pergub	347,000,000.00	7 pergub	522,000,000.00	9 pergub	522,000,000.00	10 pergub	522,000,000.00	10 pergub	522,000,000.00	Biro Hukum
4.01.29	Program Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Persentase masyarakat yang memperoleh akses informasi hukum (%)	0%	60%	200,000,000.00	65%	200,000,000.00	70%	200,000,000.00	75%	200,000,000.00	80%	200,000,000.00	Biro Hukum
4.01.32	Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum Kabupaten/Kota yang ditetapkan	0 peraturan	250 peraturan	1,244,300,000.00	255 peraturan	1,064,300,000.00	260 peraturan	1,064,300,000.00	265 peraturan	1,064,300,000.00	270 peraturan	1,064,300,000.00	Biro Hukum
4.01.33	Program Pelayanan Bantuan Hukum	Persentase kasus hukum yang diselesaikan	0%	90%	1,840,000,000.00	90%	1,660,000,000.00	90%	1,660,000,000.00	90%	1,660,000,000.00	90%	1,660,000,000.00	Biro Hukum

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.36	Program Peningkatan Penyuluhan Hukum dan HAM	Persentase lembaga di Kabupaten/Kota Peduli HAM	0%	80%	370,000,000.00	85%	370,000,000.00	90%	370,000,000.00	90%	370,000,000.00	90%	370,000,000.00	Biro Hukum
4.01.45	Program Identifikasi dan Evaluasi Produk Hukum	Peraturan Daerah yang diterapkan (Perda)	0 perda	10 perda	-	15 perda	185,000,000.00	20 perda	185,000,000.00	25 perda	185,000,000.00	25 perda	185,000,000.00	Biro Hukum
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	85%	454,032,000.00	90%	476,733,600.00	95%	500,570,280.00	100%	525,598,794.00	100%	551,878,734.00	Biro Organisasi
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	1 unit	2 unit	251,450,000.00	3 unit	364,022,500.00	3 unit	382,223,625.00	3 unit	401,334,806.00	3 unit	421,401,547.00	Biro Organisasi
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	75%	80%	744,785,000.00	85%	782,024,250.00	90%	821,125,463.00	95%	862,181,736.00	95%	905,290,822.00	Biro Organisasi

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.42	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase PD yang telah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	0%	50%	906.920.000.00	61%	952.266.000.00	71%	999.879.300.00	79%	1.049.873.265.00	89%	1.102.366.929.00	Biro Organisasi
4.01.51	Program Peningkatan Manajemen Kepegawaian Setda	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan sesuai aturan	100%	100%	127.960.000.00	100%	134.338.000.00	100%	141.075.900.00	100%	148.129.695.00	100%	155.536.180.00	Biro Organisasi
4.01.53	Program Peningkatan Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi	68.93 Skor	69.5 Skor	2.691.105.000.00	70.5 Skor	2.825.660.250.00	71.5 Skor	2.966.943.263.00	72.5 Skor	3.115.290.426.00	74 Skor	3.271.054.947.00	Biro Organisasi
4.01.60	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang memperoleh predikat minimal B (BAIK)	71.05%	73%	2.974.660.000.00	75%	2.547.303.400.00	77%	2.198.578.969.00	79%	1.832.418.318.00	81%	1.447.949.632.00	Biro Organisasi
4.01.80	Program Penguatan Ketenagagaan	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan NSPK	0%	87%	1.145.920.000.00	90%	1.203.216.000.00	92%	1.263.376.800.00	95%	1.326.545.640.00	97%	1.392.872.923.00	Biro Organisasi

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.81	Program Penataan Tata Laksana Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yg telah Menyusun SOP Sesuai Ketentuan / Aturan	52,63%	60,53%	224.960.000,00	68,42%	236.208.000,00	78,95%	248.018.400,00	89,47%	260.419.320,00	100%	273.440.286,00	Biro Organisasi
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	75%	1.205.300.000,00	80%	1.265.565.000,00	85%	1.028.843.250,00	90%	1.031.650.618,00	95%	1.063.698.751,00	Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	233.000.000,00	2 unit	244.650.000,00	3 unit	409.087.500,00	3 unit	422.041.875,00	3 unit	435.643.969,00	Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	50%	869.450.000,00	55%	951.395.000,00	60%	690.050.625,00	65%	1.140.687.950,00	70%	1.149.756.745,00	Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	73%	3.000.000,00	75%	3.150.000,00	77%	101.102.500,00	80%	101.157.625,00	83%	101.215.506,00	Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.16	Program peningkatan pelayanan kedisnasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah Laporan Kedinasan yang diselesaikan secara tertib dan tepat waktu (Dokumen)	0 dokumen	1 dokumen	409.000.000.00	2 dokumen	481.950.000.00	2 dokumen	506.047.500.00	3 dokumen	531.349.875.00	4 dokumen	557.917.369.00	Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah
4.01.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Batas Administrasi Wilayah yang diselesaikan	0%	64%	1.192.500.000.00	68%	1.284.270.000.00	72%	1.166.999.250.00	76%	1.435.349.213.00	80%	1.507.116.673.00	Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah
4.01.31	Program Penyempurnaan Perangkat Daerah dan Pengembangan Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	Persentase kasus administrasi pemerintahan yang ditindaklanjuti (%)	0%	80%	1.076.250.000.00	85%	1.130.062.500.00	90%	1.186.565.625.00	95%	1.245.893.906.00	100%	1.308.188.602.00	Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah
4.01.34	Program Pembinaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kabupaten/Kota Yang memiliki Indeks Kinerja Pemerintah Daerah dengan peringkat predikat tinggi (Kab/Kota)	kab/kota	3 kab/kota	919.800.000.00	4 kab/kota	520.172.500.00	5 kab/kota	1.014.079.500.00	6 kab/kota	864.783.475.00	7 kab/kota	518.022.649.00	Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah
4.01.35	Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah	Nilai Kinerja LPPD	skor	3.106 skor	541.700.000.00	3.153 skor	568.785.000.00	3.172 skor	597.224.250.00	3.172 skor	427.085.463.00	3.172 skor	708.439.736.00	Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	70%	678,650,000.00	75%	746,515,000.00	80%	821,166,500.00	85%	903,283,150.00	90%	993,611,465.00	Biro Kesjahtera an Rakyat
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	348,630,000.00	2 unit	260,000,000.00	3 unit	260,000,000.00	3 unit	160,000,000.00	3 unit	160,000,000.00	Biro Kesjahtera an Rakyat
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelambagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40%	702,500,000.00	45%	700,500,000.00	50%	767,050,000.00	55%	840,255,000.00	60%	920,780,500.00	Biro Kesjahtera an Rakyat
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan n Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	70%	104,000,000.00	73%	110,000,000.00	75%	110,000,000.00	77%	110,000,000.00	80%	110,000,000.00	Biro Kesjahtera an Rakyat
4.01.17	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan dan Keagamaan dan Kesehatan	Prosentase Hasil Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Bidang Keagamaan dan Kesehatan yang diindaklanjuti	0%	90%	2,351,000,000.00	90%	2,586,100,000.00	90%	2,844,710,000.00	90%	1,958,733,170.00	90%	1,942,099,100.00	Biro Kesjahtera an Rakyat

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.18	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga yang ditindaklanjuti	Prosentase Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga yang ditindaklanjuti	0%	90%	1.213.000,000.00	90%	1.334.300,000.00	90%	1.467.730,000.00	90%	1.614.503,000.00	90%	1.775.953,300.00	Biro Kesjahteraan Rakyat
4.01.19	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial, Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Prosentase Hasil Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Bidang Sosial, Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti	0%	90%	1.007,000,000.00	90%	1,107,700,000.00	90%	1,218,470,000.00	90%	1,340,317,000.00	90%	1,474,348,700.00	Biro Kesjahteraan Rakyat
4.01.79	Program Peningkatan Pelayanan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Prosentase Capaian Program Bidang Kesejahteraan Rakyat	0%	90%	3,434,420,000.00	90%	2,994,085,000.00	90%	2,350,073,500.00	90%	2,912,108,680.00	90%	2,462,406,935.00	Biro Kesjahteraan Rakyat
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	75%	463,700,000.00	80%	510,000,000.00	85%	510,000,000.00	90%	560,000,000.00	95%	560,000,000.00	Biro Perekonomian

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	193,305,000.00	2 unit	352,500,000.00	3 unit	302,500,000.00	3 unit	502,500,000.00	3 unit	450,000,000.00	Biro Perencanaan
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	50%	710,000,000.00	55%	800,000,000.00	60%	800,000,000.00	65%	800,000,000.00	70%	800,000,000.00	Biro Perencanaan
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	70%	61,195,000.00	73%	125,000,000.00	75%	125,000,000.00	77%	225,000,000.00	80%	225,000,000.00	Biro Perencanaan
4.01.48	Program Kebijakan Pengembangan Produksi Daerah	Tersedianya Kebijakan Bidang Produksi Daerah	0 Kebijakan	2 Kebijakan	452,500,000.00	3 Kebijakan	780,000,000.00	3 Kebijakan	887,500,000.00	4 Kebijakan	770,000,000.00	5 Kebijakan	721,000,000.00	Biro Perencanaan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.49	Program Kebijakan Peningkatan Investasi Daerah, Tata Kelola dan Kinerja BUMD	Kebijakan Peningkatan Investasi Daerah	0 kebijakan	1 kebijakan	699,300,000.00	2 kebijakan	1,000,000,000.00	3 kebijakan	1,110,000,000.00	3 kebijakan	1,130,000,000.00	3 kebijakan	1,119,000,000.00	Biro Perencanaan
4.01.50	Program Peningkatan Sinegritas Bidang Industri dan Jasa	Jumlah Fasilitas dan Kebijakan Bidang Industri dan Jasa	0 Kebijakan	6 Kebijakan	670,000,000.00	7 Kebijakan	932,500,000.00	7 Kebijakan	765,000,000.00	8 Kebijakan	862,500,000.00	9 Kebijakan	925,000,000.00	Biro Perencanaan
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	1,137,539,000.00	85%	880,000,000.00	90%	880,000,000.00	95%	880,000,000.00	100%	880,000,000.00	Biro Administrasi Pembangunan
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	542,300,000.00	2 unit	350,000,000.00	3 unit	350,000,000.00	3 unit	350,000,000.00	3 unit	400,000,000.00	Biro Administrasi Pembangunan
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	75%	779,000,000.00	80%	1,050,000,000.00	85%	1,050,000,000.00	90%	1,050,000,000.00	95%	1,050,000,000.00	Biro Administrasi Pembangunan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	70%	627,998,000.00	73%	120,000,000.00	75%	120,000,000.00	77%	120,000,000.00	80%	120,000,000.00	Biro Administrasi i Pembangunan an
4.01.25	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase pengadaan barang dan jasa yang selesai sebelum akhir maret	0%	50%	1,199,470,000.00	60%	950,000,000.00	70%	950,000,000.00	75%	950,000,000.00	80%	950,000,000.00	Biro Administrasi i Pembangunan an
4.01.46	Program Koordinasi dan Pembinaan Monitoring serta Evaluasi Pembangunan	Persentase Paket Pekerjaan Pembangunan yang mengalami keterlambatan yang ditindaklanjuti	0%	80%	1,821,000,000.00	80%	1,200,000,000.00	80%	1,200,000,000.00	80%	1,200,000,000.00	80%	1,200,000,000.00	Biro Administrasi i Pembangunan an
4.01.47	Program Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan serta Pengendalian Program	Persentase program/kegiatan yang dikendalikan sesuai target perencanaan	0%	73%	1,992,693,000.00	75%	2,450,000,000.00	80%	2,450,000,000.00	85%	2,450,000,000.00	90%	2,450,000,000.00	Biro Administrasi i Pembangunan an

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	75%	451,696,000.00	80%	600,000,000.00	85%	600,000,000.00	90%	600,000,000.00	95%	600,000,000.00	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	84,400,000.00	2 unit	350,000,000.00	3 unit	550,000,000.00	3 unit	550,000,000.00	3 unit	550,000,000.00	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	50%	803,645,000.00	60%	900,000,000.00	70%	900,000,000.00	80%	900,000,000.00	90%	900,000,000.00	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya
4.01.67	Program Koordinasi Infrastruktur Fisik dan Bangunan	Persentasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan yang ditindaklanjuti/erlaksana	90%	75%	653,000,000.00	80%	760,000,000.00	85%	860,000,000.00	90%	960,000,000.00	95%	960,000,000.00	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya
4.01.68	Program Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan	Persentase Kebijakan Bidang Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan yang ditindaklanjuti/terlaksana	100%	75%	583,500,000.00	80%	820,000,000.00	85%	920,000,000.00	90%	920,000,000.00	95%	920,000,000.00	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.69	Program Koordinasi Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase kebijakan pengembangan energi dan sumber daya mineral yang ditindaklanjuti/erlaksana	90%	75%	473,759,000.00	80%	670,000,000.00	85%	670,000,000.00	90%	670,000,000.00	95%	670,000,000.00	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	75%	12,491,377,750.00	76%	12,491,377,750.00	77%	12,491,377,750.00	78%	12,491,377,750.00	80%	12,491,377,750.00	Sekretariat DPRD Provinsi
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	20,874,503,280.00	1 unit	20,874,503,280.00	1 unit	20,874,503,280.00	1 unit	20,874,503,280.00	1 unit	20,874,503,280.00	Sekretariat DPRD Provinsi
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbogan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	70%	17,413,760,000.00	72%	17,413,760,000.00	75%	17,413,760,000.00	77%	17,413,760,000.00	80%	17,413,760,000.00	Sekretariat DPRD Provinsi

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	70%	1,444,864,970.00	72%	1,444,864,970.00	75%	1,444,864,970.00	77%	1,444,864,970.00	80%	1,444,864,970.00	Sekretariat DPRD Provinsi
4.01.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase pelayanan terhadap kegiatan Anggota DPRD yang sesuai SOP	%	75%	43,800,494,000.00	77%	43,800,494,000.00	78%	43,800,494,000.00	79%	43,800,494,000.00	80%	43,800,494,000.00	Sekretariat DPRD Provinsi
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	70%	2,985,200,000.00	75%	2,985,200,000.00	80%	2,985,200,000.00	85%	2,985,200,000.00	90%	2,985,200,000.00	Badan Penghubung Provinsi
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	2,755,000,000.00	2 unit	2,314,995,000.00	3 unit	2,288,045,000.00	4 unit	2,243,995,000.00	4 unit	2,243,995,000.00	Badan Penghubung Provinsi

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenjangan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	45%	1,145,981,000.00	50%	1,195,546,000.00	55%	1,195,546,000.00	60%	1,202,000,000.00	65%	1,202,000,000.00	Badan Penghubung Provinsi
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	70%	91,750,000.00	73%	93,750,000.00	75%	93,750,000.00	77%	93,750,000.00	80%	93,750,000.00	Badan Penghubung Provinsi
4.01.38	Program informasi pembangunan, potensi dan peluang investasi	Jumlah kunjungan wisatawan pada Ajangsan Kalutim di TMII	0 Orang	24000 Orang	1,421,769,000.00	24500 Orang	1,658,039,000.00	25000 Orang	1,658,039,000.00	25250 Orang	1,695,635,000.00	25500 Orang	1,695,635,000.00	Badan Penghubung Provinsi
4.01.39	Program Peningkatan Manajemen Kerja	Tingkat kepuasan pelayanan Badan Penghubung	0%	80%	800,500,000.00	85%	952,670,000.00	90%	979,620,000.00	95%	979,620,000.00	100%	979,620,000.00	Badan Penghubung Provinsi
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	300,000,000.00	2 unit	350,000,000.00	3 unit	350,000,000.00	3 unit	300,000,000.00	4 unit	250,000,000.00	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelayakan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	30%	550,000,000.00	40%	450,000,000.00	45%	450,000,000.00	50%	450,000,000.00	55%	450,000,000.00	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	70%	50,000,000.00	73%	50,000,000.00	75%	50,000,000.00	77%	50,000,000.00	80%	50,000,000.00	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur
4.01.41	Program Peningkatan Ekonomi dan Sosial Bagi ASN/Anggota KORPRI dan Keluarga	Prosentase Kesejahteraan ASN / Anggota KORPRI dan Keluarganya	5%	15%	1,750,000,000.00	15%	1,925,000,000.00	15%	2,235,000,000.00	15%	2,400,000,000.00	25%	2,650,000,000.00	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur
4.02	Pengawasan				15,012,840,000.00		15,012,840,000.00		15,012,840,000.00		15,012,840,000.00		15,012,840,000.00	
4.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	1,516,600,000.00	85%	1,516,600,000.00	90%	1,516,600,000.00	95%	1,516,600,000.00	100%	1,516,600,000.00	Inspektorat
4.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	853,800,000.00	2 unit	853,800,000.00	3 unit	853,800,000.00	4 unit	853,800,000.00	5 unit	853,800,000.00	Inspektorat

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	80%	1,769,700,000.00	85%	1,769,700,000.00	90%	1,769,700,000.00	95%	1,769,700,000.00	100%	1,769,700,000.00	Inspektorat
4.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	75.39 Skor	76 Skor	410,100,000.00	78 Skor	410,100,000.00	80 Skor	410,100,000.00	81 Skor	410,100,000.00	82 Skor	410,100,000.00	Inspektorat
4.02.97	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki akuntabilitas kinerja baik	27 PD	28 PD	1,597,510,000.00	30 PD	1,117,510,000.00	32 PD	1,117,510,000.00	34 PD	1,117,510,000.00	36 PD	1,117,510,000.00	Inspektorat
4.02.98	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan keuangan Perangkat Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	0 PD	17 PD	226,500,000.00	17 PD	226,500,000.00	17 PD	226,500,000.00	17 PD	226,500,000.00	20 PD	226,500,000.00	Inspektorat
4.02.99	Program penguahan KKN	Hasil Penilaian Integritas	60 Nilai	65 Nilai	2,467,205,000.00	70 Nilai	2,667,205,000.00	75 Nilai	2,667,205,000.00	80 Nilai	2,667,205,000.00	85 Nilai	2,667,205,000.00	Inspektorat

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.02.10.0	Program Peningkatan Kapabilitas APIP	Meningkatkan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	35 orang	40 orang	2,767,000,000.00	40 orang	2,827,000,000.00	45 orang	2,827,000,000.00	50 orang	2,827,000,000.00	60 orang	2,827,000,000.00	Inspektorat
4.02.10.1	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penda Kab/Kota	0 Kegiatan	10 Kegiatan	3,404,425,000.00	10 Kegiatan	3,544,425,000.00	10 Kegiatan	3,544,425,000.00	10 Kegiatan	3,544,425,000.00	10 Kegiatan	3,544,425,000.00	Inspektorat
4.02.10.2	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penda Kab/Kota	10 Kegiatan	10 Kegiatan	-	10 Kegiatan	80,000,000.00	10 Kegiatan	80,000,000.00	10 Kegiatan	80,000,000.00	10 Kegiatan	80,000,000.00	Inspektorat
4.03	Perencanaan			48,050,000,000.00		48,050,000,000.00		48,050,000,000.00		48,050,000,000.00		48,050,000,000.00		
4.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna perangkat kependidikan terhadap pelayanan PD (SKM)	82.30%	85%	8,450,375,000.00	86%	8,450,375,000.00	87%	8,450,375,000.00	88%	8,450,375,000.00	90%	8,450,375,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan an Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	1 unit	2 unit 8,061,650,000.00	3 unit 6,561,650,000.00	4 unit 6,561,650,000.00	5 unit 6,561,650,000.00	5 unit 6,561,650,000.00	5 unit 6,561,650,000.00	5 unit 6,561,650,000.00	5 unit 6,561,650,000.00	5 unit 6,561,650,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan an Daerah	
4.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi perencanaan	13.8%	15% 3,407,400,000.00	17% 3,407,400,000.00	20% 3,407,400,000.00	23% 3,407,400,000.00	23% 3,407,400,000.00	23% 3,407,400,000.00	23% 3,407,400,000.00	23% 3,407,400,000.00	23% 3,407,400,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan an Daerah	
4.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	77.69%	78% 3,621,425,000.00	78.50% 3,621,425,000.00	79% 3,621,425,000.00	80% 3,621,425,000.00	81% 3,621,425,000.00	81% 3,621,425,000.00	81% 3,621,425,000.00	81% 3,621,425,000.00	81% 3,621,425,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan an Daerah	
4.03.30	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	53.23 Persen	60 Persen 4,824,900,000.00	65 Persen 5,324,900,000.00	75 Persen 5,324,900,000.00	80 Persen 5,324,900,000.00	90 Persen 5,324,900,000.00	90 Persen 5,324,900,000.00	90 Persen 5,324,900,000.00	90 Persen 5,324,900,000.00	90 Persen 5,324,900,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan an Daerah	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.03.42	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Hasil Pelaksanaan Pembangunan	45,68%	50%	3,772,160,000.00	60%	3,772,160,000.00	70%	3,972,160,000.00	80%	3,772,160,000.00	90%	3,772,160,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan an Daerah
4.03.46	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	38.6 Persen	50 Persen	2,564,300,000.00	60 Persen	3,064,300,000.00	70 Persen	3,064,300,000.00	80 Persen	3,064,300,000.00	90 Persen	3,064,300,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan an Daerah
4.03.47	Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah	45.2 Persen	55 Persen	2,850,000,000.00	65 Persen	3,350,000,000.00	75 Persen	3,350,000,000.00	85 Persen	3,350,000,000.00	90 Persen	3,350,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan an Daerah
4.03.48	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase program kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan melalui dokumen anggaran	78.53%	80%	7,085,850,000.00	85%	8,585,850,000.00	90%	7,385,850,000.00	95%	8,585,850,000.00	100%	8,585,850,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan an Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.03.49	Program Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Proporsi program pembangunan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota	82,30%	85%	1.500.000.000.00	87%	-	91%	-	94%	-	96%	-	Badan Perencanaan Pembangunan an Daerah
4.03.50	Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah	Presentase ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam analisis perencanaan pembangunan	74%	76%	1.911.940.000.00	78%	1.911.940.000.00	81%	2.911.940.000.00	85%	1.911.940.000.00	87%	1.911.940.000.00	Badan Perencanaan Pembangunan an Daerah
4.04	Keuangan				93.308.212.000.00		101.636.919.000.00		102.991.620.000.00		104.422.655.000.00		105.736.047.000.00	
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	4.244.879.200.00	87%	9.181.053.000.00	88%	9.478.005.000.00	89%	9.912.176.000.00	90%	10.182.432.000.00	Badan Pendapatan Daerah
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	5 unit	2.329.141.199.00	5 unit	2.439.066.000.00	5 unit	3.080.839.000.00	5 unit	2.591.183.000.00	5 unit	2.591.769.000.00	Badan Pendapatan Daerah
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelmbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	61%	3.487.762.500.00	63%	3.336.539.000.00	68%	3.382.420.000.00	71%	3.432.890.000.00	73%	3.488.407.000.00	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.04.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	65 nilai AKIP	68 nilai AKIP	767.421.000.00	68 nilai AKIP	844.164.000.00	70 nilai AKIP	928.581.000.00	70 nilai AKIP	1.021.440.000.00	72 nilai AKIP	1.123.885.000.00	Badan Pendapatan Daerah
4.04.30	Program Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Persentase kualitas perencanaan dan pengembangan sistem informasi pendapatan daerah	%	100%	3.588.180.000.00	%	-	%	-	%	-	%	-	Badan Pendapatan Daerah
4.04.31	Program Koordinasi Pajak Daerah	Persentase tercapainya target penerimaan pajak daerah	0%	100%	4.529.713.000.00	100%	4.982.685.000.00	100%	5.480.953.000.00	100%	6.029.051.000.00	100%	6.344.095.000.00	Badan Pendapatan Daerah
4.04.32	Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah	Persentase tercapainya target penerimaan Bukan Pajak Daerah	0%	100%	2.217.120.000.00	100%	2.716.493.000.00	100%	2.682.717.000.00	100%	2.950.990.000.00	100%	3.148.664.000.00	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.04.33	Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	Jumlah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pendapatan dan administrasi dari pengawas internal maupun eksternal	18 Dokumen	765,690,000.00	18 Dokumen	1,500,000,000.00	18 Dokumen	926,485,000.00	18 Dokumen	1,019,134,000.00	18 Dokumen	1,121,048,000.00	Badan Pendapatan Daerah	
4.04.35	Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Obyek/Sumber Pendapatan Baru	0 Obyek	-	4 Obyek	3,946,999,000.00	6 Obyek	4,341,700,000.00	8 Obyek	4,775,871,000.00	10 Obyek	5,046,127,000.00	Badan Pendapatan Daerah	
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna pelayanan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	2,806,969,988.00	87%	2,806,969,988.00	88%	2,806,969,988.00	89%	2,806,969,988.00	90%	2,806,969,988.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Samarinda
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	1,025,833,000.00	3 unit	1,045,466,000.00	3 unit	1,045,466,000.00	3 unit	1,045,466,000.00	3 unit	1,045,466,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Samarinda

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40%	174,380,000.00	45%	177,224,012.00	50%	177,224,012.00	55%	177,224,012.00	60%	177,224,012.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Samarinda
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengiraan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Samarinda	0%	100%	220,340,000.00	100%	220,340,000.00	100%	220,340,000.00	100%	220,340,000.00	100%	220,340,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Samarinda
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	2,572,450,000.00	87%	2,590,066,613.00	88%	2,590,066,613.00	89%	2,590,066,613.00	90%	2,590,066,613.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Kutai Kartanegara
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	725,387,387.00	3 unit	725,387,387.00	3 unit	725,387,387.00	3 unit	725,387,387.00	3 unit	725,387,387.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Kutai Kartanegara

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40%	217,046,000.00	45%	217,046,000.00		217,046,000.00	50%	217,046,000.00	55%	217,046,000.00	60%	217,046,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan P.L.L serta tunggakan pajak daerah dan P.L.L di UPTD Kukar	0%	100%	567,500,000.00	100%	567,500,000.00		567,500,000.00	100%	567,500,000.00	100%	567,500,000.00	100%	567,500,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	1.216,005.000.00	87%	1.216,005,000.00		1.216,005,000.00	88%	1.216,005,000.00	89%	1.216,005,000.00	90%	1.216,005,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	782,192,136.00	3 unit	762,212,000.00		762,212,000.00	3 unit	762,212,000.00	3 unit	762,212,000.00	3 unit	762,212,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40%	221,300,000.00	45%	243,430,000.00		243,430,000.00	50%	243,430,000.00	55%	243,430,000.00	60%	243,430,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemertaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Kutim	0%	100%	525,775,000.00	100%	578,353,000.00	100%	578,353,000.00	100%	578,353,000.00	100%	578,353,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Kutai Timur
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	1,647,606,000.00	87%	1,647,606,000.00	88%	1,647,606,000.00	89%	1,647,606,000.00	90%	1,647,606,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Kutai Barat
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	106,000,000.00	3 unit	116,600,000.00	3 unit	116,600,000.00	3 unit	116,600,000.00	3 unit	116,600,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Kutai Barat
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40%	254,200,000.00	45%	246,994,000.00	50%	246,994,000.00	55%	246,994,000.00	60%	246,994,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Kutai Barat

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penyeranaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB se-Kalim	0%	100%	308,000,000.00	100%	338,800,000.00	100%	338,800,000.00	100%	338,800,000.00	100%	338,800,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalim di Kutai Barat
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	2,315,399,650.00	87%	2,479,428,000.00	88%	2,479,428,000.00	89%	2,479,428,000.00	90%	2,479,428,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalim di Balikpapan
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	577,072,000.00	3 unit	634,780,000.00	3 unit	634,780,000.00	3 unit	634,780,000.00	3 unit	634,780,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalim di Balikpapan
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbugaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40%	306,740,000.00	45%	337,414,000.00	50%	337,414,000.00	55%	337,414,000.00	60%	337,414,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalim di Balikpapan
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penyeranaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target dan Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Balikpapan	0%	100%	498,525,000.00	100%	548,378,000.00	100%	548,378,000.00	100%	548,378,000.00	100%	548,378,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalim di Balikpapan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	1,027,563,000.00	87%	1,194,580,000.00	88%	1,194,580,000.00	89%	1,194,580,000.00	90%	1,194,580,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Bontang
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	282,200,000.00	3 unit	310,420,000.00	3 unit	310,420,000.00	3 unit	310,420,000.00	3 unit	310,420,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Bontang
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40%	251,800,000.00	45%	276,980,000.00	50%	276,980,000.00	55%	276,980,000.00	60%	276,980,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Bontang
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemenerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Bontang	0%	80%	198,200,000.00	80%	218,020,000.00	80%	218,020,000.00	80%	218,020,000.00	80%	218,020,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Bontang
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	958,550,000.00	87%	958,550,000.00	88%	958,550,000.00	89%	958,550,000.00	90%	958,550,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Penajam Paser Utara

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	740,450,000.00	3 unit	718,630,000.00	3 unit	718,630,000.00	3 unit	718,630,000.00	3 unit	718,630,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Penajam Paser Utara
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40%	240,200,000.00	45%	264,220,000.00	50%	264,220,000.00	55%	264,220,000.00	60%	264,220,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Penajam Paser Utara
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan P.L.L serta tunggakan pajak daerah dan P.L.L di UPTB Penajam Paser Utara	0%	100%	326,000,000.00	100%	358,600,000.00	100%	358,600,000.00	100%	358,600,000.00	100%	358,600,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Penajam Paser Utara
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	918,212,250.00	87%	918,212,250.00	88%	918,212,250.00	89%	918,212,250.00	90%	918,212,250.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Paser
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	1,103,727,750.00	3 unit	1,137,844,750.00	3 unit	1,137,844,750.00	3 unit	1,137,844,750.00	3 unit	1,137,844,750.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Paser

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40%	387,160,000.00	45%	425,876,000.00	50%	425,876,000.00	55%	425,876,000.00	60%	425,876,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Paser
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan P.LL serta tunggakan pajak daerah dan P.LL di UPTB Paser	0%	100%	470,970,000.00	100%	518,067,000.00	100%	518,067,000.00	100%	518,067,000.00	100%	518,067,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Paser
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	1,082,141,000.00	87%	1,474,259,000.00	88%	1,474,259,000.00	89%	1,474,259,000.00	90%	1,474,259,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Berau
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	457,102,440.00	3 unit	502,814,000.00	3 unit	502,814,000.00	3 unit	502,814,000.00	3 unit	502,814,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Berau
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40%	236,550,000.00	45%	260,205,000.00	50%	260,205,000.00	55%	260,205,000.00	60%	260,205,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Berau

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pencernaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL di Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTD Berau	0%	100%	238,837,500.00	100%	262,722,000.00	100%	262,722,000.00	100%	262,722,000.00	100%	262,722,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Berau
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	6,676,777,500.00	80%	6,676,777,500.00	80%	6,676,777,500.00	80%	6,676,777,500.00	100%	6,676,777,500.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	15 unit	1,780,136,000.00	20 unit	1,780,136,000.00	25 unit	1,780,136,000.00	27 unit	1,780,136,000.00	27 unit	1,780,136,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	50%	153,450,000.00	60%	153,450,000.00	65%	153,450,000.00	70%	153,450,000.00	75%	153,450,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.17	Program peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Persentase anggaran belanja Program/Kegiatan an yang sesuai dengan dokumen rencana pembangunan daerah	%	80%	18,359,169,000.00	85%	18,359,169,000.00	90%	18,359,169,000.00	95%	18,359,169,000.00	100%	18,359,169,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.04.18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Persentase belanja program/kegiatan dalam Dokumen APBD Kab/Kota yang sejalan dengan APBD Provinsi	0%	80%	2,345,587,500.00	85%	2,345,587,500.00	90%	2,345,587,500.00	95%	2,345,587,500.00	100%	2,345,587,500.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah	Persentase aset tetap (Tanah dan Bangunan) Daerah yang diamankan dan dimanfaatkan	0%	80%	16,074,800,000.00	85%	16,074,800,000.00	90%	16,074,800,000.00	95%	16,074,800,000.00	100%	16,074,800,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.05	Kepegawaian				21,950,000,000.00		22,133,647,000.00		21,923,647,000.00		21,908,647,000.00		21,808,647,000.00	
4.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penugasan kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	84%	2,060,751,499.00	85%	2,075,000,000.00	86%	2,075,000,000.00	87%	2,138,647,000.00	88%	2,075,000,000.00	Badan Kepegawaia n Daerah
4.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit	5 unit	1,460,225,230.00	5 unit	1,200,000,000.00	5 unit	1,200,000,000.00	5 unit	1,200,000,000.00	5 unit	1,200,000,000.00	Badan Kepegawaia n Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	10%	1,272,025,000.00	11%	1,903,647,000.00	12%	2,208,647,000.00	13%	2,110,000,000.00	14%	2,295,000,000.00	Badan Kepegawaia n Daerah
4.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraa n Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	77 Nilai	78 Nilai	299,925,000.00	81 Nilai	350,000,000.00	82 Nilai	375,000,000.00	83 Nilai	400,000,000.00	84 Nilai	425,000,000.00	Badan Kepegawaia n Daerah
4.05.15	Program Peningkatan Pelayanan Mutasi Kepegawaian	Persentase pegawai yang di mutasi sesuai dengan job description	0%	0%	-	89%	2,220,000,000.00	91%	2,275,000,000.00	93%	2,285,000,000.00	95%	2,285,000,000.00	Badan Kepegawaia n Daerah
4.05.16	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	Persentase SDM Aparatur yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	0%	0%	-	83%	9,225,000,000.00	85%	9,375,000,000.00	87%	9,375,000,000.00	90%	9,203,647,000.00	Badan Kepegawaia n Daerah
4.05.17	Program Peningkatan Kinerja dan Disiplin Pegawai	Persentase PNS Berkinerja Baik	0%	0%	-	82%	3,250,000,000.00	84%	2,700,000,000.00	86%	2,700,000,000.00	88%	2,700,000,000.00	Badan Kepegawaia n Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.05.18	Program Pengembangan Data dan Informasi ASN	Persentase Data Kepegawaian yang digunakan dalam proses penempatan pegawai, mutasi dan promosi jabatan	0%	0%	-	94%	585,000,000.00	95%	600,000,000.00	96%	600,000,000.00	97%	625,000,000.00	Badan Kepegawaia n Daerah
4.05.47	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase PNS yang menduduki dalam jabatan struktural	0%	97%	15,457,073,271.00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	Badan Kepegawaia n Daerah
4.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	75%	1,400,000,000.00	80%	1,325,000,000.00	85%	1,115,000,000.00	90%	1,100,000,000.00	100%	1,000,000,000.00	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur
4.06	Pendidikan dan Pelatihan				30,050,000,000.00		29,969,791,000.00		29,969,791,000.00		29,969,791,000.00		29,969,791,000.00	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna pelayanan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	5,095,750,000.00	85%	5,067,632,000.00	90%	5,067,632,000.00	95%	5,067,632,000.00	100%	5,067,632,000.00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit	5 unit	4,030,153,000.00	5 unit	3,974,049,000.00	5 unit	3,974,049,000.00	5 unit	3,974,049,000.00	5 unit	3,974,049,000.00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	90%	91%	763,000,000.00	92%	734,948,000.00	93%	734,948,000.00	94%	734,948,000.00	95%	734,948,000.00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.06.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	59	60	443,120,000.00	65	487,686,000.00	70	487,686,000.00	73	487,686,000.00	75	487,686,000.00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.06.15	Program Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelengkapan	Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang Bersertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelengkapan	%	90%	1.823,831,000.00	%	1,739,675,000.00	%	1,739,675,000.00	%	1,739,675,000.00	%	1,739,675,000.00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.06.16	Program Pengembangan Kompetensi Teknis	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Memiliki Kompetensi Teknis	%	90%	5,739,122,000.00	90%	4,214,000,000.00	90%	4,214,000,000.00	90%	4,214,000,000.00	90%	4,214,000,000.00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.06.17	Program Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang Berkompeten dan Berkarakter	%	100%	12,155,024,000.00	100%	13,751,801,000.00	100%	13,751,801,000.00	100%	13,751,801,000.00	100%	13,751,801,000.00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.07	Penelitian dan Pengembangan				3,803,100,000.00		4,200,000,000.00		4,400,000,000.00		4,700,000,000.00		5,000,000,000.00	
4.07.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	1,299,575,000.00	85%	1,140,000,000.00	90%	1,042,500,000.00	95%	1,026,750,000.00	100%	1,029,425,000.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.07.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	2 unit 446,450,000.00	3 unit 765,000,000.00	4 unit 891,500,000.00	5 unit 930,650,000.00	5 unit 935,780,000.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah					
4.07.09	Program Peningkatan Kapasitas Ketenagagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	0%	80% 789,785,000.00	81% 550,000,000.00	82% 515,000,000.00	83% 596,500,000.00	85% 632,750,000.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah					
4.07.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	78% 174,620,000.00	79% 195,000,000.00	79% 211,000,000.00	80% 213,100,000.00	81% 272,745,000.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah					
4.07.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase teknologi yang dapat dimanfaatkan dengan optimal	80%	80% 129,420,000.00	80% 250,000,000.00	80% 330,000,000.00	80% 363,000,000.00	80% 399,300,000.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah					
4.07.41	Program Libang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase rekomendasi yang dihasilkan libang bidang ekonomi dan pembangunan	0%	70% 356,750,000.00	80% 450,000,000.00	90% 550,000,000.00	95% 500,000,000.00	100% 550,000,000.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah					

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.07.47	Program Libang Bidang Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi yang dihasilkan libang bidang inovasi dan teknologi	0%	70%	270.000.000.00	80%	450.000.000.00	90%	450.000.000.00	95%	650.000.000.00	100%	750.000.000.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.07.48	Program Libang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Persentase rekomendasi yang dihasilkan libang bidang sosial dan pemerintahan	0%	70%	336.500.000.00	80%	400.000.000.00	90%	410.000.000.00	95%	420.000.000.00	100%	430.000.000.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		JUMLAH			4.143.013.021,925,00		5.007.817.248,925,00		5.620.444.031,925,00		6.719.563.508.925,00		7.674.495.039,425,00	

BAB 9

Penutup

Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023 ini merupakan pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan di Kalimantan Timur lima tahun kedepan dalam mewujudkan Kalimantan Timur Yang Berdaulat. Dokumen ini merupakan penjabaran visi dan misi gubenur serta wakil gubenur **“Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”** yang kemudian diterjemahkan secara operasional dalam bentuk program-program prioritas. Penetapan berbagai prioritas pembangunan dilakukan dengan pendekatan Teknokratis, *Top Down*, *Bottom Up* dan Politis.

Pada substansi makro, visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun kedepan. Pada tahapan meso makro selanjutnya tujuan dan sasaran diterjemahkan ke dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang kemudian dijabarkan secara mikro (operasional) menjadi program-program prioritas. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah.

Guna memastikan konsistensi antar tahapan pelaksanaan pembangunan tersebut, maka perlu ditetapkan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain:

1. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 merupakan rencana pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memerlukan peran serta aktif seluruh Pemangku Kepentingan untuk berkontribusi sesuai perannya masing-masing;

2. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD tahun 2019 dan 2020;
3. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 merupakan pedoman penyusunan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023;
4. Untuk memastikan konsistensi antara dokumen RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah, setiap PD/Dinas/Instansi lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyesuaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 dengan tetap memperhatikan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program/kegiatan terhadap kebijakan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota;
5. Dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 wajib dilaksanakan oleh seluruh kepala perangkat daerah dan bupati/walikota dengan tujuan untuk: (1) memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; (2) memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel dan partisipatif; serta (3) melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan kepada gubernur dan masyarakat umum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku
6. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai obyek melakukan pengawasan pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur;
7. RPJMD ini merupakan pedoman bagi Perangkat daerah/Dinas/Instansi dalam pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Timur Periode 2018-2023
8. Gubernur, melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap satuan kerja pemerintah provinsi secara berkala (3 bulanan) untuk

selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 tiap tahunnya;

9. Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD sesuai dengan ketentuan Pasal 275 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Setelah berakhirnya RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023, penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional". Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Samarinda, Februari 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si